



GUBERNUR GORONTALO

**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 9 TAHUN 2024**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2007 - 2025 Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 03);
12. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 15);
14. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 2

- (1) RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Sistematika RKPD Tahun 2025 terdiri dari :
 - a. Pendahuluan,
 - b. Gambaran Umum Kondisi Daerah,
 - c. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah,
 - d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah,
 - e. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota,
 - f. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah,
 - g. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan
 - h. Penutup,sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2025 merupakan Penjabaran dari RPD Tahun 2023-2026 dan memperhatikan RPJPD Tahun 2007-2025.
- (2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Tahun 2025; dan
- c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan KUA PPAS dan menyusun Rancangan APBD Tahun 2025.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Tahun 2025:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2025 sebagai bahan pembahasan KUA PPAS dengan DPRD.
- b. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2025 sebagai bahan pembahasan RAPBD dengan DPRD.
- c. Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2025 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan DPRD.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan, semester dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 berdasarkan indikator kinerja, keluaran sub-kegiatan, hasil kegiatan, serta capaian Program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Keuangan, dan Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi pencapaian target pembangunan pada tahun rencana yang berkenaan.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah wajib mengalokasikan APBD ke rincian program, kegiatan dan subkegiatan secara efektif dan efisien serta memperhatikan pengalokasian pada program prioritas daerah serta kinerja hasil yang inovatif sesuai prioritas dan sasaran pembangunan yang termuat dalam RKPD tahun 2025.
- (2) Keterbatasan pembiayaan melalui APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menjadi bagian yang tidak terpisah dalam pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan.

Pasal 7

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Badan Keuangan menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025, hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Tahun 2025.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad, Irizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 28 Juni 2024

Pj. GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUDY SALAHUDDIN

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 28 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

SOFIAN IBRAHIM

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2025

DAFTAR ISI

1.	BAB I PENDAHULUAN	
	I. 1. Latar Belakang _____	I. 1
	I. 2. Landasan Hukum _____	I. 2
	I. 3. Hubungan Antar Dokumen _____	I. 3
	I. 4. Maksud dan Tujuan _____	I. 4
	I. 5. Sistematika Dokumen RKPD _____	I. 5
2.	BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
	II.1 Kondisi Umum Daerah _____	II.1
	II.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD _____	II.103
	II.3 Permasalahan Pembangunan Daerah _____	II.107
3.	BAB III ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	
	III.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah _____	III.1
	III.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah _____	III.12
4.	BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
	IV.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan _____	IV.1
	IV.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 _____	IV.17
	IV.3 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025 _____	IV.18
	IV.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah _____	IV.31
	IV.5 Pokok – Pokok Pikiran DPRD dalam RKPD Tahun 2025 _____	IV.42
5.	BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN / KOTA	
	V.1 Kota Gorontalo _____	V.1
	V.2 Kabupaten Gorontalo _____	V.2
	V.3 Kabupaten Boalemo _____	V.4
	V.4 Kabupaten Pohuwato _____	V.5
	V.5 Kabupaten Bone Bolango _____	V.7
	V.6 Kabupaten Gorontalo Utara _____	V.9
6.	BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	VI
7.	BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VII
8.	BAB VIII PENUTUP	VIII

DAFTAR TABEL

1. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Luas Wilayah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota _____	II.2
2.2 Kelas Kemiringan Lereng Provinsi Gorontalo _____	II.4
2.3 Wilayah Sungai (WS) Provinsi Gorontalo _____	II.5
2.4 Wilayah Sungai (WS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Di Provinsi Gorontalo _____	II.5
2.5 Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo tahun 2020 _____	II.8
2.6 Penggunaan Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian Menurut Kabupaten/Kota (Ha) Di Provinsi Gorontalo tahun 2022 _____	II.9
2.7 Luas Panen dan Produktivitas Padi Provinsi Gorontalo, Tahun 2022-2023 _____	II.11
2.8 Luas Lahan Tegal/Kebun, Ladang/Huma dan Lahan yang sementara Tidak Diusahakan Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo tahun 2023 _____	II.12
2.9 Populasi Sapi dan Kambing (ekor) Tahun 2021-2022 (ekor) _____	II.12
2.10 Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Gorontalo _____	II.28
2.11 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2020-2022 (Milyar Rupiah) _____	II.30
2.12 PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2020-2022 (Milyar Rupiah) _____	II.31
2.13 Nilai PDRB Perkapita ADHB Provinsi Gorontalo, Tahun 2021-2023 _____	II.34
2.14 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2022-2023 _____	II.36
2.15 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Gorontalo Tahun 2023 _____	II.37
2.16 Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo Tahun 2022-2023 _____	II.40
2.17 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2023 _____	II.41
2.18 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Gorontalo Tahun 2023 _____	II.42
2.19 Komposisi Penduduk Usia Kerja Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2023 _____	II.44
2.20 Harapan Lama Sekolah Provinsi Gorontalo, Tahun 2021-2023 _____	II.45
2.21 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2023 _____	II.45
2.22 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Umur 7-12 Tahun, 13-15 Tahun, 16-18 Tahun dan 19-24 Tahun, Provinsi Gorontalo tahun 2021-2023 _____	II.47
2.23 Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK, 2021-2023 _____	II.48
2.24 Prevalensi Status Gizi Balita menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo tahun 2023 _____	II.52
2.25 Kondisi Jalan Provinsi Gorontalo berdasarkan kategori kondisi jalan tahun 2020-2022 _____	II.52
2.26 Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Gorontalo, 2020-2022 _____	II.53
2.27 Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Gorontalo, 2020-2022 _____	II.55
2.28 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Sosial di Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2021 _____	II.57
2.29 Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, serta Persentase kasus yang terlayani melalui P2TP2A Provinsi Gorontalo tahun 2021 _____	II.61

2.30 Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan dan Konsumsi Provinsi Gorontalo tahun 2021-2022	II.63
2.31 Status Mutu Air Sungai Strategis di Provinsi Gorontalo, Hasil Pemantauan Tahun 2021	II.65
2.32 Perkembangan Koperasi Selang Tahun 2022 – 2023	II.73
2.33 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo tahun 2023	II.79
2.34 Indikator Kinerja Pembangunan Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo Tahun 2023	II.80
2.35 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Provinsi Gorontalo Tahun 2021 – 2023	II.81
2.36 Perkembangan Produksi 3 Komoditi Utama Pertanian Provinsi Gorontalo tahun 2021 - 2023	II.81
2.37 Perkembangan Peternakan Provinsi Gorontalo Tahun 2021 - 2023	II.82
2.38 Indikator Pembangunan Urusan Kehutanan Provinsi Gorontalo tahun 2022-2023	II.83
2.39 Indikator Pembangunan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo tahun 2023	II.84
2.40 Laju Pertumbuhan, Nilai dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB) Provinsi Gorontalo Tahun 2021 – 2023	II.85
2.41 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perencanaan Pembangunan Provinsi Gorontalo Tahun 2023	II.87
2.42 Nilai Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2023	II.89
2.43 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo Tahun 2023	II.92
2.44 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021-2022	II.94
2.45 Nilai MCP Provinsi Gorontalo Tahun 2021 - 2023	II.95
2.46 Hasil Evaluasi LPPD Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2023	II.96
2.47 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2023	II.97
2.48 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2023	II.97
2.49 Jumlah Kejahatan yang dilaporkan menurut Kepolisian Resort di Provinsi Gorontalo, Tahun 2018-2021	II.101
II.56 Evaluasi pelaksanaan program kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD	II.106

2. **BAB III ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

3.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010, 2021-2023 (miliar rupiah)	III.2
3.2 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha, 2021-2023 (%)	III.2
3.3 Distribusi PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen)	III.3
3.4 PDRB Per Kapita Gorontalo Tahun Dasar 2010, 2020-2023	III.4
3.5 IHK dan Tingkat Inflasi Kota Gorontalo Desember 2023, Tahun Kalender 2023, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran COICOP	III.5
3.6 Distribusi Pengeluaran Penduduk Gorontalo Maret 2022, September 2022 dan Maret 2023 (persentase)	III.6
3.7 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Provinsi Gorontalo, Februari 2022-Februari 2024	III.7
3.8 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo September 2021-September 2022	III.7

3.9 Perkembangan Garis Kemiskinan di Provinsi Gorontalo Menurut Daerah Tempat Tinggal, September 2021-September 2022	III.8
3.10 Perkiraan Indikator Ekonomi Makro Gorontalo Tahun 2024	III.9
3.11 Proyeksi dan Target Indikator Makro Provinsi Gorontalo 2024-2025	III.12
3.13 Realisasi Pendapatan 2019 s/d 2023	III.13
3.14 Kapasitas Fiskal / Proyeksi Pendapatan Daerah 2025	III.14
3.15 Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2025	III.15
3.16 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022)	III.16
3.17 Proyeksi Pembiayaan Provinsi Gorontalo TA. 2025	III.17
3. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
4.1 Unsur – Unsur Tema RKPD 2025	IV.17
4.2 Tema, Unsur Tema dan Sasaran RKPD 2025	IV.18
4.3 Indikator, Capaian dan Target Sasaran I	IV.19
4.4 Indikator, Capaian dan Target Sasaran II	IV.21
4.5 Indikator, Capaian dan Target Sasaran III	IV.22
4.6 Indikator, Capaian dan Target Sasaran IV	IV.22
4.7 Indikator, Capaian dan Target Sasaran V	IV.23
4.8 Indikator, Capaian dan Target Sasaran VI	IV.24
4.9 Indikator, Capaian dan Target Sasaran VII	IV.25
4.10 Indikator, Capaian dan Target Sasaran VIII	IV.25
4.11 Indikator, Capaian dan Target Sasaran IX	IV.26
4.12 Indikator, Capaian dan Target Sasaran X	IV.26
4.13 Indikator, Capaian dan Target Sasaran XI	IV.27
4.14 Indikator, Capaian dan Target Sasaran XII (a)	IV.28
4.15 Indikator, Capaian dan Target Sasaran XII (b)	IV.28
4.16 Indikator, Capaian dan Target Sasaran XIII	IV.30
4.17 Indikator, Capaian dan Target Sasaran XIV	IV.31
4.18 Program Prioritas Provinsi Tahun 2025	IV.31
4.19 Prioritas Nasional untuk Provinsi Gorontalo 2025	IV.37
4. BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN / KOTA	
5.1 Proyeksi Makro Ekonomi Kota Gorontalo Tahun 2025	V.2
5.2 Proyeksi Makro Ekonomi Kabupaten Gorontalo Tahun 2025	V.4
5.3 Proyeksi Makro Ekonomi Kabupaten Boalemo Tahun 2025	V.5
5.4 Proyeksi Makro Ekonomi Kabupaten Pohuwato Tahun 2025	V.7
5.5 Proyeksi Makro Ekonomi Kabupaten Bone Bolango Tahun 2025	V.8
5.6 Proyeksi Makro Ekonomi Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025	V.10
5. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
7.1 Target Indikator Kinerja Utama Provinsi Gorontalo	VII.1
7.2 Target Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Gorontalo	VII.2

DAFTAR GAMBAR

1.	BAB I PENDAHULUAN	
1.1.	Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi _____	I. 2
1.2.	Keterkaitan Perencanaan Nasional dengan Perencanaan Daerah _____	I. 4
2.	BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1	Peta Provinsi Gorontalo _____	II.1
2.2	Peta Topografi Provinsi Gorontalo _____	II.3
2.3	Perbandingan Luas Panen dan Produksi Padi di Provinsi Gorontalo, 2022 dan 2023 _____	II.11
2.4	Industri Besar dan Sedang Provinsi Gorontalo Tahun 2022 _____	II.18
2.5	Tingkat Penghunian Kamar Hotel di Provinsi Gorontalo Tahun 2023 _____	II.20
2.6	Peta Rawan Bencana Gempa Bumi _____	II.24
2.7	Peta Risiko Bencana Gempa Bumi di Provinsi Gorontalo _____	II.24
2.8	Peta Risiko Bencana Tanah Longsor di Provinsi Gorontalo _____	II.25
2.9	Peta Kawasan Rawan Tsunami _____	II.26
2.10	Peta Kawasan Rawan Banjir _____	II.27
3.	BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
4.1	Sinergi Arah RPJPD, Agenda Pembangunan Nasional dan Kebijakan Utama RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026 _____	IV.3

DAFTAR GRAFIK

2. **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

II.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2023 _____	II.25
II.2 Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Gorontalo Tahun 2021-2023 _____	II.27
II.3 Inflasi Nasional dan Provinsi Gorontalo 2021 - 2023 _____	II.29
II.4 Perkembangan Gini Ratio Provinsi Gorontalo 2020 – 2023 _____	II.32
II.5 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo, 2020 – 2023 _____	II.33
II.6 Kemiskinan Ekstrem Provinsi Gorontalo Tahun 2021 – 2023 _____	II.36
II.7 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Gorontalo, 2021- 2023 _____	II.38
II.8 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Gorontalo dan Nasional 2021-2023 _____	II.41
II.9 Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2023 _____	II.47
II.10 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2022 _____	II.50
II.11 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2022 _____	II.50
II.12 Angka Harapan Hidup Provinsi Gorontalo Tahun 2021 – 2023 _____	II.51
II.13 Prevalensi Gizi Kurang (underweight) Balita di Provinsi Gorontalo Tahun 2018 – 2022 _____	II.52
II.14 Prevalensi Stunting di Provinsi Gorontalo Tahun 2018 – 2022 _____	II.52
II.15 Kondisi Mantap Jalan Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2023 _____	II.54
II.16 Perkembangan Upah Minimum Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021 _____	II.61
II.17 Status IDM per Wilayah Tahun 2022 _____	II.70
II.18 Realisasi Pendapatan dan Persentase Kenaikan PAD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 (Dalam Milyar Rupiah) _____	II.89
II.19 Perkembangan NTP dan NTUP Provinsi Gorontalo Tahun 2020 s.d. 2023 _____	II.98
II.20 Angka Beban Ketergantungan _____	II.101
II.21 Presentase Penduduk Provinsi Gorontalo Umur 15 Tahun ke atas Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Pendidikan yang Ditamatkan _____	II.102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. menyatakan bahwa tujuan daerah melaksanakan pembangunan adalah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing pemerintah daerah. Selanjutnya sesuai dengan pasal 260 UU 23 Tahun 2014 bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun Rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

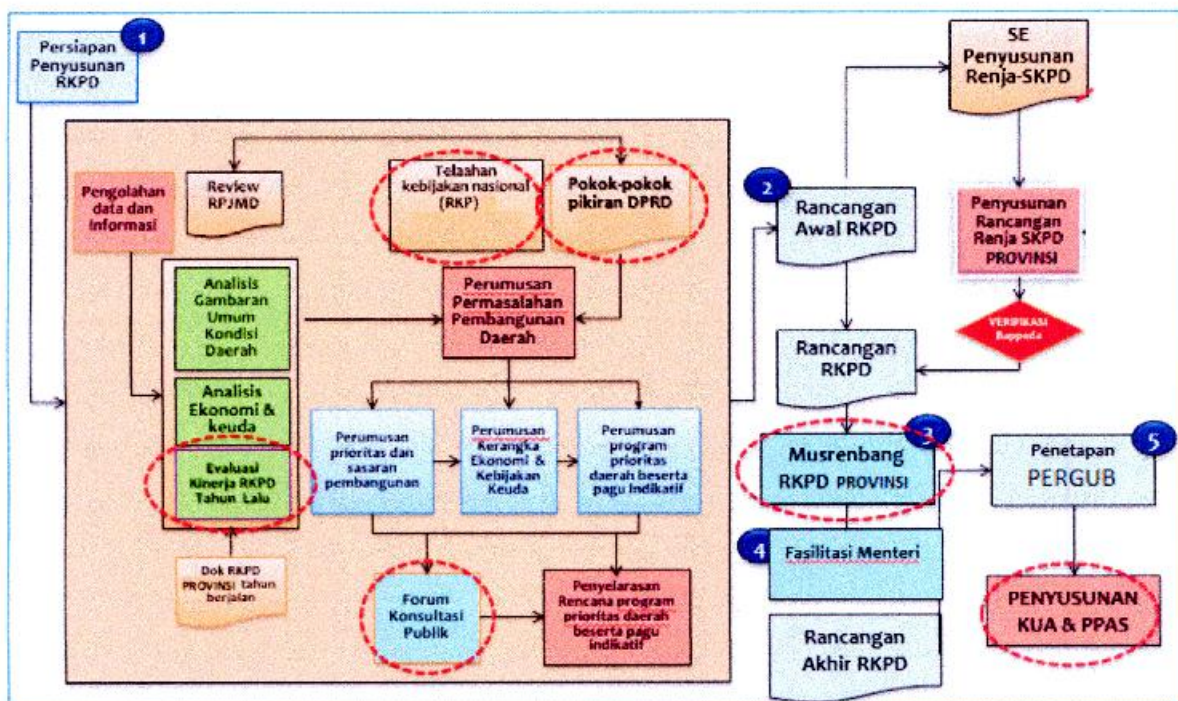
Salah satu dokumen perencanaan yang wajib disusun oleh daerah yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat dengan RKPD. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2025 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi. RPD disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 ini kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2025, dengan tetap mempedomani Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2023-2026 yang disusun bersamaan dengan RPD. Selanjutnya, juga menjadi acuan dalam perumusan dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Beberapa permasalahan besar yang dihadapi oleh Provinsi Gorontalo antara dari sisi ekonomi antara lain masih besarnya share PDRB yang masih didominasi oleh sektor primer, sedangkan transformasi ekonomi ke sektor lain masih terhambat. Selain itu beberapa infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan sekolah yang merupakan layanan dasar masih perlu peningkatan kualitas dan pemerataan. Tantangan lain yang dialami adalah laju penurunan kemiskinan yang menunjukkan stagnansi. Di sektor lingkungan eksploitasi yang dilakukan oleh investasi besar belum memberikan dampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya adalah kejadian bencana yang semakin tinggi frekuensinya yang didominasi oleh bencana hidrologis seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan. Fiskal yang semakin ketat juga memberikan tantangan tersendiri jika dilihat dari kemampuan daerah dalam mendanai program kegiatan yang menjadi instrumen dalam pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.

RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, dengan tahapan yang dapat dicermati pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi



1.2. Landasan Hukum

Peraturan dan perundangan yang menjadi landasan hukum penyusunan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

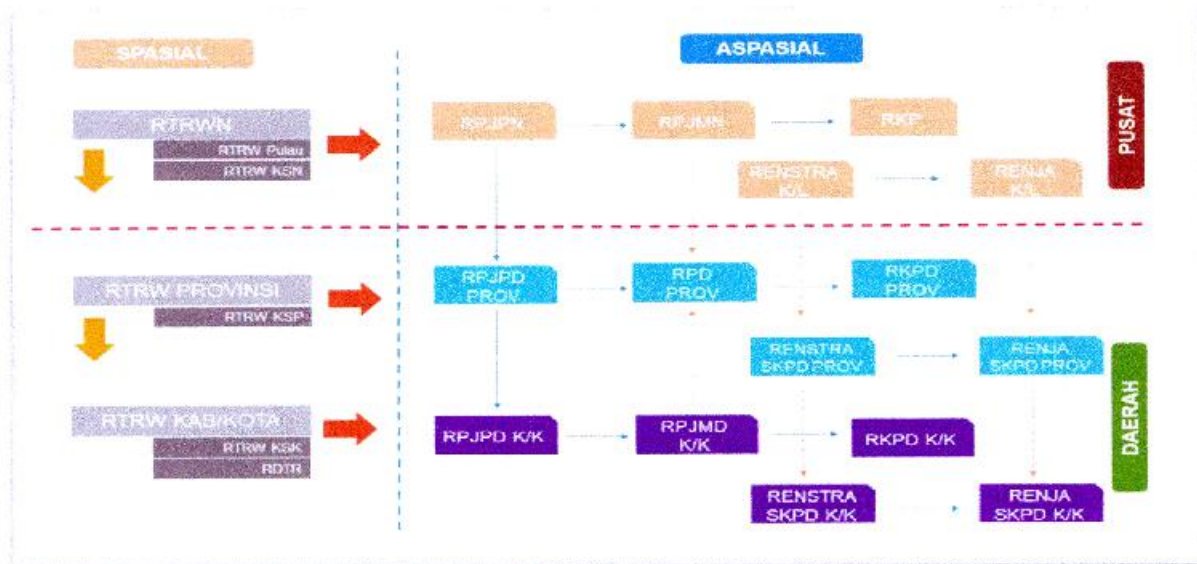
- Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembanugnan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo;
 16. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
 17. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional dan merupakan satu kesatuan proses pembangunan dalam skema pembangunan dalam jangka yang lebih panjang. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

daerah, yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), RKPD, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.2:

Gambar 1.2 Keterkaitan Perencanaan Nasional dengan Perencanaan Daerah



1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2025 adalah:

1. Mewujudkan pencapaian Tujuan dan Sasaran Provinsi Gorontalo dalam RPD 2023-2026
2. Memberikan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah
3. Memberikan arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah
4. Mewujudkan sinergi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan baik antar daerah, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan
5. Optimalisasi partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

Tujuan dari penyusunan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 adalah:

1. Untuk menjadi dokumen acuan untuk penyusunan KUA-PPAS dan APBD 2025
2. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran
3. Sebagai dasar pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan
4. Sebagai instrumen evaluasi untuk menilai pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPD, Renstra PD, Renja PD serta tindaklanjutnya yaitu penyusunan KUA-PPAS dan APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan tentang hubungan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

1.4. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan disusunnya RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025.

1.5. Sistematika

Memuat sistematika dokumen RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan tentang kondisi terkini berdasarkan capaian target pembangunan tahun sebelumnya.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan

dan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya

Menjelaskan hasil capaian Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2024 serta pencapaian indikator RPJMD Provinsi Gorontalo 2023-2026

2.3. Permasalahan Pembangunan

Menjelaskan dan melakukan Identifikasi permasalahan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan provinsi, proyeksi dan tantangan pembangunan ekonomi tahun 2025

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2025 serta pendanaan pembangunan lainnya.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan Tujuan dan Sasaran pembangunan tahun 2025.

4.2 Isu Strategis

Memuat Isu Strategis yang merupakan hasil analisis terhadap permasalahan yang diuraikan pada BAB II. Dikemukakan pula Isu Strategis Nasional yang perlu menjadi perhatian daerah.

4.3 Prioritas Pembangunan Daerah

Memuat tentang prioritas pembangunan untuk tahun 2025 serta prioritas program pembangunan daerah.

4.4 Program Prioritas Daerah

Memuat Program Prioritas Daerah berdasarkan Prioritas Daerah beserta Program Prioritas Daerah yang Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2025.

BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KOTA TAHUN 2025

Memuat Arah Kebijakan Pembangunan dan Prioritas Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 yang menjadi bahan sinkronisasi atas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo pada tahun 2025.

BAB VI. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. KONDISI UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DOMOGRAFI

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Gorontalo lahir pada tanggal 5 Desember Tahun 2000, dan menjadi provinsi ke-32 di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo tanggal 22 Desember 2000. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.1.1-6117 tahun 2022 tanggal 9 November 2022, luas Wilayah Provinsi Gorontalo sebesar 12.025,147 Km², atau hanya sebesar 0,59 persen dari luas wilayah Indonesia. Wilayah Gorontalo terletak di antara 0°19' – 1°15' Lintang Utara dan 121°23' – 123°33' Bujur Timur. Letak Provinsi Gorontalo sangat strategis, karena diapit oleh dua perairan, yaitu Teluk Gorontalo atau yang lebih dikenal dengan nama Teluk Tomini di sebelah Selatan dan Laut Sulawesi di sebelah Utara. Provinsi Gorontalo juga berbatasan langsung dengan dua provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Provinsi Gorontalo



Sumber: Revisi RTRW Provinsi Gorontalo tahun 2022-2042

Secara Administratif, Provinsi Gorontalo terbagi atas 5 kabupaten dan 1 kota yakni Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo sebagai Ibu Kota Provinsi. Dari 6 wilayah administrasi tersebut terdiri atas

77 Kecamatan, 72 Kelurahan dan 657 Desa. Kabupaten dengan kecamatan terbanyak adalah Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Pohuwato memiliki wilayah terluas di Provinsi Gorontalo dengan luas wilayah sebesar 4.370 km² atau sebesar 36,34%, sedangkan Kota Gorontalo memiliki wilayah terkecil di Provinsi Gorontalo yaitu sebesar 71 km² atau sebesar 0,59%.

Tabel 2.1.
Luas Wilayah Provinsi Gorontalo menurut Kabupaten/Kota

Kode Wilayah	Wilayah	Jumlah Kecamatan	Kelurahan/Desa			Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
			Kelurahan	Desa	Jumlah		
75.01	Kabupaten Gorontalo	19	14	191	205	2.160	17,96
75.02	Kabupaten Boalemo	7	-	82	82	1.831	15,22
75.03	Kabupaten Bone Bolango	18	5	160	165	1.889	15,70
75.04	Kabupaten Pohuwato	13	3	101	104	4.370	36,34
75.05	Kabupaten Gorontalo Utara	11	-	123	123	1.704	14,17
75.71	Kota Gorontalo	9	50	-	50	71	0,59
75	Provinsi Gorontalo	77	72	657	729	12.025,147	100

Sumber : Permendagri 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Kode dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau

b. Topografi

Dilihat dari aspek topografi sebagian besar Wilayah Provinsi Gorontalo merupakan daerah dataran, perbukitan dan pegunungan. Wilayah Kota Gorontalo adalah yang terletak pada elevasi yang paling rendah, dari 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Gorontalo terdiri dari wilayah dataran dan pegunungan berada pada elevasi bervariasi, dari 0 sampai 2.065 m dari permukaan laut. Kabupaten Boalemo terdiri dari wilayah dengan topografi datar sampai bergunung terletak pada ketinggian dengan variasi dari 0 sampai 2.100 m dari permukaan laut. Kabupaten Pohuwato terletak pada elevasi 0 sampai 1.920 m yang ditemukan di daerah perbatasan dengan Sulawesi Tengah. Kabupaten Bone Bolango mempunyai topografi dengan variasi antara 0 sampai 1.954. Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai topografi dengan ketinggian yang berbeda-beda, dengan variasi ketinggian antara 0 sampai 1.970 m dari permukaan laut.

Gambar 2.2
Peta Topografi Provinsi Gorontalo



Sumber : Revisi RTRW Provinsi Gorontalo 2010-2030.

Secara fisiografis, wilayah Gorontalo dikelompokkan menjadi 2 satuan wilayah morfologi, yaitu:

- 1) Satuan morfologi pegunungan berlereng terjal, terutama menempati wilayah bagian tengah dan utara wilayah Gorontalo, yang menjadi pembatas sebelah timur dan sebelah utara dari Cekungan Air Tanah Limboto yaitu dengan beberapa puncaknya berada di Pegunungan Tilongkabila, antara lain : G. Gambut (1954 m), G. Tihengo (1310 m), G. Pombolu (520 m) dan G. Alumolingo (377 m). Satuan morfologi ini terutama dibentuk oleh satuan batuan Gunung api tersier dan batuan Plutonik.
- 2) Satuan morfologi perbukitan bergelombang, terutama dijumpai di daerah bagian selatan dan bagian barat dan menjadi batas cekungan di sebelah selatan dan sebelah utara. Satuan morfologi ini umumnya menunjukkan bentuk puncak membulat dengan lereng relatif landai dan berjulung kurang dari 200 meter yang terutama ditempati oleh satuan batuan Gunung api dan batuan sedimen berumur Tersier hingga Kuarter.

Satuan morfologi dataran, merupakan daerah dataran rendah yang berada di bagian tengah wilayah Cekungan Limboto yaitu di sekitar Danau Limboto. Pada umumnya daerah ini ditempati oleh satuan aluvium dan endapan danau. Aliran sungai di wilayah ini umumnya mempunyai pola sub dendritik dan sub parallel.

Satuan morfologi pegunungan dicirikan dengan bentuk bentang alam berbentuk kerucut, dengan puncak-puncak tertinggi adalah Gunung Tabongo (2.100 mdpl), Gunung Boliyohuto (2.065 mdpl), Gunung Mopangga (2.051 mdpl) dan Gunung Pontolo (2.017 mdpl).

Tabel 2.2
Kelas Kemiringan Lereng Provinsi Gorontalo

Kelas Lereng	Kemiringan (%)	Luas (ha)	Persentase (%)
A	0 – 2	128.552	10,52
B	2-8	74.112	6,07
C	8-15	66.528	5,45
D	15 – 40	113.997	9,33
E	> 40	838.355	68,63
Jumlah		1.221.544	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo

Morfologi Gorontalo sebagian besar adalah perbukitan. Gunung Tabongo yang terletak di Kabupaten Boalemo merupakan gunung yang tertinggi di Provinsi Gorontalo dengan ketinggian 2.100 m dari permukaan laut. Sedangkan Gunung Litu-Litu yang terletak di Kabupaten Gorontalo adalah gunung terendah dengan ketinggian 884 m dari permukaan laut.

c. Geologi

Secara regional, berdasarkan Peta Geologi Lembar Tilamuta (*S. Bachri, dkk, 1993*) menyatakan bahwa Daerah Provinsi Gorontalo merupakan bagian dari lengan utara Sulawesi yang sebagian besar batuanannya ditempati oleh batuan gunung api Tersier. Di wilayah tengah bagian timur dijumpai dataran rendah yang berbentuk memanjang, terbentang dari Danau Limboto ke Lembah Paguyaman yang diduga semula merupakan danau. Batuan yang ada di daerah penyelidikan terdiri dari batuan-batuan yang berumur Tersier hingga Kuarter. Urutan batuan dari yang tertua hingga batuan yang termuda adalah sebagai berikut:

- Formasi Tinombo (Teot): Terdiri dari lava basal, basal sepilitan, lava andesit, breksi gunungapi, batu pasir wake, batu lanau, batu pasir hijau, batu gamping merah, batu gamping kelabu dan batuan termalihkan lemah. Formasi ini berumur Eosen – Pertengahan Oligosen.
- Secara selaras diatas Formasi Tinombo terdapat Formasi Dolokopa (Tmd) yang terdiri dari: batu pasir wake, batu lanau, batu lumpur, konglomerat, tuf, tuflapili, aglomerat, breksi gunung api, lava andesit sampai basalt. Formasi Dolokopa berumur Miosen Tengah – Pertengahan Miosen Atas.
- Kedua formasi batuan tersebut selanjutnya di intrusi oleh Diorit Boliohuto (Tmbo) yang terdiri dari diorit dan granodiorit yang berumur Pertengahan Miosen Tengah - Pertengahan Miosen Atas.
- Datas ketiga batuan baik Formasi Tinombo, Formasi Dolokopa dan intrusi Diorit Boliohuto secara tidak selaras ditempati oleh Batuan Gunung api Pinggu (TQpv) yang terdiri dari: aglomerat, tuf, lava andesit, basalt yang berumur Pliosen Atas - Plistosen Bawah. Selaras lebih muda bersamaan diendapkan batu gamping klastika (TQI) yang terdiri dari kalkarenit, kalsirudit dan batu gamping koral. Selanjutnya pada Plistosen mulai di endapkan endapan Danau yang berumur Plistosen Bawah - Holosen dan di atasnya secara selaras diendapkan batu gamping terumbu (QI) yang dimulai pada Plistosen Atas – Holosen berupa batu gamping koral, sedangkan endapan yang paling muda di daerah penyelidikan adalah berupa endapan permukaan/ aluvium (Qpl).

Struktur geologi yang utama yang berkaitan dengan daerah penyelidikan adalah sesar, berupa sesar normal dan sesar geser. Sesar normal yang terdapat di G. Boliohuto menunjukkan pola memancar,

sedangkan sesar geser umumnya bersifat menganan tetapi ada pula yang mengiri. Sesar tersebut memotong batuan yang berumur tua (Formasi Tinombo) hingga batuan yang berumur muda (Satuan Batu gamping Klastik).

d. Hidrologi

1) Daerah Aliran Sungai (DAS)

Provinsi Gorontalo dilintasi oleh beberapa sungai. Sungai Paguyaman yang terletak di Kabupaten Boalemo adalah sungai terpanjang dengan panjang aliran 99,3 km. Sedangkan sungai yang terpendek adalah Sungai Bolontio dengan panjang aliran 5,3 km yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara.

Berikut 3 (tiga) satuan Wilayah Sungai di Provinsi Gorontalo berdasarkan Permen PUPR No. 04/PRT/M/2015.

Tabel 2.3
Wilayah Sungai (WS) Provinsi Gorontalo

NO	NAMA WILAYAH SUNGAI	KODE	LUAS (Km ²)
1.	Wilayah Sungai Limboto-Bolango-Bone (WS LBB)	WS No. 05.05.A2	456.944,03
2.	Wilayah Sungai Paguyaman	WS No. 05.05.A3	3.485,65
3.	Wilayah Sungai Randangan	WS No. 05.06.A2	3.945

Sumber : BWS Sulawesi II Provinsi Gorontalo, 2023

Tabel 2.4
Wilayah Sungai (WS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS)
Di Provinsi Gorontalo

DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)			
WS Paguyaman	WS Limboto-Bolango-Bone (LBB)		WS Randangan
1. DAS Paguyaman,	1. DAS Tolinggula,	38. DAS Waluhu	1. DAS Randangan
2. DAS Limba,	2. DAS Potanga,	39. DAS Bilolantunga	2. DAS Beringin
3. DAS Olibuhu,	3. DAS Limbato	40. DAS Tombulilato	3. DAS DingaMotolohu,
4. DAS Tumba,	4. DAS Biawu,	41. DAS Ombulo	4. DAS Patihu,
5. DAS Bolangga,	5. DAS Bulolila,	42. DAS Momungaa	5. DAS Sidorukun,
6. DAS Bubaa,	6. DAS Bulontio,	43. DAS Bangahu	6. DAS Sukadamai,
7. DAS Tumbihi,	7. DAS Boliohulu	44. DAS Mopuya	7. DAS Wonggarasi,
8. DAS Limbatihu,	8. DAS Boliyohuto,	45. DAS Kaidundu	8. DAS Lemito,
9. DAS Tabongo,	9. DAS Baladu,	46. DAS Uabanga	9. DAS Lomull,
10. DAS Dulupi,	10. DAS Mooti,	47. DAS Tongo	10. DAS Milangodaa,
11. DAS Sambat,	11. DAS Sipatana,	48. DAS Bilungala	11. DAS Popayato,
12. DAS Tilamuta,	12. DAS Dulukapa,	49. DAS Tamboo	12. DAS Dudeulo,
13. DAS Lamu,	13. DAS Deme I,	50. DAS Tolotio	13. DAS Molosipat,
14. DAS Botumoito,	14. DAS Dunu,	51. DAS Olele	14. DAS Moutong
15. DAS Tapadaa,	15. DAS Bubalango,	52. DAS Oluhuta	
16. DAS Salilama,	16. DAS Tengah,	53. DAS Molotabu	
17. DAS Tabulo,	17. DAS SOgu,	54. DAS Botutonuo	
18. DAS Bumbulan,	18. DAS Monano,	55. DAS Modelamo	
19. DAS Libuo	19. DAS Tudi,	56. DAS Buluango	
20. DAS Marisa	20. DAS Tolango,	57. DAS Huangobutu	
	21. DAS Datahu,	58. DAS Inengo	
	22. DAS Popalo,	59. DAS Leato	
	23. DAS Tolanglo,	60. DAS Bolango-Bone	
	24. DAS Pontolo,	61. DAS Limboto	
	25. DAS Buda,	62. DAS Pohe	
	26. DAS Posso,	63. DAS TanjungKramat	
	27. DAS Bubode,	64. DAS Bongo	
	28. DAS Sanbungo,	65. DAS Lopo	
	29. DAS Tolotapo,	66. DAS Kayu Bulan	
	30. DAS Butoimola,	67. DAS Bilihu Timur	
	31. DAS Samia	68. DAS Langgula	

	32. DAS Tapaibuhu 33. DAS Soklat 34. DAS Sapawea 35. DAS Imana 36. DAS Taludaa 37. DAS Sogitia	69. DAS Lamu 70. DAS Limo'o 71. DAS Lobuto Timur 72. DAS Lobuto 73. DAS Biluhu Barat 74. DAS Huango	
--	---	--	--

Sumber : BWS Sulawesi II Provinsi Gorontalo, 2023

2) Danau

Di Provinsi Gorontalo terdapat 2 (dua) danau yang secara potensial mempunyai nilai ekonomi bagi pengembangan bidang-bidang kepariwisataan, pengairan, dan energi antara lain :

1. Danau Limboto merupakan sebuah danau yang terletak di 2 (dua) wilayah yaitu wilayah Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo dimana pada tahun 1932 rata-rata kedalaman danau mencapai 30 m dengan luas 7.000 ha tetapi mulai tahun 1990 sampai sekarang kedalaman danau rata-rata hanya tinggal 2.5 m pada musim kemarau dan bisa mencapai 5 m pada musim hujan dengan luas kurang lebih 3.000 ha. Pendangkalan danau diakibatkan oleh adanya erosi dan sedimentasi dan masalah lain yang tidak kalah pentingnya yaitu adanya gulma air seperti enceng gondok yang menutupi permukaan mencapai 30% sampai 35 % dari luas danau.
2. Danau Perintis yang terdapat di Desa Huluduotamo Kec. Suwawa ± 11 Km dari pusat kota Gorontalo dapat ditempuh ± 12 menit dengan kendaraan darat. Danau perintis merupakan obyek wisata seluas ± 6 Ha yang dibuat untuk kepentingan pengairan sawah. Air yang mengalir ke Danau Perintis berasal dari mata air pegunungan yaitu mata air Lulahu dan mata air Poso.

3) Cekungan Air Tanah

Wilayah cekungan air tanah di Provinsi Gorontalo ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) wilayah cekungan air tanah berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, yang terdiri atas CAT Bone, CAT Pinogu, CAT Tombulilato, CAT Gorontalo, CAT Molombulahe, CAT Mahinoto, CAT Sogniti, CAT Marisa, dan CAT Popayato.

e. Klimatologi

Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Seperti halnya wilayah lain di Indonesia, Provinsi Gorontalo memiliki iklim tropis. Dengan kondisi wilayah Provinsi Gorontalo yang letaknya di dekat garis khatulistiwa, menjadikan daerah ini mempunyai suhu udara yang cukup panas. Menurut catatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Djalaluddin Gorontalo, suhu udara rata-rata Provinsi Gorontalo selama tahun 2023 adalah 29,84°C. Suhu terendah terjadi di bulan Oktober yaitu 19,2°C. Provinsi Gorontalo memiliki kelembaban udara yang relative tinggi. Rata-rata kelembaban udara pada tahun 2023 sebesar 69,59 persen. Sementara itu, untuk jumlah curah hujan selama tahun 2023 yaitu sebesar 1.292,1 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari, yaitu mencapai 169,60 mm. Pada tahun 2023, rata-rata kecepatan angin tercatat sebesar 1,48 knot.

f. Penggunaan Lahan

Secara umum penggunaan lahan di Provinsi Gorontalo terbagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu:

1) Kawasan Lindung

Kawasan Lindung Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi adalah:

- Cagar Alam (CA) Tanjung Panjang di Kabupaten Pohuwato;
- Cagar Alam (CA) Panua di Kabupaten Pohuwato;
- TN Bogani Nani Wartabone di Kabupaten Bone Bolango; dan,
- Taman Nasional Promosi (TNP) Nantu Boliohuto di Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo.
- Kawasan Teluk Tomini.

Kawasan Lindung Provinsi meliputi:

- Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kabupaten-Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, Bone Bolango, Boalemo, Pohuwato dan Kota Gorontalo;
- CA Mas Popaya Raja di Kabupaten Gorontalo Utara;
- CA Tangale di Kabupaten Gorontalo; dan
- Kawasan konservasi laut daerah (KKLD) desa olele di Kabupaten Bone Bolango dan Pulau Monduli di Kabupaten Boalemo.

2) Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi adalah:

- Kawasan Andalan Gorontalo dengan sector unggulan pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan;
- Kawasan Andalan Marisa dengan sector unggulan pertanian, perkebunan dan perikanan;
- Kawasan Andalan Teluk Tomini dan sekitarnya dengan sector unggulan perikanan dan pariwisata;

Sedangkan Kawasan Budidaya Provinsi meliputi Kawasan budidaya yang bernilai strategis provinsi, baik di darat maupun laut, yang meliputi:

a) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi hutan produksi, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi konversi.

- (1) Kawasan hutan produksi meliputi hutan produksi di wilayah Bone Bolango, Gorontalo Utara, Boalemo, Kabupaten Gorontalo dan kabupaten Pohuwato :
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas meliputi hutan produksi terbatas di wilayah Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Pohuwato :
- (3) Kawasan hutan produksi konversi meliputi hutan konversi di wilayah Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo Utara dan kabupaten Pohuwato:

b) Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Kawasan peruntukan Hutan Rakyat adalah beberapa lahan milik masyarakat yang digunakan secara sadar untuk tanaman kehutanan di beberapa tempat yang tersebar di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bone Bolango.

Berdasarkan data dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XV Gorontalo. Luas hutan Provinsi Gorontalo pada tahun 2010 seluas 824.668 Ha. Seiring berjalannya pembangunan, terjadi pelepasan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit dan untuk daerah transmigrasi, sehingga pada tahun 2018 luas kawasan hutan di Provinsi Gorontalo berkurang menjadi 764.881,23 Ha. Berikut adalah luas kawasan hutan menurut Kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2019 :

Tabel 2.5
Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo tahun 2020

Kabupaten/Kota	Hutan Lindung	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi dapat dikonversi	Jumlah luas hutan dan perairan
Boalemo	28.514,52	10.970,62	44.240,78	14.537,49	4.783,09	103.046,50
Gorontalo	13.124,94	24.777,84	41.899,34	17.714,06	2.395,33	99.911,51
Pohuwato	136.582,81	39.707,97	83.304,44	41.476,29	10.522,52	311.594,03
Bone Bolango	15.634,23	104.855,72	18.830,08	824,10	-	140.144,13
Gorontalo Utara	8.021,54	16.210,33	64.388,66	15.540,08	5.554,01	109.714,62
Kota Gorontalo	470,48	-	-	-	-	470,48
Provinsi Gorontalo	202.348,52	196.522,47	252.663,30	90.092,02	23.254,95	764.881,27

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

a. Potensi Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor unggulan Provinsi Gorontalo dan menjadi penyumbang terbesar PDRB. Sektor ini berpeluang besar dalam menyerap tenaga kerja terutama masyarakat yang berada di perdesaan. Potensi pertanian Provinsi Gorontalo antara lain :

- Tanaman pangan meliputi padi dan palawija (jagung, ubi kayu, ubi jalar, kedele, kacang tanah dan kacang hijau). Luas panen padi sawah adalah 48.498 ha dan produksi 249.709 ton (produktivitas 56,22 kw/ha), dengan luas panen terbesar berada di Kabupaten Gorontalo sekitar 24.123 ha. Untuk padi ladang adalah seluas 38 ha dengan produksi 120 ton (produktivitas 31,58 kw/ha). Luas panen jagung adalah 334.945 ha dengan 1.050.662 ton produksi (48,22 kw/ha produktivitas), 48% di antaranya berada di Kabupaten Pohuwato.
- Hortikultura meliputi komoditas sayur-sayuran (bawang merah, bawang daun, bayam, cabai besar, cabai rawit, kacang panjang, kangkung, ketimun, kubis, melon, petsai/sawi, semangka, terung, tomat dan wortel) dan buah-buahan (alpukat, belimbing, duku, durian, jambu air, jambu biji, jeruk besar, jeruk siam, mangga, manggis, nangka, nenas, pepaya, rambutan, salak, sawo,

sirsak dan sukun). Cabai rawit merupakan komoditas utama sayur-sayuran dengan luas panen 1.993 hektar dengan produksi sebanyak 147.292 ton. Dari komoditas buah-buahan, pisang adalah yang utama dengan produksi 131.664 kw. Adapun luas lahan pertanian Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

Luas Baku lahan Provinsi Gorontalo tahun 2022 sebesar 1.248.419 yang terdiri dari Luas lahan Sawah sebesar 33.131 Ha, Lahan pertanian bukan sawah sebesar 904.667 Ha, dan Lahan Bukan Pertanian sebesar 310.621 Ha.

Tabel 2.6
Penggunaan Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian Menurut Kabupaten/Kota (Ha)
Di Provinsi Gorontalo tahun 2022

No	Wilayah	Penggunaan Lahan			Total Luas Lahan
		Sawah	Pertanian Bukan Sawah	Bukan Pertanian	
1	Kabupaten Boalemo	4.975	239.208	12.543	256.726
2	Kabupaten Gorontalo	14.180	162.547	23.195	199.832
3	Kabupaten Pohuwato	5.767	335.406	83.065	424.238
4	Kabupaten Bone Bolango	2.081	87.104	99.583	188.768
5	Kabupaten Gorontalo Utara	5.367	77.068	88.517	170.952
6	Kota Gorontalo	761	3.425	3.717	7.903
	JUMLAH	33.131	904.667	310.621	1.248.419

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023

Kota Gorontalo, memiliki Pertanian lahan basah seluas $\pm$ 796 Ha berada di 7 (tujuh) Kecamatan dari 9 (sembilan) Kecamatan yang ada di Kota Gorontalo. Kawasan tanaman pangan lahan basah untuk tanaman padi berada di Kecamatan Duingi, Kota Timur, kota Utara, kota tengah, dan Sibatana. Lahan sawah di Kota Gorontalo hanya berupa lahan sawah irigasi teknis. Pertanian lahan kering seluas $\pm$ 157 Ha. Kawasan tanaman pangan lahan kering dikembangkan untuk berbagai jenis tanaman antara lain: jagung di Kecamatan kota Barat, Duingi, Kota Timur dan Kota Utara; tanaman buah mangga dan pisang di hampir seluruh wilayah kecamatan; tanaman buah nangka berada di Kecamatan Kota Barat, Kota Timur, Dumbo Raya, Kota Utara dan Sibatana; tanaman Buah pepaya di Kecamatan Kota Barat, Kota utara dan Sibatana. Kawasan hortikultura, berada di Kecamatan Kota Barat, duingi, dan Kota Utara dengan Komoditi cabe dan tomat.

Kabupaten Boalemo, Lahan pertanian di Kabupaten Boalemo untuk lahan sawah irigasi berada di 5 kecamatan yaitu Mananggu, Botumoito, Paguyaman, Wonosari dan Dulupi dengan jenis komoditi berupa padi sawah. Sementara untuk Kawasan perkebunan di Kabupaten Boalemo diarahkan pada pengembangan perkebunan dengan komoditi yang potensial untuk dikembangkan yaitu cengkeh, kakao, kelapa, kelapa sawit dan tebu dengan menyesuaikan ketinggian lahan.

Kabupaten Bone Bolango, Potensi Sektor Pertanian di wilayah ini terdiri dari beberapa komoditas pertanian yaitu: Komoditas Pertanian tanaman pangan terdiri dari padi, jagung, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, ubi jalar dan ubi kayu; Komoditas tanaman hortikultura terdiri dari bawang merah, bawang daun, petsai/sawi, cabe rawit, tomat, terong, ketimun, kangkung, bayam dan kacang panjang; Komoditas tanaman perkebunan antara-lain Kelapa, Kakao, Kemiri, Jambu, Kapuk, Pala,

Cengkih, Kopi, Aren, Vanili, Kayu Manis; dan Komoditas Tanaman Buah-buahan yaitu Alpokat, Belimbing, duku, langsung, Durian, Jambu Biji, Jambu air, Jeruk Siam/Keprok, Jeruk Besar, mangga, Nangka, nenas, Pepaya, Pisang, Rambutan, Sirsak, dan Sukun.

Kabupaten Gorontalo, Potensi di Sektor Pertanian di daerah Kabupaten ini adalah tanaman Padi yang menjadi komoditi andalan, yang tersebar di 2 kawasan yaitu kawasan

agropolitan, meliputi Kecamatan Telaga, Telaga Biru, Limboto Barat Tabongo, Dungaliyo, Batudaa, Pulubala, Tibawa Mootilango, Asparaga, Tolangohula, Boliyohuto, Telaga Jaya, Tilango, Bilato dan Limboto; dan di kawasan Minapolitan meliputi Kecamatan Batudaa Pantai, Biluhu, Bilato, Telaga, Telaga Biru, Limboto, Limboto Barat, Tabongo, Bongomeme, Dungaliyo, Pulubala, Tibawa, Mootilango, Boliyohuto, Tolangohula dan Asparaga. Sektor Pertanian sangat memungkinkan mengingat lahan produktif cukup luas yaitu tanah persawahan/basah 11.856 ha.

Kabupaten Gorontalo Utara, Komoditas yang termasuk pada tanaman pangan adalah padi, jagung, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Gorontalo Utara tersebar di seluruh kecamatan. Kabupaten Gorontalo Utara juga memiliki produksi beberapa komoditas hortikultura. Komoditas hortikultura yang berupa tanaman sayur antara lain cabai rawit, tomat, terung, kacang panjang, dan kangkung. Tanaman sayuran yang paling banyak tumbuh dan tersebar merata di setiap kecamatan adalah cabai rawit, dengan luas panen seluas 455 hektar dan produksi mencapai 2.104,5 Ton pada tahun 2021. Untuk tanaman buah-buahan yang paling banyak adalah durian yang produksinya mencapai 655,3 Ton. Kecamatan Atinggola merupakan produsen buah durian terbanyak di Kabupaten Gorontalo Utara.

Kabupaten Pohuwato, Kabupaten ini mengandalkan Jagung dan Padi Sawah sebagai brand daerah, bahkan dinamakan sebagai Lumbung Jagung terbesar di Provinsi Gorontalo. Pengembangan pertanian Padi Sawah menjadi unggulan kedua setelah jagung dengan luas areal lahan yang terhampar mencapai kira-kira 41.212 ha, atau sebesar 9,71% dari luas wilayah kabupaten. Petani di daerah ini juga mengembangkan komoditi Hortikultura dan Perkebunan dengan berbagai jenis tanaman seperti kopi, kakao, mete, kelapa dalam, kelapa sawit, cengkeh, panili dan kemiri serta buahan-buahan seperti durian, jeruk dan mangga. Luas areal yang diarahkan untuk pengembangan tanaman perkebunan adalah seluas 48.481 ha dengan areal pengembangannya merata ke segenap wilayah Kabupaten Pohuwato. Di Provinsi Gorontalo, komoditas tanaman pangan merupakan komoditas yang dominan dan dikembangkan secara intensif terutama padi dan jagung. Luas Panen Padi Provinsi Gorontalo Tahun 2022 sebesar 46,82 Ha dan mengalami peningkatan sebesar 49,61 Ha di tahun 2023. Luas panen padi terbesar berada di kabupaten Gorontalo sekitar 24.123 Ha.

Gambar 2.3

Perbandingan Luas Panen dan Produksi Padi di Provinsi Gorontalo, 2022 dan 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023

Tabel 2.7
Luas Panen dan Produktivitas Padi Provinsi Gorontalo,
Tahun 2022-2023

Kabupaten/ Kota	Luas Panen (ha)		Produktivitas (ku/ha)		Produksi (ton)	
	2022	2023*	2022	2023*	2022	2023*
Boalemo	5.886,02	7.097,65	50,40	46,79	29.663,64	33.208,89
Gorontalo	23.177,91	24.402,22	55,64	49,85	128.971,46	121.644,22
Pohuwato	5.704,18	3.936,44	48,05	54,46	27.409,27	21.436,07
Bone Bolango	3.640,09	5.163,80	48,87	55,56	17.790,18	28.690,84
Gorontalo Utara	6.581,47	5.847,03	40,52	43,19	26.667,80	25.256,15
Kota Gorontalo	1.833,80	2.382,85	52,53	54,38	9.632,18	12.957,32
Provinsi Gorontalo	46.823,47	48.829,99	51,29	49,80	240.134,53	243.193,49

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023

Berbagai komoditi Pertanian potensial dapat mendorong peningkatan perekonomian di Provinsi Gorontalo. Untuk itu dalam rangka meningkatkan daya saing pertanian, akan dilakukan upaya-upaya untuk mengembangkan industri primer yang diarahkan untuk mengolah produk pasca panen guna meningkatkan nilai tambah komoditi produk pertanian serta kegiatan intensifikasi dan mekanisasi/modernisasi pertanian dari hulu ke hilir untuk menunjang potensi pertanian. Berikut adalah luas lahan tegal/kebun, ladang/huma serta lahan yang sementara tidak diusahakan yang sangat potensial untuk pemanfaatan pertanian tanaman potensial.

Tabel 2.8
Luas Lahan Tegal/Kebun, Ladang/Huma dan Lahan yang sementara Tidak Diusahakan
Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo tahun 2023

Kabupaten/ Kota	Tegal/Kebun (ha)	Ladang/Huma (ha)	Sementara tidak diusahakan (ha)
Boalemo	54.448,0	17.883,00	472,0
Gorontalo	52.142,0	15.578,0	2.745,0
Pohuwato	45.524,6	17.462,0	20.845,5

Bone Bolango	13.077,0	3.987,0	13.734,0
Gorontalo Utara	26.777,0	9.298,0	7.424,0
Kota Gorontalo	146,0	0,0	16,0
Provinsi Gorontalo	192.114,6	64.208,0	45.236,5

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Gorontalo Dalam Angka 2024

b. Potensi Peternakan

Selain Pertanian, peternakan juga menjadi salah satu potensi yang cukup berkembang di Provinsi Gorontalo. Faktor pendorongnya diantaranya adalah ketersediaan lahan dan pakan ternak. Populasi ternak Sapi Provinsi Gorontalo Tahun 2022 mencapai 266.556 ekor, sementara populasi ternak kambing 2022 sebesar 108.992 ekor. Selain ternak sapi dan kambing, potensi peternakan lainnya adalah jenis unggas ayam dan itik yang cukup mendorong perekonomian daerah. Berikut sebaran populasi unggas menurut kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.

Tabel 2.9
Populasi Sapi dan Kambing (ekor) Tahun 2021-2022 (ekor)

Wilayah	Sapi			Kambing			Unggas		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Boalemo	42.308	43.046	43.204	10.747	11.124	11.218	433.902	404.922	405.935
Gorontalo	96.681	99.177	101.685	51.096	52.464	53.447	686.375	720.135	747.153
Pohuwato	32.543	33.830	34.735	14.783	15.285	15.627	367.177	385.536	404.542
Bone Bolango	47.384	48.317	49.471	7.604	7.688	8.170	324.491	332.203	342.906
Gorontalo Utara	32.405	32.979	33.726	7.320	7.356	7.284	432.485	432.490	381.280
Kota Gorontalo	3.662	3.735	3.735	12.986	13.246	13.246	120.900	123.318	176.623
Provinsi Gorontalo	254.983	261.084	266.556	104.536	107.163	108.992	2.365.330	2.398.604	2.458.439

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo 2022

Kabupaten Bone Bolango : potensi peternakan adalah peternakan besar : sapi, kuda dan kambing, ayam kampung, ayam ras, dan itik. Populasi ternak sapi pada tahun tahun 2021 mencapai 48.317 Ekor. Peningkatan populasi sapi disebabkan Pelaksanaan Inseminasi Buatan melebihi target yang telah ditetapkan pada program SIKOMDAN sejumlah 2.400 Ekor.

Kabupaten boalemo : Kawasan peruntukan peternakan di Kabupaten Boalemo terdapat di Kecamatan Manangu, Kecamatan Botumoito, Kecamatan Tilamuta, Kecamatan Dulupi, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Paguyaman Dan Kecamatan Paguyaman Pantai. Populasi peternakan di wilayah kabupaten ini meliputi sapi potong, kuda, kambing dan babi. Yang masih paling dominan adalah sapi yakni 44.667 ekor per tahun. Ternak ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur dan itik juga terdapat di daerah ini.

Kabupaten Gorontalo : Di sektor peternakan kabupaten gorontalo terus berusaha memenuhi permintaan pasar local dan regional yang terus meningkat termasuk permintaan pasar luar negeri, di antaranya yang terjalin melalui kerja sama ekspor. Potensi peternakan di daerah ini adalah sapi, (lokasi di seluruh kecamatan), kambing (lokasi dikembangkan di kecamatan biluhu dan batudaa pantai) dan itik (lokasi dikembangkan di kecamatan batudaa, tobango dan bongomeme).

Kabupaten pohnuato : Potensi di sektor peternakan meliputi ternak sapi, kambing, ayam buras, dan itik. Pemerintah daerah (pemda) menaruh perhatian terhadap sektor yang satu ini dengan pemberian bantuan sapi secara bergilir kepada petani peternak. Pemda pohnuato telah menargetkan daerah ini sebagai lumbung ternak sapi di provinsi Gorontalo. Populasi sapi telah mencapai 100 ribu ekor.

Pembangunan peternakan perlu dikembangkan karena peternakan turut berperan dalam mendorong terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia dari sisi pemenuhan gizi melalui penyediaan konsumsi protein hewani asal ternak yaitu daging, telur dan susu. Selain itu mendorong tumbuhnya ekonomi yang berkerakyatan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat peternakan.

Provinsi Gorontalo sangat potensial dan memiliki peluang dalam pengembangan industri disektor peternakan.

Kabupaten Gorontalo Utara: Potensi di sektor peternakan adalah sapi potong dan kambing sekaligus sebagai komoditas unggulan. daerah yang menjadi penghasil hewan ternak non unggas terbesar jenis sapi potong yaitu di Kecamatan Kwandang dan Anggrek, Kambing di Sumalata Timur dan Anggrek, Babi di Gentuma dan Kuda di Kecamatan Atinggola. Sedangkan pada jenis unggas, ayam kampung sebagai unggas terdominan di Gorontalo Utara.

Kota Gorontalo : Pengembangan ternak dan unggas diarahkan pada lahan pertanian sawah bukan irigasi, pertanian lahan kering dan hortikultura. Rencana Kawasan ini di Kecamatan Kota Barat dan Kecamatan Kota Utara yang berbatasan dengan Kabupaten Bone Bolango.

c. Potensi Perikanan

Potensi sumber daya alam di Provinsi Gorontalo sangat strategis khususnya disektor perikanan dan kelautan. Provinsi Gorontalo memiliki luas perairan laut 876.663,08 Ha atau 9.638.44 Km² yang memiliki panjang garis pantai 903,7 Km terdiri dari 572,5 Km Pantai Selatan/ Teluk Tomini dan 331,2 Km Pantai Utara/ Laut Sulawesi.

Potensi perikanan tangkap Provinsi Gorontalo tidak bisa dipisahkan dari potensi perikanan tangkap yang berbasis pada WPP (Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan) dan diakui secara Nasional maupun Internasional. Potensi perikanan tangkap Provinsi Gorontalo masuk dalam 2 (dua) WPP yaitu :

1. WPP 715 (perairan Teluk Tomini sampai perairan Laut Seram) potensi perikanan tangkapnya : 1.242.526 ton per tahun.
2. WPP 716 (Laut Sulawesi sampai Samudra Pasifik bagian Utara pulau Halmahera dan Irian Jaya) potensi perikanan tangkapnya : 597.139 ton per tahun. Potensi ini sudah termasuk potensi perikanan di wilayah ZEE pada wilayah tersebut.

Jumlah produksi perikanan tangkap di laut tahun 2022 sebesar 130.916 ton. Produksi perikanan terbesar berada di Kabupaten Pohnuato yaitu 27.084 ton atau sekitar 20,68 persen. Hasil perikanan terbesar diperoleh dari budidaya perikanan darat yaitu sebesar 49.378 ton dengan produksi ikan bandeng terbesar di Kabupaten Pohnuato sebanyak 15.740 ton.

Kabupaten Bone Bolango, Potensi Perikanan dan Kelautan di Kabupaten ini berada di garis sepanjang pantai selatan Gorontalo, terbentang dari Kecamatan Kabila Bone sampai dengan Kecamatan Bone dan menjadi tempat pencaharian sebagian penduduk Bone Bolango. Produksi perikanan Bone Bolango terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Perikanan tangkap berasal dari perikanan tangkap laut dan perairan umum, sedangkan produksi perikanan budidaya berasal dari budidaya kolam, karamba, jaring apung dan rumput laut. Jenis ikan Laut di wilayah ini adalah Ikan Layang, Tongkol, Cakalang, Selar, Tenggiri, Ikan Terbang, Julung, Kuwe, Cumi, Tuna dan Madidihang. Produksi perikanan tangkap laut di Kabupaten Bone Bolango sebesar 10.991 ton/tahun.

Kota Gorontalo, Budidaya perikanan darat yang sudah berkembang di Kota Gorontalo meliputi keramba jaring apung yang terletak di wilayah Danau Limboto Kecamatan Kota Barat dan Kecamatan Utara, sedangkan budidaya berupa kolam ikan tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kota Gorontalo. Sebagian kecamatan di Kota Gorontalo juga merupakan produsen perikanan tangkap. Kecamatan yang menjadi produsen perikanan adalah Hulontaloangi dan Dumbo Raya dengan hasil produksi perikanan laut pada Kecamatan Hulontaloangi sebesar 17.190 Ton dan Kecamatan Dumbo Raya 12.188 ton.

Kabupaten Boalemo, Sektor perikanan ini meliputi jenis perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Untuk perikanan tangkap terbesar berasal dari Kecamatan Tilamuta, Mananggu, Botumoito, Dulupi, Paguyaman dan Paguyaman Pantai. Sedangkan untuk budidayanya adalah pembudidayaan ikan Bandeng, Ikan air tawar, ikan kuwe dan budi daya rumput laut (basah).

Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo yang berbatasan dengan Teluk Tomini adalah salah satu penghasil ikan yang cukup besar karena memiliki wilayah kelautan yang cukup luas. Dengan panjang garis pantai sekitar 80 Km (13,6 % dari panjang pantai Provinsi Gorontalo) memiliki karakteristik sebagian besarnya adalah pantai berbatu/berpasir dan luas ZEE mencapai kira-kira 587,6 km² yang membentang di 3 kecamatan dan 21 desa pesisir. Kabupaten Gorontalo juga memiliki potensi ekosistem pesisir yang terdiri dari ekosistem terumbu karang sekitar 72 ha, ekosistem estuaria sekitar 12,4 ha dan ekosistem lamun sekitar 87,7 ha. Produksi perikanan Kabupaten Gorontalo di dominasi oleh perikanan tangkap dan sebagian kecil perikanan budidaya yang berada di Danau Limboto (2.400 ha) dan kolam air tawar (potensi sekitar 580 ha).

Kabupaten Gorontalo Utara, Komoditas unggulan di Kabupaten Gorontalo Utara adalah ikan cakalang. Potensi perikanan ini berada di perairan 12 mil dengan hasil sebesar 25.831 ton per tahun. Aktivitas perikanan menonjol adalah perikanan tangkap dan budidaya (rumput laut, kerang mutiara, udang laut, ikan karapu dan ikan karang). Pengelolaan ikan umumnya masih bersifat tradisional (penggaraman, pengeringan dan pengasapan ikan).

Kabupaten Pohuwato, Sektor perikanan merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Gorontalo dimana dari 13 kecamatan yang ada, 10 kecamatan berada di wilayah pesisir. Pencaharian masyarakat disektor ini terdiri dari dua yakni pada perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Jenis ikan tangkap yang dominan diperoleh nelayan adalah ikan tongkol, cakalang, tuna, udang

dan jenis lainnya. Sedangkan untuk jenis budidaya ikan air tawar melalui kolam belum masif dilaksanakan padahal ikan air tawar mudah dikembangkan.

d. Potensi Pertambangan dan Energi

Sektor pertambangan Provinsi Gorontalo memiliki berbagai jenis bahan tambang logam, misalnya: emas, perak, tembaga, pasir besi; sedangkan bahan non logam antara lain: slag pasir, batu, pasir-batu (sirtu), kerikil, besi andesit, batu makora, basalt, batu gamping, toseki, batu granit, dll.

Potensi pertambangan dan energy tersebar di Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo dengan potensi yang dimiliki, sebagai berikut :

Kabupaten Bone Bolango. Potensi Pertambangan di wilayah ini adalah pertambangan:

- Emas di Kecamatan Suwawa Tengah (Desa Tapadaa), Suwawa Timur (Desa Tulabolo, Sungai Mak, Motomboto dan Kayu Bulan) dan Bone Raya (Desa Tombulilato Kiri).
- Tembaga di Kecamatan Suwawa Tengah (Desa Tapadaa), Suwawa Timur (Desa Kayu Bulan, Motomboto dan Sungai Mak) dan Bone Pantai Cabang Kiri.

Potensi Energi di wilayah ini meliputi sumber energi yang belum dikelola yakni : Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berlokasi di Kecamatan Suwawa Timur; Pembangkit Listrik Tenaga Udara/Uap (PLTU) di Kecamatan Kabila Bone; dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Geothermal) di Kecamatan Suwawa Tengah dan Suwawa Selatan.

Sementara Potensi Energi yang sudah dikelola adalah: Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berlokasi di Kecamatan Suwawa Timur (Pinogu 450 unit, Tulabolo Timur 145 Unit, Tulabolo Barat 100 Unit, Poduma 71 Unit), Suwawa Selatan (Molintogupo 1 unit, Bulontala 45 unit), Suwawa Tengah (Tapadaa 71 Unit), Kabila Bone (Biluango 50 unit, Olele 50 unit) dan Tilongkabila (Tunggulo 48 unit); serta Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) berlokasi di Kecamatan Bolango Ulu (Owata 1 unit), Bolango Timur (Desa Kopi 1 unit) dan Suwawa Timur (Desa Tulabolo sebanyak 15 Unit).

Sebagian besar kebutuhan listrik di Provinsi Gorontalo dipenuhi oleh PT. PLN. Pada tahun 2023, listrik yang terjual sebesar 741.552,80 MWh. Tercatat sebanyak 350.128 pelanggan listrik di Provinsi Gorontalo Desember 2023 naik 4,63 persen dibandingkan Desember 2022.

Kabupaten Gorontalo Potensi sumber daya alam mineral di daerah ini baik logam dan non logam dapat ditemukan di setiap wilayah kecamatan, dengan potensi yang beragam. Pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat sebagian besar pengelolaannya masih dilakukan secara tradisional.

- Potensi mineral logam: Emas dengan jumlah cadangan sekitar 528.29 ton yang tersebar di Kecamatan Boliyohuto dan Tembaga dengan jumlah cadangan sekitar 3.978.390 m³ tersebar di Kecamatan Boliyohuto.
- Potensi mineral non logam meliputi: Granit (jumlah cadangan sekitar 470.000.000 m³), tersebar di Kecamatan Telaga Biru dan Batudaa Pantai; Batu Gamping (jumlah cadangan sekitar 12.414.500 m³), tersebar di Kecamatan Tibawa, Limboto, Limboto Barat, Bongomeme, Batudaa dan Batudaa Pantai; Toseki (jumlah cadangan sekitar 6.000.000 m³), tersebar

di Kecamatan Tibawa dan Boliyohuto; Felspar (jumlah cadangan sekitar 1.000.000 m³), tersebar di Kecamatan Batudaa Pantai; dan Andesit (jumlah cadangan sekitar 1.050.000 m³), tersebar di Kecamatan Batudaa Pantai Boliyohuto dan Tibawa.

- Potensi Energi sumber daya panas bumi terdapat di Kecamatan Telaga Biru dan Mootilango.

Kabupaten Gorontalo Utara, Potensi sumberdaya pertambangan logam meliputi: emas, perak, tembaga dan pasir besi. Sedangkan bahan mineral non-logam adalah; granit, slag pasir, batu, sirtu, kerikil, besi Andesit, batu Makora dan basalt. Disamping itu terdapat potensi sumberdaya air sungai yang banyak mengalir wilayah ini yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro.

Kabupaten Pohuwato, Potensi Pertambangan yang dimiliki daerah ini adalah: Emas (> 1.800.000.000 m³); Batu Granit (> 100.000.000 m³); Dasit (300.000.000 m³); Sirtu (100.000.000 m³); Andesit (10.000.000 m³); dan Zeolit 5.000.000 m³). Kesemuanya tersebar di Kecamatan Marisa, Taluditi, Paguat, Popayato dan Patilanggio.

Beberapa lokasi yang menjadi pusat penambangan emas oleh masyarakat diantaranya : Ilota Kiri, Ilota Kanan, Gunung Pani, dan Baginite, meski tergolong tradisional namun stabilitas keamanan terjaga dengan baik. Dalam hal pengolaan limbah para penambang berupaya maksimal menjaga aktivitas ini agar tidak memberi dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya.

Kabupaten Boalemo, Kabupaten Boalemo memiliki potensi untuk dikembangkan pada sektor pertambangan yang tersebar di semua wilayah kecamatan. Kawasan peruntukan pertambangan emas, perak dan tembaga terdapat di Kecamatan Mananggu, Tilamuta, Dulupi, Wonosari dan Paguyaman. Kawasan peruntukan pertambangan granit granodiorit terdapat di Kecamatan Mananggu, Tilamuta, Paguyaman, Dulupi, Wonosari dan Paguyaman Pantai, pertambangan basal di Kecamatan Botumoito dan Tilamuta, pertambangan dasit di Kecamatan Mananggu, Tilamuta, dan Dulupi, pertambangan batu gamping di Kecamatan Paguyaman Pantai, pertambangan sirtu di Kecamatan Wonosari dan pertambangan tanah liat di Kecamatan Paguyaman dan Wonosari.

Peluang Investasi disektor ini adalah pengembangan fasilitas teknologi modern bagi pertambangan logam dan non-logam karena selama ini masih diolah oleh masyarakat secara tradisional. Selain itu juga pengembang pembangkit listrik dengan memanfaatkan sungai sungai dan air terjun sebagai pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

e. Potensi Industri

Pembangunan ekonomi merupakan transformasi secara sistematis dan berkelanjutan. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui transformasi ekonomi dilakukan proses industrialisasi. Proses tersebut mencakup perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencarian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Dalam prosesnya meliputi interaksi antara perkembangan teknologi, inovasi, spesialisasi, dan perdagangan untuk meningkatkan pendapatan dan mendorong perubahan struktur ekonomi.

Sektor industri mampu mengatasi permasalahan perekonomian, dengan mengasumsikan bahwa sektor industri mampu menjadi leading sektor bagi sektor lainnya. Sehingga sektor industri dipersiapkan untuk mendorong perkembangan sektor lainnya yang terkait, baik keterkaitan kedepan (*forward linkage*), maupun keterkaitan kebelakangan (*backward linkage*). Dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada, maka Provinsi Gorontalo sangat potensial untuk mendorong sektor industri, baik dari pengolahan pertanian, dan perikanan.

Gambar 2.4

Industri Besar dan Sedang Provinsi Gorontalo tahun 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023

Pada tahun 2022, jumlah perusahaan industri besar dan sedang di Provinsi Gorontalo sebanyak 26 perusahaan. Berdasarkan kelompok industri, jumlah perusahaan yang terbanyak adalah pada kelompok industri makanan (10), yaitu sebanyak 13 perusahaan.

Beberapa potensi sektor industri di masing-masing kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo

Kabupaten Gorontalo Utara, Adapun potensi Industri di Kabupaten ini berbasis keunggulan daerah yaitu :

- Industri berbasis Ikan. Potensi bahan baku ikan ini terdapat di 11 kecamatan sepanjang garis pantai 320 km terpanjang (se-Provinsi Gorontalo) dengan laut ZEE seluas 40.000 Km². Industri pengelolaan ikan ini berupa pengeringan ikan dengan kapasitas produksi 1.394.526 kg/tahun dan pengasapan ikan sebesar 337.680 kg/tahun;
- Industri berbasis kerajinan kerang laut berada di pesisir garis pantai dan berlokasi di pulau ponelo yang bisa dikembangkan sebagai sentra kerajinan kerang;
- Industri berbasis Aren dan ijuk Aren. Potensi bahan baku pohon aren ini memiliki total luas areal tumbuh tanaman sekitar 332 Ha atau sekitar 51.792 pohon aren dengan asumsi 1 ha ditumbuhi 156 pohon. Hasil aren berupa nira diproduksi secara tradisional menjadi gula merah aren dan ijuk pohonnya dibuatkan sapu ijuk, atap ijuk dsb.;

- Industri berbasis tanaman Bambu Burik di Kecamatan Gentuma Raya, Tomilito dan Monano. Tanaman ini hanya tumbuh di Kabupaten Gorontalo Utara dan sangat potensial dicarikan investor yang memproduksi furniture; Industri berbasis kerajinan Sulaman Karawo yang dikenal dengan sulaman Kabate Gorontalo Utara.

Kota Gorontalo, Kota Gorontalo terus berkembang sebagai pusat perindustrian dan perdagangan. Industri kecil di Kota Gorontalo terbagi atas 2 (dua) kategori perusahaan industri dan industri kerajinan rumah tangga. Industri yang berkembang di Kota Gorontalo adalah industri makanan dan industri kerajinan dan pakaian jadi. Perusahaan perdagangan yang menonjol terdiri dari perusahaan terbatas, Firma (CV), Koperasi dan perorangan. Selain itu juga terdapat pedagang besar, pedagang menengah dan pedagang kecil/mikro.

Kabupaten Gorontalo. Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Gorontalo berdasarkan informasi bahwa potensi di sektor industri masih bersifat menyebar (kegiatan *home industry*). Berdasarkan jenisnya, unit usaha industri di Kabupaten Gorontalo terbagi atas : Industri Hasil Pertanian; Industri Aneka; Industri Logam; dan Industri Perikanan.

Beberapa industri yang sudah berkembang di antaranya adalah

- Pabrik Tepung Kelapa dan Nata de Coco. Sektor Perkebunan kelapa menjadi prospek andalan untuk pengembangan produksi pabrik tepung kelapa dan *nata de coco* di Kabupaten Gorontalo. Industri yang bahan bakunya ditunjang dari hasil pertanian rakyat dari seluruh wilayah Kabupaten serta beberapa wilayah di sekitarnya. Pabrik tepung kelapa Tri Jaya Tangguh terletak di kawasan Boliyohuto. Sejak awal berproduksi pabrik ini telah meluncurkan ekspor tepung kelapa ke Rusia sebanyak 40 feet.
- Pabrik Gula Tolangohula berdiri sejak tahun 1990 pada areal seluas 15.700 ha dengan lahan perkebunan tebu mencapai sekitar 8.000 ha. Pabrik Gula Tolangohula pada setiap tahun memproduksi gula sebesar 35.000 ton sampai dengan 39.000 ton. Besaran produksi tersebut memenuhi kebutuhan gula bagi masyarakat se Provinsi Gorontalo sejumlah 12.000 Ton, sedangkan lainnya dipasarkan ke luar daerah. Pabrik ini mengangkat 1.800 karyawan ditambah 4.000 orang tenaga pekerja lepas yang dikontrak setiap musim produksi.
- Pabrik Rumput Laut. Sebagian besar produksi rumput laut yang dikelola melalui kelompok-kelompok usaha masyarakat ataupun secara perorangan ditampung pada pabrik pengolahan. Kapasitas yang dihasilkan pabrik rumput laut mencapai 2 ton per hari dan dipasarkan ke berbagai wilayah, terutama ke Jakarta, Malaysia dan Korea. Pabrik ini juga menampung hasil rumput laut dari beberapa Kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo, seperti Gorontalo Utara, Boalemo dan juga Pohuwato.

f. Potensi Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai sektor pendorong ekonomi daerah. Pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian. Sektor ini merupakan salah satu jenis

industri yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan pekerjaan, standar hidup serta dapat menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya.

Majunya industri pariwisata suatu daerah sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang datang, karena itu harus ditunjang dengan peningkatan pemanfaatan Daerah Tujuan Wisata (DTW) sehingga industri pariwisata akan berkembang dengan baik.

Gambar 2.5

Tingkat penghunian kamar hotel di Provinsi Gorontalo tahun 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023

Tingkat penghunian kamar hotel berbintang tertinggi terjadi di bulan September 2023 yaitu 56,45 persen, sedangkan TPK hotel non berbintang terjadi pada bulan Juni 2023 yaitu 23,75 persen. Sedangkan jumlah rumah makan pada tahun 2021 sebanyak 298 unit rumah makan. Rumah makan terbanyak terdapat di wilayah Kabupaten Pohuwato dan kota Gorontalo yaitu sebanyak 87 unit.

Berbagai Potensi Pariwisata di wilayah Provinsi Gorontalo ini, diantaranya:

1. **Wisata Pantai :** Obyek wisata pantai yang memiliki prospek sangat menjanjikan adalah Wisata Pantai Bolihutuo (Kabupaten Boalemo) dan Taman Laut Olele (di Kabupaten Bone Bolango). Destinasi wisata lainnya adalah Pantai Karang Putih, Pantai Diyonurno, Pantai Pulau Popaya-Raja, Pantai Minanga, Pantai Molotabu, Pantai Bumbulan, Pantai Pohon Cinta, Pantai Langala, Pantai Mananggu, Pantai Batu Buaya, Pantai Kurenai, Pantai Dunu dan Pantai Ratu Tenilo.
2. **Wisata Laut dan Pulau :** Obyek wisata Pulo Cinta (Kabupaten Boalemo), Laut Torosiaje (Kabupaten Pohuwato) dan obyek wisata Pulau Saronde (Kabupaten Gorontalo Utara) adalah salah satu dari beberapa destinasi wisata yang sangat indah. Destinasi wisata lainnya meliputi: Objek Wisata Hiu Paus (*whale shark*), Pulau Bogisa, Pulau Ponelo, Pulau Oile, Pulau Bitila, Pulau Olinggobe, Pulau Asiangi, Pulau Monduli dan Pulau Mohinggito.

3. *Wisata Alam dan Pegunungan* : Obyek wisata Hutan Pinus Dulamayo, Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dan Danau Limboto merupakan destinasi wisata yang sangat mengagumkan. Disamping itu juga Goa-Goa, Air terjun Taludaa, Air terjun Ayuhulalo, Air Terjun Talamuta, Cagar Alam Panua di Kelurahan Libuo, Cagar Alam Tangole, Kolam Renang Potanga, Sumber Mata Air Panas Alami Pentadio dan Lombongo serta Air Terjun Ayuhulalo.
4. *Wisata Adat dan Situs Sejarah* : Obyek wisata yang perlu dikunjungi adalah Objek Wisata Religi Bubuhu, Tumbila Tohe; Rumah Adat Dulohupa; Rumah Adat Bandayo Pomboide, Benteng Oranye, Benteng Otanaha, Pentadio Resort, Masjid Baiturrahim, Makam kerajaan Ju Panggola, Batu berbentuk tapak kaki, Tangga 2000 dan Jejak Kaki Lahilote, Torosiaje (Desa Terapung Suku Bajo), Pendaratan Soekarno dan Pusat Kerawang.
5. *Wisata Kuliner* : Binte Biluhuta merupakan makanan khas di Gorontalo, makanan khas ini terbuat dari Jagung Gorontalo terkenal sebagai daerah penghasil jagung yang subur. Oleh masyarakat pribumi, hasil bumi tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan kuliner khas Gorontalo, yaitu 'Binte Biluhuta' yang berasal dari bahasa Gorontalo. Binte Biluhuta berbumbu rempah khas Gorontalo dan makanan ini paling enak disantap saat masih panas dan makanan ini bisa Anda dapatkan di rumah makan Gorontalo. Aneka kuliner khas Gorontalo lainnya yakni ayam iloni, ilabulo, sate tuna Gorontalo, sayur putungo, duduli, tiliaya, dan bilenthango yang tidak kalah lezat.

Potensi Pariwisata yang tersebar di Kabupaten Kota di Provinsi Gorontalo sangat beragam dan memiliki keunikan dan karakteristiknya masing-masing.

Kabupaten Bone Bolango. Potensi Pariwisata di Kabupaten ini cukup besar dan dapat dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata. Berdasarkan analisis dan pengamatan di lapangan daerah ini memiliki potensi pengembangan wisata pantai dan wisata taman bawah laut. Pengembangan wisata lainnya yang belum dikembangkan adalah wisata alam jenis *outbond* (*hiking, tracking, climbing* dan *rafting*). Garis pantai Bonebol ada di daerah sepanjang pesisir perairan pantai selatan (Teluk Tomini) dan wisata bawah laut yang terletak di Olele. Jenis Obyek wisata lainnya adalah Wisata alam Lombongo, Wisata Budaya Makam Raja Atinggola, Benteng Ulantha.

Kota Gorontalo. Beberapa objek wisata yang telah dikembangkan di Kota Gorontalo diantaranya adalah objek wisata alam dan objek wisata budaya sekaligus perpaduan antara keduanya. Salah satu objek wisata yang juga menjadi situs bersejarah di Gorontalo terletak di Kota Gorontalo yaitu Benteng Otanaha. Kota juga telah memiliki penunjang pariwisata berupa hotel berbintang, cafe, restoran dan biro-biro perjalanan.

Kabupaten Boalemo. Obyek wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik adalah obyek wisata Pantai Boalemo Indah, pemandian air panas Dulangea, Taman Laut Pulau Monduli di Kecamatan Botumoito, Pulau Cinta, Pulau Pasir Putih, Pulau Mohupomba, wisata alam air terjun Ayuhulalo, air terjun Dulamayo dan air terjun Tenilo di Kecamatan Talamuta, Taman Polohungo, air terjun Tangga Barito di Kecamatan Dulupi, Taman laut Pulau Limba, teluk Bubaa di

Kecamatan Paguyaman Pantai dan Ekowisata Sungai Paguyaman, Sungai Moliliulo, dan Hutan Nantu di Kecamatan Wonosari.

Kabupaten Gorontalo. Potensi Pariwisata di Kabupaten Gorontalo memiliki daya tarik dan keunikan masing-masing. Obyek wisata yang dapat dikembangkan meliputi : Rumah Adat/Banthayo Poboide; Danau Limboto; Suaka Margasatwa Nantu; Pentadio Resort; Pakaya Tower/Eks Menara Keagungan; dan Pemandian Taluhu Barakati, Desa Wisata Religi Bubohu

Kabupaten Gorontalo Utara. Potensi wisata di Kabupaten Gorut adalah sebagai berikut : Wisata Pantai yang menjadi unggulan yaitu Pulau Saronde, Pantai Minanga, Pantai Mokonow, Pantai Toliteyuhu dan masih terdapat 52 pulau yang berpotensi untuk dijadikan wisata pantai meskipun 50 pulau di antaranya tidak berpenghuni. Pulau yang berpenghuni adalah Pulau Ponelo dan Pulau Dudepo; Wisata Sejarah yaitu Benteng Oranye/*Orange Fortress*, Benteng Emas yang dibangun bangsa Portugis sebagai benteng pertahanan tahun 1630; dan Kawasan pariwisata Kota Jin sebagai situs Geopark di Kec. Atinggola.

Kabupaten Pohuwato. Potensi Pariwisata yang ada di wilayah ini adalah Air Terjun Lemito Indah yang terkenal dengan panorama alam air terjun dengan hawa sejuk di pegunungan, lokasinya berada di Desa Lomuli, Kecamatan Lemito; Pulau Bitila dan Pulau Lahe terkenal dengan pesona alam dan panorama bawah laut yang berlokasi di Kecamatan Marisa dan Kecamatan Paguat; Tanjung Bajo, tempat ini sangat cocok untuk menyalurkan hobi menyelam dan memancing berlokasi di Kecamatan Paguat; Pantai Indah Bumbulan dikenal dengan panorama pantai. Pantai ini biasanya digunakan untuk berselancar, perahu tradisional dan terdapat *cottage-cottage* di sekitar lokasi pariwisata ini. Lokasi pantai ini berada di Kelurahan Libuo dan Kecamatan Paguat; Cagar Alam Panua yang merupakan habitat Burung Maleo (Maskot Sulawesi). Lokasi cagar alam ini berada di sejumlah Kecamatan termasuk di ibu kota Marisa; dan Kampung Torosiaje yang dikenal dengan perkampungan Suku Bajo yang mengapung di atas air, berlokasi di Kecamatan Popayato (sekitar 88 km dari kota Marisa).

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

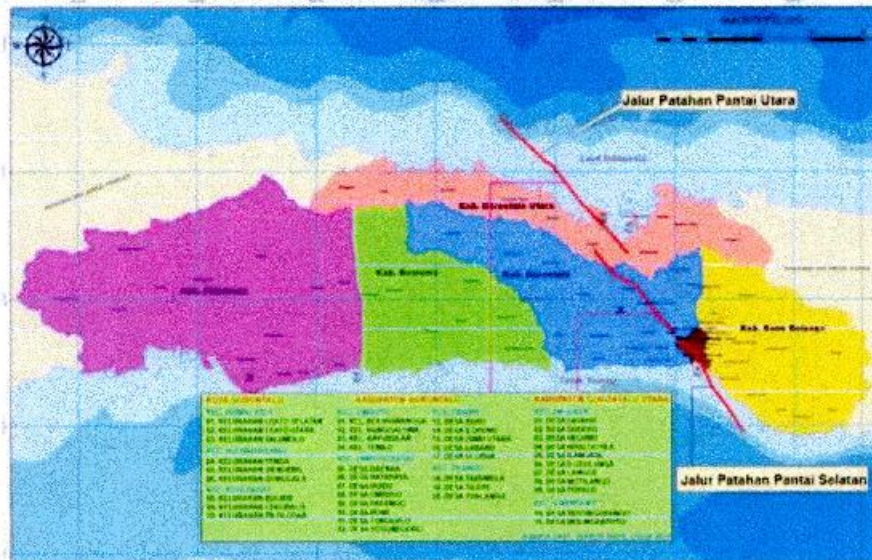
a. Kawasan Rawan Gempa

Gempa bumi adalah peristiwa alam karena proses tektonik maupun vulkanik. Gempa bumi tektonik disebabkan dari pergerakan tektonik lempeng. Wilayah Provinsi Gorontalo dan sekitarnya terletak pada jalur subdaksi lempeng, yaitu Lempeng Indo – Australia yang menyusup di bawah Lempeng Eurasia. Dengan demikian wilayah Gorontalo merupakan wilayah yang rawan gempa bumi tektonik. Potensi bahaya gempa di Provinsi Gorontalo berada dalam kriteria potensi sedang. Hampir seluruh wilayah di Provinsi Gorontalo merupakan kawasan rawan gempa karena kondisi Geologi Gorontalo yang merupakan jenis batuan tua yang memiliki banyak patahan. Namun secara umum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- Wilayah sebelah Utara merupakan kawasan rawan gempa yang bersifat merusak.
- Wilayah sebelah selatan merupakan kawasan rawan gempa yang tidak terlalu merusak.

Wilayah Gorontalo juga dilalui oleh 2 (dua) patahan lempeng aktif yang berpotensi menimbulkan gempa. keberadaan patahan/sesar Gorontalo terbagi menjadi 2 segmen. Pertama, segmen jalur patahan pantai utara yang mengiris wilayah Gorut hingga ke Laut Sulawesi yang merupakan batas sisi utara daerah ini. Segmen yang kedua, merupakan jalur patahan pantai selatan yang membentang dari arah tenggara di Teluk Tomini ke arah barat laut, memotong Kota Gorontalo hingga sisi timur Kabupaten Gorontalo, termasuk di Danau Limboto. Di daerah patahan ini terdapat potensi terjadinya tektonik endogen dalam bentuk bergesernya kerak/lapisan bumi secara vertikal. Tatanan tektonik geologi yang kompleks ini menjadikan sebagian besar Provinsi Gorontalo dikategorikan sebagai kawasan rawan bencana gempa bumi menengah dengan prakiraan intensitas guncangan berkisar antara VII-VIII (skala MMI/Modified Mercally Intensity).

Gambar 2.6
Peta Rawan Bencana Gempa Bumi



Sumber : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo, 2020

Berdasarkan analisis peta geologi lembar Gorontalo, sesar/patahan Gorontalo merupakan bagian zona pertemuan antara zona eurasia dan zona pasifik. Sesar Gorontalo tersebut menyerupai garis diagonal tunggal mulai dari Leato sampai Kwandang, yang berpotensi terjadinya gempa tektonik endogen yang menyebabkan patahan. Di daerah patahan ini terdapat potensi terjadinya tektonik endogen dalam bentuk bergesernya kerak/lapisan bumi secara vertikal.

Gambar 2.7
Peta Risiko Bencana Gempa Bumi di Provinsi Gorontalo



Sumber: Revisi RTRW Provinsi Gorontalo 2010-2030, KLHS RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045

b. Kawasan Rawan Tanah Longsor

Beberapa kawasan yang sering dilanda dan rawan longsor adalah Kota Gorontalo berada pada Kecamatan Kota Selatan, Kecamatan Kota Timur dan Kota Barat. Kabupaten Gorontalo berada pada Kecamatan Tibawa dan Kecamatan Tolangohula. Kabupaten Boalemo terdapat di Kecamatan

Tilamuta, Botumoito dan Mootilango. Di Kabupaten Pohuwato yaitu di Kecamatan Buntulia (lokasi tambang). Sedangkan di Kabupaten Bone Bolango kawasan rawan longsor berada pada Kecamatan Suwawa, Bonepantai, Botupingge, Boneraya dan Bulawa. Sedangkan untuk Kabupaten Gorontalo Utara berada di kecamatan Kwandang, Atinggola, Sumalata dan Tolinggula.

Gambar 2.8

Peta Risiko Bencana Tanah Longsor di Provinsi Gorontalo



Sumber : Peta RTRWP Gorontalo 2010-2030

c. Kawasan Rawan Gelombang Pasang (Tsunami)

Provinsi Gorontalo merupakan wilayah yang memiliki resiko tinggi terhadap ancaman tsunami karena memiliki panjang garis pantai $\pm 655,8$ km dan terdapat jalur patahan. Wilayah-wilayah yang memiliki resiko tinggi terhadap tsunami di kabupaten Boalemo adalah Kecamatan Botumoito, Manangu, Paguyaman Pantai dan Tilamuta. Seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo Utara beresiko tinggi terhadap tsunami. Wilayah Kota Gorontalo yang beresiko tinggi terhadap tsunami adalah Kecamatan Dumbo Raya dan wilayah Kabupaten Pohuwato adalah Kecamatan Marisa, Kecamatan Paguat dan Kecamatan Randangan.

Gambar 2.9
Peta Kawasan Rawan Tsunami



Sumber : Peta RTRWP Gorontalo 2010-2030

d. Kawasan Rawan Banjir

Provinsi Gorontalo potensial untuk terjadi banjir karena bentuk topografi lahannya yang berbentuk seperti mangkuk. Kawasan Rawan Banjir di Provinsi Gorontalo berada pada semua kabupaten dan kota yang ada, yaitu Kota Gorontalo terdapat pada Kecamatan Kota Selatan, Kota Timur, Kota Utara dan Kota Barat. Pada kabupaten Gorontalo terdapat di Kecamatan Limboto, Limboto Barat, Telaga, Telaga Jaya, Tibawa, Tolangohula, Bongomeme, Pulubala dan Boliyohuto. Kabupaten Boalemo terdapat di Kecamatan Tilamuta, Botumoito dan Mootilango. Pada Kabupaten Pohuwato berada di Kecamatan Randangan, Marisa, Lemito dan Popayato. Untuk Kabupaten Bone Bolango terdapat di Kecamatan Suwawa, Kabila, Botupingge dan Tilongkabila sedangkan di Kabupaten Gorontalo Utara terdapat di Kecamatan Kwandang, Anggrek dan Sumalata.

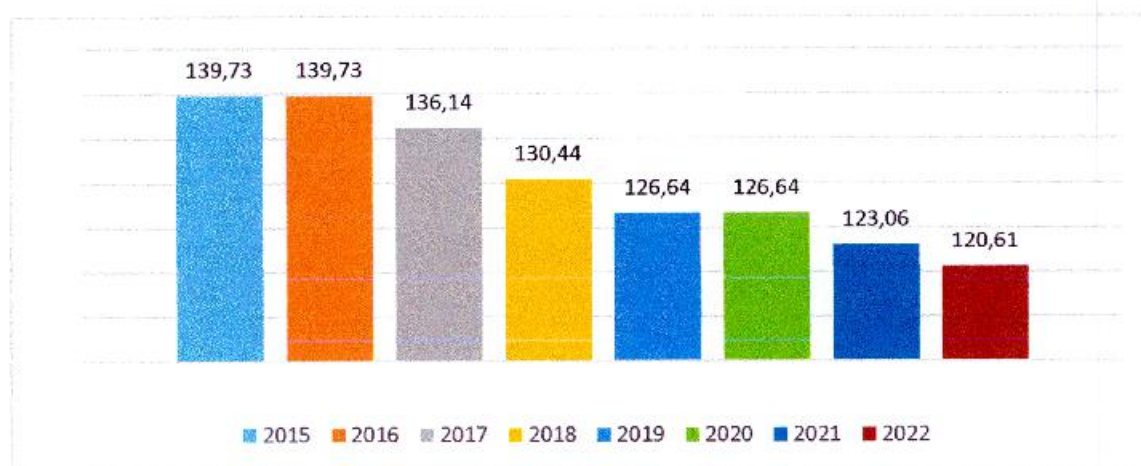
Gambar 2.10
Peta Kawasan Rawan Banjir



Sumber : Peta RTRWP Gorontalo 2010-2030

Secara Nasional, Provinsi Gorontalo merupakan wilayah dengan potensi bencana sedang berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia yang diterbitkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Berdasarkan data yang dihimpun dari DIBI BNPB data dari BPBD selama periode 10 tahun terakhir provinsi Gorontalo, dari tahun 2018-2022, telah mengalami sebanyak 169 kejadian bencana. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2021 Provinsi Gorontalo memiliki indeks risiko sedang dengan nilai indeks 120,61 (sedang) dan memiliki ancaman bencana seperti Gempa bumi, banjir, tsunami, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gelombang ekstrim dan abrasi.

Grafik 2.1
Nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi Gorontalo tahun 2015-2022



Sumber: Buku IRBI 2022

2.1.1.4 Aspek Demografi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, hasil proyeksi penduduk tahun 2023 mencapai 1.213.180 jiwa, meningkat dibanding Tahun 2022 sebesar 1.192.737 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Gorontalo Tahun 2023 sebesar 1,71 persen. Wilayah dengan laju pertumbuhan tertinggi yaitu

Kabupaten Gorontalo Utara dengan laju pertumbuhan sebesar 1,64 persen. Berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2022, *Total Fertility Rate* (TFR) di Provinsi Gorontalo sebesar 2,3.

Grafik 2. 2
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2023



Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2023

Tabel 2.10
Laju Pertumbuhan Penduduk Penduduk Provinsi Gorontalo

Kode Wilayah	Wilayah	Laju Pertumbuhan Penduduk	
		2010-2020	2020-2022
75.01	Kabupaten Boalemo	1,18	1,04
75.01	Kabupaten Gorontalo	0,96	0,83
75.03	Kabupaten Pohuwato	1,25	1,11
75.04	Kabupaten Bone Bolango	1,34	1,20
75.05	Kabupaten Gorontalo Utara	1,78	1,64
75.71	Kota Gorontalo	0,95	0,81
75	Provinsi Gorontalo	1,16	1,02

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Informasi mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan yang berwawasan gender. Dilihat dari struktur penduduk menurut jenis kelamin, rasio jenis kelamin/seks ratio (SR) di Provinsi Gorontalo sejak tahun 2010 hingga tahun 2020 menunjukkan jumlah penduduk perempuan relatif seimbang dengan jumlah penduduk laki-laki. Artinya, tidak terdapat selisih jumlah yang signifikan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Hal ini dapat dilihat dari nilai rasio jenis kelamin yang selalu bernilai mendekati 100. Pada tahun 2031 rasio jenis kelamin Provinsi Gorontalo sebesar 101,73 yang berarti bahwa terdapat 101 hingga 102 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

Sebaran penduduk antar wilayah di Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2022 masih belum merata, dimana Kabupaten Gorontalo masih menjadi kabupaten yang jumlah penduduknya tertinggi,

sebesar 33,50% dari jumlah keseluruhan penduduk Provinsi, sedangkan Kabupaten Gorontalo Utara merupakan wilayah yang terendah dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Gorontalo, hanya sebesar 10,71% dari jumlah penduduk Provinsi Gorontalo.

Wilayah kabupaten/kota yang terpadat penduduknya adalah Kota Gorontalo. Sekitar 18 persen, Penduduk Provinsi Gorontalo tinggal di Kota Gorontalo yang merupakan wilayah Ibu Kota Provinsi. Dengan luas wilayah yang hanya sebesar 79,59 Km², memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, dengan kepadatan penduduk mencapai 2.510 jiwa/km². Wilayah terpadat kedua di Provinsi Gorontalo adalah Kabupaten Gorontalo dengan kepadatan penduduk mencapai 226 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2021. Selanjutnya disusul Kabupaten Boalemo 97 jiwa/km², Kabupaten Bone Bolango 83 jiwa/km², dan Kabupaten Gorontalo Utara 75 jiwa/km². Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk terkecil adalah Kabupaten Pohuwato, yaitu hanya sekitar 35 jiwa/km². Rata-rata kepadatan penduduk Provinsi Gorontalo tahun 2022 sebesar 105 jiwa/km².

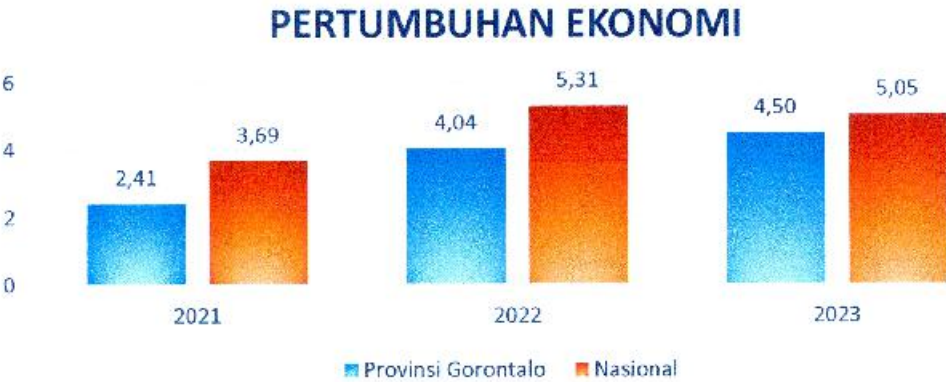
2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kumulatif Provinsi Gorontalo Tahun 2023 tumbuh sebesar 4,50 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2022 sebesar 4,04 persen. Ekonomi Gorontalo tahun 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2023 mencapai Rp. 51.374,40 miliar, sedangkan atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 31.647,60 miliar. Pertumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan usaha. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan kategori yang mengalami pertumbuhan tertinggi mencapai 9,95 persen; diikuti Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6,29 persen; serta Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,18 persen.

Grafik 2.3
Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Gorontalo Tahun 2021-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional dan Gorontalo, 2024

Struktur PDRB Gorontalo tahun 2023 masih didominasi oleh tiga lapangan usaha yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 37,75 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,78 persen, serta Konstruksi sebesar 11,13 persen.

Sedangkan kontribusi sektor Industri Pengolahan hanya berkontribusi sebesar 4,42 persen mengalami penurunan dibanding tahun 2022 sebesar 4,56 persen.

Laju pertumbuhan tertinggi bersumber dari kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan pertumbuhan mencapai 9,95 persen, diikuti Pengadaan listrik dan gas sebesar 6,29 persen, serta Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,18 persen.

Tabel 2.11
PDRB Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2020-2022 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha		PDRB ADHB		PDRB ADHK		Laju Pertumbuhan 2023	Distribusi PDRB 2023
		2022*	2023**	2022*	2023**		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18.073,58	19.392,62	10.907,95	11.369,43	4,23	37,75
B	Pertambangan dan Penggalian	519,28	562,13	353,96	375,69	6,14	1,09
C	Industri Pengolahan	2.169,61	2.269,47	1.331,47	1.335,46	0,30	4,42
D	Pengadaan Listrik dan Gas	23,96	25,65	27,24	28,95	6,29	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	27,76	29,28	18,49	19,21	3,91	0,06
F	Konstruksi	5.189,74	5.717,04	3.274,17	3.464,07	5,80	11,13
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.221,61	7.080,63	3.757,84	4.131,62	9,95	13,78
H	Transportasi dan Pergudangan	2.668,65	3.040,11	1.693,94	1.798,58	6,18	5,92
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.076,22	1.153,82	720,57	760,24	5,51	2,25
J	Informasi dan Komunikasi	1.286,08	1.370	1.095,92	1.140,60	4,08	2,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.192,18	2.070,44	1.302,73	1.206,46	-7,39	4,03
L	Real Estate	820,71	820,26	566,46	557,15	-1,64	1,60
M,N	Jasa Perusahaan	42,80	42,33	27,66	26,51	-4,16	0,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	2.802,94	2.975,08	2.165,30	2.237,22	3,32	5,79
P	Jasa Pendidikan	2.125,46	2.249,90	1.415,29	1.474,89	4,21	4,38
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.717,14	1.910,14	1.176,97	1.246,85	5,94	3,72
R,S,T,U	Jasa lainnya	616,29	665,35	448,33	474,67	5,67	1,30
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		47.569,65	51.374,40	30.284,29	31.647,60	4,50	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2024

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Dari sisi pengeluaran masih didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mencakup lebih dari separuh PDRB Gorontalo yaitu 61,77 persen. Komponen lain yang memiliki peranan besar terhadap PDRB yaitu komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 27,66 persen. Sedangkan aktivitas ekspor barang dan jasa berkontribusi sebesar 27,02 persen.

Jika dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo tahun 2023 komponen pengeluaran konsumsi Rumah Tangga merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,63 persen, dan komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 1,63 persen.

Tabel 2.12
PDRB Menurut Pengeluaran
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2020-2022 (Milyar Rupiah)

Komponen		PDRB ADHB		PDRB ADHK		Laju Pertumbuhan 2023**	Distribusi PDRB 2023**
		2022*	2023**	2022*	2023**		
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	29.262,80	31.733,41	18.598,13	19.394,13	4,28	61,77
2	Pengeluaran Konsumsi LNPR	349,11	381,49	231,69	243,32	5,02	0,74
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8903,58	9.208,25	5.418,28	5.446,93	0,53	17,92

4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	13.225,57	14.207,97	8.874,28	9.188,43	3,54	27,66
5	Perubahan Inventori	685,41	738,72	327,07	338,25	-	1,44
6	Ekspor Barang dan Jasa	12.794,76	13.879,90	7.261,31	7.755,53	6,81	27,02
7	Impor Barang dan Jasa	17.651,58	18.775,34	10.426,46	10.718,98	2,81	36,55
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		47.569,65	51.374,40	30.284,29	31.647,60	4,50	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2024

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

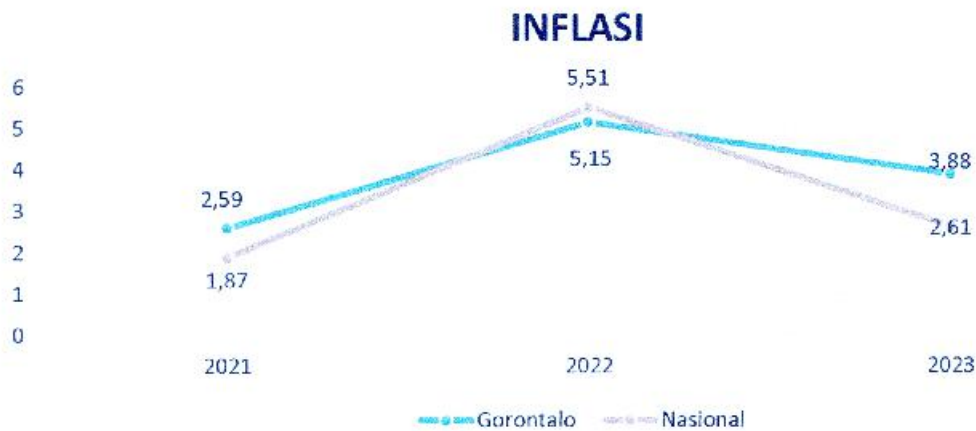
Aktivitas ekonomi Gorontalo menunjukkan kinerja positif memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan peningkatan PDRB perkapita Provinsi Gorontalo. PDRB perkapita Provinsi Gorontalo tahun 2023 sebesar Rp. 42,35 juta atau US\$ 2.779,11 meningkat dibanding tahun 2022 sebesar Rp. 39,89 juta. Namun demikian, hasil perhitungan PDRB perkapita tidak dapat mengukur tingkat kesejahteraan penduduk secara utuh, karena belum menggambarkan pemerataan pendapatan dan pola pengeluaran penduduk yang beragam. PDRB perkapita hanya menunjukkan rata-rata tingkat pendapatan suatu masyarakat. Upaya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dilaksanakan dalam mewujudkan prioritas pembangunan melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor strategis dan potensial, penguatan UMKM dan kapasitas SDM tenaga kerja.

b. Laju Inflasi

Inflasi merupakan tingkat kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu, yang diukur berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) khususnya di wilayah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Laju inflasi tahun kalender Provinsi Gorontalo yang dihitung di wilayah Kota Gorontalo pada Desember 2023 (y on y) sebesar 3,88 persen, turun dibandingkan kondisi Desember 2022 (y on y) sebesar 5,15 persen.

Grafik 2.4

Inflasi Nasional dan Provinsi Gorontalo, Tahun 2021-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2024

Inflasi Kota Gorontalo lebih tinggi dari Nasional, meskipun demikian Inflasi Provinsi Gorontalo masih cukup terkendali. Provinsi Gorontalo memperoleh penghargaan ditingkat pusat, atas keberhasilannya menekan inflasi triwulan I Tahun 2023, sehingga mendapatkan insentif fiskal sebesar 8,98 Miliar Rupiah.

Kenaikan inflasi Kota Gorontalo pada Desember 2023 terjadi karena adanya kenaikan indeks pada 10 kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks tertinggi yaitu pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 8,37 persen. Komoditi tertinggi penyumbang inflasi yaitu dari Cabai rawit sebesar 1,32 persen dan Beras 0,85 persen.

Dalam hal pengendalian inflasi, beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo diantaranya:

1. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi (High Level Meeting) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bersama Bank Indonesia, KPw Bank Indonesia, Satgas Pangan, Bulog, dan beberapa instansi terkait;
2. Germas Batari (Gerakan Masyarakat Batanam Rica Sandiri), melalui Dinas Pangan Provinsi Gorontalo telah menyalurkan bibit cabai ke kantor-kantor, sekolah, pesantren, kelompok Wanita tani, dan lainnya sebanyak 39.816 bibit;
3. Program Bazar Pangan Murah oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Operasi Pasar Murah yang dilaksanakan oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo sebanyak 5 kali;
4. Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah Bersubsidi di Kabupaten/Kota sebanyak 29 kali dengan mengcover 21.077 KPM
5. Penyaluran Bahan Pangan Beras oleh Perum Bulog Gorontalo sebanyak 1.307.890 Kg
6. Penjualan Beras SPHP kepada Masyarakat sebanyak 461.880 Kg
7. Penyaluran Coolbox dan Motorcoolbox Dinas Perikanan sebanyak 42 unit;

8. Memanfaatkan peran bulog untuk membantu pengendalian harga terutama beras dan minyak goreng dan disiapkan 4 ton daging sapi untuk wilayah tertentu jelang HBKN Nataru
9. Pelaksanaan Gelar Pasar Murah Menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru 2024 untuk komoditi Cabai Rawit dan Tomat di Pasar Sentral, Kota Gorontalo. Cabai Rawit dengan harga Rp.15.000 (harga pasar Rp.140.000) 3.150 Kg dan Tomat dengan harga Rp.5000 (harga pasar Rp.30.000) sebanyak 2.016 Kg
10. Sidak BBM dan LPG 3 kg di SPBU dan Pangkalan LPG 3 kg yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama TNI/POLRI dan Pertamina Gorontalo.
11. Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Melalui Program Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G) sebanyak 10.000 KPM
12. Penyediaan layanan angkutan perintis kepada daerah – daerah yang belum terlayani angkutan umum ke daerah sentra produksi

Beberapa upaya lainnya juga dilakukan dalam hal pengendalian inflasi diantaranya :

- Melakukan Kerjasama antar daerah (KAD) Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait pengendalian inflasi dan akan ditindaklanjuti penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan OPD Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan, Dinas Perhubungan terkait komoditi beras, sapi dan bawang merah.
- Melanjutkan pemanfaatan Dana Insentif Fiskal untuk intervensi inflasi
- Melakukan Pemantauan Harga
- Melakukan stabilisasi harga melalui Gerakan Pangan Murah, Pasar Murah dan Operasi Pasar Beras bersama Bulog

c. PDRB perkapita

PDRB Perkapita merupakan indikator yang menggambarkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara makro yang diukur berdasarkan indikator pendapatan / percapita income. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan bertambah baik. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk, maka pendapatan regional sama besar dengan PDRB perkapita. Namun demikian peningkatan PDRB perkapita belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Gorontalo secara umum, karena PDRB perkapita yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku yang masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, PDRB Perkapita Tahun 2023 mencapai Rp. 42,35 Juta atau senilai dengan 2.779,11 US\$. PDRB Perkapita meningkat 6,16 % dibanding tahun 2021.

Tabel 2.13

Nilai PDRB Perkapita ADHB Provinsi Gorontalo, Tahun 2021-2023

Uraian	2021	2022	2023
--------	------	------	------

Nilai (Rupiah)	37.170.549,65	39.886.776,66	42.346..820
Nilai (US\$)	2.597,75	2.686,36	2.779,11
Persentase kenaikan	4,14%	7,31%	6,16%

Sumber data BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2023

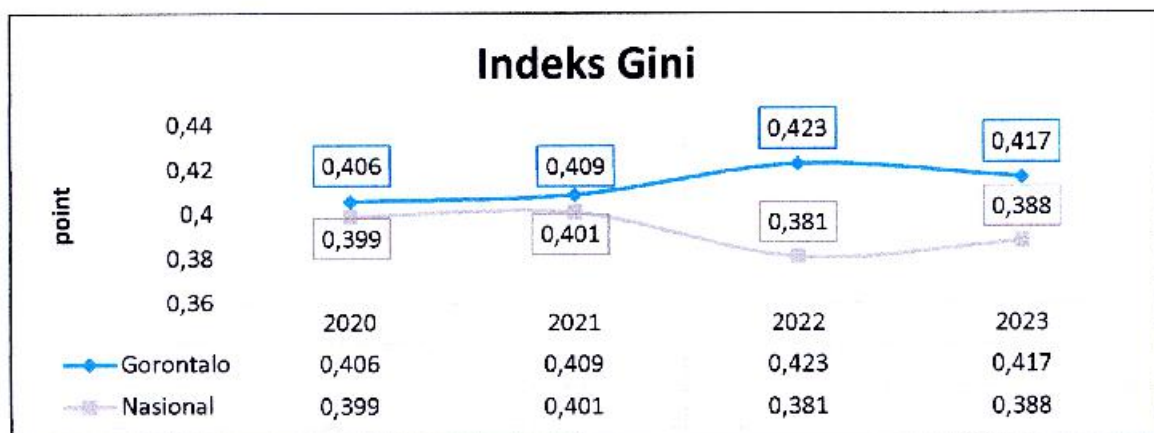
d. Indeks Gini

Indeks Gini (Ratio Gini) merupakan salah satu ukuran untuk mengukur ketimpangan pendapatan (*income disparity*) secara menyeluruh disuatu wilayah. Ukuran ketimpangan agregat dalam indeks gini berada dalam kisaran antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Semakin besar nilai indeks tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan yang tidak merata disetiap kelompok masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo ketimpangan pendapatan yang diukur Indeks Gini tahun 2023 berada pada angka 0,417 (Maret 2023), turun 0,006 point dibanding tahun 2022 pada posisi 0,423 (September 2022) dan 0,418 (Maret 2022). Indeks Gini atau rasio gini Provinsi Gorontalo mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif dan masih berada pada kategori “ketimpangan sedang” atau moderat.

Menurut daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 sebesar 0,403. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan sebesar 0,003 poin dibanding September 2022 yang sebesar 0,406. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2022, terjadi penurunan sebesar 0,006 poin dari Gini Ratio sebesar 0,409. Untuk daerah perdesaan, Gini Ratio pada Maret 2023 sebesar 0,403, meningkat 0,008 poin dibandingkan Maret 2022 dan September 2022. Nilai Gini Ratio pada Maret 2023 di daerah perdesaan sama dengan Gini Ratio di wilayah perkotaan, menunjukkan pemerataan yang sama antara wilayah di perdesaan dan wilayah perkotaan.

Grafik 2.5

Perkembangan Gini Ratio Provinsi Gorontalo 2020 - 2023



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik, 2023

Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu tingkat ketimpangan

tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika nilainya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika berada di atas 17 persen.

Pada Maret 2023 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di perkotaan sebesar 16,75 persen dari total konsumsi penduduk perkotaan Gorontalo. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan share konsumsi pada kelompok ini dibandingkan September 2022. Sementara persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di perdesaan tercatat sebesar 16,64 persen dari total konsumsi penduduk perdesaan Gorontalo. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan share konsumsi pada kelompok ini dibandingkan September 2022. Menurut kriteria Bank Dunia baik daerah perkotaan maupun daerah perdesaan termasuk kategori ketimpangan sedang. Namun, kondisi ketimpangan di perkotaan sedikit lebih baik dibandingkan di perdesaan.

Perubahan tingkat ketimpangan penduduk sangat dipengaruhi oleh besarnya variasi perubahan pengeluaran antar kelompok penduduk. Apabila perubahan pengeluaran penduduk kelompok bawah lebih cepat dibandingkan dengan penduduk kelompok atas maka ketimpangan pengeluaran akan membaik. Beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pengeluaran selama periode September 2022-Maret 2023, diantaranya yaitu Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), tercatat bahwa rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Gorontalo periode September 2022-Maret 2023 mengalami penurunan 1,31 persen. Penduduk kelompok 20 persen teratas mengalami penurunan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang paling tinggi dibandingkan kelompok lainnya, yaitu mencapai 1,91 persen poin. Adapun penurunan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan pada kelompok 40 persen menengah sebesar 1,31 persen poin dan kelompok 40 persen terbawah mengalami peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan sebesar 1,00 persen.

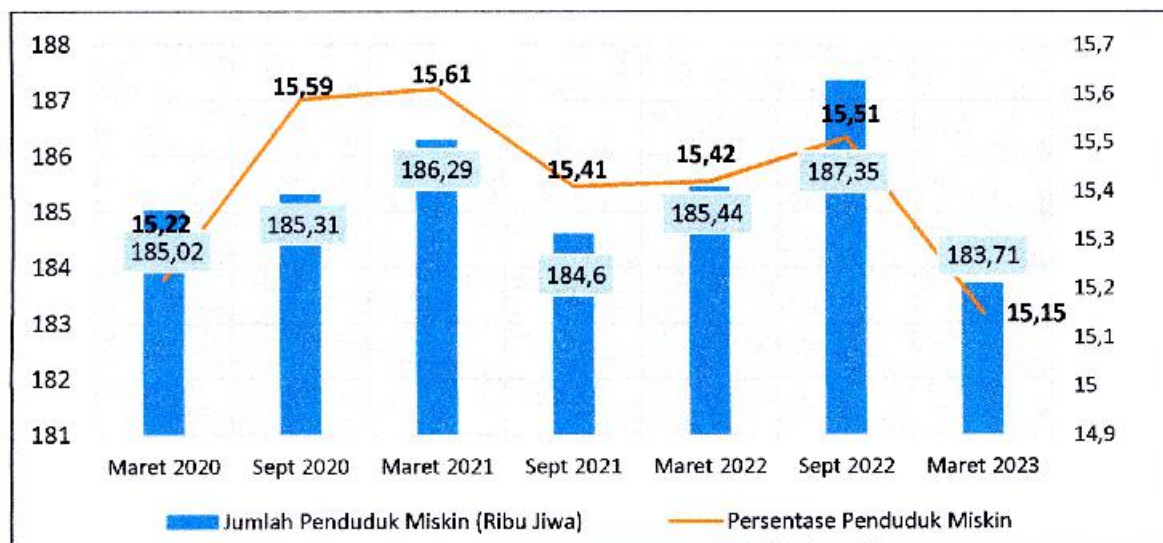
e. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan keadaan ketidakmampuan seseorang secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Konsep tersebut mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* dari *The World Bank*. Seseorang dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Kemiskinan Provinsi Gorontalo tahun 2023 sebesar 15,15 persen (Maret 2023), turun 0,36 persen poin dibandingkan September Tahun 2022 sebesar 15,51 persen, dan menurun 0,27 persen terhadap maret 2022 sebesar 15,42 persen. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 183,71 ribu orang, turun 3,64 ribu orang terhadap September 2022 dan turun 1,73 ribu orang terhadap Maret 2022.

Grafik 2.6

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo, 2020-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, 2023

Persentase penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 4,47 persen, menurun 0,02 persen poin dari kondisi September 2022 yang tercatat sebesar 4,49 persen. Sementara persentase penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 23,73 persen, menurun 0,79 persen poin jika dibandingkan kondisi September 2022 yang tercatat sebesar 24,52 persen.

Tabel 2.14

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2022-2023

Daerah Tempat Tinggal/Periode	Persentase Penduduk Miskin (%)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)
Perkotaan		
Maret 2022	3,97	21,01
September 2022	4,49	24,40
Maret 2023	4,47	24,12
Perdesaan		
Maret 2022	24,42	164,43
September 2022	24,52	162,95
Maret 2023	23,73	159,60
Perkotaan + Perdesaan		
Maret 2022	15,42	185,44
September 2022	15,51	187,35
Maret 2023	15,15	183,71

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023

Dalam pengukuran angka kemiskinan makro, garis kemiskinan digunakan sebagai besaran/ batas untuk mengelompokkan penduduk yang dapat dikategorikan sebagai miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah (atau lebih rendah) dari Garis Kemiskinan, yang meliputi Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo pada September 2022 tercatat sebesar Rp439.961,- per kapita per bulan dan pada Maret 2023 mengalami kenaikan menjadi Rp 442.194,- per kapita per bulan, yang berarti naik sebesar Rp7.233,- per kapita per

bulan, atau naik sebesar 1,66 persen. Pada Maret 2023, GKM untuk daerah perkotaan tercatat sebesar Rp327.347,- dan perdesaan sebesar Rp348.718,-. Kondisi ini menunjukkan bahwa pola konsumsi makanan di daerah perdesaan kurang mengandung kalori dibandingkan pola konsumsi di perkotaan, sehingga untuk mendapatkan kalori yang standar (2100 kkal/hari) diperlukan harga yang lebih mahal. Pada Maret 2023, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya hampir sama. Beras masih memberi sumbangan terbesar yakni sebesar 26,52 persen di perkotaan dan 27,12 persen di perdesaan.

Indikator kemiskinan lainnya diukur berdasarkan Tingkat Kedalaman Kemiskinan dan Tingkat Keparahan Kemiskinan yang disajikan dalam bentuk Indeks yang menunjukkan cukup berhasilnya kebijakan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal penurunan angka kemiskinan. Meningkatnya jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, menyebabkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar 2,910, naik sebesar 0,068 poin jika dibandingkan kondisi September 2023. Namun jika dibandingkan kondisi Maret yang tercatat sebesar 2,918, nilai ini turun 0,068 poin. Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami penurunan 0,157 poin dari 0,848 pada Maret 2022 menjadi 0,692 pada September 2022. Jika dibandingkan dengan kondisi September 2021 yang tercatat sebesar 0,772 nilai ini turun sebesar 0,081 poin.

Tabel 2.15
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Provinsi Gorontalo Tahun 2023

Indikator / Periode	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
Maret 2022	0,317	5,181	3,309
September 2022	0,668	4,634	2,850
Maret 2023	0,666	4,725	2,918
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)			
Maret 2022	0,049	1,477	0,848
September 2022	0,153	1,132	0,692
Maret 2023	0,131	1,229	0,740

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023

Selain kemiskinan absolut, maka sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem maka Pemerintah Provinsi Gorontalo terus berupaya dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem yang merupakan salah satu agenda prioritas pembangunan Nasional. Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan ukuran kemiskinan absolut yang konsisten supaya dapat dibandingkan antarnegara dan antarwaktu. Salah satunya dengan mengikuti definisi Bank Dunia, yakni paritas daya beli (*purchasing power parity/PPP*) di bawah US\$1,9 per hari. Dalam laporan *Poverty & Equity Brief East Asia & Pacific (2019)* disebutkan bahwa pada 2017, nilai

US\$1,9 PPP setara dengan Rp11.941 per kapita per hari, yang untuk tahun selanjutnya digerakkan dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) periode tahun yang bersesuaian.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Kemiskinan Ekstrem Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu 3 tahun terakhir 2021-2023 mengalami penurunan yang cukup berarti. Pada tahun 2023, proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan ekstrem sebesar 2,44 persen atau turun 1,88 persen poin dari tahun 2022 yang mencapai 4,28 persen.

Grafik 2.7
Kemiskinan Ekstrem Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2024

Upaya penurunan kemiskinan ini Provinsi Gorontalo terus dilakukan melalui strategi dan kebijakan yang fokus pada program penanggulangan kemiskinan lintas sektor, yaitu dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Kebijakan pemerintah Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan diantaranya melalui:

1. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dan Baznas nomor 800/Dinsos/2031/X/2023 tentang Dukungan Program Bantuan Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial untuk Kemiskinan Ekstrem
2. Pemberian bantuan sosial melalui program BLP3G (Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo) sejumlah 10.000 sasaran penerima manfaat di tahun 2023;
3. Pemberian bantuan modal usaha baik usaha ekonomi produktif (UEP) sebanyak 1.463 KK maupun perempuan kepala keluarga (PEKKA) kepada 813 keluarga penerima manfaat (KPM)
4. Pemberian bantuan jaminan kesehatan (PBI) Pemerintah Provinsi dengan jumlah sasaran 89.200 jiwa di tahun 2023;
5. Pembangunan Rumah Layak Huni pada kawasan kumuh kewenangan Provinsi (10-15 Ha) sebanyak 106 unit rumah.
6. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) 8,6 Ton beras (Dinas Pangan)
7. Bantuan Kios Akses Pangan untuk 30 unit kios pangan (Dinas Pangan)
8. Bantuan Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) sebanyak 1000 KK (Dinas Pangan)
9. Bantuan Sarana Pemasaran Program Sistim Logistik Ikan (bantuan motor bercoolbox (173 unit), Pengadaan coolbox dan perlengkapannya Program Sistim Logistik Ikan (89 unit);
10. Rumah Tangga Sasaran yang terpenuhi kebutuhan listrik sejumlah 516 RTS;

11. Pemanfaatan data P3KE dalam rangka pensasaran percepatan penurunan kemiskinan ekstrim melalui upaya koordinasi serta menyusun program kegiatan bersinergi dengan pemerintah Kabupaten/Kota;
12. Pembangunan database kemiskinan melalui tata kelola Gorontalo Satu Data dari desa sebagai tindak lanjut dari amanat Perpres No.39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia serta memastikan bahwa penerima bantuan merupakan pihak yang berhak menerima dengan melakukan optimalisasi verifikasi dan validasi data di lapangan;
13. Peningkatan kerjasama melalui kemitraan dengan dunia usaha dan perguruan tinggi;
14. Menetapkan OPD menjadi PIC per kecamatan

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo selama periode September 2022–Maret 2023 antara lain:

1. Selama periode September 2022-Maret 2023, angka inflasi umum Kota Gorontalo tercatat sebesar 0,83 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi Nasional pada periode yang sama tercatat sebesar 1,32 persen. Kota Gorontalo menempati urutan kedua angka inflasi umum terendah, setelah Mamuju, dari 13 kota IHK di Pulau Sulawesi. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau pada periode September 2022-Maret 2023 mengalami kenaikan indeks harga sebesar 1,72 persen, jauh lebih rendah daripada kenaikan indeks harga pada periode Maret 2022- September 2023 yang tercatat sebesar 4,58 persen.
2. Nilai Tukar Petani (NTP) kondisi Maret 2023 tercatat sebesar 104,35, mengalami kenaikan sebesar 1,49 poin dibanding September 2022 yang tercatat sebesar 102,86. NTP Subsektor Tanaman Pangan pada periode yang sama mengalami kenaikan 4,23 poin.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Gorontalo Februari 2023 sebesar 3,07 persen, mengalami penurunan dibandingkan Februari 2022 yang tercatat sebesar 3,25 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka di Perdesaan pada periode yang sama mengalami penurunan dari 3,03 persen pada Februari 2022 menjadi 2,88 persen pada Februari 2023. Tingkat Pengangguran Terbuka di Perkotaan pada periode yang sama mengalami penurunan dari 3,55 persen pada Februari 2022 menjadi 3,33 persen pada Februari 2023.
4. Ekonomi Gorontalo triwulan I-2023 terhadap triwulan I-2022 (*y-on-y*) tumbuh sebesar 4,23 persen. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki kontribusi sebesar 38,02 persen pada triwulan I-2023, mengalami pertumbuhan sebesar 3,95 persen terhadap triwulan I-2022 (*y-on-y*).

f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) merupakan indikator yang menggambarkan kualitas hidup manusia, yang diukur dari seberapa besar penduduk suatu wilayah dapat mengakses pendidikan, kesehatan dan tingkat pendapatan masyarakat. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*),

dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Gorontalo Tahun 2023 mencapai 71,25 meningkat 0,63 poin dibanding tahun 2022 sebesar 70,62 persen. Selama 2 (dua) tahun terakhir, IPM Provinsi Gorontalo sudah berada pada kategori Tinggi. Namun demikian, masih lebih rendah dari IPM Nasional sebesar 74,39 persen.

Grafik 2.8

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Gorontalo, 2021-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2024

Komponen-komponen yang mempengaruhi perhitungan IPM di Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

Tabel 2.16

Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo Tahun 2022-2023

No	Indikator	2022	2023
1	Kesehatan		
	Angka Harapan Hidup (AHH)	70,22	70,50
2	Pendidikan		
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,12	13,16
	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,10	8,10
3	Standar Hidup Layak		
	Pengeluaran perkapita riil disesuaikan	10.687	11.069
	IPM	70,62	71,25

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2024

Peningkatan IPM Tahun 2023 didukung oleh semua dimensi pendukung nya yang mengalami pertumbuhan. Umur Harapan Hidup yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat, tahun 2023 tumbuh sebesar 0,32 persen menjadi 70,50 persen. Sedangkan dimensi pendidikan dibentuk dari 2 indikator yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dengan capaian tahun 2023 sebesar 13,16 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas dengan capaian sebesar 8,10 tahun. Sementara Dimensi Standar Hidup Layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil perkapita per tahun mencapai Rp. 11,07 juta per tahun.

g. Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender

Salah satu pengembangan dari penghitungan IPM adalah Indeks Pembangunan Gender. Baik metodologi maupun konsep definisi yang dipakai dalam penghitungan Indeks Pembangunan Gender sama dengan penghitungan IPM. Perbedaannya, penghitungan ini dibedakan menurut gender. Tujuan penghitungan IPG adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, berimplikasi kepada pembangunan perempuan. Peran perempuan dalam perekonomian suatu daerah dari waktu ke waktu semakin tinggi. Namun demikian, masih dirasakan adanya diskriminasi perlakuan terhadap perempuan dalam kancah sosial ekonomi. Upah kerja perempuan masih lebih rendah dibanding laki- laki. Selain itu, masih berlaku budaya menempatkan perempuan pada urusan dapur rumah tangga. Sehingga kesempatan pendidikan perempuan relatif rendah dan berpengaruh pada rendahnya daya saing di masyarakat. Dengan melihat angka IPG, diharapkan ada perhatian dari berbagai pihak khususnya Pemerintah Daerah, untuk memajukan perempuan di masa mendatang. Evaluasi untuk meningkatkan pembangunan perempuan diperlukan agar posisi perempuan semakin sejajar setara dengan laki-laki. Sehingga peran perempuan dalam memberikan nilai tambah di masyarakat akan semakin nyata. Penghitungan IPG ini juga memakai metodologi yang dipakai pada penghitungan IPM metode baru.

Tabel 2.17
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2023

Provinsi/ Kab/Kota	Indeks Pembangunan Gender (Tahun)		
	2021	2022	2023
Kabupaten Boalemo	81,56	82,76	83,20
Kabupaten Gorontalo	82,60	83,12	83,61
Kabupaten Pohuwato	91,60	92,22	92,39
Kabupaten Bone Bolango	88,17	88,53	88,84
Kabupaten Gorontalo Utara	81,32	82,03	82,43
Kota Gorontalo	86,87	87,41	87,74
PROVINSI GORONTALO	87,52	88,12	88,24

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, 2024

Indeks Pembangunan Gender Provinsi Gorontalo Tahun 2023 cukup baik yaitu sebesar 88,24 persen. Kondisi IPG terus membaik (mendekati 100) mengindikasikan semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Daerah yang maju dan madani, selain ditopang dari peran SDM penduduk laki- lakinya, juga ditopang oleh peran perempuan. Pemerintah Provinsi Gorontalo sendiri berupaya terus agar peran perempuan semakin banyak muncul dalam kancah pembangunan sosial ekonomi. Sehingga disparitas SDM antar laki-laki dan perempuan dari waktu ke waktu semakin menyempit. Pada akhirnya, kinerja pembangunan di segala bidang bisa dinikmati siapa saja baik penduduk laki-laki maupun perempuan.

Selain Indeks Pembangunan Gender, terdapat indikator lainnya dalam rangka mengukur sejauh mana keterlibaran perempuan dalam pembangunan, yaitu melalui Indeks Pemberdayaan Gender. Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan keterwakilan perempuan di parlemen, dalam angkatan kerja, dalam pekerjaan ditempat manajerial, dan upah pekerja perempuan disektor non pertanian.

Tabel 2.18
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Gorontalo Tahun 2023

Provinsi/ Kab/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai Tenaga Profesional	Sumbangan Pendapatan Perempuan	IDG
Boalemo	24	63,46	29,55	69,46
Gorontalo	17,14	58,52	26,90	63,22
Pohuwato	16	56,73	36,35	70,45
Bone Bolango	4	56,50	29,94	53,38
Gorontalo Utara	24	62,07	27,81	69,21
Kota Gorontalo	24	55,95	30,84	72,15
PROVINSI GORONTALO	26,67	58,23	26,93	71,11

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, 2024

Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Gorontalo Tahun 2023 sebesar 71,11 dengan indikator pendukungnya yaitu keterlibatan perempuan di Parlemen sebesar 26,67 persen, Perempuan sebagai tenaga Profesional sebesar 58,23 persen dan Sumbangan Pendapatan Perempuan sebesar 26,93 persen. Indeks Pemberdayaan Gender tertinggi berada di Kota Gorontalo sebesar 72,15 dan terendah adalah Kabupaten Bone Bolango sebesar 53,38 persen.

Bila di potret dari Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tahun 2023 sebesar 0,391 turun 0,020 poin dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,411. Ketiga dimensi pembentuk Indeks Ketimpangan Gender (IKG) secara konsisten mengalami perbaikan. Dimensi kesehatan reproduksi membaik, risiko perempuan terkait dengan kesehatan reproduksi semakin menurun. Sementara, dimensi pemberdayaan dan dimensi pasar tenaga kerja semakin setara. Perbaikan pada semua dimensi menjadi faktor utama menurunnya IKG Provinsi Gorontalo. Selama lima tahun terakhir, IKG Provinsi Gorontalo secara konsisten mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Provinsi Gorontalo terus mengalami peningkatan.

h. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator yang menggambarkan tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Berdasarkan Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Gorontalo Tahun 2023 sebesar 3,06 persen (Agustus 2023), mengalami peningkatan 0,48 persen poin dibanding kondisi Agustus 2022 yang turun hingga mencapai 2,58 persen. Pendorong utama peningkatan ini adalah terjadinya peningkatan TPT di wilayah perkotaan dari 3,52 persen pada Agustus 2022 menjadi 4,13 persen pada Agustus 2023. Adapun TPT perdesaan juga mengalami peningkatan dari 1,86 persen pada Agustus 2022 menjadi 2,14 persen pada Agustus 2023.

Grafik 2.9

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Gorontalo dan Nasional 2021-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2024

Tenaga kerja sebagai pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam aktivitas perekonomian nasional, yaitu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Semakin berkurangnya tingkat pengangguran terbuka dan semakin meningkatnya penduduk usia kerja yang bekerja, mengindikasikan bahwa semakin tinggi daya serap tenaga kerja. Data menunjukkan bahwa, penduduk usia kerja yang bekerja tahun 2023 sebanyak 631.521 jiwa, naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 614.250 jiwa. Sementara jumlah penganggur tahun 2023 sebanyak 19.904 jiwa.

Tabel 2.19
Komposisi Penduduk Usia Kerja Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2023

STATUS KEADAAN KETENAGAKERJAAN	TAHUN 2022	TAHUN 2023
Penduduk Usia Kerja	914.951	920.273
Angkatan Kerja	630.534	651.425
Bekerja	614.250	631.521
Pengangguran	16.284	19.904
Bukan Angkatan Kerja	284.417	268.848
Sekolah	61.506	62.447
Mengurus Rumah Tangga	180.088	169.968
Lainnya	42.823	36.433
Tingkat Pengangguran Terbuka	2,58	3,06
Perkotaan	3,52	4,13
Perdesaan	1,86	2,14
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	68,91	70,79
Laki-laki	85,30	85,34
Perempuan	52,64	56,07

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023

Selain TPT, indikator lainnya yang menggambarkan kondisi penduduk bekerja adalah persentase setengah penganggur, dimana indikator tersebut menunjukkan bahwa tidak semua pekerjaan memiliki produktifitas yang tinggi yang diindikasikan dari jam kerja yang rendah. Jumlah setengah penganggur di Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan, tahun 2022 sebesar 37.481 orang, sedangkan ditahun 2023 yaitu sebesar 52.564 orang atau sebesar 8,32 persen dari total angkatan kerja.

Berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki dan perempuan sama-sama mengalami peningkatan dibandingkan Agustus 2022. TPT laki-laki pada Agustus 2022 sebesar 2,28 persen meningkat menjadi 2,79 persen pada Agustus 2023 sedangkan TPT perempuan pada Agustus 2022 sebesar 3,07 persen meningkat menjadi 3,46 persen pada Agustus 2023. Menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan, TPT pada pendidikan SMA sederajat jauh lebih tinggi dibandingkan TPT pada pendidikan SMP ke bawah. Pada Agustus 2023 TPT tertinggi ada pada jenjang pendidikan SMK yaitu sebesar 8,61 persen.

Selanjutnya pada jenjang pendidikan SMA sederajat yaitu sebesar 6,30 persen, dan jenjang SMP sederajat sebesar 2,95 persen, TPT perguruan tinggi sebesar 2,42 persen, dan yang terendah pada jenjang pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 1,15 persen. Pola TPT yang demikian menunjukkan mereka yang berpendidikan lebih rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja. Sedangkan mereka yang berpendidikan lebih tinggi cenderung memilih pekerjaan yang lebih sesuai.

Sementara jika dilihat dari status pekerjaan, Penduduk yang bekerja dibagi atas kegiatan formal yang mencakup mereka yang berusaha dibantu buruh tetap dan mereka yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai, dan pekerja informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, pekerja bebas pertanian dan nonpertanian, serta pekerja keluarga/tak dibayar). Penduduk bekerja di Provinsi Gorontalo masih didominasi oleh kegiatan informal. Pada Agustus 2023 sebanyak 402.467 pekerja atau 63,73 persen penduduk bekerja pada kegiatan informal, sedangkan 36,27 persen bekerja di sektor formal.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Harapan Lama Sekolah

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik. Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah.

Tabel 2.20
Harapan Lama Sekolah Provinsi Gorontalo, Tahun 2021-2023

Wilayah	Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
	2021	2022	2023
Boalemo	12,45	12,46	12,48
Gorontalo	13,18	13,19	13,21
Pohuwato	12,38	12,39	12,46
Bone Bolango	13,65	13,66	13,67
Gorontalo Utara	12,46	12,47	12,49
Kota Gorontalo	14,50	14,57	14,58
Provinsi Gorontalo	13,08	13,11	13,16

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023

b. Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-Rata Lama Sekolah (*mean years school/mys*) merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang

ditamatkan. Tetapi, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya.

Angka ini bisa memberikan gambaran secara sederhana pemenuhan penduduk terhadap akses pendidikan. Keterbandingan besaran rata-rata lama sekolah antar wilayah atau waktu, dapat mengetahui perbedaan atau perkembangan tingkat kualitas sumber daya manusia. Angka rata-rata lama sekolah memberikan gambaran tingkat Pendidikan penduduk suatu wilayah.

Tabel 2.21

Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2023

Kabupaten/ Kota	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)		
	2021	2022	2023
Boalemo	7,00	7,03	7,30
Gorontalo	7,30	7,61	7,79
Pohuwato	7,26	7,35	7,59
Bone Bolango	8,32	8,33	8,35
Gorontalo Utara	7,15	7,16	7,17
Kota Gorontalo	10,37	10,39	10,40
Provinsi Gorontalo	7,90	8,02	8,10

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya sekolah atau *years of schooling* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah pada sekolah formal seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat Pendidikan terakhirnya. Meskipun mengalami peningkatan setiap tahunnya, rata-rata lama sekolah di Provinsi Gorontalo, masih relatif sama selama 3 tahun terakhir. Rata-rata lama sekolah Provinsi Gorontalo berada pada kisaran 7-8 tahun.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Agama

Pencapaian pembangunan di bidang budaya dan adat istiadat juga ditunjukkan oleh capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sebagai salah satu instrumen yang telah dirilis sejak tahun 2018 untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan didasarkan pada 7 dimensi yaitu ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi dan gender. Dimana IPK Provinsi Gorontalo sejak 2018-2021 bergerak secara dinamis dari 49,86 ditahun 2018, kemudian meningkat menjadi 50,57 di tahun 2019. Dan pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 51,49, meskipun kemudian di tahun 2021 terjadi penurunan dengan perolehan sebesar 47,14.

Dari hasil capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan terdapat beberapa dimensi yang pencapaiannya belum maksimal antara lain ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, dan ekspresi budaya, sedangkan untuk dimensi budaya literasi dan gender pencapaiannya lebih tinggi dari angka nasional. Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau

Sulawesi, Provinsi Gorontalo berada di posisi ke 5 setelah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

Kerukunan umat beragama adalah kondisi dimana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong menolong, dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, kerukunan beragama berarti kebersamaan antara umat beragama dengan pemerintah dalam rangka suksesnya pembangunan di Provinsi Gorontalo senantiasa menjaga keutuhan Negara Keasatuan Republik Indonesia. Untuk memotret realitas kerukunan umat beragama dalam hubungannya dengan pembangunan kehidupan sosial keagamaan, digunakan indikator pengukuran berupa Indeks Kerukunan Umat Beragama.

Berdasarkan hasil survei Indeks Kerukunan Umat Beragama pada periode 2017-2021 terjadi fluktuasi, tahun 2021 mencapai 71,9. Capaian ini menggambarkan suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara, dalam menjalankan agama, serta bekerja sama dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang terdiri dari dimensi toleransi, kesetaraan dan kerjasama.

2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.1.3.1. Fokus Pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pembagian urusan dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional, dengan pembagian kewenangan sebagai berikut : pemerintah pusat berkewenangan dalam penetapan standar pendidikan, Pemerintah provinsi berkewenangan mengelola pendidikan menengah dan untuk kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar. Sejak diberlakukannya Undang-undang 23 tahun 2014, maka kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah dalam hal ini adalah SMA, MA DAN SMK menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

1) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Pembangunan pendidikan Provinsi Gorontalo dilakukan melalui peningkatan akses bagi masyarakat. Wujud pemerataan dan perluasan akses pendidikan tersebut dilakukan dengan cara memperluas daya tampung satuan pendidikan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat baik secara sosial, ekonomi, gender, geografis wilayah, dan tingkat kemampuan fisik serta intelektual. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas pendidikan di Provinsi Gorontalo.

Angka partisipasi sekolah digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang dapat mengakses fasilitas pendidikan. Penghitungan APS biasanya dibedakan berdasarkan kelompok umur sekolah, misal 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun, dan 19-24 tahun.

Secara umum, APS Provinsi Gorontalo cenderung mengalami peningkatan pada setiap kelompok umur dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 2.22

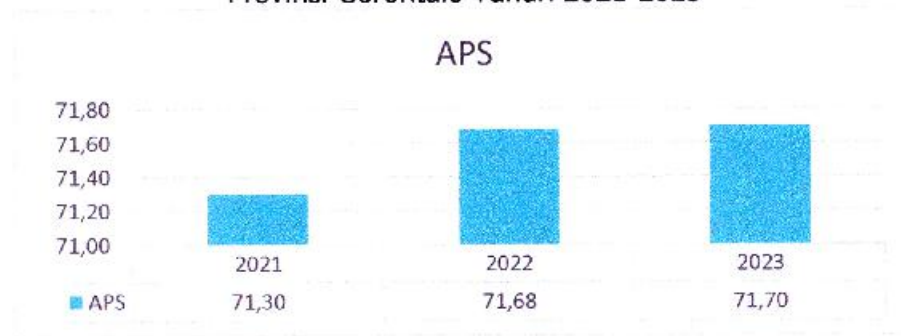
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Umur 7-12 Tahun, 13-15 Tahun, 16-18 Tahun dan 19-24 Tahun, Provinsi Gorontalo tahun 2021-2023

PROVINSI	APS											
	7 – 12			13 – 15			16 - 18			19-24		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
GORONTALO	99,02	98,93	98,69	92,05	91,83	91,85	71,30	71,68	71,70	31,66	30,06	35,50

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Tahun 2023, Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun atau jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan dibanding tahun sebelumnya yakni sebesar 71,70.

Grafik 2.10
Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun
Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Meningkatnya APS usia 16 – 18 tahun ini merupakan gambaran semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi pada jenjang SMA/SMK/MA. Peningkatan APS pada pendidikan menengah ini tidak terlepas dari program yang diluncurkan oleh pemerintah dalam memudahkan mereka bersekolah, terutama bagi golongan yang kurang mampu melalui bantuan operasional sekolah dan manajemen prodira.

2) Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Murni adalah perbandingan penduduk yang Angka Partisipasi Murni adalah perbandingan penduduk yang sedang sekolah dengan usia tertentu pada jenjang tertentu pula sesuai dengan peruntukannya. Dengan kata lain APM dapat digunakan untuk mengetahui kesesuaian usia dengan tingkat pendidikan yang dijalannya. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.

Sedangkan Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkatan Pendidikan dibagi dengan jumlah penduduk berapapun usianya yang sedang sekolah ditingkat pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkatan pendidikan.

Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan dan juga merupakan salah satu indikator tonggak kunci keberhasilan (*key development milestones*) terhadap pemerataan serta perluasan akses pendidikan.

Tabel 2.23
Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK, 2021-2023

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)			Angka Partisipasi Kasar (APK)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
SMA/ SMK/ MA/ Sederajat	77,75%	81,49%	86,05%	96,86%	105,34 %	92,03 %

Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2023

Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SMA/SMK/MA tahun 2023 sebesar 86,05 persen menunjukkan bahwa hanya 86,05 persen penduduk usia 16 tahun ke atas yang bersekolah di SMA/SMK/MA. Tahun 2023 Angka Partisipasi Kasar turun sebesar 92,03 persen.

Pembangunan bidang pendidikan dilakukan melalui penyediaan dukungan sarana dan prasarana Pendidikan melalui pembangunan sekolah, ruang kelas baru, Laboratorium Komputer bagi SMA/SMK dan SLB, peningkatan kapasitas tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan melalui penyediaan beasiswa studi, fasilitasi kegiatan boarding school, bantuan bagi siswa SMK peserta Praktek kerja Industri, mendorong Pendidikan vokasi melalui sertifikasi bagi siswa SMK.

3) Rasio Murid

Pelaksanaan pendidikan ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah, dan ruang kelas yang memadai. Tidak hanya masalah ketersediaan, aksesibilitas juga menjadi fokus perhatian pembangunan dibidang pendidikan dalam rangka peningkatan angka partisipasi sekolah. Peningkatan kapasitas pendidikan, pembangunan serta perbaikan sarana dan prasarana pendidikan khususnya di daerah terpencil dan sulit dijangkau penting dalam memperluas akses layanan pendidikan, agar semua anak didik dapat mengenyam pendidikan dan khususnya dapat memberantas buta huruf.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 dan Surat Edaran Menteri Nomor 3 Tahun 2017, jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar untuk SMA idealnya dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak 36 peserta didik. Sedangkan SMK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 peserta didik, dan paling banyak 36 peserta didik. Untuk Provinsi Gorontalo, Tahun 2023 rasio siswa per kelas SMA/MA sebesar 1 : 36 dan untuk SMK rasio sekolah 1 : 36. Ini menunjukkan dalam satu kelas rata-rata berjumlah 36 peserta didik untuk SMA/MA, dan SMK rata-rata berjumlah 36 peserta didik. Data ini menunjukkan bahwa jumlah sarana sekolah dan kelas di Provinsi Gorontalo masih memenuhi dan sesuai standar yang ditetapkan.

4) Rasio Guru

Selain sarana dan prasarana, ketersediaan dan pemerataan distribusi guru penting menjadi perhatian. Ketersediaan guru juga menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Data Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga untuk guru SMA (PNS, PPPK dan GTT) sebanyak kurang lebih 120 PNS Dinas Dikbud, 2.275 PNS Satuan Pendidikan dan 1.205 Guru P3K yang tersebar di kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo, dengan perbandingan rasio guru per siswa SMA/MA tahun 2023 sebesar 1:20, sementara rasio guru per siswa SMK 1 : 15. Ketersediaan guru tidak hanya dilihat dari aspek kuantitasnya, melainkan yang menjadi fokus pemerintah provinsi adalah tingkat sebaran, dan tingkat kesejahteraan guru khususnya guru yang mengabdikan di daerah sulit dijangkau, agar pelaksanaan pemerataan kualitas maupun layanan pendidikan juga dapat lebih maksimal.

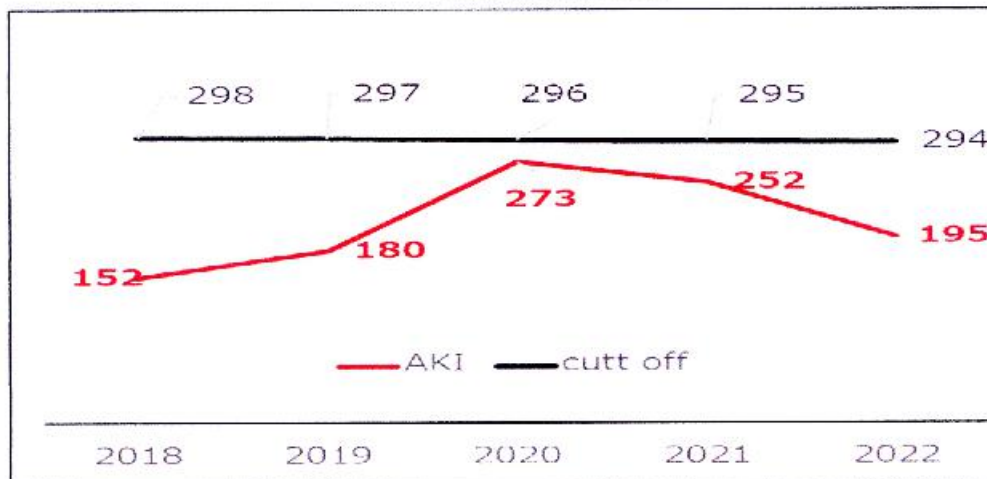
b. Kesehatan

1) Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup merupakan salah satu ukuran keberhasilan upaya pelayanan kesehatan ibu yang juga menjadi agenda utama SDGs, 5 tahun terakhir AKI per 100.000 KH di Provinsi Gorontalo fluktuatif, tetapi 3 tahun terakhir *trend*nya menurun. Tahun 2022 AKI Provinsi Gorontalo masih dibawah rata – rata nasional yang angkanya berkisar 305 per 100.000 KH tetapi angka 195 per 100.000 KH pada tahun 2022 juga masih membutuhkan upaya yang lebih baik lagi untuk mencapai target 183 pada tahun 2024.

Berbagai kebijakan saat ini telah diupayakan oleh Kemenkes seperti menetapkan pemeriksaan kehamilan sebanyak 6 kali dan 2 diantaranya dilakukan oleh dokter dan dilakukan USG, yang dulu hanya dilakukan di RS dan klinik saat ini ibu hamil dapat melakukan pemeriksaan kehamilan dengan USG di puskesmas. Kemenkes dalam proses menyediakan USG melalui anggaran DAK Fisik samapai tahun 2024. pemeriksaan USG ini perlu didukung dengan penguatan kolaborasi layanan ANC (*Ante Natal Care*) antara bidan, dokter umum dan dokter spesialis kebidanan serta jejaring PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) dan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif).

Grafik 2.11
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Gorontalo
Tahun 2018-2022



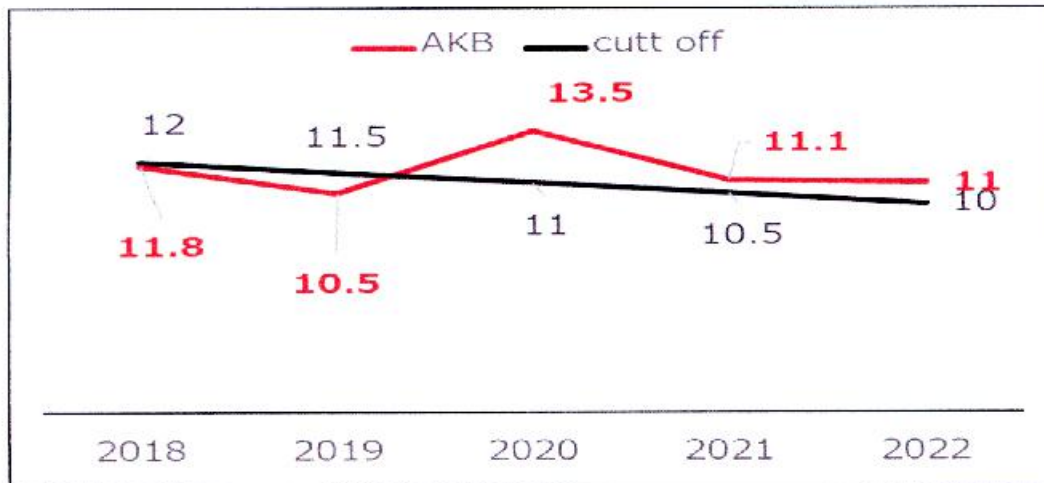
Sumber : Seksi Kesga Dinas Kesehatan Prov. Gorontalo

2) Angka Kematian Bayi, Balita dan Neonatal

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator penting yang menggambarkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. AKB Provinsi Gorontalo tahun 2022 mencapai 11 per 1.000 KH di Provinsi Gorontalo meskipun hanya turun 0.1% dari tahun sebelumnya dan belum mencapai target yang ditetapkan, akan tetapi menunjukkan 3 tahun terakhir *trend*nya menurun. Gambaran Angka Kematian Bayi Tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.12

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2022



Sumber : Seksi
Kesga Dinas
Kesehatan Prov.
Gorontalo, 2022

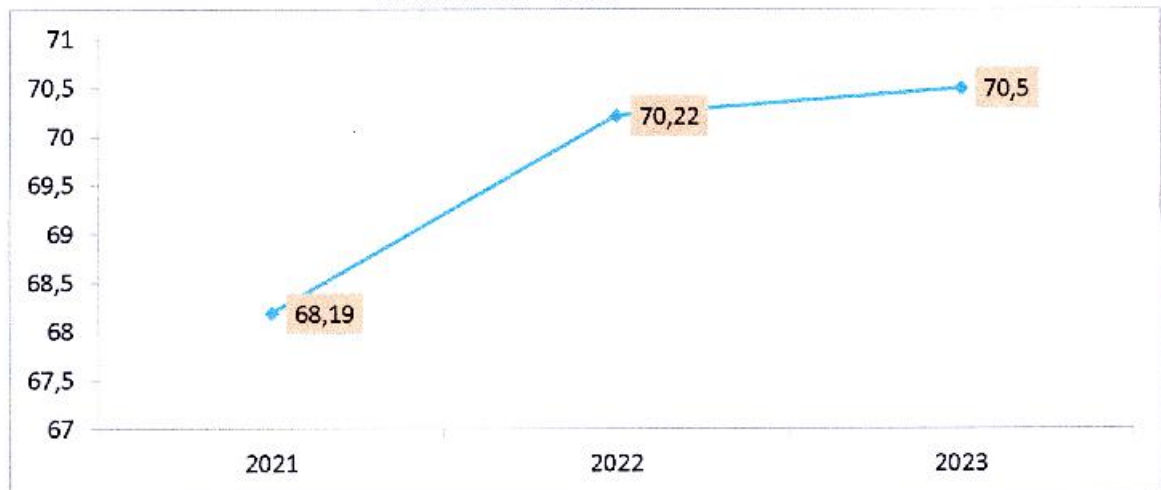
Intervensi langsung Pemerintah Provinsi dalam upaya menekan AKI, AKB dan percepatan penurunan stunting yaitu melalui Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, yaitu dengan Screening anemia remaja putri, Konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri, Pemeriksaan kehamilan, Konsumsi tablet tambah darah pada ibu hamil, Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil KEK, Pemantauan tumbuh kembang balita, ASI Eksklusif, Pemberian makanan tambahan protein hewani bagi baduta, Tata laksana balita dengan masalah gizi, Peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi serta Edukasi remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita.

3) Angka Usia Harapan Hidup

Secara umum tingkat keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi dapat dilihat dari peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH). AHH ini merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Capaian AHH di Provinsi Gorontalo tahun 2021-2023 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Grafik 2.13
Angka Harapan Hidup Provinsi Gorontalo
Tahun 2021 – 2023

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo 2023



Berdasarkan grafik diatas, AHH Provinsi Gorontalo meningkat dibanding 2 tahun sebelumnya, sektor kesehatan ikut berkontribusi terhadap peningkatan AHH misalnya meningkatkan angka kecukupan gizi serta terus mengupayakan pencegahan penyakit menular serta menurunkan faktor risiko penyakit tidak menular.

4) Prevalensi Status Gizi Balita

Status gizi balita dinilai menurut 3 indeks, yaitu Berat Badan Menurut Umur (BB/U), Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U), Berat Badan Menurut Tinggi Badan (BB/TB). Prevalensi *underweight* di Provinsi Gorontalo fluktuatif selama 5 tahun terakhir, meskipun angkanya masih dibawah angka yang menjadi batas tertingginya. Kondisi fluktuatif menggambarkan bahwa indikator ini harus dilakukan evaluasi secara intensif. *Underweight* adalah kegagalan bayi mencapai berat badan ideal, sehingga mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan, sesuai usianya, dalam jangka waktu tertentu. Gangguan ini bisa disebabkan karena bayi kekurangan energi dan zat gizi yang dibutuhkan sesuai usianya.

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru Nampak saat anak berusia dua tahun. Kekurangan gizi pada usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan anak, menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh tak maksimal saat dewasa.

Tabel 2. 24
Prevalensi Status Gizi Balita menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Gorontalo tahun 2023

Kabupaten/ Kota	Status Gizi Balita							
	Stunting		Wasting		Underweight		Overweight	
	%	95% CI	%	95% CI	%	95% CI	%	95% CI
Boalemo	16	13-19,4	12,6	10,1-15,6	18,1	14,4-22,6	1,1**	0,5-2,5
Gorontalo	34,7	30,2-39,5	13,8	10,5-18	24,9	20,6-29,7	5,1	3,3-7,7
Pohuwato	18,4	15,2-22,2	15,4	12,2-19,3	23	18,6-28,1	2,8	1,7-4,5

Bone Bolango	27,1	22,8-32	11	8,3-14,3	22,3	17,8-27,6	3,4	2,2-5,3
Gorontalo Utara	30,5	25,6-35,7	14,1	10,6-18,4	26,3	21,7-31,3	4,8**	2,8-8,0
Kota Gorontalo	23,6	19,7-28	9,1	6,8-12	15,3	11,8-19,6	7,6	5,7-10
Gorontalo	26,9	25-28,8	12,7	11,2-14,4	22	20-24,1	4,4	3,6-5,4

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Jalan dan Jembatan

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar dasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dukungan infrastruktur memiliki nilai elastisitas yang tinggi dalam perekonomian disuatu wilayah. Oleh karenanya pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pembangunan provinsi Gorontalo. Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dilakukan melalui pembangunan serta perbaikan jalan dan jembatan provinsi, serta pembangunan jalan dan jembatan strategis provinsi sebagai akses pusat-pusat perekonomian, akses pendidikan dan kesehatan, dan akses pemukiman.

Penyediaan akses jalan di Provinsi Gorontalo, dibagi berdasarkan kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Panjang jalan Nasional di Provinsi Gorontalo yaitu sepanjang 748,60, dan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota sepanjang 3.637,55 km. Sementara yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 383/18/XI/2017 tanggal 27 November 2017, panjang ruas jalan provinsi 467,17 Km dan jalan strategis provinsi 176,4 Km. Terjadi perubahan dan penambahan ruas jalan yang menjadi kewenangan Provinsi, dari sebelumnya yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 373/09/IX/2012 yaitu sepanjang 432,51 km. Penetapan status ruas jalan Provinsi sebagai jalan kolektor primer 2 (JKP-2), jalan kolektor primer 3 (JKP-3), dan jalan strategis provinsi dilakukan dengan memperhatikan fungsi jalan yang ditetapkan oleh Gubernur. Perubahan tersebut berimplikasi terhadap perhitungan kondisi mantap jalan. Kondisi Mantap Jalan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 sebesar 70,23 persen, meningkat dibanding tahun 2022 sebesar 60,05 persen.

Grafik 2.14
Kondisi Mantap Jalan Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2023



Sumber : Dinas Pekerjaan Provinsi Gorontalo, 2023

Kondisi jalan provinsi dibagi kedalam 5 kategori, sebagai berikut :

Tabel 2.25
Kondisi Jalan Provinsi Gorontalo berdasarkan katagori kondisi jalan tahun 2021-2023

No	Kondisi	Panjang (km) / persentase (%)		
		2021	2022	2023
1	Kondisi Baik	256,2 km (54,86%)	233,75 km (50,05%)	302,736 km
2	Kondisi Sedang	11,36 km (2,43%)	46,8 km (10,02%)	15,41 km
3	Rusak Ringan	51,7 km (11,07%)	30,59 km (6,55%)	11,544 km
4	Rusak Berat	147,75 km (31,64%)	156,04 km (33,41%)	137,31 km
Total Panjang Jalan Provinsi		467,01 Km	467 km	467 km

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo, 2023

2) Sumberdaya Air dan Irigasi

Pengelolaan sumberdaya air dilakukan dalam rangka konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air, dan pengendalian daya rusak air. Tujuannya adalah dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan untuk mewujudkan keberlanjutan sumberdaya air, dimana air merupakan salah satu aspek penting dalam dunia pertanian, mengingat posisinya sebagai salah satu kebutuhan penting bagi tanaman, terutama tanaman pada lahan basah. Kebutuhan air pertanian banyak dipenuhi melalui irigasi. Sistem irigasi yang ada di Indonesia bersumber dari adanya aliran sungai maupun sumber-sumber mata air.

Kualitas aliran sungai dan sumber mata air yang baik menjadi hal yang penting. Kuantitas air dari sumber irigasi pun turut menjadi penentu kelancaran proses bercocok tanam para petani.

Pembangunan dalam bidang pengelolaan sumber daya air dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Tahun 2023 luasan irigasi yang ditingkatkan, direhabilitasi dan dipelihara jaringan irigasinya sebesar 1802 Ha dari target 2467 Ha diantaranya pemeliharaan 1.127,5 Ha, Rehabilitasi DI Tolinggula 269 Ha, Rehabilitasi DI Taluduyunu 406 Ha dan Peningkatan

DI Bongo 60 Ha. Panjang pengaman sungai yang dibangun dan dipelihara sebesar 0,34 Km dari target 0,8 Km. Panjang pengaman pantai yang dibangun dan pembangunan Breakwater/Seawall sebesar 163 meter dari target 600 meter berlokasi di Kab. Boalemo dan Kab. Gorontalo.

3) Air Minum dan Sanitasi

Ketersediaan air bersih sangat dibutuhkan. Kebutuhan air bersih untuk perkotaan di Provinsi Gorontalo dipasok oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Selain dipasok oleh PDAM, ketersediaan air bersih untuk daerah-daerah terpencil di kabupaten/kota Provinsi Gorontalo sumber air bersih dipasok dari bak-bak penampung yang dibangun melalui program penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan/sanitasi.

Program-program yang telah dilaksanakan terkait penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan/sanitasi di Provinsi Gorontalo, yaitu :

- Pamsimas (Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat)
- PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman)
- DAK Air Minum dan sanitasi

Peningkatan penyediaan pelayanan air minum, sanitasi yang sehat dan ramah lingkungan dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah melalui program 100 0 100 (100 % akses air minum aman, 0 % kawasan kumuh dan 100% sanitasi layak). Beberapa program yang dilakukan diantaranya melalui program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum dengan membangun sarana prasarana air minum dan sanitasi.

Upaya pemerintah dalam hal penyehatan lingkungan/sanitasi dan penyediaan air bersih, sudah cukup baik. Pencapaian akses air minum dan sanitasi tersebut didapat melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan dan non perpipaan terlindungi, serta pra sarana dan sarana dasar sanitasi berbasis masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan cakupan air minum dan sanitasi layak yang setiap tahun mengalami peningkatan.

Tabel 2.26

Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Gorontalo, 2021-2023

Kabupaten/ Kota	2021	2022	2023
Boalemo	68,82	74,62	69,91
Gorontalo	76,82	75,14	80,56
Pohuwato	76,20	78,32	82,42
Bone Bolango	73,57	76,75	78,15
Gorontalo Utara	79,03	81,80	81,37
Kota Gorontalo	92,90	92,09	94,48
Provinsi Gorontalo	78,58	79,82	81,72

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023

Tabel 2.27

Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Gorontalo, 2021-2023

Kabupaten/ Kota	2021	2022	2023
Boalemo	94,21	95,14	95,41
Gorontalo	95,11	96,80	94,81
Pohuwato	93,13	95,93	96,05
Bone Bolango	93,72	94,87	98,50
Gorontalo Utara	86,23	89,46	90,14
Kota Gorontalo	99,62	100	99,86
Provinsi Gorontalo	94,57	96,16	96,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Urusan perumahan dan pemukiman, sasaran utama pembangunan yaitu Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur ekonomi dan layanan dasar melalui Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Layak bagi korban bencana yang ditangani melalui program pengembangan perumahan serta menurunnya luasan kawasan kumuh yang ditangani melalui program kawasan permukiman. Tahun 2023, penyediaan Rumah Layak Huni dalam kawasan permukiman dengan luas 10 Ha sampai dengan dibawah 15 Ha yang diperbaiki sebanyak 106 unit rumah dari 370 unit rumah yang ditargetkan.

Untuk menurunkan luasan kawasan kumuh di Provinsi Gorontalo, ditangani melalui kegiatan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha seluas 26 Ha dari target 19 Ha di tahun 2023. Selain itu dilaksanakan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan dan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP.

e. Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkesinambungan. Kondisi ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan yang kondusif merupakan modal penting yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Pemerintah daerah bertanggung jawab sepenuhnya untuk menciptakan dan memelihara kondisi tersebut, dengan melibatkan peran serta stakeholder lainnya, termasuk seluruh warga masyarakat sebagai upaya membangun kesadaran yang baik terhadap perilaku tidak tertib dan juga kerawanan gangguan ketertiban yang dilakukan secara terus menerus sehingga akan diketahui pola ketidaktertiban yang berlangsung dalam hal ini mengetahui apa yang menjadi penyebab perilaku tidak tertib, apa yang menyebabkan sebagian masyarakat sering melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah, mengapa sebagian masyarakat mengabaikan peraturan daerah.

Stabilitas ketentraman dan ketertiban di Provinsi Gorontalo masih dalam kategori aman dan kondusif. Hal ini tercipta karena adanya peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan kejahatan, peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat, pembinaan terhadap berbagai komponen organisasi masyarakat dengan organisasi social politik yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Dalam menjalankan fungsinya menjaga ketentraman dan ketertiban umum, Dinas Satpol PP dan Kebakaran Provinsi Gorontalo melaksanakan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur antara lain :

- Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Pada Selasa, 14 Februari 2023 dalam rangka penegakan Perda Nomor No.1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Penertiban Lapak PKL yang menggunakan ruas bahu jalan provinsi wilayah kecamatan isimu Kabupaten Gorontalo. Terdapat 7 lapak yang menggunakan bahu jalan dan telah diberikan teguran lisan.
- Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Pada Kamis, 22 Juni 2023 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dalam rangka penegakan Perda Nomor, 10 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang dilaksanakan di RSUD Toto Kabila Kabupaten Bone Bolango dan RSUD Aloe Saboe Kota Gorontalo. Terdapat 1 Orang Pelanggar Perda dan di kenai sanksi administrasi denda melalui mekanisme sidang tindak pidana ringan (TIPIRING)
- Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Pada Senin, 03 Juli 2023 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dalam rangka penegakan Perda Nomor, 10 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang dilaksanakan di RSUD Toto Kabila Kabupaten Bone Bolango dan RSUD Aloe Saboe Kota Gorontalo. Terdapat 5 Orang Pelanggar Perda dan dikenai sanksi administrasi denda melalui mekanisme sidang tindak pidana ringan (TIPIRING).
- Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur melalui operasi Yustisi dan Non Yustisi Pada Kamis, 09 November 2023 terkait dengan Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum, Perda No. 10 2003 Tentang Pencegahan Maksiat, Perda No. 16 Tahun 2015 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Miras dan Perda No.5 Tahun 2014 Tentang Pencegahan HIV dan AIDS. Penegakan perda dilaksanakan di wilayah Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo.
- Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur melalui operasi Yustisi dan Non Yustisi Pada Jumat, 10 November 2023 terkait dengan Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum, Perda No. 10 2003 Tentang Pencegahan Maksiat, Perda No. 16 Tahun 2015 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Miras dan Perda No.5 Tahun 2014 Tentang Pencegahan HIV dan AIDS. Penegakan perda dilaksanakan di wilayah Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango.

- Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur melalui operasi Yustisi dan Non Yustisi Pada Jumat, 10 November 2023 terkait dengan Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah. Penegakan perda dilaksanakan sepanjang jalan Gorontalo Outer Ring Road di wilayah Gorontalo. Terdapat 2 Orang Pelanggar Perda dan dikenai sanksi administrasi denda melalui mekanisme sidang tindak pidana ringan (TIPIRING).

Dalam upaya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta perlindungan masyarakat, melalui penguatan perlindungan masyarakat dalam penanganan penyandang masalah Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT), yang dilaksanakan oleh petugas Satpol PP Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Selanjutnya setelah dilakukan pembinaan para pengemis/gelandangan oleh Satpol PP Provinsi kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo untuk dilakukan pedataan lebih lanjut.

Selain itu, melalui Badan kesatuan Bangsa dan Politik fokus pada fungsi perlindungan masyarakat yang dilakukan melalui program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial dengan kegiatan Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Selain itu pada fungsi perlindungan masyarakat, secara Nasional Provinsi Gorontalo merupakan wilayah dengan potensi bencana sedang berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia yang diterbitkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Berdasarkan Data Geoportal Data Bencana Indonesia, Provinsi Gorontalo tahun 2023 tercatat 53 kejadian bencana yang pernah terjadi. Bencana tersebut didominasi oleh banjir dan kekeringan. Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Risiko bencana Indonesia (IRBI) 2023 Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki kelas risiko sedang dengan nilai 116.71 (sedang) dan memiliki ancaman bencana seperti Gempa bumi, banjir, tsunami, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gelombang ekstim dan abrasi.

Berdasarkan fakta tersebut adanya ancaman bencana di wilayah Indonesia, khususnya di Gorontalo tampaknya masih akan berlanjut karena kondisi tektonik Provinsi Gorontalo dimana Sesar Gorontalo melewati Kota Gorontalo sebagai ibukota Provinsi Gorontalo dengan kepadatan penduduk yang padat menjadikan Provinsi Gorontalo sangat rawan terhadap bencana gempa bumi dan tanah longsor.

f. Sosial

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha untuk mencapai tujuan pembangunan. Sasaran utama pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah meningkatnya perlindungan social bagi Masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan perlindungan social masyarakat Provinsi Gorontalo melaksanakan berbagai program kegiatan diantaranya melalui program pemberdayaan social melalui kegiatan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan social dengan pelaksanaan bimtek bagi 25 pekerja social Masyarakat, pelaksanaan bimtek penguatan kapasitas bagi 77 tenaga kesejahteraan social,

penerimaan bantuan kepada Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) sejumlah Rp. 9.000.000/orsos, Karang Taruna sejumlah Rp. 4.500.000/orsos dan LKSA sejumlah Rp. 11.500.000/lembaga.

Dalam upaya penurunan angka kemiskinan, dilakukan melalui Program perlindungan dan jaminan social dan Program penanganan bencana. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan diantaranya bantuan modal usaha baik usaha ekonomi produktif (UEP) maupun Perempuan kepala keluarga (PEKKA) kepada 2995 keluarga penerima manfaat (KPM).

Upaya preventif lainnya dilakukan melalui program rehabilitasi sosial, melalui :

- a) Pemberian alat bantu kepada 15 penyandang disabilitas
- b) Terpenuhinya kebutuhan dasar permakanaan 60 Anak dalam panti/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)
- c) Penyediaan permakaman bagi lansia
- d) Penyediaan sandang bagi lansia
- e) Penyediaan asrama layak huni bagi lansia yang mudah diakses
- f) Terpenuhinya obat-obatan bagi lansia
- g) Kegiatan vocational bagi lansia
- h) Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari

Tabel 2.28
Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Sosial
di Provinsi Gorontalo Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023	
		Target	Capaian
1	Cakupan penerima penjaminan pemeliharaan kesehatan (UHC)	91%	83,59%
2	Cakupan masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan sosial	21%	11,42%

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, 2023

Selain itu, Pemerintah Provinsi kebijakan penanggulangan kemiskinan secara integratif lintas sektor dilakukan beberapa upaya-upaya preventif seperti program pendidikan gratis, beasiswa miskin, kesehatan gratis, perlindungan sosial bagi PMKS, pengembangan KUKM, pembangunan infrastruktur dengan metode padat karya. Kemudian upaya-upaya kuratif seperti pembangunan mahyani, penciptaan wirausaha baru, bantuan sosial, dan bantuan pangan non tunai.

2.1.3.2. Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

a. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan mempunyai korelasi positif yang cukup erat terhadap suksesnya proses pembangunan. Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Dalam pengembangan potensi tenaga kerja, diperlukan

pengembangan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas potensi tenaga kerja, diantaranya melalui penyediaan lapangan kerja, penciptaan usaha kecil dan menengah yang memberdayakan potensi daerah, penyiapan tenaga kerja siap pakai untuk penempatan di perusahaan pengguna, serta peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pembekalan keterampilan kerja, yang didukung dengan sistem Informasi Pasar kerja yang memadai, maka akan tercipta kesempatan kerja dan perluasannya. Untuk menghadapi tantangan di atas, maka perlu kebijakan dalam pembangunan ketenagakerjaan yang proaktif dan menyeluruh.

Tahun 2023, tercatat bahwa jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 5.712 orang dan jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 9.099 orang. Hal tersebut menggambarkan pencapaian persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja yaitu sebesar 62,78% dari target sebesar 24,05%.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja diantaranya melalui Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja melalui pemagangan dalam negeri kepada 130 orang peserta magang yang dimagangkan di 17 perusahaan yang ada di Provinsi Gorontalo, serta pelatihan pengelolaan pakan ikan dan unggas kepada 45 orang tenaga kerja yang tersebar di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango.

Selain itu, untuk meningkatkan kondisi hubungan industrial yang kondusif, melalui program hubungan industrial 12 kasus perselisihan yang dilaporkan di Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo telah diselesaikan melalui mediasi pembinaan bagi perusahaan yang berselisih.

Untuk penjaminan hak-hak tenaga kerja, setiap perusahaan di daerah Provinsi Gorontalo diwajibkan untuk mengikuti asuransi Jamsostek, dan tunduk pada peraturan pemerintah daerah termasuk penentuan upah minimum provinsi (UMP). Upah Minimum Provinsi ditetapkan melalui SK SK Gubernur Gorontalo Nomor 446/32/XI/2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Gorontalo Tahun 2024. Dalam SK Penetapan UMP tersebut, menetapkan UMP Provinsi Gorontalo Tahun 2024 sebesar Rp 3.025.100,-

Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam upaya meningkatkan ketaatan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan dilakukan melalui program pengawasan ketenagakerjaan. Pada tahun 2023, tercatat jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan sebanyak 132 perusahaan atau sebesar 3,07% dan jumlah perusahaan yang terdaftar WLKP online sebanyak 4.307 perusahaan. Pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan ini telah diterapkan oleh 432 perusahaan.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kebijakan Pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan pada peningkatan peran perempuan dalam berbagai strata kehidupan dan peningkatan perlindungan terhadap anak melalui Peningkatan keterampilan dan pengetahuan perempuan; Peningkatan

kesetaraan gender; Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan Peningkatan kelembagaan perempuan dan perlindungan anak, dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam upaya Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak kekerasan dan Pencegahan kasus *Human Trafficking* adalah melalui pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dengan tugas fungsinya adalah melakukan fasilitas pendampingan perempuan dan anak korban tindak kekerasan, yang dibentuk sejak tahun 2016 melalui Perda Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dengan tugas dan fungsinya untuk Perlindungan perempuan meliputi: a. pencegahan tindak kekerasan; b. pelayanan terpadu bagi korban Tindak kekerasan; c. pemberdayaan terhadap korban Tindak kekerasan, Sementara Perlindungan Anak meliputi : perlindungan anak yang menjadi korban tindak kekerasan; dan b. perlindungan khusus anak.

Tabel 2.29

Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, serta
Persentase kasus yang terlayani melalui P2TP2A Provinsi Gorontalo tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Kasus	Korban		Persentase terlayani	
			Anak	Perempuan	%Anak	%Perempuan
1	Kab. Boalemo	38	18	39	100	100
2	Kab. Bone Bolango	34	33	32	93,94	93,75
3	Kab. Gorontalo	45	30	42	70	69,05
4	Kab. Gorontalo Utara	28	27	22	100	100
5	Kab. Pohuwato	57	33	49	100	100
6	Kota Gorontalo	50	22	44	95,45	95,45
	Provinsi Gorontalo	252	163	228	92,64	92,54

Sumber : Data P2TP2A Provinsi Gorontalo, 2023

Data P2TP2A menunjukkan tahun 2022 jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak masih relatif tinggi sebesar 252 kasus menurun dibanding tahun 2021 sebanyak 338 kasus kekerasan perempuan dan anak.

c. Pangan

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadi ketergantungan pangan pada pihak manapun. Pembangunan ketahanan pangan pada hakekatnya adalah pemberdayaan masyarakat, yang berarti meningkatkan kemandirian dan kapasitas masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan dari waktu ke waktu.

Ukuran keberhasilan pembangunan bidang ketahanan pangan dapat diukur dari sisi pola konsumsi pangan ditunjukkan dengan peningkatan skor pola pangan harapan (PPH).

Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Capaian skor PPH provinsi Gorontalo tahun 2023 adalah 76,8 dari target yang ditentukan pada angka 80. Dengan belum tercapainya sasaran tersebut hal ini menandakan bahwa tingkat konsumsi masyarakat Gorontalo masih kurang beragam bergizi seimbang dan aman.

Pada tahun 2023 ini, melalui dana APBD-Perubahan, telah dilaksanakan kegiatan B2SA Stunting, dalam bentuk pemberian beberapa bahan pangan untuk anak stunting antara lain: beras Nutrizink, Telur Ayam, Kacang Hijau dan Susu untuk anak balita. Penerima bantuan berjumlah 225 anak yang ada di Kota Gorontalo 100 anak dan Kab. Gorontalo 125 anak.

Tabel 2.30

Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan dan Konsumsi
Provinsi Gorontalo tahun 2022-2023

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Skor PPH Ketersediaan	66,89	76,6	77,16	79,62
2.	Skor PPH Konsumsi	86	74,3	80	76,8

Sumber : Dinas Pangan Provinsi Gorontalo, 2023

Skor PPH konsumsi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain diversifikasi yang lebih intens baik konsumsi pangan pokok, protein hewani, protein nabati, vitamin, mineral dan serat melalui promosi media informasi terkait keberagaman pangan dan manfaatnya, serta pemanfaatan pekarangan rumah dalam menanam sayur dan buah agar dapat terpenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Jika dibandingkan dengan sasaran target konsumsi pangan dan standar konsumsi pangan yang ideal atau konsumsi pangan normatif, maka diharapkan konsumsi pangan setiap masyarakat agar lebih diperhatikan melalui beberapa program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan di masing-masing kabupaten/kota antara lain kegiatan Pekarangan Pangan Harapan dan kegiatan Germas Batari.

Dalam rangka peningkatan ketersediaan dan pemenuhan konsumsi pangan di Provinsi Gorontalo, berbagai upaya yang dilakukan diantaranya Program Penanganan kerawanan Pangan, melalui penyaluran 1.000 paket bantuan di daerah rawan pangan. Selain itu tahun 2023 dilakukan penyaluran bahan pangan pada Lembaga keuangan desa (LKD) di kios akses pangan yang tersebar di Kabupaten Gorontalo. Jenis bantuan yang diberikan rincian yaitu Beras 4.500 Kg, Gula Pasir 1.950 Kg, Minyak Goreng 600 Liter dan Telur Ayam 4.950 butir, yang dibagikan kepada 30 Unit Kios Akses Pangan. Bantuan ini diharapkan bisa menjadi stimulant untuk kios-kios pangan yang ada di desa-desa rawan pangan.

Kebijakan pemerintah lainnya untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan dilakukan melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, diantaranya melalui Gelar Pangan Murah yang dilaksanakan sebanyak 24 kali di lokasi yang berbeda-beda dengan jumlah komoditi yang disediakan antara lain yaitu Beras, Minyak Goreng, Gula Pasir, bawang merah, bawang putih, cabe dan telur.

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) memiliki peran strategis dalam penyediaan pangan untuk penanganan bencana, kerawanan pangan, kondisi darurat serta menjaga stabilisasi harga pangan di daerah. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan dimana salah satunya dimanfaatkan untuk upaya penanganan kerawanan pangan transien. Untuk cadangan pangan beras sejumlah 41.160 Kg dialokasikan untuk masyarakat di 2 (dua) wilayah yaitu Kabupaten Boalemo dan Kab. Gorontalo dengan rincian 21.160 Kg di Kab. Gorontalo untuk 2.116 KK dan 20.000 Kg di Kab. Boalemo untuk 2.000 KK penerima manfaat.

Indikator lainnya yang menggambarkan capaian pembangunan ketahanan pangan disuatu wilayah yaitu Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang meliputi tiga aspek, yaitu

ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Berdasarkan peringkat IKP Provinsi, Provinsi Gorontalo menempati urutan keenam skor terbaik setelah Provinsi DIY dengan nilai skor 80,35. Wilayah Indonesia bagian timur secara umum memiliki nilai IKP lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia bagian barat. Penyebab rendahnya nilai IKP antara lain produksi pangan wilayah lebih kecil dibanding kebutuhan (kurang), prevalensi balita stunting tinggi, akses air bersih terbatas, dan persentase penduduk hidup miskin tinggi. Penanganan kerentanan pangan yang komprehensif perlu diprioritaskan pada daerah tersebut sesuai dengan faktor penyebabnya.

d. Pertanahan

Urusan Pertanahan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana Amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 dan UU No. 5/1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) bahwa pemanfaatan bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, pasal 2 ayat (4) UUPA menyatakan hak menguasai Negara atas tanah dalam pelaksanaannya dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah. Pembagian kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

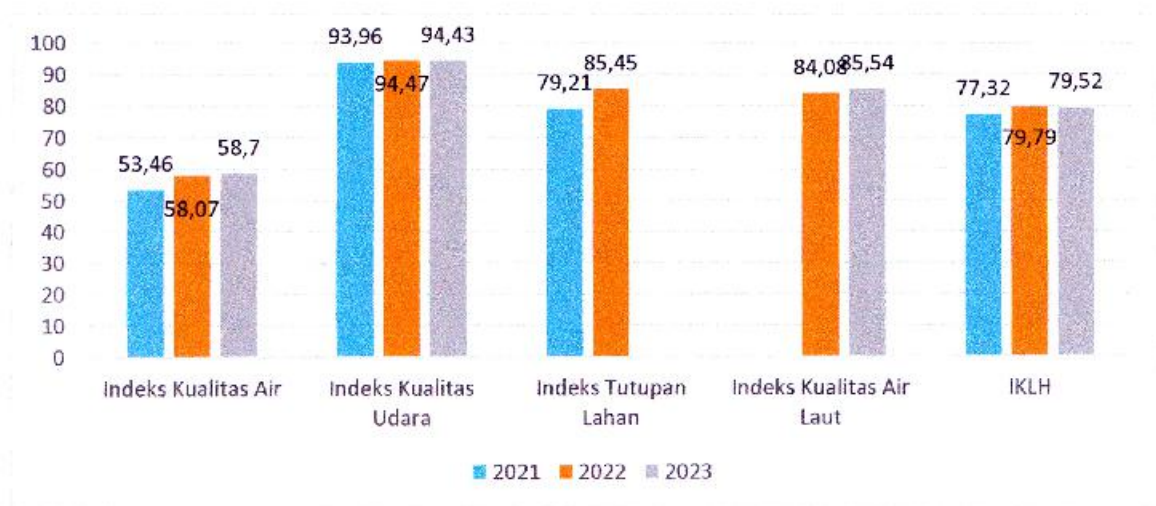
Kebijakan pembangunan bidang Pertanahan dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pemanfaatan ruang wilayah dan pengadaan tanah untuk pembangunan, salah satunya adalah penyelenggaraan pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum. Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyiapkan 11 dokumen pengadaan tanah yang bersertifikat untuk kepentingan umum dengan rincian sebagai berikut :

- 1) 1 dokumen tanah untuk asrama haji
- 2) 1 dokumen tanah yang berlokasi di kawasan City Centre
- 3) 1 dokumen tanah untuk Inspektorat
- 4) 8 dokumen tanah untuk D.I Lomaya

e. Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan alat untuk mengukur kinerja setiap daerah dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Sesuai dengan RPJMN KLHK Tahun 2020 – 2024 bahwa perhitungan nilai IKLH mengalami perubahan perhitungan, sejak tahun 2020 perhitungan nilai IKLH menambah parameter Indeks Kualitas Air Laut, selanjutnya untuk perhitungan nilai Indeks Kualitas Udara yang semula menggunakan 2 parameter NO₂ dan SO₂, di tahun ini menambahkan nilai PM_{2.5}, sementara untuk parameter kualitas air yang menjadi parameter kunci untuk perhitungan nilai IKA bertambah dari 7 parameter bertambah menjadi 8 parameter, demikian juga untuk perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang keseluruhannya menggunakan hasil perhitungan KLHK sehingga nilai IKTL dan IKAL menggunakan hasil perhitungan IKLH Nasional. Pemantauan kualitas udara di Provinsi Gorontalo masih menggunakan 2 parameter SO₂ dan NO₂, namun untuk kualitas air telah memenuhi parameter yang diperhitungkan saat ini;

Grafik 2.15
Indeks Lingkungan Hidup tahun 2021-2023



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, 2023

Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Pengukuran dilakukan dengan mengambil sampel air sungai strategis provinsi. Hasilnya nilai Indeks Kualitas Air Sungai Tahun 2023, terjadi pencemaran dengan kategori cemar ringan. Data tersebut diperoleh dari hasil sample di 5 titik pantau air sungai yaitu Sungai Bone (Bone Bolango), Sungai Bionga (Kabupaten Gorontalo), Sungai Buladu (Gorontalo Utara), Sungai Paguyaman (Boalemo) dan Sungai Taluduyunu (Pohuwato).

Tabel 2.31
Status Mutu Air Sungai Strategis di Provinsi Gorontalo,
Hasil Pemantauan Tahun 2023

NO	Kabupaten/ Kota	STATUS MUTU AIR SUNGAI			
		Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 4
1	Bone	Cemar RINGAN	Cemar RINGAN	Memenuhi	Memenuhi
2	Paguyaman	Cemar RINGAN	Cemar RINGAN	Memenuhi	Memenuhi
3	Bionga	Cemar RINGAN	Cemar RINGAN	Memenuhi	Memenuhi
4	Buladu	Cemar RINGAN	Cemar RINGAN	Memenuhi	Memenuhi
5	Taluduyunu	Cemar SEDANG	Cemar SEDANG	Cemar RINGAN	Cemar RINGAN

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa, pencemaran air terjadi di hampir semua sungai yang mengalir di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan status mutu air sungai berada pada kondisi cemar ringan sampai dengan cemar sedang. Indeks kualitas air tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 58,70. Nilai tersebut berada pada status bahaya dimana status Sungai Bone Bone, Sungai Bionga, Sungai Paguyaman, Sungai Buladu, Sungai Andagile, Sungai Taluduyunu dan Sungai Randangan berstatus cemar ringan sampai sedang. Hal ini disebabkan oleh: Limbah

Domestik, Limbah Pertanian, Limbah Peternakan, Limbah Industri, Perilaku masyarakat membuang tinja dan ketersediaan sarana sanitasi (jamban) yang masih kurang, pengelolaan sampah dan limbah B3 yang belum maksimal, serta Illegal Logging dan ketaatan pelaku usaha yang cenderung rendah.

Dalam upaya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah B3, sebanyak 14 fasilitas kesehatan (Fasyankes) ditingkatkan kinerjanya dalam pengelolaan limbah B3 yang terkelola sebesar 33.868 ton dalam kurun waktu 4 tahun. Di tahun 2023, Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup yang diberikan yakni 1) Pemberian Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi kepada 10 sekolah yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 348/21/IX/2023 tentang Penetapan Penerima Penghargaan/Reward Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Tanggal 7 September 2023; 2) Pemberian Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri kepada SMA Negeri 2 Gorontalo dan 3) Pemberian Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional kepada MAN 1 Pohuwato dan MTs Negeri 1 Boalemo.

f. Penataan Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah pada dasarnya merupakan arah kebijakan pembangunan daerah berwawasan tata ruang wilayah yang digunakan untuk pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang. Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat harus mengacu pada arahan pemanfaatan ruang, sehingga ruang yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sebagai arahan pola penataan Ruang Provinsi Gorontalo, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga telah menetapkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030. Namun demikian, tahun 2017 diusulkan direvisi, hal ini terkait dengan amanat UU nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yang menyebutkan bahwa rencana tata ruang bisa ditinjau 1 kali dalam 5 tahun, dimana sejak tahun 2016 sudah dilakukan peninjauan kembali, hasilnya adalah sebesar 60 % pemanfaatan ruang yang sudah tidak sesuai dengan tata ruang dan peruntukan ruang. Sehingga dokumen RTRW Provinsi Gorontalo perlu untuk dilakukan revisi. Hingga tahun 2022, Perda revisi RTRW Provinsi Gorontalo masih dalam tahapan sinkronisasi data dengan dokumen RZWP3K sehingga kegiatan di alihkan untuk percepatan sinkronisasi revisi RTRW Provinsi Gorontalo.

Disisi lain, Perwujudan tata ruang wilayah bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekonomi, ekologi dan sosial budaya, serta mendukung optimalisasi dan pengelolaan potensi sumber daya alam dan kearifan local, menjaga kelestarian lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata dan pertambangan melalui inovasi dan pengembangan kualitas sumberdaya manusia.

Dalam pelaksanaan urusan penataan ruang tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan program Penyelenggaraan Penataan Ruang melalui kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang

Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi. Hal ini dilaksanakan dalam rangka Meningkatkan Efisiensi, Efektifitas dan Akuntabilitas Pemanfaatan ruang wilayah dan pengadaan tanah untuk pembangunan.

g. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya pada tata kelola data Kependudukan, sementara pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menjadi kewenangan ditingkat Kabupaten/kota. Oleh karenanya melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain melalui Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil dan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk.

h. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu program pemerintah dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Sasaran pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dan masyarakat, terwujudnya perkembangan desa dan kelurahan, terwujudnya kelembagaan masyarakat yang berkualitas, serta Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan prima berbasis reformasi birokrasi.

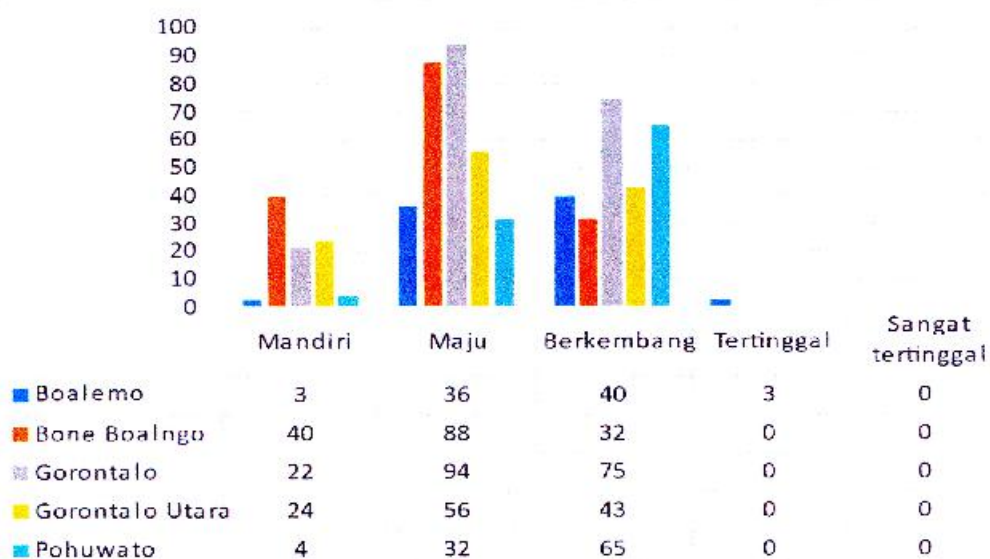
Upaya ini dilakukan melalui program pengembangan desa, Program Peningkatan Kerja sama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan diantaranya Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Data Kementerian Desa, menunjukkan Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Gorontalo sejak tahun 2022 tidak ada lagi desa dengan status sangat tertinggal. Secara keseluruhan

IDM dengan status mandiri pada tahun 2023 sebanyak 93 desa, desa maju sebanyak 306 desa, desa berkembang menjadi 255 desa, dan desa tertinggal 3 sebanyak desa.

Grafik 2.16
Status IDM Per Wilayah Tahun 2023



Sumber : Dinas PMD-Dukcapil, 2023

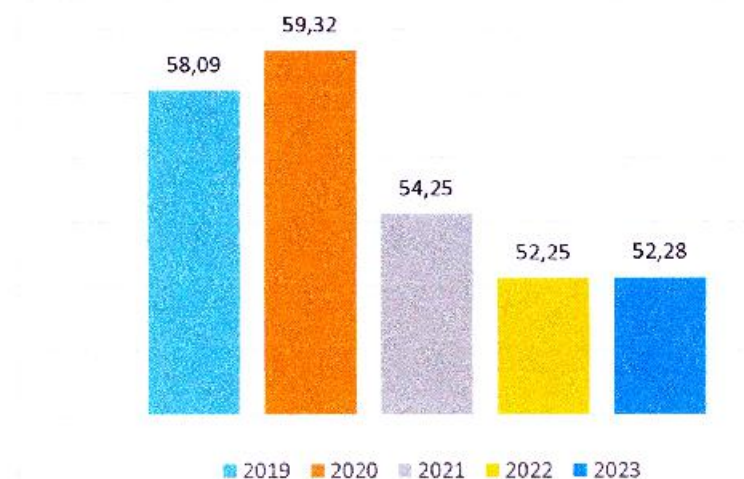
i. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berbicara mengenai kependudukan, fertilitas dan mortalitas menjadi dua hal yang tidak terpisahkan. Keduanya menjadi salah satu penyebab dinamika perubahan jumlah penduduk. Fertilitas memiliki pengaruh positif terhadap laju pertumbuhan penduduk. Meningkatnya jumlah kelahiran akan mengakibatkan pertumbuhan penduduk menjadi semakin tinggi. Sedangkan mortalitas berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk. Semakin meningkat jumlah kematian maka pertumbuhan penduduk akan semakin rendah. Fertilitas Provinsi Gorontalo mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam 22 tahun terakhir. Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) merupakan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang perempuan selama masa usia suburnya (15-49 tahun). Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2000 angka TFR Provinsi Gorontalo mencapai 2,70 yang artinya rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang perempuan sekitar 2-3 anak selama masa reproduksinya. Sementara Long Form SP2020 mencatat TFR Provinsi Gorontalo pada tahun 2022 sebesar 2,30 yang berarti rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang perempuan hanya sekitar 2 anak selama masa produksinya. Berdasarkan data Susenas, usia kawin pertama tahun 2022 dari perempuan diGorontalo masih didominasi oleh perempuan usia 21 tahun ke atas. Usia 19-20 tahun pun masih menduduki posisi yang sama sebagai peringkat kedua yaitu mencapai 23,91 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat untuk tidak menikah muda mengalami peningkatan.

Fenomena fertilitas juga sangat berhubungan dengan program pembatasan anak dan jarak kelahiran dalam keluarga. Partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah menangani masalah kependudukan adalah berupa kesadaran masyarakat untuk menyukseskan program Keluarga Berencana (KB). Salah satu tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, serta mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pengaturan jarak kelahiran.

Grafik 2.17

Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Pernah Kawin yang sedang Menggunakan Alat/Cara KB di Provinsi Gorontalo, 2019-2023



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat 2022, BPS Provinsi Gorontalo, 2022

Program tersebut dapat dilihat dari penggunaan alat KB oleh pasangan. Persentase wanita berumur 15-49 tahun berstatus kawin yang menggunakan alat KB mengalami peningkatan menjadi 52,28 persen tahun 2023 dari 52,25 persen pada tahun 2022. Dalam jangka panjang, peningkatan penggunaan alat KB akan berdampak pada penurunan angka kepadatan penduduk, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan lain sebagainya. Berdasarkan alat atau cara penggunaan KB, jenis KB suntikan masih menjadi alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan di tahun 2023 dengan persentase pengguna sebesar 43,15 persen, angka ini meningkat dibanding tahun 2022 (41,19%). Selain KB Suntikan, susuk KB juga banyak digunakan dengan persentase pengguna sebesar 28,56 persen di tahun 2023. Manfaat implementasi KB sangat berdampak baik dari segala bidang. Selain dapat meningkatkan status kesehatan ibu dan anak dan mengurangi risiko kematian bayi, KB juga mampu mencegah kehamilan yang tidak diinginkan sehingga jarak kelahiran dapat direncanakan dengan matang. Dari segi ekonomi, KB juga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga karena dengan jumlah anak yang sedikit dapat menjamin anak menikmati fasilitas kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas.

j. Perhubungan

Dalam pengembangan suatu wilayah untuk mendukung sektor-sektor yang lain, pembangunan infrastruktur jaringan transportasi mempunyai peran penting. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat dukungan antar wilayah maupun pemerataan pembangunan wilayah.

Pelaksanaan urusan perhubungan bertujuan untuk mewujudkan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kapasitas keselamatan transportasi. Untuk mewujudkannya, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Perhubungan melaksanakan beberapa program kegiatan diantaranya

Program Peningkatan Layanan Transportasi, Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi, Program Peningkatan Kapasitas Keselamatan Transportasi.

Tahun 2023, melalui kegiatan pelayanan angkutan perintis melayani 5 lintasan yaitu Pusat Kota – Kampus Poligon, Pusat Kota-Poduwoma, Pusat Kota – Boidu – Dulamayo – Mongiilo, Dan Pusat Kota – Pangea. Selanjutnya pelayanan Bus Pariwisata Gorontalo – Botutonuo dan Gorontalo – Lombongo serta Pelayanan bus siswa, sebagai layanan antar jemput siswa ini tersebar di lima daerah terpencil dengan puluhan sekolah yang dilintasi setiap harinya. Masing masing di Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango, Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo, Kecamatan Taluditi Dan Kecamatan Wonggarasi Kabupaten Pohuwato Serta Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara.

Tahun 2023 juga dilaksanakan pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ Pada 5 Ruas jalan Provinsi sebagai berikut :

1. Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) / *Zebra Cross* di ruas jalan :
 - Ruas Jalan Raja Eyato (1 Zoss)
 - Ruas Jalan Aloe Saboe (1 Zoss)
 - Ruas Jalan Gorontalo – Batudaa (1 Zoss)
2. Pengadaan RLL (Rambu Lalu Lintas) Tiang Tunggal
 - Ruas Jalan Raja Eyato (34 Buah)
 - Ruas Jalan Kancil - Siendeng (34 Buah)
 - Ruas Jalan Boidu - Dulamayo (60 Buah)
 - Ruas Jalan Talumolo Buata- Duano (Botu Pengge) (64 Buah)
 - Ruas Jalan Beringin (14 Buah)
 - Ruas Jalan Dembe – Lekobalo (4 Buah)
3. Pengadaan RPPJ (Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan)
 - Ruas Jalan Raja Eyato (1 Buah)
 - Ruas Jalan Boidu (1 Buah)
 - Ruas Jalan Tinaloga (2 Buah)
4. Pita Penghadu
 - Ruas Jalan Raja Eyato (1 Titik)
 - Ruas Jalan Tinaloga (Kejaksaan Tinggi) (1 Titik)
 - Ruas Jalan Tinaloga (SD 95 Kota Utara) (1 Titik)
 - Ruas Jalan Akses Botu (1 Titik)
 - Ruas Jalan Rusli Datau (1 Titik)
 - Ruas Jalan Gorontalo – Suwawa – Tulabolo (Jl. Sultan Botutihe) (1 Titik)
 - Ruas Jalan Thayeb Moh. Gobel (1 Titik)
5. *Warning Light*
 - Ruas Jalan Tinaloga (Kejaksaan Tinggi) (1 Titik)
 - Ruas Jalan Aloe Saboe (1 Titik)

- Ruas Jalan Brigjen Piola Isa (1 Titik)

Rasio konektivitas antar wilayah di jalan Provinsi Gorontalo tahun 2023 yakni sebesar 0,8%.

k. Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka meningkatkan kapasitas layanan informasi, kerjasama lembaga komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika terus berupaya meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Hal ini untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi dan transparansi. Selain itu pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Adapun strategi yang dijalankan adalah meningkatkan ketersediaan informasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Beberapa langkah konkrit pengelolaan informasi dan publikasi yang telah dilaksanakan tahun 2023 terdiri dari 9.689 Konten Berita, Video, Foto, 3 Media Cetak, 27 Media Online, 2 Media Elektronik, Hibah KPID.

Integrasi system dalam pelaksanaan pembangunan sangat penting. Salah satu cara untuk dapat mencapai birokrasi dan pelayanan public yang berkinerja tinggi adalah dengan penerapan system pemerintahan berbasis elektronik yang meliputi Penyediaan Pusat Data Terpadu, Jaringan Intra Pemerintah, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Aplikasi Layanan SPBE serta Keamanan Informasi Pemerintah. Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Gorontalo pada tahun 2023 meningkat mencapai 3,22 jika dibanding tahun 2022 sebesar 2,48. Salah satu perwujudan semangat reformasi birokrasi di pemerintahan, khususnya dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance) melalui E-Procurement pemerintah melaksanakan penguatan terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik terutama berbasis web atau internet. Instrumen ini memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE. Provinsi Gorontalo terus membenahi kualitas pengelolaan barang dan jasa dengan hasil capaian Indeks Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa yang menunjukkan hasil yang terus meningkat mencapai 65,90 pada tahun 2022 dibanding capaian tahun 2021 pada angka 62,14.

l. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sasaran Pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah yakni meningkatnya kapasitas usaha kecil menengah, meningkatnya pertumbuhan industry kecil menengah serta meningkatnya nilai ekspor. Tujuannya adalah meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian.

Dalam menunjang hal tersebut, Program yang dilaksanakan meliputi Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dan Program Pengembangan UMKM. Tahun 2023 jumlah koperasi sehat sebanyak 22

koperasi, jumlah SDM koperasi yang meningkat kapasitasnya sebanyak 400 UKM, jumlah koperasi aktif sebanyak 20 unit usaha, jumlah UKM yang berdaya saing sebanyak 50 UKM dan jumlah UKM yang bertansformasi usaha sebanyak 50 unit usaha.

Disamping itu, dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan koperasi, juga dilakukan melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Berdasarkan data Sistem Informasi kredit Program (SIKP) jumlah pelaku usaha yang mengajukan kredit sebanyak 26.961 dengan nilai kredit sebesar Rp. 767.870.039.086,- dan Outstanding sebesar Rp. 506.927.919.360,-.

Tabel 2.32
Perkembangan Koperasi selang tahun 2022-2023

Kabupaten / Kota	2022				2023			
	Aktif	Tidak aktif	Total	RAT	Aktif	Tidak aktif	Total	RAT
Kota Gorontalo	187	145	332	80	196	146	342	90
Kabupaten Gorontalo	351	76	427	98	356	78	434	60
Kabupaten Boalemo	92	61	153	18	92	61	153	12
Kabupaten Pohuwato	101	37	138	18	98	37	165	9
Kabupaten Gorontalo Utara	90	40	130	26	95	40	135	13
Provinsi Gorontalo	61	13	74	10	98	14	112	30
Jumlah	985	429	1414	275	1402	434	1476	245

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, 2023

m. Penanaman Modal

Pembangunan investasi berpengaruh penting dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah. Namun demikian, investasi di Provinsi Gorontalo memang masih dinilai belum begitu berkembang. Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka meningkatkan jumlah dan minat investor di Provinsi Gorontalo yaitu melalui Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Program Pelayanan Penanaman Modal.

Tahun 2023 Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menerbitkan izin dan non izin sejumlah 2.040 yang terdiri atas izin di sektor pertanian, peternakan dan perkebunan sebanyak 22 izin, sektor perikanan dan kelautan sebanyak 371 izin, sektor Perindustrian sebanyak 249 izin, sektor Perdagangan sebanyak 0 izin, sektor Perhubungan sebanyak 11 izin, sektor Kesehatan sebanyak 5 izin, sektor Pendidikan sebanyak 2 izin, sektor Pariwisata sebanyak 24 izin, sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 1321 izin, sektor ESDM sebanyak 35 izin, dan sektor PUPR sebanyak 0 izin.

Pemerintah Provinsi terus meningkatkan pelayanan dengan memberikan kemudahan berinvestasi, serta promosi investasi. Tahun 2023 nilai realisasi Investasi sebesar 3.397 Triliun terlihat telah melebihi target 2,6 Triliun yang ditetapkan.

N. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan, yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk pertama menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan kedua meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pencapaian pembangunan di bidang sosial dan budaya juga ditunjukkan oleh Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Saat ini Indonesia sedang berada di fase penting di mana persentase usia produktif lebih besar dibandingkan persentase usia tidak produktif yang didapatkan melalui bonus demografi yang akan mencapai puncaknya di tahun 2030. Pemuda dengan jumlah yang besar tersebut diharapkan menjadi motor penggerak produktivitas sehingga dapat berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia ke arah yang lebih baik di masa depan. Pada tahun 2020 tercatat bahwa jumlah pemuda di Provinsi Gorontalo sebanyak 314 ribu pemuda (Statistik Pemuda, 2020). Dari tahun 2019 ke 2020, nilai IPP Provinsi Gorontalo naik sebesar 1,34 poin. Selain naik signifikan, capaian domain kesehatan dan kesejahteraan Provinsi Gorontalo juga lebih baik dari level nasional, sebesar 5 poin di atas rata-rata nasional. Sebaliknya, domain pendidikan serta domain partisipasi dan kepemimpinan lebih rendah dari capaian nasional. Meskipun nilai capaian kedua indikator tersebut lebih rendah dibanding level nasional, namun keduanya merupakan penyumbang terbesar terhadap IPP Provinsi Gorontalo.

Pembangunan dalam bidang Kepemudaan dan olahraga terus dilakukan dengan mendorong agar masyarakat gemar berolahraga, kreatif dan inovatif melalui penataan dan menyempurnakan sistem pembinaan dan pengembangan pemberdayaan olahraga, membangun keserasian dan keharmonisan program, mekanisme dan hasil pembangunan keolahragaan kabupaten/kota, serta memfasilitasi dan mengembangkan jaringan serta akses kemitraan disektor olahraga tingkat provinsi sampai kabupaten/kota.

Peningkatan prestasi siswa dibidang akademik dan non akademik terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Strategi peningkatan prestasi dilakukan secara bertahap dan berjenjang serta memperhatikan bakat dan minat siswa terhadap jenis dan lomba tersebut. Pembinaan Pemuda dan Olahraga dilakukan melalui Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan serta Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan dengan memfasilitasi para pelajar dalam mengikuti berbagai kejuaraan baik ditingkat Regional, Nasional maupun Internasional. Sebanyak 377 orang Pemuda dan 60 Olahraga yang dibina dan memperoleh Medali Olahraga Pelajar baik ditingkat Regional, Nasional maupun Internasional dari berbagai cabang olahraga yang diikuti, yaitu dari cabang atletik, sepak takraw, pencak silat, taekwondo dan karate.

Berbagai prestasi tersebut cukup menggembirakan, hingga kedepan akan terus dilakukan peningkatan kesadaran berolahraga di kalangan masyarakat luas, pembibitan olahraga dan

peningkatan jumlah ruang publik untuk olahraga yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan dan masyarakat luas. Diharapkan dengan peningkatan ruang publik untuk olahraga, pembibitan olahraga dan pemasyarakatan olahraga akan memudahkan pencarian dan penemuan bibit unggul daerah di bidang olahraga dan bisa membudayakan olahraga di masyarakat.

O. Statistik

Pembangunan di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keanekaragaman data informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil, perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat akan data dan informasi serta mempersiapkan SDM penyelenggaraan statistik. Informasi data statistik yang akurat secara series dan berkesinambungan sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Data statistik menjadi parameter bagi pemerintah dalam evaluasi dan perencanaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Statistik sangat terkait dengan program/kegiatan pada urusan Perencanaan Pembangunan yaitu dalam penyediaan data dan informasi, sehingga program dan kegiatan dalam urusan statistik yakni Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Dalam pengelolaannya, telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dimasing-masing OPD sebagai penanggungjawab dan penyedia informasi data sektor dimasing-masing OPD. Hal ini dimaksudkan untuk optimalisasi keterisian data sektor dimasing-masing OPD.

Dukungan statistic lainnya adalah melalui penyusunan Buku Profil Daerah, Buku Data Statistik Sektor Provinsi Gorontalo yang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, yang diterbitkan setiap 5 tahun.

P. Persandian

Perlindungan informasi merupakan peran dan tanggung jawab persandian. Di era keterbukaan informasi, setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk mengakses informasi seperti yang tertuang dalam undang-undang keterbukaan informasi public. Namun bukan berarti kebebasan itu tanpa batas, akan tetapi informasi itu haruslah diamankan untuk menjaga stabilitas negara. Pemanfaatan ilmu dan teknologi persandian dapat digunakan untuk menjamin keamanan informasi, karena itu perlu adanya payung hukum yang mengamankan informasi berklasifikasi. Sebagaimana tugas fungsi Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo yaitu dalam rangka peningkatan aplikasi, muatan layanan publik, pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta menjamin keamanan informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka pelaksanaan urusan persandian untuk menjamin keamanan informasi daerah melalui kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk keamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo berbasis elektronik dan non elektronik.

Q. Kebudayaan

Pembangunan Seni Budaya pada dasarnya ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah tengah-tengah semakin deras arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Gorontalo memiliki beraneka ragam budaya daerah yang sangat kental dengan adat istiadat Provinsi Gorontalo. Kebudayaan daerah tersebut meliputi tarian, lagu daerah, alat musik tradisional, upacara keagamaan, rumah adat dan pakaian adat, yang masih dijaga kelestariannya.

Pembangunan dibidang kesenian penting untuk terus dilestarikan dan dikembangkan, karena mempunyai peran penting dalam mendukung pariwisata di Gorontalo. Dengan penguatan terhadap jargon "Serambi Madinah", sangat mendukung terhadap pengembangan pariwisata "*Halal Tourism*". Melalui program Pengembangan Budaya, sebanyak 5 objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan yaitu *Upiya Karanji, elengge, longgo, tiliaya dan ilabulo*.

Dalam rangka pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, beberapa objek cagar budaya yang didaftarkan, ditetapkan dan diregistrasi diantaranya Makam Nani Wartabone, Kompleks Rumah Nani Wartabone, Kompleks Makam Hunodunggala, Pendaratan Soekarno dan Benteng Otanaha.

Apresiasi 5 Warisan Budaya Gorontalo yang ditetapkan sebagai warisan tak benda Indonesia pada tahun 2023 antara lain:

- Walimomo (sertifikat) Nomor Register : MTRAAA89
- Molunggelo (Sertifikat) Nomor Register : MTRAAA8970
- Poluala Nomor (Sertifikat) Nomor Register : MTRAAA8971
- Tidi Lo Bituo (Sertifikat) Nomor Register : MTRAAA8974
- Mandi Safar Atinggola (Sertifikat) Nomor Register : MTRAAA8973

R. Perpustakaan

Berdasarkan UU No. 43 tahun 2007 Berdasarkan UU No. 43 tahun 2007 disebutkan bahwa Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karyatulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Sedangkan fungsi perpustakaan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dinyatakan bahwa perpustakaan mempunyai fungsi yang strategis sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Konsekuensi dari fungsi-fungsi tersebut, berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yakni program Pembinaan Perpustakaan dan Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno melalui Pelestarian Karya Cetak dan bibliografi/katalog induk daerah (BID/KID) yang tersedia pada perpustakaan umum daerah.

Semakin mudahnya akses informasi melalui media internet, semakin tergerusnya budaya baca dikalangan masyarakat. Oleh karenanya Dalam rangka meningkatkan minat baca di Provinsi

Gorontalo, Dinas perpustakaan dan Kearsipan tahun 2023 terus mengembangkan pelayanan kepada masyarakat melalui pengembangan layanan jasa perpustakaan dan informasi, pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan yang dilakukan antara lain dengan Gerakan Gorontalo Gemar Membaca dan pengembangan kapasitas perpustakaan. Dari upaya tersebut, menunjukkan jumlah pemustaka yang mengunjungi perpustakaan tahun 2023 meningkat sebanyak 6.550 pemustaka dibanding tahun sebelumnya sebanyak 2.567 pemustaka. Pemustaka dibagi dalam 2 kategori yaitu kategori Masyarakat/Umum sebanyak 2.312 pemustaka dan kategori pelajar sebanyak 4.238 pemustaka.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat. Berdasarkan laporan IPLM Perpustakaan Nasional RI, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Provinsi Gorontalo tahun 2021 sebesar 22,53 naik menjadi 57,92 pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 sebesar 70,39 dan masuk ke dalam *Kategori Sedang*. Nilai IPLM tertinggi dicapai Kota Gorontalo dengan nilai 74,98 dan Kabupaten Gorontalo Utara 70,69. Sedangkan dua nilai terendah oleh Kabupaten Gorontalo yaitu 61,21 dan Kabupaten Boalemo 65,50.

Berikut sajian rincian data nilai IPLM Provinsi Gorontalo tahun 2023 beserta interpretasinya.

Tabel. 2.33

Nilai IPLM Provinsi Gorontalo tahun 2023

Jumlah Penduduk (BPS 2022)	1.192.737
Jumlah Civitas Sekolah (BPS 2022)	254.002
Jumlah Civitas Akademika (BPS 2022)	59.944
Jumlah Kelembagaan (BPS 2022)	2.875

NO	INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN	NILAI	INTERPRETASI
INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT		70,39	Sedang
1	Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)	0,4323	Pencapaian layanan perpustakaan sebesar 43 persen dari standar
2	Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (UPLM2)	0,4305	Pencapaian koleksi perpustakaan sebesar 43 persen dari standar
3	Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)	1,0000	Pencapaian tenaga perpustakaan sebesar 100 persen dari standar
4	Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari (UPLM4)	0,0647	Pencapaian tingkat kunjungan masyarakat sebesar 6 persen dari standar
5	Perpustakaan yang dibina Sesuai SNP (UPLM5)	1,0000	Pencapaian perpustakaan yang dibina sesuai SNP sebesar 100 persen dari standar
6	Keterlibatan Masyarakat Dalam Sosialisasi Perpustakaan (UPLM6)	1,0000	Pencapaian keterlibatan masyarakat sebesar 100 persen dari standar
7	Anggota Perpustakaan (UPLM7)	1,0000	Pencapaian jumlah anggota perpustakaan sebesar 100 persen dari standar
Keterangan Standar:			
UPLM1: Jumlah kelembagaan		UPLM5: 22,39% dari jumlah perpustakaan	
UPLM2: 2 x jumlah penduduk		UPLM6: 2% dari jumlah penduduk	
UPLM3: 1 tenaga perpustakaan melayani 2500 penduduk		UPLM7: 2% dari jumlah penduduk	
UPLM4: 2% dari jumlah penduduk			

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo, 2023

S. Kearsipan

Arsip merupakan bagian yang terpenting dalam suatu organisasi pemerintah daerah. Menurut pasal 1 ayat Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam rangka mendukung kegiatan *e-government* dalam reformasi birokrasi, maka pengelolaan arsip harus dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan tata cara dan kaidah yang berlaku. Sedangkan kearsipan adalah suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan warkat menurut system tertentu. Kearsipan memegang peranan penting bagi kelancaran jalannya organisasi pemerintah daerah, yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan bagi organisasi.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan lembaga pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pelayanan arsip kepada pengguna arsip di lingkungannya berdasarkan pada

norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Untuk memenuhi prinsip pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, transparan dan akuntabel, maka layanan kearsipan tahun 2023, daerah didesain sedemikian hingga rancangan system layanan kearsipan tersebut mampu memenuhi harapan masyarakat dan memiliki daya guna serta hasil guna.

Kebijakan strategis pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pengelolaan kearsipan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kearsipan melalui penerapan aplikasi SRIKANDI dalam proses surat menyurat. Tujuan penerapan arsip berbasis digital yakni untuk mengurangi pemakaian kertas dalam pengelolaan arsip, pengadministrasian arsip secara digital, serta mengurangi tumpukan arsip.

2.1.3.3. Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

Potensi sumber daya alam di Provinsi Gorontalo sangat strategis khususnya disektor perikanan dan kelautan. Provinsi Gorontalo memiliki luas perairan laut 963.844 Ha atau 9.638.44 Km² yang memiliki panjang garis pantai 903,7 Km terdiri dari 572,5 Km Pantai Selatan/ Teluk Tomini dan 331,2 Km Pantai Utara/ Laut Sulawesi.

Di sektor Perikanan dan Kelautan sampai dengan tahun 2023 menunjukkan capaian hasil yang relatif baik. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi terhadap produksi perikanan tangkap yang mencapai 136.579 ton atau meningkat dibanding produksi tahun 2022 sebesar 135.051 ton. Sementara untuk produksi perikanan budidaya menurun mencapai 44.863 ton tahun 2023, menurun sedikit dibanding tahun 2022 sebesar 49.378 ton. Pertumbuhan produksi perikanan yang signifikan tersebut, memberikan pengaruh juga terhadap rata-rata pendapatan nelayan per bulannya. Dimana pada tahun 2022 pendapatan nelayan dapat mencapai Rp. 4,4 Juta/Bulan. Kegiatan perikanan budidaya juga memegang peranan yang sangat strategis selain perikanan tangkap dalam pembangunan perikanan di Provinsi Gorontalo. Akan tetapi, tingginya kontribusi produksi perikanan tangkap terhadap total produksi perikanan, tidak dibarengi dengan total produksi perikanan budidaya yang masih rendah dan laju persentase pertumbuhannya yang masih di bawah target. Produksi perikanan budidaya mengalami penurunan sampai dengan tahun 2021. Rata-rata laju pertumbuhan hanya sekitar 4,76% dari target pertumbuhan 9% per tahun yang ditetapkan. Penurunan produksi perikanan budidaya ini, berdampak pada capaian Nilai Tukar Nelayan di Provinsi Gorontalo. Bila dilihat dari tingkat pencapaian NTN-Pi, pada tahun 2023 menurun sebesar 97,77.

Tabel 2. 34
 Indicator Kinerja Pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan
 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Capaian tahun			
		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	129.817	131.764,26	135.901 ton	136.579 ton

2	Produksi perikanan budidaya ikan laut dan payau serta rumput laut (Ton)	29.124	50.040	44,700 ton	44.863 ton
3	Produksi benih ikan laut dan payau yang dihasilkan (Juta/ekor)	18	18,11	33 juta / ekor	33,1 juta / ekor
4	Konsumsi ikan masyarakat (kg/kapt/thn)	59.9	61	67.01 kg/kapt/thn	67.03 kg/kapt/thn
5	Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (%)	86	86	100 %	100 %
6	Luas kawasan konservasi perairan daerah yang di kelola (Ha)	11.196	2.426	2.264 Ha	2.264 Ha
7	Pendapatan Nelayan (Rp./bln)	4.211.837	4.211.837	4.422.429 Rp./bln	4.422.429 Rp./bln
8	Pendapatan pembudidaya ikan laut dan payau (Rp./bln)	4.097.973	4.097.973	4,261,892 Rp./bln	4,261,892 Rp./bln
9	Pendapatan Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Rp./bln)	4.262.835	4.262.835	4.412.034 Rp./bln	4.412.034 Rp./bln
10	Produksi ikan yang di antar pulau/antar daerah atau ekspor (Ton)	2.518	2.688,57	4.412 Ton	4.551Ton

b. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor kegiatan ekonomi yang cukup penting dan mempunyai andil yang besar dalam memacu pembangunan. Perkembangan sektor pariwisata akan membawa dampak terhadap perkembangan disektor lainnya seperti perdagangan, akomodasi, jasa-jasa bahkan sektor pertanian dan industry sehingga mampu memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apalagi ditunjang dengan keadaan geografis pegunungan dan panorama alam yang memukau merupakan kekayaan alam yang tak ternilai bagi potensi pariwisata untuk mewujudkan pariwisata Gorontalo yang mendunia.

Untuk mengembangkan sector pariwisata dibutuhkan dukungan dari semua pihak, baik masyarakat, swasta dan pemerintah itu sendiri. Tersedianya sarana dan prasarana ang memadai, serta informasi lokasi wisata, akses jalan, tempat penginapan yang mendukung pariwisata. Selain itu perlu diperhatikan juga factor keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan.

Kebijakan pembangunan urusan kepariwisataan Provinsi Gorontalo diarahkan melalui pengembangan dan pemanfaatan potensi-potensi wisata secara maksimal, melalui Program Pemasaran Pariwisata, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, serta Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Tahun 2022 sektor pariwisata telah bangkit kembali dari keterpurukan akibat adanya pandemi covid-19 pada awal bulan Maret 2020. Pemulihan sektor pariwisata di tahun 2023 ditunjukkan dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Manca Negara mencapai 1.465 orang dengan target 6.500 orang dan jumlah kunjungan wisatawan Nusantara sebanyak 1.080.271 orang dari target 650.000 orang. Sedangkan untuk rata-rata lama tinggal di tahun 2023 ditargetkan selama 2 (dua) hari, namun realisasi hanya mencapai 1,67 hari.

Tabel 2.35
Indikator Kinerja Pembangunan
Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo Tahun 2023

Indikator Kinerja	2023	
	Target	Realisasi
Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata	2,5%	2,39%

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, 2023

C. Pertanian

Struktur ekonomi Gorontalo tahun 2023 dari sisi produksi didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 19.392,63 Miliar Rupiah atau sebesar 37,75 persen distribusi pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, yang masih terus tumbuh di 2023 sebanyak 4,23 persen.

Tabel 2.36
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Provinsi Gorontalo
Tahun 2021-2023

Indikator	Tahun		
	2021	2022*	2023**
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (Miliar Rupiah)	17.082,24	18.073,20	19.392,63
Distribusi Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi (%)	38,92	37,99	37,75
Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor Pertanian	1,76	2,29	4,23

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023

Prioritas pembangunan di bidang pertanian tetap diarahkan pada peningkatan produktivitas dan produksi komoditi tanaman pangan dan hortikultura, peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana lahan dan air dan peningkatan ketahanan pangan. Salah satu strategi yang dilakukan dalam upaya memacu peningkatan produksi dan produktivitas usaha tani padi dan jagung adalah dengan mengintegrasikan dukungan kegiatan antar sektor dan antar wilayah dalam pengembangan usaha pertanian. Pada Tahun 2023 Dinas Pertanian melakukan upaya peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas di Provinsi Gorontalo melalui bantuan Benih dan Pupuk, perbaikan jaringan irigasi, pengembangan optimasi lahan, bantuan alsintan pra panen dan pasca panen, bantuan bangunan dan revitalisasi sarana pengolahan dan Pendampingan, juga telah ditetapkan focus pada lokasi pengembangan 5 kawasan pertanian terpadu. Komoditas strategis dan unggulan nasional dikembangkan pada kawasan-kawasan andalan secara utuh, sehingga menjadi satu kesatuan dalam system pertanian bio-industri. Aktivitas usaha tani dikelola dengan prinsip pertanian lestari dengan memanfaatkan agro-input yang ada di sekitar dan mengelola limbah dengan prinsip *zero waste* melalui *reduce, re-use dan re-cycle*.

Tabel 2.37
Pekembangan Produksi 3 Komoditi Utama Pertanian
Provinsi Gorontalo tahun 2021-2023

No	Indikator (ton)	Capaian		
		2021	2022	2023
1	Produksi Padi (Ton)	291,423	249,709	241.774
2	Produksi Jagung (Ton)	1,537,488	1,050,662	1.014.791
3	Produksi Kedelai	882	1,293	2.215

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, 2023

Pencapaian kinerja sector pertanian di tahun 2023 dapat dilihat dari; produksi padi berdasarkan angka Sementara 2023 (ASEM) sebesar 241.774 ton melampaui target 229.905 ton. Sementara untuk produksi Jagung tahun 2023 sebesar 1.014.791 Ton, dan Produksi kedelai tahun 2023 sebesar 2.215 melampaui target 1.293 ton.

Berbagai upaya peningkatan produksi pertanian melalui peningkatan produktivitas di Provinsi Gorontalo telah dilaksanakan antara lain Bantuan Benih padi yang disalurkan berupa *bufferstock* dan jumlah benih jagung yang disalurkan (*bufferstock*).

Capaian indikator komoditi hortikultura untuk tanaman cabai dari target produksi sebesar 13.249 ton berhasil mencapai 15.521 ton atau 117,15% dari target sementara untuk produksi bawang merah mencapai 215 ton turun dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini disebabkan karena luasan pertanaman bawang merah berkurang karena minimnya bantuan benih bawang merah yang mahal. Sementara untuk produksi kakao tahun 2023 mencapai 2.036 ton juga tidak mencapai target 3.450 ton disebabkan oleh alokasi anggaran yang terbatas serta minat petani terhadap budidaya kakao yang kurang.

Pembangunan sub sektor peternakan juga terus dikembangkan melalui pengembangan bibit ternak, pengembangan dan penerapan teknologi pakan, serta pengembangan kawasan ternak. Upaya menjadikan Provinsi Gorontalo sebagai lumbung ternak terus diupayakan dengan mengembangkan usaha peternakan untuk meningkatkan populasi ternak sapi.

Tabel 2.38
Perkembangan Peternakan Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2023

Komoditi	2021	2022	2023
Populasi Sapi	259.235	265.821	268.126
Populasi Kambing	107.051	108.876	107.670
Populasi Unggas	6.472.171	2.436.006	2.364.862

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, 2023

Capaian indikator program komoditas peternakan secara keseluruhan rata-rata capaian melebihi target dimana populasi sapi yang ditargetkan 265.615 ekor, mencapai 268,126 ekor atau 100,95% dari target. Sama halnya dengan populasi kambing yang ditargetkan 109.839 ekor mencapai 107.670 ekor. Populasi unggas yang ditargetkan 2.480.200 ekor mencapai 2.364.862. Walaupun capaian ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Bantuan ternak ke masyarakat secara keseluruhan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan populasi.

d. Kehutanan

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan Kehutanan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Kebijakan pembangunan urusan pilihan bidang kehutanan di Provinsi Gorontalo memiliki untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Pembangunan dan pelestarian hutan dilakukan melalui program pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Cakupan luas kawasan hutan yang dikelola sebesar 0,04% atau sebesar 5,66% DAS yang dikelola dari target 5,56%.

Selain itu dalam upaya meningkatkan pengelolaan Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang kompetitif dan berkelanjutan melalui program pengelolaan hutan dan program pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.

Kebijakan pemerintah disektor kehutanan tersebut, diperoleh Indeks Tutupan Lahan/Hutan mengalami penurunan ditahun 2023 sebesar 80,24 persen, menurun dibanding tahun 2022 sebesar 85,45 persen, serta Luas Lahan kritis yang direhabilitasi seluas 268 Ha, juga menurun dibanding tahun 2022 seluas 1.272 Ha.

Tabel 2.39
Indikator Pembangunan Urusan Kehutanan
Provinsi Gorontalo tahun 2022-2023

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Tutupan Lahan/Hutan	75,98	85,45	79,72	80,24
2	Luas Lahan kritis yang direhabilitasi	1000 Ha	1.272 Ha	93 Ha	268 Ha

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, 2023

e. Energi Dan Sumber Daya Mineral

Pembangunan bidang energi ketenagalistrikan melalui urusan energi dan sumberdaya mineral telah melaksanakan program-program pembangunan daerah dalam kaitannya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik, pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan, meliputi kegiatan Penganggaran untuk kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan, sebanyak 516 RTS yang terpenuhi kebutuhan Listrik yang tersebar diseluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Peningkatan pemanfaatan sumber energi dan ketenagalistrikan melalui program pengelolaan energi terbarukan yakni pelaksanaan konservasi energi di wilayah provinsi.

Selain itu, di sektor pertambangan mineral dan batubara memiliki potensi strategis untuk pemenuhan kebutuhan umat manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Potensi bahan tambang yang ada di suatu wilayah merupakan bentuk ketersediaan sumberdaya tambang, dalam hal ini sumberdaya mineral. Sumberdaya alam tersebut merupakan modal yang perlu dikembangkan dan dioptimalkan untuk menunjang pengembangan suatu wilayah. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut harus memperhatikan konservasi dan upaya untuk kelestarian fungsi ekosistemnya. Hal ini dilakukan melalui Program Pengelolaan Mineral dan Batubara, melalui Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Bantu dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil ada sebanyak 30 dokumen rekomendasi pertambangan yang diterbitkan.

Selain penyediaan listrik bagi masyarakat, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga memberikan pelayanan dan pemenuhan air bersih khususnya di daerah-daerah sulit air. Pada tahun 2023, 1 (satu) dokumen konservasi Air Tanah telah disusun yaitu di cekungan air tanah Marisa (Paguat-Patilanggio), sehingga tercatat sampai dengan tahun 2023 telah tersedia 2 (dua) data zona konservasi air tanah. Jumlah zona konservasi air tanah di Provinsi Gorontalo adalah sebanyak 7 cekungan air tanah. Hal itu menggambarkan Persentase ketersediaan data zona konservasi dan pemanfaatan air tanah sebesar 29% atau tercapai 100% dari target yang ditetapkan.

Tabel 2.40

Indikator Pembangunan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Gorontalo tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	
		Target	Realisasi
1	Rasio Elektrifikasi	99,5	99,18
2	Persentase bauran energi terbarukan	11,76	18,79
3	Persentase jumlah rumah tangga terpasang listrik	33,34	34,06

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, 2023

f. Perdagangan

Urusan perdagangan merupakan salah satu sektor ekonomi yang mempunyai peran strategis, terutama dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan, mempertahankan stabilitas ekonomi dalam mengendalikan inflasi dan mengamankan neraca pembayaran. Kegiatan sektor perdagangan saling berkait dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya, seperti sektor produksi, yaitu pertanian, industri, dan pertambangan; sektor keuangan; sektor perhubungan dan telekomunikasi.

Peran perdagangan semakin penting dalam perekonomian baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini terlihat dari peningkatan kontribusi PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran dan kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendukung sektor industri, pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan lain-lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor perdagangan.

Pembangunan bidang perdagangan difokuskan untuk peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian. Untuk mewujudkan hal tersebut, dilakukan melalui beberapa program kegiatan diantaranya : Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Pengembangan Ekspor, dan Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

Komoditi produk ekspor tahun 2023 yaitu Ikan Tuna, Molases, Santan Beku, Jagung, Wood Pelet, Briket, dan Minyak Mentah. Jumlah nilai eksport tahun 2023 sebesar \$37.959.205. Data ini diperoleh dari penerbitan Surat Keterangan Asal dan Bea Cukai Gorontalo.

g. Perindustrian

Kebijakan Pembangunan perindustrian difokuskan pada Peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian. Pembangunan urusan perindustrian menjadi sangat penting karena kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan ekonomi sangat besar karena kemampuannya dalam peningkatan nilai tambah yang tinggi, serta sebagai pemicu kegiatan ekonomi lain yang berdampak ekspansif atau meluas ke berbagai sektor jasa, penyediaan bahan baku, transportasi, distribusi atau perdagangan, pariwisata dan sebagainya.

Oleh karenanya penting untuk mendorong Pembangunan sektor industri, yang dimulai dari Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM). Adapun kegiatan yang dilakukan diantaranya Kegiatan pelatihan pengembangan WUB, fasilitasi tempat usaha, bahan dan peralatan, Listrik bagi IKM pangan, Bimtek penyuluhan keamanan pangan, fasilitasi kemasan untuk IKM pangan, fasilitasi sertifikat halal bagi IKM pangan, sosialisasi aplikasi/web Sistem Informasi Industri (SIINAS) serta

fasilitasi pendampingan, konsultasi perizinan khusus sektor industri untuk memberikan kemudahan para IKM dan industri menengah dalam mendapatkan informasi serta pengelolaan perizinan khususnya sektor Perindustrian.

Workshop e-SMART dan E Katalog bagi IKM Pangan, Pengembangan Wira Usaha Baru (WUB) Pangan, Penguatan Jumlah Industri Kecil Menengah IKM dan Wira Usaha Baru (WUB) dalam bentuk Stimulan, Fasilitas Halal Bagi IKM Pangan, dan Fasilitas Kemasan Bagi IKM Pangan. Hingga tahun 2021, sudah sebanyak 15.555 IKM yang dibina.

Sejalan dengan upaya yang dilakukan tersebut, kontribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.41

Laju Pertumbuhan, Nilai dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB)
Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2023

No	Indikator	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Nilai PDRB Sektor Industri (Miliar Rp)	1.936,07	2.169,61	2.269,47
2	Laju Pertumbuhan	5,32	7,79	0,30
3	Distribusi Sektor Industri terhadap PDRB	4,41	4,56	4,42

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa, kontribusi sektor industri terhadap Pertumbuhan PDRB sebesar 4,42 persen. Hingga tahun 2023 Nilai PDRB sektor industri mencapai 2.269,47 Miliar Rupiah.

h. Transmigrasi

Penyelenggaraan urusan transmigrasi mempunyai peran penting dalam pembangunan Nasional, khususnya dalam upaya pengembangan wilayah, pemerataan Pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan terutama di kawasan yang masih terisolir atau tertinggal yang sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat sekitarnya.

Provinsi gorontalo merupakan salah satu Provinsi tujuan transmigran. Terdapat 7 kawasan pemukiman transmigrasi Provinsi Gorontalo meliputi Kimtrans Bukit Aren dengan total 158 KK dan Kimtrans Ayumolingo sebanyak 275 KK yang berlokasi di Kabupaten Gorontalo, Kimtrans Pangea Sp3 sebanyak 150 KK dan Kimtrans Lito SP 1 sebanyak 186 KK yang berlokasi di Kabupaten Boalemo, Kimtrans Sandalan di Kabupaten Pohuwato yang dihuni oleh 165 KK, dan Kimtrans Motihelumo di Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 134 KK. Sedangkan 4 lokasi lainnya yaitu Puncak, Marisa, Pangea Sp4, Pangea Sp1 termasuk UPT pembinaanya telah diserahkan ke kabupaten bersangkutan. Tahun 2023, tercatat masyarakat transmigrasi yang dikembangkan sebanyak 480 KK dan jumlah masyarakat transmigrasi binaan sebanyak 635 KK.

Kegiatannya berupa pembinaan mental spiritual bagi 400 warga transmigrasi di 4 Satuan Permukiman.

2.1.3.4. Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan, keterpaduan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta atas-bawah dan bawah-atas.

Kebijakan Perencanaan Di Provinsi Gorontalo Dilaksanakan Kebijakan Perencanaan Di Provinsi Gorontalo dilaksanakan untuk mengintensifkan penerapan pendekatan HITS dalam formulasi perencanaan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun di tingkat OPD, Meningkatkan sinergi perencanaan dan penganggaran, memastikan pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah, mengembangkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan seluruh pemangku kepentingan. Untuk menunjang hal tersebut, program yang dilaksanakan yaitu : Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dibutuhkan koordinasi antar instansi pemerintah serta partisipasi seluruh pelaku pembangunan dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya, koordinasi tersebut diwadahi dalam sebuah mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional yang dilaksanakan setiap tahun untuk mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan yang kemudian dituangkan dalam dokumen rencana kerja pemerintah untuk pemerintah pusat dan rencana kerja pembangunan daerah provinsi/kab/kota. Selain itu, optimalisasi sinkronisasi antar dokumen perencanaan daerah mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, Renja OPD hingga penyusunan dokumen Penganggaran KUA PPAS dan APBD.

Sesuai dengan ketentuan pada permendagri no. 86 tahun 2017, dalam rangka menjaga sinergitas pembangunan tersebut, Bappeda Provinsi Gorontalo melakukan berbagai tahapan perencanaan pembangunan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 yang sejalan dengan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran dalam RPJPD Provinsi Gorontalo, yang juga selaras dengan RPD 2023-2026.

Kualitas Perencanaan Pemerintah Daerah menggambarkan kondisi perencanaan di Pemerintah Daerah. Dari hasil penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) 2023 Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo mendapat nilai 87,64 dengan predikat Baik.

Penilaian IPPN Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menilai kualitas perencanaan setiap pemerintah Daerah yang ditunjukkan dengan adanya Sinergi antar dokumen perencanaan, Kualitas

Perencanaan dan Keterhubungan antara Rencana dengan Kinerja. Dalam Sistem Perencanaan Nasional, hirarki perencanaan tertinggi yaitu tingkat Nasional wajib menjadi acuan dan didukung pencapaiannya oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Dalam skala Provinsi, wujud perencanaan pembangunan daerah yaitu RPJMD, yang disusun berdasarkan RPJMN, wajib menjadi acuan dalam penyusunan RKPD maupun Renstra dan Renja OPD.

Tabel 2.42
Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perencanaan Pembangunan
Provinsi Gorontalo Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	
		Target	Realisasi
1	Indeks Kualitas Perencanaan	Baik	87,64 (baik)

Sumber : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2023

b. Keuangan

1) Pendapatan Asli Daerah

Otonomi daerah sebagaimana diamanatkan UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menuntut pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengelola sumber keuangannya sendiri. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang, Pendapatan Daerah terdiri atas : (1) Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok, selanjutnya Pendapatan Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam hal ini bagian laba penyertaan modal serta Lain-lain PAD yang sah, (2) Pendapatan Transfer meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus serta Dana Penyesuaian (DID), serta (3) Lain-lain Pendapatan yang Sah yang meliputi Pendapatan Hibah dan Pendapatan lainnya. Pendapatan daerah dapat didorong melalui optimalisasi pengelolaan potensi PAD, dan perbaikan kinerja pemerintah dalam merencanakan besaran pagu DAU dan DAK yang merupakan dan transfer dari pemerintah pusat.

Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo cenderung mengalami fluktuasi, Tahun 2023 Pendapatan Daerah sebesar 1,86 Trilyun Rupiah. Terjadi peningkatan hingga 1,86 persen dibanding Tahun 2022 yang mencapai 1,84 Trilyun Rupiah.

Grafik 2.18
Realisasi Pendapatan dan Persentase Kenaikan PAD
Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2023 (Dalam Milyar Rupiah)



Penurunan pendapatan daerah salah satunya disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan dana transfer daerah yang menyebabkan alokasi dana transfer daerah mengalami penurunan. Pertumbuhan realisasi dana transfer tahun 2019-2023 rata-rata minus 2,62% dan untuk tahun 2023 hanya mengalami kenaikan Rp. 14.751.984.017,00 atau 1,1 persen disbanding tahun 2022.

Tahun 2023 capaian kinerja pertumbuhan pendapatan asli daerah -0,98 karena penurunan realisasi pendapatan asli daerah. Realisasi pendapatan asli daerah tahun 2023 sebesar Rp505,359,577,049.05 dan realisasi tahun 2022 sebesar Rp510,337,164,773.83 atau turun sebesar Rp4,977,587,724.78. Faktor yang mempengaruhi terjadinya penurunan dimaksud terdapat pada sektor pajak kendaraan bermotor dan retribusi. Sektor pajak kendaraan bermotor disebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang sangat rendah. Tingkat kepatuhan wajib pajak tahun 2023 sebesar 39.01% walaupun terdapat peningkatan sedikit 2.55% dari tahun 2022. (Faktor Eksternal) Data dari Gaikindo target penjualan kendaraan baru hanya mencapai 80% dari target 1.000.000 unit kendaraan bermotor di tahun 2023, disebabkan faktor kemarau panjang (El Nino).

Lain-lain pendapatan daerah yang sah walaupun tumbuh rata-rata 22,86% namun Sebagian besar hanya bersumber dari hibah PT. Jasa Raharja dan PT. Pelindo serta lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Dimana jumlahnya relative kecil disbanding sumber pendapatan lainnya. Untuk tahun 2023 juga mengalami penurunan Rp.2.102.202.191,00 atau turun 55,96% dibanding tahun 2022.

Upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka optimalisasi pendapatan pajak daerah diantaranya : Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembayaran secara online melalui E-Samsat dan SAMOLNAS; Melaksanakan Kerjasama dengan Ditlantas Polda Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Razia kendaraan bermotor, *door to door*, samsat keliling, warkop samsat dan *samsat night*; serta memberikan kemudahan informasi pembayaran pemberi PKB melalui Super PKB (Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo PKB).

2) Nilai Opini BPK

Pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mengedepankan aspek akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Dari upaya yang dilakukan tersebut, kinerja pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi tahun 2023 berhasil menjaga predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tabel 2.43
Nilai Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Provinsi Gorontalo
Tahun 2021-2023

Indikator	Tahun		
	2021	2022	2023
Nilai Opini BPK	WTP	WTP	WTP

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2023

Pemerintah Provinsi Gorontalo mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan RI berkat keberhasilannya meraih opini pemeriksaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian sejak tahun 2013 secara berturut-turut sampai dengan tahun 2023. Hal ini karena Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memantapkan dan meningkatkan komitmennya dalam pelaksanaan pembangunan daerah, mulai dari Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Program Kegiatan, Peningkatan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam perwujudan *Good Governance and Clean Governance*.

Selain itu, Penilaian BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah juga ditunjang dengan pengelolaan aset. Badan Keuangan Provinsi Gorontalo terus memperbaiki pengelolaan aset Provinsi Gorontalo, hingga tahun 2023 persentase aset yang dikelola dengan baik sebesar 100 persen.

c. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan (Litbang) berperan penting dalam proses pengambilan kebijakan. Hasil Kajian penelitian dalam bentuk konsep, model, scenario, maupun pilihan kebijakan yang tepat, dapat menjadi rekomendasi dalam mengatasi berbagai masalah dalam pembangunan. Penelitian dan pengembangan yang menjadi fungsi penunjang pemerintahan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo, melalui Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Berbagai hasil kajian penelitian yang dihasilkan dalam mendukung pembangunan Provinsi Gorontalo. Beberapa output yang dihasilkan ditahun 2023 antara lain:

- Buku evaluasi kebijakan
- Buku kolaborasi pengentasan kemiskinan Provinsi Gorontalo
- Dokumen kajian agronomis pemanfaatan jagung sebagai tanaman sela kakao dibawah tegakan kepala
- Produk teknologi informasi untuk pengembangan Geopark Gorontalo

- Dokumen dan hasil rekomendasi kajian (kebijakan rumah layak huni yang efisien yang tahan terhadap bencana)

Hasil Penelitian yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi arahan dalam pelaksanaan perencanaan dan evaluasi Pembangunan Provinsi Gorontalo, Tahun 2023 jumlah pemanfaatan hasil kelitbangan sebanyak 9 dokumen dan jumlah inovasi dan teknologi yang termanfaatkan sebanyak 3 dokumen.

d. Pengawasan

Dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian intern adalah efektivitas “peran” aparat “pengawasan intern” pemerintah (APIP). Pelaksanaan pengawasan intern lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban.

Adapun program yang dilakukan dalam upaya mengoptimalkan fungsi pengawasan internal lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan serta Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Upaya tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Government*). Inspektorat daerah sebagai aparat pengawasan internal pemerintah berperan sebagai *quality assurance* yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif, baik dari sisi administrative maupun pengelolaan keuangan. Titik berat pelaksanaan tugas pengawasannya adalah melakukan Tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh OPD.

Dari segi pengendalian dan pengawasan internal pemerintah terus berupaya meningkatkan kinerjanya. Hal ini terlihat dari capaian Indeks Kapabilitas SPIP dan Indeks Maturitas SPIP, Provinsi Gorontalo berada pada level 3 dan capaian tahun 2022 presentasi pelaporan LHKPN 100 %, LHKS 99,9%, dan SPT Tahunan 87,03%.

Salah satu bentuk komitmen dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas dalam pelaksanaan pembangunan adalah dengan melaksanakan pengajuan unit kerja sebagai wilayah Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan langkah akselerasi guna mencapai sasaran reformasi birokrasi. Sampai tahun 2023 terdapat 6 (enam) unit kerja pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah berkomitmen menjadi Zona Integritas WBK WBBM walaupun belum meraih predikat WBK dan WBBM.

e. Pendidikan Dan Pelatihan

Dalam rangka optimalisasi kinerja Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, maka dilakukan peningkatan kompetensi baik secara struktural maupun fungsional. Dalam menjalankan fungsinya, Badan pendidikan dan pelatihan melaksanakan

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai bentuk upaya peningkatan profesionalisme aparatur, peningkatan kompetensi SDM Aparatur, serta meningkatkan kualitas kelembagaan diklat dengan kegiatan diantaranya :

1. Kegiatan pengembangan kompetensi teknis meliputi Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum serta Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.
2. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional meliputi Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar, Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga, serta Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.

Adapun faktor-faktor penunjang *output* pada kegiatan ini adalah penyusunan *Human Capital Development Plan* (HCDP), pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan, dan pelaksanaan kerja sama penyelenggaraan pengembangan kompetensi dengan K/L/D.

Terkait penyusunan HCDP, di tahun 2023 BPSDM Provinsi Gorontalo masih mengoptimalkan penginputan data rencana pengembangan kompetensi oleh seluruh ASN melalui Rumah Kompetensi (RUKO) melalui kegiatan asistensi penginputan di setiap Perangkat Daerah serta evaluasi penginputan data kompetensi. Berdasarkan hasil inputan tersebut, akan dilakukan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi dari setiap ASN, kemudian akan dilakukan verifikasi dan validasi atas rencana kebutuhan tersebut sehingga terbentuklah Dokumen HCDP. Ditargetkan dokumen HCDP akan berhasil disusun pada tahun 2024, ditambah dengan kebijakan dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN yang sudah menetapkan pengembangan kompetensi yang awalnya merupakan hak, sudah menjadi kewajiban bagi seluruh ASN.

BPSDM Provinsi Gorontalo telah melakukan re-akreditasi sebagai Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa (LPPBJ) dengan hasil memperoleh predikat "A" sehingga BPSDM Provinsi Gorontalo memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi kompetensi pengadaan barang dan jasa untuk seluruh Provinsi di Wilayah III (Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat).

Tabel 2.44

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	
		Target	Realisasi

1	Persentase pengembangan Kompetensi SDM aparatur	20% 491 orang	45% 1.105 orang
2	Akreditasi Lembaga Penyelenggaraan Pelatihan	B	A

Sumber : Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo, Tahun 2023

f. Kepegawaian

Pengelolaan dan manajemen kepegawaian dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pengembangan ASN, layanan kesejahteraan dan pembinaan ASN, serta pengelolaan dan pelayanan manajemen kepegawaian. Badan Kepegawaian dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melakukan manajemen pengelolaan kepegawaian berupa pelayanan kenaikan pangkat, pensiunan, pengangkatan jabatan, pelayanan mutasi, pengelolaan data dan pengembangan sistem pelayanan manajemen ASN, manajemen arsip kepegawaian daerah.

Pelaksanaan urusan penunjang Pemerintahan bidang Kepegawaian dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dengan sasaran yaitu percepatan reformasi birokrasi.

Dalam mewujudkan sasaran tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan Program Kepegawaian Daerah dengan kegiatan diantaranya:

1. Kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN meliputi seleksi penerimaan Praja IPDN tahun 2023 sebanyak 235 orang, seleksi PPPK sebanyak 2022, Kegiatan Pembekalan ASN Purna Bakti sebanyak 160 orang, aplikasi layanan manajemen ASN sebanyak 1 layanan SIMASN, dan arsip kepegawaian yang terpelihara sebanyak 5.385 arsip.
2. Kegiatan mutasi dan promosi ASN meliputi pelantikan pejabat Esselon I dan II, SK Kenaikan Pangkat dan Pensiun sebanyak 1.281 SK dan pengelolaan promosi ASN.
3. Kegiatan pengembangan kompetensi ASN meliputi Bantuan tugas belajar S1: 1 orang, Bantuan belajar S2: 3 orang, Bantuan tugas belajar S3: 5 orang, Bantuan studi IPDN Angkatan I : 16 orang, Bantuan studi IPDN Angkatan II : 16 orang, Bantuan studi IPDN Angkatan III : 10 orang dan Bantuan studi IPDN Angkatan IV: 18 orang.
4. Kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur meliputi kenaikan gaji berkala, karpeg, karis/karsu, SKP Tahunan, Taspen, Taperum, Cuti, Satya Lencana, KPE, dan TKD bagi ASN sebanyak 6.239 orang dan Pelayanan Pembinaan dan Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin ASN sebanyak 71 orang.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Pasal 1, sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Dari hasil penilaian (evaluasi) Indeks sistem merit Provinsi Gorontalo tahun 2023 adalah 327 dengan predikat sangat baik dan predikat kualitas pengisian JPT baik.

g. Kesekretariatan Daerah

1) Nilai SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggung jawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Sejak tahun 2019 hingga 2022 Nilai SAKIP Provinsi Gorontalo sudah berada pada kategori B. Nilai SAKIP tahun 2022 mencapai 68,27 atau Predikat B. Penilaian ini menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah cukup memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Provinsi Gorontalo sudah menunjukkan hasil yang baik.

Tabel 2.45
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021-2022

Indikator	Tahun	
	2021	2022
Nilai SAKIP	68,05	67,63
Predikat	B	B

Sumber : Menpan-RB, 2022

Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Provinsi Gorontalo yang diarahkan untuk menggerakkan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan prima dan berkualitas serta berorientasi pada kepuasan masyarakat telah menunjukkan dampak yang signifikan terhadap kualitas pelayanan publik di Provinsi Gorontalo. Indeks Reformasi Birokrasi menjadi indikator pencapaian terhadap sasaran yang diharapkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam pelayanan pada masyarakat serta mewujudkan reformasi birokrasi yang baik di Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2023, capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Gorontalo mencapai nilai 77,75 dengan Kategori BB. Hasil evaluasi tahun 2023 “tidak diperbandingkan” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan.

Selanjutnya dari sisi tata Kelola pemerintahan, yang ditunjukkan dengan nilai MCP atau *Monitoring Center for Prevention* oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Provinsi Gorontalo sebesar 81,50 persen, menurun dibanding tahun 2022 sebesar 82,51 persen namun masuk kategori Zona Hijau karena berada diatas 70%. Penilaian MCP meliputi tujuh area perubahan, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, perizinan, pengadaan barang dan jasa, pengawasan APIP, Manajemen ASN, Manajemen Aset serta Optimalisasi Pajak Daerah dan Pengelolaan Dana Desa. Nilai MCP Provinsi Gorontalo berada diatas rata-rata MCP Nasional yakni sebesar 65 persen.

Tabel 2.46
 Nilai MCP Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2023

No	Area Intervensi	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Perencanaan dan Penganggaran APBD	100	92,09	73,88
2	Pengadaan Barang dan Jasa	94,46	82,86	100
3	Perizinan	100	99,08	100
4	Pengawasan APIP	89,31	77,48	65,20
5	Manajemen ASN	83,47	63,16	83,93
6	Optimalisasi Pajak Daerah	73,63	73,89	73,69
7	Manajemen Aset Daerah	77,96	85,09	73,01
TOTAL		89,72	82,51	81,50

Sumber : Korsupgah KPK RI, 2023

Selain itu peningkatan Kualitas Pelayanan Publik terlihat dari capaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik pada tahun 2022 mencapai nilai 72,65, meningkat 5,07 point dari capaian tahun 2021 serta capaian Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2022 4,34 dengan kategori Sangat Baik meningkat 0,3 poin dari capaian tahun 2021 serta capaian Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik mencapai nilai 94,9.

Salah satu perwujudan semangat reformasi birokrasi di pemerintahan, khususnya dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance) melalui E-Procurement pemerintah melaksanakan penguatan terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik terutama berbasis web atau internet. Instrumen ini memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE. Provinsi Gorontalo terus membenahi kualitas pengelolaan barang dan jasa dengan hasil capaian Indeks Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa yang menunjukkan hasil yang terus meningkat mencapai 65,90 pada tahun 2022 dibanding capaian tahun 2021 pada angka 62,14.

2) Evaluasi LPPD

LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah pusat. Laporan ini menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, untuk itu Kemendagri menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Dari upaya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Hasil Evaluasi LPPD Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.47

Hasil Evaluasi LPPD Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2023

Indikator	Evaluasi LPPD (Tahun)		
	2021	2022	2023
Kategori	Optimal	n/a	2,8779 (sedang)

Sumber : Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo, 2023

3) Survey Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Dalam rangka optimalisasi tingkat kepuasan masyarakat, pemerintah Provinsi Gorontalo terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dari hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama periode Januari hingga Nopember Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik di lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM rata-rata yaitu 85,087. Sebanyak 42 OPD dan UPTD lingkup Provinsi Gorontalo telah menyampaikan laporannya, hal ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya.

4) Sekretariat DPRD

Dalam meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, serta menunjang peran DPRD dalam pembangunan Daerah, maka sekretariat DPRD tahun 2023 ini memfasilitasi legislative dalam menyelesaikan 7 (tujuh) Rancangan Perda dan telah disahkan menjadi Perda.

Selain itu, dalam rangka peningkatan kapasitas DPRD melalui Bimtek yang diikuti 45 anggota DPRD, penyelenggaraan hubungan Masyarakat melalui Kerjasama dengan Pihak Media cetak dan media elektronik, kegiatan Rapat-rapat Paripurna, Paripurna Istimewa dan semua kegiatan DPRD. Sedangkan kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi Masyarakat untuk menjaring aspirasi Masyarakat di daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD dilaksanakan 3 kali kegiatan reses, dan 96 kali kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD.

2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Kesejahteraan rakyat secara ekonomi salah satunya dapat dilihat dari tingkat pendapatannya. Masyarakat yang pendapatannya lebih besar secara umum dapat diartikan lebih sejahtera dibanding mereka yang pendapatannya rendah. Sejalan dengan pendapatan, pengeluaran penduduk juga mencerminkan kesejahteraannya, dengan asumsi pengeluaran yang besar tentunya mereka juga mempunyai pendapatan yang besar pula.

Konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB Gorontalo sebesar 61,64 persen, yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah gorontalo sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dari Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Provinsi Gorontalo yang mengalami peningkatan pertahunnya.

Tabel 2.48
 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita
 Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2023

Indikator	Tahun		
	2021	2022*	2023**
Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita (Miliar Rp)	27.104,89	29.262,80	31.733,41
Distribusi Pengeluaran Konsumsi RT terhadap PDRB	61,80	61,52	61,77

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2024

*Angka sementara

**Angka sangat sementara

b. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran konsumsi pemerintah didefinisikan sebagai jumlah seluruh pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatannya, yang terdiri dari pembelian barang dan jasa (belanja barang), pembayaran balas jasa pegawai (belanja pegawai), dan penyusutan barang modal, dikurangi dengan hasil penjualan barang dan jasa (output pasar) pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah (yang bukan dikonsumsi oleh pemerintah). Pengeluaran konsumsi pemerintah meliputi Konsumsi Kolektif maupun konsumsi individu.

Tabel 2.49
 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2023

Uraian	Tahun		
	2021	2022*	2023**
Pengeluaran konsumsi pemerintah (Milyar Rp) ADHB	8.680,32	8.903,58	9.208,25
Pengeluaran konsumsi pemerintah (Milyar Rp) ADHK	2.811,20	2.219,56	2.859,73
Laju Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah ADHK	2,64	0,12	0,53
Distribusi Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB	19,78	18,72	17,92

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2024

*Angka sementara

**Angka sangat sementara

Tabel diatas menunjukkan kontribusi konsumsi Pemerintah terhadap PDRB tahun 2023 turun sebanyak 17,92 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 18,72 persen, dengan laju pertumbuhan Konsumsi Pemerintah sebesar 0,53 persen. Total Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (ADHB) mencapai 9. 208,25 Miliar Rupiah.

c. Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)

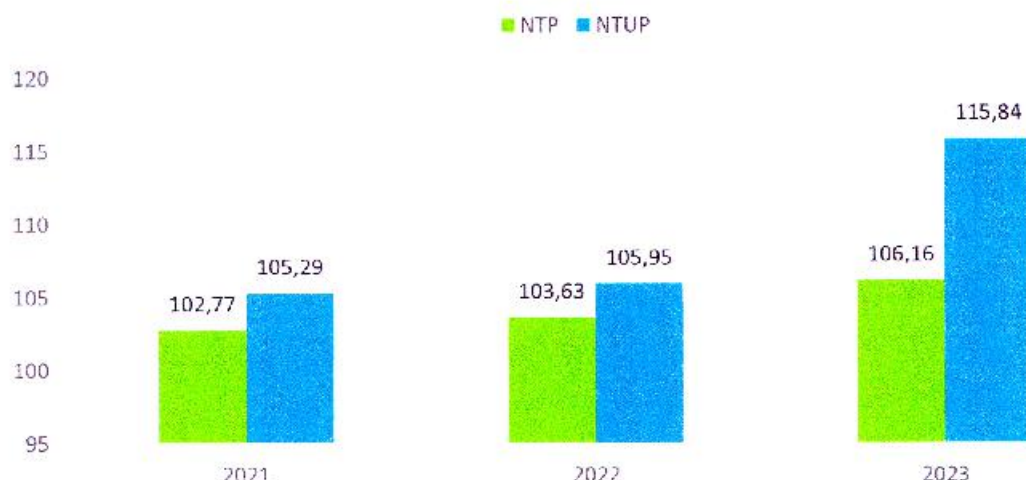
Sampai dengan saat ini NTP dan NTUP menjadi indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dan nelayan. NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima

petani (I_t) terhadap indeks harga yang dibayar petani (I_b). NTP mengukur kemampuan produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani.

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) juga merupakan perbandingan antara Indeks harga yang diterima oleh petani (I_t) dengan Indeks harga yang dibayar oleh Petani (I_b) dimana komponen I_b hanya meliputi Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM).

Semakin tinggi NTP dan NTUP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

Grafik 2.19
Perkembangan NTP dan NTUP Provinsi Gorontalo
Tahun 2021 s.d. 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023

Grafik diatas menunjukkan bahwa Nilai NTUP dari tahun ke tahun berada di angka lebih dari 100, yang mengindikasikan bahwa harga yang diterima petani memperoleh selisih lebih (surplus) dari seluruh biaya produksi oleh petani atas usaha pertanian. Demikian halnya dengan NTP. Pada Desember 2023, NTUP naik sebesar 1,61 persen. Hal ini terjadi karena It naik sebesar 1,88 persen, dan indeks BPPBM naik sebesar 0,26 persen. Seperti yang terlihat pada Tabel 4, tiga subsektor yang mengalami kenaikan NTUP yaitu subsektor tanaman hortikultura, subsektor peternakan, dan subsektor perikanan. Sementara itu, subsektor tanaman pangan dan subsektor tanaman perkebunan rakyat mengalami penurunan indeks.

2.1.4.2. Fokus fasilitas wilayah/ infrastruktur

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah memperhatikan arahan pola ruang dan struktur ruang yang telah dirumuskan dalam kebijakan penataan ruang. Arah kebijakan tata ruang dilaksanakan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang, untuk memastikan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, yang saling bersinergi antara kebijakan pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dilaksanakan dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi suatu wilayah atau kawasan sehingga memiliki nilai tambah bagi masyarakat berupa peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja. Dalam RPJPN 2025-2045, memuat arah pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang difokuskan pada sentra dan kawasan berbasis potensi unggulan daerah yang didukung oleh kawasan perkotaan, meliputi :

- (i) Sentra pertanian, perikanan, perkebunan dan pertambangan sebagai pusat produksi;
- (ii) Kawasan industri unggulan sebagai pusat pengolahan sumberdaya alam;
- (iii) Kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pusat pengembangan industri dan jasa pariwisata
- (iv) Kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan, jasa dan perdagangan.

Arah kebijakan pengembangan pusat pertumbuhan dalam tahap perencanaan dilakukan dengan memperhatikan kebijakan pembangunan wilayah dan dinamika pasar, yang diarahkan pada : (a) pembangunan sentra produksi berbasis komoditas unggulan, kawasan industri pengolahan, serta kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi dengan mempertimbangkan kesiapan lahan, keterkaitan kawasan dengan *hinterland*, serta manajemen rantai nilai dan rantai pasok, (b) percepatan pembangunan infrastruktur dan (c) penyediaan SDM yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, serta (d) penguatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan.

Sebagaimana tema kewilayahan dalam RPJPN 2025-2045, Tema Pengembangan Wilayah Sulawesi diarahkan sebagai **"Penunjang Ekonomi IKN dan Industri berbasis Sumber Daya Alam"**, yang berperan sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pintu gerbang internasional Kawasan Timur Indonesia (KTI), melalui pengembangan industri hilirisasi mineral, dan lumbung pangan nasional. Arah Pembangunan wilayah Sulawesi mencakup 5 (lima) prioritas, sebagai berikut :

Beberapa pembangunan proyek-proyek strategis Nasional yang dilaksanakan di Provinsi Gorontalo antara lain:

1. Pengembangan pelabuhan sebagai simpul utama pembangunan diwilayah Sulawesi untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi, seperti Pelabuhan Gorontalo/Anggrek, sehingga dapat berperan sebagai hub komoditas untuk Kawasan Timur Indonesia;
2. Pembangunan dan Pengembangan bandara untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas;
3. Pengembangan jalan tol dan penyelesaian Trans Sulawesi serta pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan daerah pada koridor utama untuk mendukung integrasi rantai pasok domestik (menghubungkan kawasan ekonomi dan pelabuhan/bandara);
4. Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum masal perkotaan di beberapa wilayah termasuk Gorontalo yang andal serta modern dalam melayani mobilitas penumpang dan barang.

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

a. Angka Kriminalitas

Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, factor keamanan dan ketertiban adalah hal yang penting. Untuk menjamin keamanan dan ketertiban di masyarakat, Provinsi Gorontalo telah diperkuat oleh aparat keamanan yang terdiri dari aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI), aparat Kepolisian (Polri), dan dibantu oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Dari keseluruhan jenis kejahatan, Polri secara khusus dan kontinyu memantau dan mengevaluasi perkembangan sebanyak 11 jenis kejahatan khusus yang dikategorikan sebagai tindak pidana menonjol. Kesebelas jenis kejahatan menonjol tersebut meliputi pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, penganiayaan berat, narkoba, perjudian, pencurian dengan kekerasan, pemerasan, pencurian kayu, penggunaan senjata api dan bahan peledak, penyelundupan dan korupsi.

Berdasarkan laporan kasus criminal Kepolisian Daerah Gorontalo tahun 2023, jumlah kasus terbanyak masing-masing kantor polisi yaitu di Polres Kota Gorontalo sebanyak 728 kasus tindak pidana.

Tabel 2.50

Jumlah Kejahatan yang dilaporkan menurut Kepolisian Resort di Provinsi Gorontalo, Tahun 2018-2021

Kepolisian Resort	Jumlah kejahatan yang dilaporkan		
	2021	2022	2023
Polres Boalemo	235	267	252
Polres Gorontalo	563	557	549
Polres Pohuwato	338	356	441
Polres Bone Bolango	352	383	296
Polres Gorontalo Utara	638	197	203
Polres Kota Gorontalo	224	616	728
Polda Gorontalo	242	296	441
Provinsi Gorontalo	2.592	2.672	2.910

Sumber : Gorontalo Dalam Angka, BPS 2024

Jumlah tindak pidana kriminalitas Provinsi Gorontalo menurut data Kepolisian Daerah Gorontalo Tahun 2023 sebanyak 2.910 kasus, meningkat dibanding tahun 2022 sebanyak 2.672 kasus.

Upaya penurunan tingkat kriminalitas Provinsi Gorontalo terus dilakukan, melalui penguatan koordinasi dan sinergi antara jajaran Forkopimda Daerah bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo.

b. Indeks Demokrasi

Kesadaran politik merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik. Kesadaran politik dan partisipasi politik memiliki hubungan yang berbanding lurus. Asumsinya bahwa semakin tinggi kesadaran politik maka semakin tinggi tingkat partisipasi politik masyarakat. Kesadaran politik dapat diukur dengan melihat capaian Indeks Demokrasi di suatu wilayah. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah angka-angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan beberapa aspek tertentu dari demokrasi. Tingkat perkembangan demokrasi tersebut diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi di semua provinsi di Indonesia. Yang dijadikan aspek demokrasi dalam penyusunan IDI ini adalah Kebebasan Sipil (Civil Liberties), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Pembangunan sosial dan politik diarahkan pada peningkatan kesadaran sosial dan politik demi terwujudnya masyarakat yang harmonis dan dinamis. Pada periode pembangunan 2007-2012 menunjukkan adanya penurunan nilai indeks Demokrasi Provinsi Gorontalo di setiap tahunnya, dimana pada kondisi awal yakni tahun 2009, capaian indeks demokrasi sebesar 73,50 dengan kategori Sedang, sedangkan pada tahun 2012 sebesar 59,37 dengan kategori Kurang, terdapat penurunan sebesar 14,13 point. Penurunan nilai indeks ini tentunya dipengaruhi oleh 3 aspek komposit indeks demokrasi yang juga mengalami penurunan setiap tahunnya. Akan tetapi secara umum jika dilihat pada kondisi awal dan akhir, Indeks Demokrasi Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan sebesar 6,71 point.

Selanjutnya periode pembangunan tahun 2018-2021, Indeks Demokrasi Provinsi Gorontalo masih juga cenderung dinamis dimana dalam kurun waktu 2019 dan 2020 mengalami peningkatan, bahkan pada tahun 2020 Indeks Demokrasi provinsi Gorontalo mencapai nilai pada Kategori Baik. Namun kemudian pada tahun 2021 Indeks Demokrasi Provinsi Gorontalo kembali mengalami penurunan. Capaian Indeks Demokrasi Provinsi Gorontalo tentunya dipengaruhi oleh pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada di beberapa periode tahun yang berbeda. Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Gorontalo jika dibandingkan dengan capaian Provinsi di Pulau Sulawesi berada di Posisi keempat setelah Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dengan Aspek Lembaga Demokrasi yang capaiannya perlu ditingkatkan kedepannya.

c. Lama Proses Perizinan

Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, begitu halnya yang terkait dengan perizinan usaha. Proses perizinan, khususnya perizinan usaha secara langsung berpengaruh terhadap keinginan dan keputusan calon pengusaha atau investor untuk menanamkan modalnya. Peningkatan kualitas pelayanan menyangkut berbagai aspek meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sistem dan prosedur pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan serta SDM pelayanan.

Dalam rangka peningkatan investasi Provinsi Gorontalo, Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperbaiki mekanisme pelayanan perizinan, dengan memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan kepastian hukum bagi para investor.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mengatur terkait kemudahan pelayanan dan perizinan kepada investor antara lain bantuan dalam proses pelayanan perizinan, fasilitasi dan persiapan lahan sesuai rencana peruntukan dengan mengacu pada Tata Ruang Wilayah dan memberikan fasilitasi keringanan pajak dan retribusi daerah untuk jangka waktu tertentu bagi investor yang telah melaksanakan realisasi investasinya, serta memberikan keamanan dan kepastian berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya untuk memberikan kemudahan dalam berinvestasi dilakukan dalam rangka mendorong minat investasi serta meminimalisir permasalahan pengurusan perizinan. Salah satu yang dilakukan adalah dengan membentuk model Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Secara umum penyelesaian proses perizinan di PTSP memerlukan waktu 3 (tiga) hari, hanya beberapa jenis perizinan yang memerlukan penyelesaian maksimal dalam 17 hari.

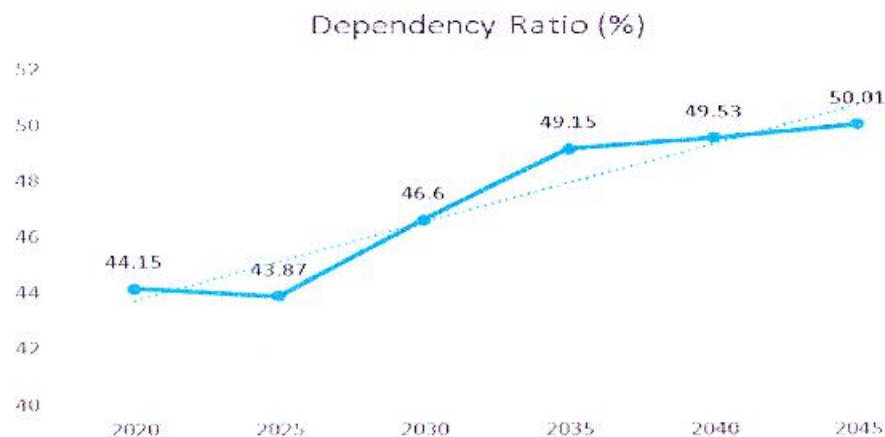
Selain itu dalam rangka peningkatan investasi, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi juga melakukan Mobile Service perizinan dan non perizinan bagi masyarakat dan pelaku usaha serta pelayanan informasi dan pengaduan perizinan. Disamping perbaikan terhadap pola prosedur perizinan, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga terus berupaya meningkatkan investasi dengan membangun system yang terintegrasi secara online berupa aplikasi promosi potensi investasi daerah (APPIG).

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

a. Rasio Ketergantungan

Komposisi penduduk Gorontalo menunjukkan penduduk usia produktif (15-64 tahun) mendominasi struktur penduduk. Kelompok penduduk ini pada tahun 2021 mencapai 69,59 persen dari total penduduk. Tren penduduk usia produktif menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Dampak dari kondisi tersebut yaitu penurunan Angka Beban Ketergantungan. Indikator ini merupakan perbandingan jumlah penduduk bukan angkatan kerja (penduduk usia 0-14 tahun ditambah dengan penduduk usia 65 tahun ke atas) dibandingkan dengan jumlah penduduk bukan angkatan kerja (usia 15-64 tahun). Dengan kata lain, Angka Beban Ketergantungan menunjukkan bagaimana penduduk usia produktif, menanggung penduduk usia non produktif. Indikator ini mengindikasikan daya dukung antar generasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial, yaitu menghubungkan kelompok yang berpotensi untuk bergantung dengan kelompok yang aktif secara ekonomi.

Grafik 2.20
Rasio Ketergantungan Provinsi Gorontalo 2020-2045



Sumber : Badan Pusat Statistik RI, 2023

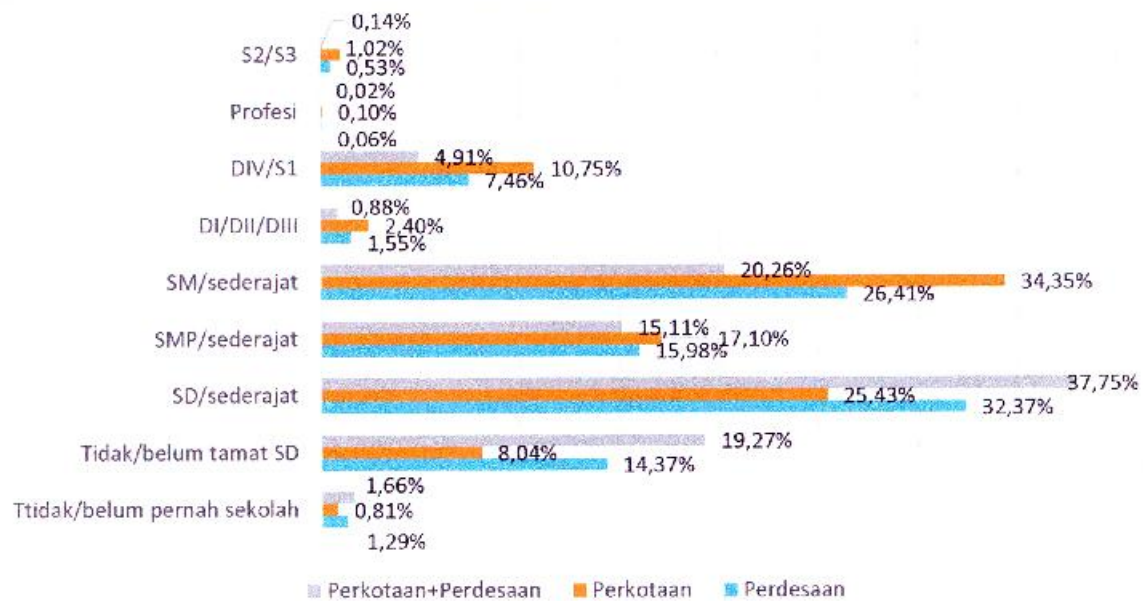
Berdasarkan hasil proyeksi Badan Pusat Statistik, di hampir seluruh wilayah di Indonesia mengalami ageing population, dimana usia 65 tahun keatas meningkat. Jika pada Sensus Penduduk tahun 2020 sebesar 63,99 ribu orang, Pada tahun 2045 meningkat menjadi 177,01 ribu orang atau meningkat hampir 3 kali lipat. Peningkatan ini seiring dengan kemajuan di bidang Kesehatan yang ditandai dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup. Gorontalo diperkirakan akan memasuki ageing population atau penuaan penduduk pada tahun 2035 dimana populasi penduduk lansia sebesar 10 persen. Implikasi dari kondisi tersebut, Rasio ketergantungan juga mengalami peningkatan. Rasio ketergantungan di Provinsi Gorontalo pada tahun 2020 adalah sebesar 44,15 persen dan diproyeksikan akan mengalami penurunan pada tahun 2025 menjadi 43,87 persen. Selanjutnya di tahun 2030 naik menjadi 46,6 persen. Kemudian rasio ini terus meningkat sampai mencapai 50,01 di tahun 2045. Hal ini berarti pada tahun 2045 terdapat 50 penduduk usia non produktif untuk setiap 100 penduduk usia produktif.

b. Persentase Penduduk berumur 15 Tahun keatas dalam status pendidikan

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan. Pemerintah Pusat dan Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangannya terus memperluas akses pendidikan, agar semua anak usia sekolah memperoleh haknya dalam memperoleh pendidikan yang layak.

Grafik 2.21

Presentase Penduduk Provinsi Gorontalo Umur 15 Tahun ke atas Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Pendidikan yang Ditamatkan



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

Dari grafik diatas menunjukkan mayoritas tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk Provinsi Gorontalo yang berumur 15 tahun ke atas adalah SD/Sederajat. Mayoritas penduduk Provinsi Gorontalo berumur 15 tahun ke atas di perkotaan berpendidikan SM/Sederajat, sedangkan di perdesaan berpendidikan SD/Sederajat.

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Hasil evaluasi pelaksanaan Pembangunan sangat penting dalam memberikan gambaran pencapaian pembangunan. Hasil evaluasi pencapaian target indikator pembangunan nantinya dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan, serta sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan dan menentukan arah kebijakan, dan prioritas pembangunan daerah setiap tahunnya. Target pembangunan Provinsi Gorontalo sebagaimana mengacu pada RPD Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026.

Kinerja pembangunan daerah tahun 2023 merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan RPD 2023-2026, dimana capaian pembangunan ditunjukkan dengan realisasi indicator dan target kinerja yang telah ditetapkan. Realisasi target kinerja pembangunan selama tahun 2023, diuraikan sebagai berikut :

No	Aspek/Bidang Urusan/ n/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2020	2021		2022		2023		Interpretasi Belum tercapai (<), Sesuai (=), melampaui (>)
		Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
okus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
.1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0,02	7,24	2,41	7,27	4,04	6,21	4,50	<
.2	IPM	69,51	69,05	69,82	69,62	70,62	69,68	71,25	>
.3	PDRB per kapita ADHB (juta Rp)	35.693.264,29	28.071,650.96	37.170.549,65	28.155.865,91	39.886.776,66	35,94	42,35	>
.4	Laju Inflasi Provinsi	2,47	3,42	2,59	3,30	5,15	2,03	4,40	<
.5	Indeks Gini	0,385	0,37	0,381	0,36	0,423	0,398	0,417	<
.6	Persentase Penduduk Miskin	15,59	15,14	15,41	14,69	15,51	15	15,15	=
.7	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,28	3,04	3,01	2,86	2,58	3,63	3,06	>
okus Kesejahteraan Sosial									
.8	Harapan Lama Sekolah	13,08		13,11		13,12	13,24	13,16	=
.9	Rata-rata Lama Sekolah	7,82	7,70	7,90	7,90	8,02	8,28	8,10	>
.10	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kelompok 16-18			71,30		71,45	71,63	71,70	=
.11	Persentase Satuan Pendidikan berakreditasi minimal B SMA/SMK (%)			SMA : 52 SMK : 39					
.12	Persentase penduduk penyandang disabilitas yang bersekolah			20,3					
okus Budaya dan Agama									
.13	Persentase warisan budaya benda/tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi			Benda: 15 ; Tak benda: 20			Benda: 30 Tak Benda: 35	5	<
.14	Indeks Kerukunan Umat Beragama			68,74			69	71,9	>
2. ASPEK PELAYANAN UMUM									
elayanan Urusan Wajib									
okus Urusan Wajib									
a. Pendidikan									
.1	Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK	77,3	77,63	77,75	78	81,49		86,05	>
b. Kesehatan									
.1	Usia Harapan Hidup	68,07	67,92	68,19	68	68,51	68,80	70,50	>
.2	Prevalensi Stunting			29			17	26,9	<
c. Pekerjaan Umum									
.1	Kondisi Mantap Jalan (%)	54,38	65,2	58	70	60,05	60,4	70,23	<

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2020	2021		2022		2023		Interpretasi Belum tercapai (<), Sesuai (=), melampaui (>)
		Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
.2	Persentase kinerja irigasi kewenangan provinsi			50%	55%		60%		
h. Perumahan									
.1	Persentase cakupan akses air minum layak (%)			94,57	94,96	96,16	95,35	100	>
.2	Persentase cakupan akses sanitasi layak (%)	76,71	67,71	75,68	77,14	79,82	78,61	100	>
.3	Penurunan Luas Kawasan Kumuh (Ha)	16 Ha	24 Ha	24 Ha	38 Ha	38 Ha	19 Ha	26 Ha	>
i. Lingkungan Hidup									
.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,66	73,39	77,32	73,39	79,79	74,31	79,52	>
j. Sosial									
.1	Cakupan penerima penjaminan pemeliharaan Kesehatan (UHC)			89,4%			91%	83,59	<
.2	Cakupan Masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan sosial (%)			20			21	11,42	<
k. Pemerintahan									
.1	Nilai MCP			89,72	91,2		92,65	81,50	<
.2	Indeks Reformasi Birokrasi (Predikat)			63,90	64,5		65,1	77,75	>
.3	Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	B	BB	B	BB	BB	=
.4	Indeks Kematangan Organisasi			48	48		48		
.5	Indeks Kualitas Perencanaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Kategori baik	87,6 baik	=
.6	Opini pengelolaan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	=
.7	Indeks system Merit			238,5 (kurang)			292	322	>
.8	Nilai Maturitas SPBE			2,51			2,77	3,22	>
.9	Indeks Demokrasi			70,54			72		
.10	Nilai Pengawasan Kearsipan			62,48					
l. Ketahanan Pangan									
.1	Indeks Ketahanan Pangan			80,40*	81,86		83,22	80,35	<
m. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
0.1	Kemiskinan Perdesaan			24,32	23,78		23,5		
0.2	Peningkatan status desa dari maju menjadi desa mandiri (Kawasan strategis provinsi/lokasi prioritas)			2	3		4		

No	Aspek/BidangUrusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2020	2021		2022		2023		Interpretasi Belum tercapai ($<$), Sesuai ($=$), melampaui ($>$)
		Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1. Komunikasi dan Informatika									
1.1	Nilai Maturitas SPBE	3,18	3.83	2,51	2,64	2,51	2,77	3,22	$>$
1.2	Indeks Pembangunan Statistik			1,5	2		2,5		
2. Penanggulangan Bencana									
2.1	Indeks Resiko Bencana			126,64	123,84		123	120,61	
3. Penanaman Modal									
3.1	Realisasi PMA/PMDN (milyar)			10.145	11.345		11.824		
14. Perhubungan									
4.1	Rasio Konektivitas antar wilayah (%)			0,553	0,553		0,553		
15. Kepemudaan dan Olahraga									
5.1	Indeks Pembangunan Gender			86,74	86,93		87,03	88,24	$>$
5.2	Indeks Perlindungan Anak			64,49	66,12		67,57		
5.3	Indeks Pembangunan Pemuda			48,17	50,58		51,59		
16. Perpustakaan									
6.1	Indeks Pembangunan literasi masyarakat			22,53	27,12		36,40		
Pelayanan Urusan Pilihan									
7. Pertanian									
7.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	99,43	105.63	103,29	104,46	105,95	104,97	106,16	$>$
7.2	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB			38,80	38,04		38,14	37,75	$<$
7.3	Nilai Tukar Usaha pertanian (NTUP)	103,37	104.12	108,55	105,01	108,44	109,90	115,84	$>$
8. Kehutanan									
8.1	Penurunan emisi GRK (%)			27,3					
9. Pariwisata									
9.1	Kontribusi PDRB sektor pariwisata			N/A	N/A		2,5	2,39	$<$
10. Kelautan dan Perikanan									
7.1	Nilai Tukar Nelayan/ Pembudidaya Ikan (NTN-Pi)	95,54	101.7	96,73	102,1	100,29	97,77	97,77	$=$
11. Energi dan Sumber Daya Mineral									
1.1	Rasio Elektrifikasi (%)			99,2*	99,3		99,5	99,18	$=$
12. Industri									
2.1	Kontribusi industry pengolahan terhadap PDRB			4,31*	4,82		5,27	4,42	$<$
13. Perdagangan									
	Nilai Ekspor (juta USD)			13,2*	15,59		18,03	37,96	$>$

B. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.1. Permasalahan Pembangunan

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan, masih ditemukan berbagai Permasalahan dan hambatan dalam mewujudkan target-target pembangunan yang telah direncanakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2023. Beberapa permasalahan dalam pencapaian target pembangunan diidentifikasi sebagai berikut:

1. Rendahnya produktifitas ekonomi daerah, yang ditandai dengan kontribusi PDRB hanya 0,12 persen terhadap PDB Nasional dan terendah secara Nasional maupun Regional Sulawesi. PDRB Provinsi Gorontalo mencapai kurang lebih 47.574,4 Miliar Rupiah (2022). Produktifitas sektor perekonomian yang cenderung rendah diantaranya disebabkan karena kualitas SDM, inovasi dan pemanfaatan teknologi yang masih lemah. Proses produksi masih bersifat parsial dan masih rendahnya upaya hilirisasi sektor-sektor perekonomian khususnya disektor pertanian sebagai sumber utama perekonomian di Provinsi Gorontalo. Produktifitas rendah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Gorontalo yang cenderung mengalami pelambatan dalam pertumbuhannya. Rata-rata pertumbuhan ekonomi pada periode 2017-2022 sebesar 4,34 persen, tumbuh melambat dibanding periode 2012-2017 yang pertumbuhannya diatas 7 persen pertahunnya.
2. Transformasi ekonomi berjalan lambat. Struktur ekonomi Provinsi Gorontalo dari sisi lapangan usaha masih didominasi sektor primer Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi rata-rata sebesar 38 persen, sedangkan sektor manufaktur hanya memberikan kontribusi rata-rata sebesar 4% terhadap struktur PDRB. Dari sisi produksi permasalahan yang dihadapi disektor industri berkaitan dengan kualitas tenaga kerja dan adaptasi teknologi yang berimplikasi terhadap kualitas dan daya saing produk. Hal lainnya yaitu terkait dengan manajemen kemitraan dan distribusi pemasaran produk baik ekspor maupun perdagangan antar pulau yang cenderung masih belum optimal.
3. Produktifitas tenaga kerja dan pendapatan perkapita masyarakat masih cenderung rendah, yang di antaranya dipengaruhi oleh serapan tenaga kerja lebih besar disumbang dari angkatan kerja dengan tingkat pendidikan lulusan SD/SMP sebesar 34,60 persen, dan pekerja yang tidak pernah mengenyam pendidikan sebesar 28,12 persen (tahun 2022). Selain itu ketidaksesuaian keahlian (*mismatch*) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, informasi tenaga kerja belum mampu menjadi sarana pasar kerja yang baik dalam merespons cepat kebutuhan dan jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk dan pola budaya kerja. Persoalan lainnya tingkat serapan tenaga kerja masih cenderung rendah karena kesempatan kerja yang terbatas.
4. Sektor pariwisata cukup potensial namun masih belum berkontribusi optimal terhadap perekonomian daerah. Hal ini karena belum optimalnya pengelolaan kawasan-kawasan wisata strategis di Provinsi Gorontalo, ketersediaan infrastruktur sarana prasarana, amenities, atraksi,

dan aksesibilitas, SDM pariwisata masih belum cukup memadai. Pengembangan kawasan wisata dan promosi sektor pariwisata masih digarap secara konvensional dan parsial. Akselerasi investasi sektor pariwisata serta penciptaan branding lokal masih belum optimal.

5. Kondisi infrastruktur seperti jalan, irigasi masih belum optimal. Hal ini dilihat dari kondisi mantap jalan yang masih berada pada angka 60,05 persen. Berdasarkan kategori jalan, panjang jalan dengan kondisi rusak berat sebesar 33,41 Km, dan rusak ringan sebesar 6,55 Km. Jika dilihat dari rasio panjang jalan dibandingkan dengan jumlah kendaraan di Provinsi Gorontalo, setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan jumlah ruas jalan belum sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan yang setiap tahunnya tumbuh rata-rata 0,12 persen. Disisi lain, kondisi Daerah Irigasi (DI) kewenangan Provinsi untuk jaringan irigasi saluran primer dan sekunder dengan panjang 137.713,58M dalam kondisi Baik 59,45 % sementara Rusak 40,54 %. Selain itu Masih rendahnya konektivitas antar wilayah, belum terbukanya beberapa ruas jalan di antaranya Marisa –Tolinggola, Tapa-Atinggola dan beberapa jalur strategis lainnya dalam mendorong pengembangan ekonomi.
6. Tingkat partisipasi angkatan kerja masih rendah. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Gorontalo cenderung rendah dengan rata-rata selama 10 tahun terakhir sebesar 3,9 persen. Tingkat Setengah Penganggur di Provinsi Gorontalo masih mendominasi sebesar 6,10 persen ditahun 2022. Selain itu tingkat produktifitas masih rendah. Hal ini disebabkan karena menurut tingkat pendidikan, tenaga kerja didominasi oleh pendidikan menengah kebawah sebesar 86,59 persen tahun 2022. Menurut status pekerjaan utama, tenaga kerja masih didominasi pada sektor informal sebesar 64,97 persen. Sedangkan menurut lapangan pekerjaan utama, serapan tenaga kerja masih didominasi disektor pertanian sebesar 33,3 persen, dengan tingkat upah yang relatif kecil. Fenomena lainnya menunjukkan bahwa kesenjangan tingkat partisipasi angkatan kerja Laki-laki dan perempuan masih cukup tinggi. TPAK laki-laki sebesar 85,30 persen, sedangkan TPAK perempuan 52,64 persen. Sementara persentase usia muda (15-24) tahun yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan Provinsi Gorontalo atau NEET (*Not Employment, Education and Training*) masih cukup tinggi sebesar 28,03 persen.

2.3.2. Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pada setiap Sasaran prioritas pembangunan yang perlu terus direduksi adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan

1. Rendahnya penganeekaragaman pangan dan optimalisasi Toko Tani Indonesia;
2. Rendahnya kualitas sarana prasarana pembibitan ternak, revitalisasi rumah potong hewan, penyediaan pakan ternak yang berkualitas untuk ternak ruminansia dan non-ruminansia, holding ground;
3. Rendahnya kualitas sarana prasarana untuk perikanan tangkap, Perikanan budidaya, Pelabuhan Perikanan, balai benih ikan/udang dan laboratorium perikanan;
4. Belum optimalnya Integrasi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan peternakan dan perikanan;
5. Belum optimalnya Penerapan standarisasi dan sertifikasi produk pangan;

Sasaran 2 : Meningkatnya nilai tambah produk unggulann daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian

1. Belum optimalnya investasi melalui promosi, peningkatan layanan perizinan dan membangun kemitraan;
2. Belum optimalnya desain perencanaan industri, melakukan pengendalian izin usaha industri, mengelola sistem informasi industri, pengendalian dan pengawasan terhadap limbah industri;
3. Rendahnya produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pengawasan dan hubungan industrial;
4. Rendahnya kapasitas kelembagaan usaha koperasi, IKM dan UKM;
5. Kurangnya Digitalisasi promosi dan pemasaran;

Sasaran 3 : Meningkatnya daya saing dan kemandirian desa

1. Belum optimalnya Revitalisasi lembaga ekonomi desa;
2. Kerjasama antar desa dan antar lembaga ekonomi desa belum terintegrasi;
3. Rendahnya sarana prasarana ekonomi desa;
4. Rendahnya infrastruktur ekonomi desa;
5. Belum optimalnya Pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga berdasarkan potensi desa;

Sasaran 4 : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

1. Rendahnya jangkauan dan kualitas infrastruktur ekonomi dan layanan dasar;
2. Rendahnya pengelolaan dan penanganan sampah;
3. Rendahnya pengelolaan penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana;
4. Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum lainnya yang belum memadai;
5. Belum optimalnya kualitas pemanfaatan ruang;

Sasaran 5 : Meningkatnya mutu dan kualitas layanan pendidikan

1. Rendahnya kualitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan secara proporsional;
2. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana Pendidikan
3. Rendahnya kualitas kurikulum;
4. Belum optimalnya pengembangan Kerjasama Dunia Pendidikan dengan Dunia Usaha;
5. Belum optimalnya pengembangan kegiatan ekstrakurikuler berbasis entrepreneurship;
6. Rendahnya ketersediaan dan kualitas data pendidikan;
7. Belum optimalnya koordinasi dan advokasi pemerintah kabupaten/kota dalam pemenuhan SPM pendidikan.

Sasaran 6: Meningkatnya derajat kesehatan

1. Rendahnya sarana dan prasarana fasilitas Kesehatan RSUD Ainun Habibie dan Labkesda;
2. Kurangnya ketersediaan dan kualitas SDM Kesehatan pada fasilitas Kesehatan provinsi;
3. Rendahnya kualitas tata kelola layanan Kesehatan di fasilitas kesehatan provinsi;
4. Belum optimalnya pengelolaan rujukan dan rujuk balik di fasilitas kesehatan;
5. Kurangnya promosi dan pemasaran Labkesda;

Sasaran 7 : Pemenuhan hak social dasar masyarakat

1. Belum optimalnya penguatan pendampingan pelaksanaan jaminan sosial;
2. Upaya pemenuhan layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih rendah;
3. Upaya pemenuhan hak dasar anak terlantar, disabilitas dan lansia dalam panti masih kurang;
4. Advokasi pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten/Kota secara dinamis serta pengembangan sistem evaluasi terpadu belum maksimal;
5. Pemanfaatan DTKS dalam penentuan sasaran penerima bantuan sosial belum optimal;
6. Pemberian kebutuhan pangan khusus untuk perbaikan dan penjaminan pertumbuhan gizi anak dan ibu hamil belum optimal.

Sasaran 8: Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda

1. Upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak belum maksimal;
2. Rendahnya kapasitas ekonomi perempuan;
3. Rendahnya keamanan perempuan dan anak dari kekerasan dan pelecehan seksual;

4. Potensi dan minat pemuda masih sangat rendah;
5. Jiwa wirausaha muda sangat kurang.

Sasaran 9: Meningkatnya pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama

1. Revitalisasi, pemanfaatan, aktualisasi, cagar, objek, nilai budaya dan kearifan lokal untuk mendukung Rintisan Geopark Gorontalo belum optimal;
2. Pengembangan, perlindungan hak dan pengelolaan kebudayaan belum maksimal;
3. Rendahnya sarana prasarana pusat pembinaan mental spiritual;
4. Pengembangan nilai-nilai keagamaan khususnya islam sebagai akar budaya daerah belum maksimal;
5. Rendahnya kerukunan dan toleransi antar umat beragama.

Sasaran 10: Meningkatnya budaya literasi masyarakat

1. Peran perpustakaan sekolah dan perpustakaan daerah sebagai sarana sosialisasi dan penguatan literasi peserta didik dan masyarakat belum optimal;
2. Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra daerah belum maksimal;
3. Pengembangan teknologi informasi sebagai corong informasi literasi masyarakat yang mudah diakses dan diperoleh masyarakat masih kurang;
4. Penguatan institusi sosial penggerak, penggiat dan pemerhati literasi sebagai mitra pemerintah dalam penguatan literasi masyarakat tidak maksimal.

Sasaran 11: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

1. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup belum optimal;
2. Rendahnya Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dalam pelaksanaan izin lingkungan / persetujuan lingkungan, SLO dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup;
3. Rendahnya kualitas SDM Lingkungan Hidup dan kehutanan Serta Pemberdayaan Masyarakat kehutanan;
4. Pembangunan Rendah Karbon masih kurang;
5. Rehabilitasi hutan dan lahan dalam kawasan dan luar kawasan hutan belum maksimal;

Sasaran 12: Meningkatnya ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim

1. Rendahnya kualitas tata kelola penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana;
2. Penanganan bangunan rumah korban bencana dan dampak program sesuai SPM belum optimal.

Sasaran 13: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

1. Penguatan manajemen institusi pemerintah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan, penerapan standar internasional dalam mutu layanan publik, tata kelola pemanfaatan TIK belum optimal;
2. Proses bisnis organisasi pemerintah berbasis pada prioritas pembangunan belum maksimal;
3. Transformasi digital dalam penerapan SPBE secara terintegrasi melalui pemanfaatan infrastruktur, proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, dan layanan SPBE secara terpadu perlu ditingkatkan;
4. Penerapan manajemen talenta ASN, dalam bentuk penguatan perencanaan kebutuhan ASN sesuai prioritas pembangunan, pengembangan pola karir structural dan fungsional, pelaksanaan talent pool JPT, implementasi Human Capital Development Plan (HCDP) dan pengembangan budaya kerja berakhlak belum optimal;
5. Penguatan kebijakan kesejahteraan ASN dalam bentuk kebijakan insentif untuk ASN tingkat risiko pekerjaan tinggi, dan bertalenta (*high performance*) perlu ditingkatkan;
6. Perluasan implementasi sistem integritas, melalui penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM dan pengembangan dan implementasi sistem integritas ASN belum optimal;
7. Penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, melalui penyempurnaan kebijakan dan implementasi manajemen risiko, penguatan implementasi SPIP sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah perlu ditingkatkan;
8. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pernatausahaan daerah melalui pemanfaatan SIPD sesuai UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah perlu ditingkatkan;
9. Pemanfaatan TIK untuk penguatan penerapan e-services dan Sistem Informasi Pelayanan Publik belum maksimal;
10. Kurangnya Penerapan replikasi inovasi pelayanan publik;

Sasaran 14 : Meningkatnya stabilitas keamanan dan penguatan demokrasi daerah

1. Pencegahan kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan dan disabilitas masih belum optimal;
2. Rendahnya kerjasama dan koordinasi dengan lembaga kepolisian dan TNI;
3. Rendahnya kerukunan beragama dengan memperhatikan kesetaraan, keterwakilan, partisipasi etnis;
4. Penguatan karakter dan wawasan kebangsaan sesuai nilai-nilai Pancasila kurang maksimal;
5. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten masih kurang;
6. Rendahnya kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil;
7. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang baik perlu ditingkatkan.

2.3.3. Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2024

Hasil evaluasi pelaksanaan Program Kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, disajikan dalam bentuk tabel Evaluasi sesuai Permendagri 86 Tahun 2017, Formulir E.19 Evaluasi terhadap Hasil RKPD.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rencana pembangunan daerah tahunan memuat tema khusus terkait ekonomi dan keuangan daerah yang disajikan dalam Bab III. Pada bagian ini menguraikan dua point utama yakni Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. Namun demikian, analisis perlu diperluas dalam lingkup pembangunan ekonomi, mengingat tujuan hakiki pembangunan ekonomi yakni kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditunjukkan oleh indikator makro ekonomi semata-mata, namun juga tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, sehingga arah kebijakan ekonomi menjadi arah kebijakan pembangunan ekonomi.

Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah untuk tahun 2025 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2023, proyeksi Tahun 2024 dan 2025. Dengan demikian pembahasan pada bagian ini diawali dengan Kondisi Pembangunan Ekonomi Provinsi Gorontalo 2023, selanjutnya Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024 dan 2025 . Pada akhir sub bab adalah poin-poin arah kebijakan pembangunan ekonomi tahun 2025.

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1.1. Kondisi Ekonomi Makro Provinsi Gorontalo

Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Gorontalo tahun 2023 tumbuh sebesar 4,50 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,04 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,95 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 6,81 persen

Ekonomi Gorontalo triwulan IV-2023 terhadap triwulan IV-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,92 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,05 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dialami oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 10,50 persen.

Ekonomi Gorontalo triwulan IV-2023 terhadap triwulan sebelumnya (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 0,38 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori Jasa Perusahaan sebesar 6,76 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dialami oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 27,14 persen.

Pertumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan usaha. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan kategori yang mengalami pertumbuhan tertinggi mencapai 9,95 persen; diikuti Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6,29 persen; serta Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,18 persen.

Tabel 3.1

PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010, 2021-2023 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha		Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
		2021	2022*	2023**	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	17.082,24	18.073,20	19.392,63	10.663,64	10.907,95	11.369,43
B.	Pertambangan dan Penggalian	483,23	519,28	562,13	339,34	353,96	375,69
C.	Industri Pengolahan	1.936,07	2.169,61	2.269,47	1.235,29	1.331,47	1.335,46
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	22,00	23,96	25,65	25,67	27,24	28,95
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	26,88	27,76	29,28	18,10	18,49	19,21
F.	Konstruksi	4.597,26	5.189,74	5.717,04	3.097,66	3.274,17	3.464,07
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.386,86	6.221,61	7.080,63	3.439,37	3.757,84	4.131,62
H.	Transportasi dan Pergudangan	2.325,32	2.668,65	3.040,11	1.578,04	1.693,94	1.798,58
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.008,94	1.076,22	1.153,82	685,98	720,57	760,24
J.	Informasi dan Komunikasi	1.184,00	1.286,08	1.370,15	1.029,70	1.095,92	1.140,60
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.140,55	2.192,18	2.070,44	1.380,46	1.302,73	1.206,46
L.	Real Estat	756,47	820,71	820,26	543,51	566,46	557,15
M,N.	Jasa Perusahaan	37,54	42,80	42,33	25,16	27,66	26,51
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.644,99	2.802,94	2.975,08	2.076,81	2.165,30	2.237,22
P.	Jasa Pendidikan	2.018,20	2.124,00	2.249,90	1.360,67	1.415,29	1.474,89
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.642,19	1.714,62	1.910,14	1.161,38	1.176,97	1.246,85
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	600,53	616,29	665,35	447,15	448,33	474,67
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		43.893,26	47.569,65	51.374,40	29.107,91	30.284,29	31.647,60

Sumber: Badan Pusat Statistik Gorontalo, 2024

Tabel 3.2

Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha, 2021-2023 (persen)

Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan			Sumber Pertumbuhan		
		2021	2022*	2023**	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,76	2,29	4,23	0,65	0,84	1,52
B.	Pertambangan dan Penggalian	2,16	4,31	6,14	0,03	0,05	0,07
C.	Industri Pengolahan	5,32	7,79	0,30	0,22	0,33	0,01
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	2,62	6,12	6,29	0,00	0,01	0,01
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,58	2,13	3,91	0,00	0,00	0,00
F.	Konstruksi	1,24	5,70	5,80	0,13	0,61	0,63

G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,41	9,26	9,95	0,40	1,09	1,23
H.	Transportasi dan Pergudangan	1,72	7,34	6,18	0,09	0,40	0,35
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,98	5,04	5,51	0,09	0,12	0,13
J.	Informasi dan Komunikasi	3,27	6,43	4,08	0,11	0,23	0,15
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,97	-5,63	-7,39	0,40	-0,27	-0,32
L.	Real Estat	-3,59	4,22	-1,64	-0,07	0,08	-0,03
M,N.	Jasa Perusahaan	1,22	9,93	-4,16	0,00	0,01	0,00
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,03	4,26	3,32	0,00	0,30	0,24
P.	Jasa Pendidikan	2,45	4,01	4,21	0,11	0,19	0,20
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,01	1,34	5,94	0,20	0,05	0,23
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	2,25	0,26	5,87	0,03	0,00	0,09
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		2,40	4,04	4,50	2,40	4,04	4,50

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

Tabel 3.3

Distribusi PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha		2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	38,92	37,99	37,75
B.	Pertambangan dan Penggalian	1,10	1,09	1,09
C.	Industri Pengolahan	4,41	4,56	4,42
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06
F.	Konstruksi	10,47	10,91	11,13
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,27	13,08	13,78
H.	Transportasi dan Pergudangan	5,30	5,61	5,92
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,30	2,26	2,25
J.	Informasi dan Komunikasi	2,70	2,70	2,67
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,88	4,61	4,03
L.	Real Estat	1,72	1,73	1,60
M,N.	Jasa Perusahaan	0,09	0,09	0,08
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,03	5,89	5,79
P.	Jasa Pendidikan	4,60	4,47	4,38
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,74	3,60	3,72
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	1,37	1,30	1,30
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2024

Secara umum tren Pertumbuhan Ekonomi Gorontalo meskipun sudah positif, tetapi belum melampaui capaian nasional sebesar 5,04%. Secara regional Sulawesi, Gorontalo berada pada posisi terbawah dengan selisih tipis dengan Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,51%. Jika dibandingkan dengan regional Sulampua capaian Provinsi Gorontalo berada di atas capaian Papua Barat yang memiliki capaian 3,91%.

PDRB Per Kapita

Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara makro dapat digambarkan dengan indikator pendapatan per kapita atau *percapita income*. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan bertambah baik. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk, maka pendapatan regional sama besar dengan PDRB perkapita. Asumsi ini, digunakan karena sulitnya untuk mendapatkan data pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk dan keluar. Namun peningkatan PDRB perkapita sebagaimana tabel 3.4 dibawah belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Gorontalo secara umum. Hal ini disebabkan karena PDRB perkapita yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku masih terkandung faktor inflasi.

Tabel 3.4				
PDRB Per Kapita Gorontalo Tahun Dasar 2010, 2020-2023				
PDRB Perkapita ADHB	2020	2021	2022	2023
Nilai (Rupiah)	35.693.264,29	37.170.549,65	39.886.776,66	42.350.000
Nilai (US\$)	2.452,16	2.597,5	2.686,36	2.779,11

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/ deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Di Indonesia, tingkat inflasi diukur dari presentase perubahan IHK dan diumumkan ke publik setiap awal bulan (hari kerja pertama) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Inflasi yoy Kota Gorontalo terjadi karena adanya kenaikan indeks pada 10 kelompok pengeluaran dan penurunan pada 1 kelompok pengeluaran. Secara umum pada Desember 2023 Kota Gorontalo mengalami inflasi year on year (yoy) sebesar 3,88 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 112,64 pada Desember 2022 menjadi 117,01 pada Desember 2023. Tingkat inflasi month to month (mtm) Desember 2023 sebesar 1,32 persen dan tingkat inflasi year to date (ytd) sebesar 3,88 persen. Bahan Makanan pada Desember 2023 mengalami inflasi yoy sebesar 9,00 persen. Capaian Inflasi ini lebih rendah jika dibandingkan pada tahun sebelumnya pada 2022 sebesar 5,15%.

Tabel 3.5

IHK dan Tingkat Inflasi Kota Gorontalo Desember 2023, Tahun Kalender 2023, dan Tahun ke

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2022	IHK November 2023	IHK Desember 2023	Tingkat Inflasi YoY ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi MtM Desember 2023 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi Ytd 2023 ³⁾ (%)	Andil Inflasi YoY Desember 2023 (%)	Andil Inflasi MtM Desember 2023 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum (Headline)	111,88	115,48	117,01	3,88	1,32	3,88	3,88	1,32
Makanan, Minuman, dan Tembakau	113,76	122,48	126,72	8,37	3,46	8,37	2,53	1,07
Pakaian dan Alas Kaki	112,44	114,16	114,17	1,60	0,01	1,60	0,13	0,00
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	106,15	106,17	105,93	-0,25	-0,23	-0,25	-0,04	-0,04
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	107,28	109,74	110,03	3,36	0,26	3,36	0,20	0,02
Kesehatan	105,58	108,62	108,88	3,14	0,24	3,14	0,06	0,00
Transportasi	123,23	123,20	124,01	1,52	0,66	1,52	0,18	0,08
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	98,04	98,11	97,97	0,07	-0,14	0,07	0,00	-0,01
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	101,58	111,43	112,36	7,76	0,83	7,76	0,11	0,01
Pendidikan	119,82	120,82	120,82	0,83	0,00	0,83	0,03	0,00
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	113,94	117,97	119,62	4,99	1,40	4,99	0,31	0,09
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	115,07	120,60	122,34	5,09	1,44	5,09	0,37	0,11

Keterangan: ¹⁾ Persentase perubahan IHK Desember 2023 terhadap IHK Desember 2022.
²⁾ Persentase perubahan IHK Desember 2023 terhadap IHK November 2023.
³⁾ Persentase perubahan IHK Desember 2023 terhadap IHK Desember 2022.

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

Selama Desember 2023 secara total andil inflasi YoY sebesar 3,88%, sedangkan MtM sebesar 1,32%. Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi paling besar ada pada makanan, minuman dan tembakau dengan nilai 1,07%, kemudian dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan nilai 0,11% dan untuk peringkat ketiga ada pada kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dengan angka 0,09%. Kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi terdapat pada perumahan, air, alat Listrik dan bahan bakar rumah tangga dengan nilai -0,04% selain itu deflasi juga terjadi pada kelompok pengeluaran Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar -0,01%

Selain pendapatan perkapita dan perubahan inflasi, saat ini Indeks Gini atau **Gini Ratio** telah menjadi salah satu aspek yang bisa menunjukkan tingkat kemakmuran masyarakat. Indeks Gini adalah indikator yang mengindikasikan berapa besar tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks Gini Ratio Gorontalo pada Maret 2023 berada pada 0,417, turun 0,006 poin jika dibandingkan kondisi September 2022. Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,403; menurun sebesar 0,003 poin dibanding September 2022 yang sebesar 0,406 dan menurun 0,006 poin dibanding Maret 2022 yang sebesar 0,409. Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,403, meningkat sebesar 0,008 poin dibanding Maret 2022 dan September 2022 yang sebesar 0,395. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah sebesar 15,87 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan sedang. Jika dirinci menurut wilayah, di perkotaan distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah sebesar 16,75 persen, sedangkan di

Tabel 3.6

Distribusi Pengeluaran Penduduk Gorontalo Maret 2022, September 2022 dan Maret 2023
(persentase)

Daerah/Periode	Penduduk 40 persen Terbawah	Penduduk 40 persen Menengah	Penduduk 20 persen Teratas	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan				
Maret 2022	17,00	33,74	49,25	100
September 2022	16,77	33,92	49,31	100
Maret 2023	16,75	35,50	47,75	100
Perdesaan				
Maret 2022	16,77	36,51	46,72	100
September 2022	16,91	36,01	47,08	100
Maret 2023	16,64	35,58	47,78	100
Perkotaan+Perdesaan				
Maret 2022	15,93	35,42	48,65	100
September 2022	15,45	35,62	48,93	100
Maret 2023	15,87	35,48	48,65	100

Gambaran kondisi sosial masyarakat di Gorontalo juga dapat dilihat dari kondisi ketenagakerjaan dan kemiskinan.

Pengangguran, Penduduk usia kerja (PUK) merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Pada usia ini, mereka memiliki potensi untuk masuk ke dalam pasar kerja. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Provinsi Gorontalo. Penduduk usia kerja pada Februari 2024 sebanyak 927.022 orang, naik sebanyak 16.565 orang dibandingkan Februari 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu 70,48 persen atau 653.381 orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 273.641 orang.

Komposisi angkatan kerja pada Februari 2024 terdiri atas 633.463 orang penduduk yang bekerja dan 19.918 orang pengangguran. Apabila dibandingkan Februari 2023, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 10.710 orang, penduduk bekerja bertambah sebanyak 10.534 orang, sementara pengangguran bertambah sebanyak 176 orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan dibanding Februari 2023. TPAK pada Februari 2024 sebesar 70,48 persen, turun sebesar 0,11 persen poin dibanding Februari 2023. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Tabel 3.7

Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Provinsi Gorontalo, Februari 2022-Februari 2024

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Februari 2022	Februari 2023	Februari 2024 Perubahan Feb 2022- Feb 2023		Februari 2024 Perubahan Feb 2023-Feb 2024	
	orang	orang	orang	orang persen	orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penduduk Usia Kerja (PUK)	896.923	910.457	927.022	13.534	1,51	16.565
Angkatan Kerja	607.028	612.671	653.381	21.713	5,71	10.710
Bukan Angkatan Kerja	289.895	297.786	273.641	-14.145	-4,75	-27.124

-Pengangguran	19.781	19.742	19.918	-39	-0,20	176	0,89
Bukan Angkatan Kerja	288.995	267.786	273.641	-21.209	-7,34	5.855	2,19
	persen	persen	persen	persen poin		persen poin	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK, persen)	67,78	70,59	70,48	2,81		-0,11	
Perkotaan	65,75	68,24	69,12	2,49		0,88	
Perdesaan	69,36	72,49	71,70	3,13		-0,79	
Laki-laki	83,60	84,08	87,15	0,48		3,07	
Perempuan	51,79	56,96	53,63	5,17		-3,33	

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2023

Kemiskinan, Secara umum, tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo pada periode Maret 2016-September 2022 mengalami fluktuasi baik dari sisi jumlah maupun persentase. Tercatat dari Maret 2016-Maret 2020 mengalami penurunan, kecuali pada Maret 2017 yang sempat naik tipis dari September 2016. Penurunan tingkat kemiskinan paling signifikan terjadi pada September 2018, yakni sebesar 0,98 persen poin dibandingkan Maret 2018. Pandemi Covid-19 yang mencapai puncak pada periode September 2020-Maret 2021 menyebabkan tingkat kemiskinan mengalami kenaikan. Tingkat kemiskinan pada September 2021, mengalami penurunan dibandingkan Maret 2021. Pada Maret 2022-September 2022, tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan dibandingkan September 2021

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo pada September 2022 mencapai 187,35 ribu orang. Dibandingkan Maret 2022, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebanyak 1,9 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2021, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebanyak 2,75 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2022 tercatat sebesar 15,51 persen, naik 0,09 persen poin terhadap Maret 2022 dan naik 0,10 persen poin terhadap September 2021.

Menurut daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2022-September 2022, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 3,4 ribu orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 1,5 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 3,97 persen menjadi 4,49 persen. Sementara itu, di perdesaan naik dari 24,42 persen menjadi 24,52 persen.

Tabel 3.8

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo September 2021-September 2022

Daerah Tempat Tinggal/Periode	Persentase Penduduk Miskin (%)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
September 2021	4,06	21,51
Maret 2022	3,97	21,01
September 2022	4,49	24,40
Perdesaan		
September 2021	24,38	163,09
Maret 2022	24,42	164,43
September 2022	24,52	162,95
Perkotaan+Perdesaan		

Maret 2022	15,42	185,44
September 2022	15,51	187,35

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo pada Maret 2022 tercatat sebesar Rp411.906,- per kapita per bulan dan pada September 2022 mengalami kenaikan menjadi Rp434.961,- per kapita per bulan, yang berarti naik sebesar Rp23.055,- per kapita per bulan, atau naik sebesar 5,60 persen. Bila dilihat menurut daerah tempat tinggal, maka Garis Kemiskinan di daerah perkotaan pada September 2022 adalah sebesar Rp436.651,- per kapita per bulan dan Garis Kemiskinan di daerah perdesaan sebesar Rp432.069,- per kapita per bulan. GKM untuk daerah perkotaan tercatat sebesar Rp321.061,- dan perdesaan sebesar Rp342.791,-. GKBM untuk daerah perkotaan adalah sebesar Rp115.590,- dan perdesaan sebesar Rp89.278,- maka terlihat bahwa GKBM di daerah perkotaan relatif lebih tinggi. Tabel 2 menyajikan perkembangan garis kemiskinan pada September 2021 sampai dengan September 2022.

Pada September 2022, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya hampir sama. Beras masih memberi sumbangan terbesar yakni sebesar 25,67 persen di perkotaan dan 27,55 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK di perdesaan, yaitu sebesar 11,28 persen dan terbesar ketiga di perkotaan yaitu sebesar 6,82 persen. Komoditi tongkol/tuna/cakalang memberikan kontribusi terbesar kedua di perkotaan yaitu sebesar 7,91 persen dan posisi ketiga di perdesaan dengan kontribusi 3,93 persen. Komoditi cabe rawit memberikan kontribusi terbesar keempat baik di perkotaan maupun di perdesaan, yaitu masing-masing sebesar 4,29 persen dan 3,81 persen. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada

Tabel 3.9

Perkembangan Garis Kemiskinan di Provinsi Gorontalo Menurut Daerah Tempat Tinggal, September 2021-September 2022

Daerah Tempat Tinggal/Periode	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
September 2021	298.372	102.847	401.219
Maret 2022	307.264	106.015	413.279
September 2022	321.061	115.590	436.651
Perubahan Sep'21-Sep'22 (%)	7,60	12,39	8,83
Perubahan Mar'22-Sep'22 (%)	4,49	9,03	5,66
Perdesaan			
September 2021	315.316	83.491	398.806
Maret 2022	324.541	85.647	410.188
September 2022	342.791	89.278	432.069
Perubahan Sep'21-Sep'22 (%)	8,71	6,93	8,34
Perubahan Mar'22-Sep'22 (%)	5,62	4,24	5,33
Perkotaan+Perdesaan			

Maret 2022	317.319	94.588	411.906
September 2022	333.794	101.167	434.961
Perubahan Sep'21-Sep'22 (%)	8,17	10,06	8,60
Perubahan Mar'22-Sep'22 (%)	5,19	6,96	5,60

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Berdasarkan kondisi perekonomian Gorontalo ditahun 2023 yang terus progresif dan mempertimbangkan faktor pendorong seperti inflasi yang tetap terjaga, Efektivitas program OPD oleh Provinsi, Kabupaten / Kota dan Instansi, Potensi share Konsumsi LNPRT yang meningkat maka perkiraan kondisi indikator perekonomian Gorontalo pada tahun 2025 diuraikan dalam tabel 3.8 dibawah ini.

Tabel 3.10
Perkiraan Indikator Ekonomi Makro Gorontalo Tahun 2024

No	Indikator	Perkiraan capaian tahun 2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,67
2.	Inflasi	4,24
3.	Penduduk miskin	15,29
4.	Tingkat pengangguran terbuka	2,49
5.	Indeks Gini	0,417
6.	IPM	71,3

Sumber : Tim KEMD Bappeda Provinsi Gorontalo, 2023

3.1.2 TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH 2024 DAN TAHUN 2025

Global, Pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan melambat dari sekitar 2,7 persen pada 2023 menjadi 2,4 persen pada 2024, cenderung di bawah tingkat pertumbuhan sebelum pandemi sebesar 3,0 persen jika merunut pada rilis "Situasi dan Prospek Ekonomi Dunia" (WESP) 2024 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perkiraan terbaru ini muncul setelah kinerja ekonomi global yang melebihi ekspektasi pada 2023. Pertumbuhan PDB yang lebih kuat dari perkiraan tahun lalu menutupi risiko jangka pendek dan kerentanan struktural.

Laporan ekonomi PBB ini menyajikan prospek ekonomi yang suram dalam waktu dekat. Suku bunga yang masih tinggi, eskalasi konflik yang terus berlanjut, perdagangan internasional yang lesu, dan bencana iklim yang meningkat, menimbulkan tantangan yang signifikan terhadap pertumbuhan global.

Prospek kondisi kredit yang lebih ketat dan biaya pinjaman yang lebih tinggi dalam waktu lama dinilai akan menghadirkan hambatan yang kuat bagi ekonomi dunia yang telah terbebani oleh utang. Ekonomi dunia juga sedang membutuhkan lebih banyak investasi untuk memajukan pertumbuhan, memerangi perubahan iklim, dan mempercepat kemajuan menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Pertumbuhan ekonomi di

karena suku bunga yang tinggi, melambatnya belanja konsumen, dan pasar tenaga kerja yang lebih lemah.

Prospek pertumbuhan jangka pendek di banyak negara berkembang, terutama di Asia Timur, Asia Barat, serta Amerika Latin dan Karibia, juga memburuk karena kondisi keuangan yang lebih ketat, ruang fiskal yang menyusut, dan permintaan eksternal yang lesu. Negara-negara berpenghasilan rendah dan ekonomi yang rentan menghadapi tekanan neraca pembayaran yang semakin meningkat dan risiko keberla. Sementara prospek ekonomi negara-negara kepulauan kecil yang sedang berkembang, khususnya akan dibatasi oleh beban utang yang besar, suku bunga tinggi, dan meningkatnya kerentanan terkait iklim yang berpotensi merusak, dan dalam beberapa kasus bahkan membalikkan kemajuan yang telah dicapai dalam SDGs.

Ekonomi Nasional,

Di tengah pelemahan ekonomi global 2024, Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan yang relatif masih cukup baik di 5,0%, sedangkan World Bank memprediksi perekonomian global hanya tumbuh 2,4 persen, lebih rendah dari kinerja perekonomian global 2023. Dari kinerja regional, Indonesia mencatatkan pertumbuhan relatif baik jika dibandingkan negara – negara G20 maupun ASEAN. kontributor yang penting dalam mendukung kuatnya ekonomi Indonesia adalah konsumsi rumah tangga yang masih terjaga tumbuh di 4,82 persen dari sisi pengeluaran dan sektor manufaktur tumbuh 4,64 persen dari sisi produksi. Aktivitas konsumsi yang tetap kuat ini didukung oleh inflasi yang terkendali dan peran APBN sebagai shock absorber dalam menjaga daya beli masyarakat.

Perekonomian Indonesia pada 2024 diproyeksikan masih terjadi perlambatan. Hal ini memungkinkan terjadi koreksi pertumbuhan ekonomi di tengah jalan oleh pemerintah yang diproyeksikan saat ini dengan pertumbuhan sebesar 5,2%. Beberapa persoalan yang mesti ditangani dan diantisipasi secara cepat antara lain pelaksanaan Pemilu 2024 harus berjalan aman dan damai, inflasi sektor produk pangan tetap terkendali, ketersediaan bahan bakar minyak yang terjangkau dan tercukupi, dan pengaruh dari tekanan global dari kondisi geopolitik dunia dalam ketidakpastian.

Sinergi kebijakan di bidang ekonomi khususnya dari sisi sinergi bauran kebijakan ekonomi perlu semakin dipererat dalam lima area penting, yakni kebijakan fiskal dan moneter, stabilitas sistem keuangan, digitalisasi ekonomi keuangan, hilirisasi, serta perdagangan, investasi, dan infrastruktur. Jika merujuk pada rilis Bank Indonesia diperkirakan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia akan kembali naik ke kisaran 4,8% - 5,6% dengan faktor – faktor yang mendorong antara lain nilai tukar rupiah yang semakin stabil, Kinerja Neraca Pembiayaan Indonesia (NPI) mendukung tetap terjaganya stabilitas eksternal sejalan dengan perkiraan defisit 0,1% - 0,9% dari PDRB pada 2024 dan defisit 0,5% sampai dengan defisit 1,3% dari PDB pada 2025.

Ekonomi Gorontalo,

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo pada 2023 didorong oleh lapangan usaha pertanian dan perdagangan, seiring dengan target produksi komoditas utama yang mengalami

peningkatan meski dalam jumlah yang terbatas. Sementara itu lapangan usaha utama lainnya seperti konsumsi domestik tumbuh positif dan menjadi penopang perekonomian daerah. Pada 2024 pertumbuhan ekonomi diproyeksikan masih akan ditopang oleh lapangan usaha pertanian, perdagangan, konstruksi dan transportasi. Untuk Lapangan Usaha Konstruksi, administrasi pemerintahan dan konsumsi akan menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi untuk tumbuh lebih tinggi diiringi dengan tren peningkatan kinerja konsumsi domestik dan ekspor menjadi pendorong pertumbuhan pada 2024. Inflasi yang terkendali didorong oleh tekanan inflasi inti, harga yang diatur dan volatile foods. Dengan demikian, inflasi diperkirakan berada pada sekitar batas bawah target nasional, meskipun pada awal tahun tren akan lebih tinggi mengingat ada penambahan kota pengukuran IHK (Indeks Harga Konsumen) yang semula hanya 1 Kota Gorontalo, menjadi 2 dengan tambahan Kota Limboto.

Pada 2025 diproyeksikan akan terjadi kenaikan share pertumbuhan PDRB dengan sumber Lapangan Usaha Pertambangan, mengingat operasional dan fungsional dari PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) yang meskipun pada tengah tahun 2023 kemarin sempat terjadi konflik dengan massa pertambangan rakyat tetapi hal tersebut sudah diredam dan diatasi dengan pendekatan persuasif baik oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan unsur Forkopimda dengan humanis dan pemberian tali asih kepada Masyarakat.

Selain itu kenaikan share lapangan usaha transportasi didorong oleh operasional Bandara Randangan Pohuwato yang melayani rute perintis Djalaluddin Gorontalo – Randangan PP, Randangan – Buol PP, dan Randangan – Sis Al Jufri Bandara Mutiara Palu PP yang otomatis akan memberikan support kelancaran distribusi barang dan orang yang ada di Gorontalo.

Dengan memperhatikan berbagai hal di atas maka untuk proyeksi IKU 2023 dan target 2024 dicantumkan pada tabel berikut :

Tabel. 3.11
Proyeksi dan Target Indikator Makro Provinsi Gorontalo 2024-2025

Indikator	Proyeksi 2024	Target 2025
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,67	5,23 – 5,46 %
Kemiskinan (%)	15,29	14,21 – 14,50 %
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,49	2,87 – 3,08
Indeks Gini	0,417	0,394 – 0,400
Indeks Modal Manusia	-	0,50
Inflasi (%)	4,24	2 - 3 %
Penurunan Intensitas Emisi GRK	-	59,58%

Sumber : Tim KEMD Bappeda Provinsi Gorontalo 2023 dan RKP 2025

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk

melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi Gorontalo. Pendapatan daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya : kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional; Kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM; Potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya; Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD; dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari: sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan serta lain-lain PAD yang sah Arah pengelolaan pendapatan daerah Provinsi Gorontalo tahun 2025 yaitu mobilisasi sumber-sumber PAD dan penerimaan daerah lainnya. Proyeksi/target pendapatan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 3.13
Realisasi Pendapatan 2019 s/d 2023

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
PENDAPATAN	1.941.076.769.545,85	1.862.646.444.965,92	1.972.988.602.791,57	1.848.237.161.017,83	1.860.734.284.160,65
PENDAPATAN ASLI DAERAH	433.427.781.388,85	414.861.588.771,92	510.804.052.686,52	509.985.305.398,83	509.832.646.715,65
Pendapatan Pajak Daerah	387.400.916.778,00	352.171.235.900,00	400.748.368.370,00	440.542.767.581,00	432.707.840.073,00
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	111.931.205.180,00	104.632.186.716,00	121.135.935.147,00	134.023.924.605,00	133.588.611.879,00
Bes. Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	132.732.511.510,00	89.469.896.098,00	117.130.243.360,00	121.365.243.855,00	112.032.821.466,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	74.072.733.173,00	77.074.516.268,00	82.857.475.525,00	91.651.245.362,00	96.470.314.759,00
Pajak Air Permukaan	244.690.210,00	250.798.606,00	195.777.877,00	213.884.039,00	149.942.808,00
Pajak Rokok	67.519.776.705,00	85.743.928.210,00	79.428.986.466,00	91.838.469.720,00	90.466.149.161,00
Pendapatan Retribusi	22.284.470.358,00	6.486.155.533,00	5.743.128.705,00	4.969.172.986,00	4.214.789.524,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan	18.210.695.358,00	307.980.300,00	404.776.000,00	599.928.400,00	674.792.300,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan	3.289.103.000,00	2.400.374.400,00	1.799.538.000,00	2.265.096.000,00	1.872.348.000,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan			1.382.647.245,00		
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	387.322.000,00	2.983.815.113,00	1.782.472.960,00	511.456.000,00	508.116.374,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	140.006.000,00	236.566.000,00	204.880.500,00	501.386.085,00	400.147.150,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	240.064.000,00	467.865.500,00	557.834.000,00	1.091.256.503,00	759.186.000,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)/ Perizinan Tertentu	17.280.000,00	99.554.570,00	30.980.000,00		
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.679.904.143,00	3.230.454.894,00	5.092.544.065,00	5.590.830.014,00	13.167.345.878,00
Bagikan Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD	5.679.904.143,00	3.230.454.894,00	5.092.544.065,00	5.590.830.014,00	13.167.345.878,00
Lain-lain PAD yang sah	18.062.490.119,85	52.963.741.944,92	99.220.011.546,52	58.882.584.817,83	59.742.671.240,65
PENDAPATAN TRANSFER	1.505.443.391.824,00	1.441.616.534.886,00	1.458.904.411.530,00	1.334.495.372.320,00	1.349.247.358.337,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANG	1.495.154.617.824,00	1.409.195.376.886,00	1.419.161.631.530,00	1.263.845.016.320,00	1.318.802.011.337,00
Dana Bagi Hasil Pajak	13.537.847.000,00	18.310.611.609,00	24.954.650.820,00	22.545.460.142,00	18.798.887.325,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.247.879.900,00	1.608.278.623,00	2.781.813.008,00	1.354.831.836,00	3.470.154.000,00
Dana Alokasi Umum	1.043.126.752.000,00	944.270.445.000,00	940.639.321.000,00	940.903.679.000,00	979.869.880.000,00
Dana Alokasi Khusus	436.242.138.924,00	445.900.020.654,00	451.285.846.702,00	299.041.695.342,00	316.663.690.012,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
Dana Penyesuaian (D/D)	10.288.774.000,00	32.421.158.000,00	39.742.780.000,00	70.650.356.000,00	30.445.345.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	10.288.774.000,00	32.421.158.000,00	39.742.780.000,00	70.650.356.000,00	30.445.345.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	2.205.596.323,00	6.168.321.808,00	3.278.138.575,00	3.756.483.299,00	1.654.281.108,00
Pendapatan Hibah	2.058.820.031,00	5.308.321.808,00	2.831.702.111,00	3.259.172.621,00	1.234.701.108,00
Pendapatan Lainnya	146.776.292,00	860.000.000,00	446.436.464,00	497.310.678,00	419.580.000,00

Pada tahun 2023 secara Pertumbuhan Realisasi Pendapatan naik sebesar 0,60% jika dibandingkan tahun 2022 dengan total Rp. 1.860.734.284.160. Pertumbuhan realisasi pendapatan daerah tahun 2019 - 2023 yang mengalami penurunan rata-rata minus 0,94%. Pertumbuhan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2019-2023 rata-rata hanya 4,66% bahkan mengalami penurunan pada tahun 2023 dibanding 2022 sebesar Rp152.658.683,18 atau turun 0,03%. Pertumbuhan realisasi dana transfer tahun 2019-2023 rata-rata minus 2,62% dan untuk tahun 2023 hanya mengalami kenaikan Rp14.751.984.017,00 atau 1,11% di banding Tahun 2022. Lain-lain pendapatan daerah yang sah walaupun tumbuh rata-rata 22,86% namun Sebagian besar hanya bersumber dari hibah PT. Jasa Raharja dan PT. Pelindo serta Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dimana jumlahnya relative kecil dibanding sumber pendapatan lainnya. Untuk Tahun 2023 juga mengalami penurunan Rp2.102.202.191,00 atau turun 55,96% di banding Tahun 2022.

Proyeksi pendapatan daerah tahun 2025 diprediksi turun 23,90 % (d disesuaikan dengan realisasi Tahun 2023 serta kebijakan dana transfer pemerintah pusat). Proyeksi pendapatan asli daerah tahun 2025 diprediksi turun 17,32% (d disesuaikan dengan realisasi Tahun 2023 serta kebijakan dana transfer pemerintah pusat). Dana transfer tahun 2025 masih diproyeksikan sama kecuali DAK yang belum di anggarkan disebabkan oleh trend realisasi, kondisi keuangan negara dan kebijakan pemerintah pusat terhadap dana transfer ke daerah.

Kebijakan belanja daerah disesuaikan dengan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain kenaikan belanja pegawai (acrees) sebesar 2,5%, Belanja Bunga Pinjaman Daerah, belanja dan Belanja Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota di sesuaikan dengan target pajak daerah yang mengalami penurunan. Penerimaan Pembiayaan daerah disesuaikan

dengan perkembangan SiLPA dan posisi kas daerah dan Pengeluaran pembiayaan di tujukan untuk penyertaan modal dan untuk Pembayaran Pokok Cicilan Utang dari Pinjaman PEN

.Rincian kapasitas fiskal / proyeksi pendapatan daerah secara rinci disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.14

Kapasitas Fiskal / Proyeksi Pendapatan Daerah 2025

AKUN	URAIAN	APBD TA. 2024	RANCANGAN APBD TA. 2025	BERTAMBAH/BERKURANG	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5 (4 - 3)	6
4	PENDAPATAN	1.892.294.926.120,00	1.551.494.599.225,00	(340.800.326.895,00)	(18,01)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	503.192.709.120,00	349.994.453.225,00	(153.198.255.895,00)	(30,45)
4.1.01	Pajak Daerah	437.626.291.107,00	303.819.442.125,00	(133.806.848.982,00)	(30,58)
4.1.02	Retribusi Daerah	35.895.605.572,00	35.423.011.100,00	(472.594.472,00)	(1,32)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.219.035.031,00	5.000.000.000,00	(5.219.035.031,00)	(51,07)
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	19.451.777.410,00	5.752.000.000,00	(13.699.777.410,00)	(70,43)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.388.003.873.000,00	1.201.100.146.000,00	(186.903.727.000,00)	(13,47)
4.2.01	<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</i>	<i>1.380.320.991.000,00</i>	<i>1.201.100.146.000,00</i>	<i>(179.220.845.000,00)</i>	<i>(12,98)</i>
4.2.01.01	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	18.660.996.000,00	16.905.008.000,00	(1.755.988.000,00)	(9,41)
4.2.01.02	Dana Alokasi Umum	1.006.766.241.000,00	1.006.766.241.000,00	-	-
4.2.01.03	Dana Alokasi Khusus	354.893.754.000,00	177.428.897.000,00	(177.464.857.000,00)	(50,01)
4.2.02	<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</i>	<i>7.682.882.000,00</i>	-	<i>(7.682.882.000,00)</i>	<i>(100,00)</i>
4.2.02.01	Dana Insentif Fiskal	7.682.882.000,00	-	(7.682.882.000,00)	(100,00)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.098.344.000,00	400.000.000,00	(698.344.000,00)	(63,58)
4.3.01	Pendapatan Hibah	598.344.000,00	-	(598.344.000,00)	(100,00)
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	500.000.000,00	400.000.000,00	(100.000.000,00)	(20,00)

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2020, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah serta pembayaran Pinjaman dan Bunga PEN yang sebagian besar proyeknya sudah dalam tahap finalisasi. Berdasarkan hal tersebut maka, arah kebijakan keuangan daerah tetap mengacu pada tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan serta program prioritas yang terkandung didalam RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026. Kebijakan anggaran belanja Tahun Anggaran 2025 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Kebijakan dalam penyusunan belanja daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan pendekatan *money follow program* (anggaran berorientasi pada program), untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran dan kinerja dirumuskan pada tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD guna peningkatan kinerja pelayanan serta peningkatan

belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Proyeksi belanja daerah dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Belanja daerah secara umum diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Besarnya anggaran belanja akan sejalan dengan besarnya anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah. Untuk itu dalam menghitung perkiraan anggaran belanja masih berpedoman pada perkiraan perolehan anggaran pendapatan. Namun demikian dalam APBD kita juga mengenal adanya istilah anggaran defisit ataupun anggaran surplus.

Dalam prakteknya, anggaran defisit ataupun surplus akan menjadi berimbang karena adanya anggaran pembiayaan daerah.

Tabel 3.15
Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2025

5	BELANJA	1.972.605.147.763,00	1.784.485.824.994,00	(188.119.322.769,00)	(9,54)
5.1	BELANJA OPERASI	1.533.845.929.581,00	1.463.848.270.586,00	(69.997.658.995,00)	(4,56)
5.1.01	Belanja Pegawai	772.951.235.115,00	818.151.838.011,00	45.200.602.896,00	5,85
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	617.562.396.179,00	614.061.719.528,00	(3.500.676.651,00)	(0,57)
5.1.03	Belanja Bunga	6.349.012.047,00	5.466.406.276,00	(882.605.771,00)	(13,90)
5.1.05	Belanja Hibah	129.715.636.240,00	18.052.306.771,00	(111.663.329.469,00)	(86,08)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.267.650.000,00	8.116.000.000,00	848.350.000,00	11,67
5.2	BELANJA MODAL	191.425.047.880,00	102.282.599.633,00	(89.142.448.247,00)	(46,57)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.741.312.400,00	2.000.000.000,00	(2.741.312.400,00)	(57,82)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.542.050.178,00	32.030.320.340,00	(7.511.729.838,00)	(19,00)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	76.248.345.202,00	43.429.650.250,00	(32.818.694.952,00)	(43,04)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	70.609.699.100,00	24.784.629.043,00	(45.825.070.057,00)	(64,90)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	233.641.000,00	38.000.000,00	(195.641.000,00)	(83,74)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	(100,00)
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	41.673.877.482,00	5.000.000.000,00	(36.673.877.482,00)	(88,00)
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	41.673.877.482,00	5.000.000.000,00	(36.673.877.482,00)	(88,00)
2.4	BELANJA TRANSFER	205.660.292.820,00	213.354.954.775,00	7.694.661.955,00	3,74
2.4.1	Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kab/Kota	205.410.292.820,00	213.104.954.775,00	7.694.661.955,00	3,75
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota	250.000.000,00	250.000.000,00	-	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(80.310.221.643,00)	(232.991.225.769,00)	(152.681.004.126,00)	190,11
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	97.245.604.887,00	50.000.000.000,00	(47.245.604.887,00)	(48,58)
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	97.245.604.887,00	50.000.000.000,00	(47.245.604.887,00)	(48,58)
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	16.935.383.244,00	21.935.383.244,00	5.000.000.000,00	29,52
3.2.1	Penyertaan Modal Pemda pada PT. Bank SulutGo	-	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
3.2.2	Pembayaran Pokok Utang	16.935.383.244,00	16.935.383.244,00	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	80.310.221.643,00	28.064.616.756,00	(52.245.604.887,00)	(65,05)
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAN	-	(204.926.609.013,00)	(204.926.609.013,00)	

Tabel 3.16**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

(Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4	PENDAPATAN	1.877.746.586.157,00	1.677.487.105.678,58	89,72	1.648.593.653.387,83
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	605.006.590.137,00	511.031.071.843,58	101,37	510.337.164.773,83
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	434.588.172.628,00	432.936.906.022,30	99,64	440.543.850.790,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	8.889.330.311,00	4.232.976.524,00	63,28	5.003.122.986,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Disiapkan	10.909.310.390,00	11.012.325.578,00	100,39	5.560.830.014,00
4.1.04	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	52.458.777.400,00	63.780.523.258,68	121,50	59.159.212.463,83
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.359.451.816.000,00	1.350.282.842.740,00	98,60	1.334.464.317.475,00
4.2.01	TRANSFER PERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	1.338.006.471.000,00	1.319.517.497.740,00	98,57	1.263.843.951.475,00
4.2.01.01	Dana Bagi Hasil	23.860.281.000,00	23.449.484.037,00	112,41	23.900.291.975,00
4.2.01.02	Dana Alokasi Umum	673.834.835.000,00	679.559.891.030,00	100,62	940.903.029.000,00
4.2.01.03	Dana Alokasi Khusus	344.311.666.000,00	316.198.722.733,00	81,92	269.040.643.497,00
4.2.02	TRANSFER PERINTAH PUSAT - LAINNYA	10.445.345.000,00	10.445.345.000,00	100,00	70.660.356.000,00
4.2.02.01	Dana Insentif Daerah (DID)	10.445.345.000,00	10.445.345.000,00	100,00	70.660.356.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	3.289.150.000,00	10.292.341.188,00	312,92	3.782.174.738,83
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.289.100.000,00	9.707.761.168,00	753,02	3.264.584.061,00
4.3.03	Pendapatan Lainnya	2.000.000.000,00	584.580.000,00	29,23	497.310.678,00
5	BELANJA	1.357.462.043.890,00	1.707.157.949.424,66	91,71	1.737.065.520.333,20
5.1	BELANJA OPERASI	1.386.174.673.862,00	1.475.863.473.693,15	93,05	1.402.621.382.981,22
5.1.01	Belanja Pegawai	721.808.151.725,00	657.826.026.577,00	91,16	631.739.700.092,23
5.1.02	Belanja Barang	739.693.206.117,00	700.268.455.177,15	94,68	704.473.302.178,49
5.1.03	Belanja Bunga	7.188.620.874,00	7.063.341.745,00	98,87	1.469.180.981,00
5.1.04	Belanja Hibah	87.457.042.146,00	55.797.136.670,00	63,80	44.435.371.677,82
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	30.328.351.000,00	24.878.811.324,00	82,03	19.552.462.071,30
5.2	BELANJA MODAL	264.265.363.028,00	230.302.469.866,51	87,14	318.331.031.107,98
5.2.01	Belanja Tanah	0,00	0,00	0	10.039.248.360,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	59.110.573.918,00	57.681.672.265,00	97,58	67.127.676.674,31
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	51.911.257.331,00	42.838.055.803,91	82,52	61.437.616.707,36
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	146.065.330.198,00	121.110.843.563,80	82,91	143.539.546.615,12
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.125.187.581,00	8.670.878.134,00	121,69	5.857.440.707,00
5.2.06	Belanja Aset Lainnya	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3.01	BELANJA TAK TERDUGA	11.022.137.000,00	991.654.875,00	9,00	16.718.126.244,00
5.3.01	Belanja Tak Terduga	11.022.137.000,00	991.654.875,00	9,00	16.718.126.244,00
6	TRANSFER	208.893.808.785,00	193.436.038.455,00	92,63	210.567.211.362,00
6.1	TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA	208.893.808.785,00	193.436.038.455,00	92,63	210.567.211.362,00
6.1.01	Bagi Hasil Pajak	206.548.868.785,00	191.714.038.455,00	92,84	210.567.211.362,00
6.1.03	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	1.545.000.000,00	1.722.000.000,00	88,43	0,00
	SURPLUS / DEFISIT	(190.609.326.538,00)	(28.108.862.364,88)	3	(86.330.074.707,37)
7	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	228.765.815.327,00	228.765.815.327,67	100,00	231.512.274.938,04
7.1.01	Penggunaan Sisa Lebih Pembiangan Anggaran (SILPA)	228.765.815.327,00	228.765.815.327,67	100,00	231.512.274.938,04
7.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0	115.725.137.313,00
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	36.158.488.789,00	29.751.038.180,00	82,29	23.474.384.934,00
7.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	10.589.310.000,00	10.000.000.000,00	94,49	10.590.830.014,00
7.2.03	Pembayaran Pokok Utang	25.569.178.789,00	19.751.038.180,00	77,29	12.883.554.920,00
	PEMBIAYAAN NETTO	192.606.526.838,00	199.014.777.167,37	103,33	328.007.893.035,04
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN	0,00	170.905.894.812,89	0	228.766.815.327,67

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam pengangggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk "menutup defisit" atau "memanfaatkan surplus" anggaran. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran sering disebut sebagai penerimaan pembiayaan. Sebaliknya, pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut dengan pengeluaran pembiayaan. Dengan kata lain pembiayaan menunjukkan penerimaan maupun pengeluaran kas yang akan dibayar kembali atau diterima kembali.

Proyeksi Pembiayaan APBD Provinsi Gorontalo 2025 dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 3.17**Proyeksi Pembiayaan Provinsi Gorontalo TA. 2025**

Uraian	APBD Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025	+/-	%
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan	97.245.604.887,00	50.000.000.000,00	- 47.245.604.887,00	- 48,58
SILPA	97.245.604.887,00	50.000.000.000,00	- 47.245.604.887,00	- 48,58
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	16.935.383.244,00	21.935.383.244,00	5.000.000.000,00	29,52
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	-	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
Pembayaran Pokok Utang	16.935.383.244,00	16.935.383.244,00	-	-
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	80.310.221.643,00	28.064.616.756,00	- 52.245.604.887,00	- 65,05

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo tahun 2025 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Amanah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah. Dokumen RPD disusun sebagai panduan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Gorontalo sampai dengan ditetapkannya Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Dalam penyusunannya, RPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025 yang selanjutnya diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang akan selesai di tahun ini. Disisi lain dokumen RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2025 adalah tahun pertama pelaksanaan RPJPD 2025-2045, dan RPJMD 2025-2029. Prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD ini menjadi arahan bagi OPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk tahun 2025 dalam mendukung pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagai kontribusi terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.

4. 1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam penerapan kebijakan pembangunan, perencanaan pembangunan menengah Provinsi Gorontalo disusun dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2023 – 2026 yang telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo 2023 – 2026 dengan visi sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025 yaitu;

"Gorontalo Maju dan Mandiri"

Visi tersebut mengandung 2 (dua) unsur penting, yaitu :

Gorontalo Maju, mengindikasikan kehendak pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan Gorontalo sebagai provinsi yang memiliki ekonomi yang handal, sumberdaya manusia yang berkualitas yang didukung dengan system hukum dan pemerintahan yang memiliki integritas.

Gorontalo **Mandiri**, menunjukkan kehendak pemerintah daerah untuk membangun masyarakat dan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan mengandalkan sumber daya yang dimiliki, kapasitas dalam mengendalikan dinamika lingkungan strategis, serta keotonomian dalam pengambilan keputusan dan Tindakan untuk semata-mata kepentingan masyarakat, daerah dan bangsa.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Provinsi Gorontalo 2007-2025 tersebut, maka ditempuh 3 (tiga) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handal, adalah mewujudkan perekonomian daerah berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan system produksi, distribusi dan pelayanan termasuk pelayanan jasa.
2. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Gorontalo yang Handal, adalah pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing yang meliputi peningkatan, perluasan, dan pemerataan akses Pendidikan dan Kesehatan bagi masyarakat, peningkatan penguasaan dan pemanfaatan IPTEK melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan, peningkatan kesadaran emosional dan spiritual, peningkatan kualitas peran masyarakat di bidang keagamaan, seni, social budaya, adat olahraga, politik, dan keamanan, serta pembangunan infrastruktur dan suprastruktur pendukung yang relevan dan berkualitas.
3. Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo yang Amanah, adalah pemantapan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kualitas pelayanan public, peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah, pengembangan kapasitas manajemen pemerintah daerah melalui reformasi birokrasi, peningkatan kualitas SDM aparatur, *right sizing* OTK dan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas peran DPRD, peningkatan relevansi dan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan public, serta peningkatan penyebarluasan informasi dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada public.

RPD Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 juga diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang menetapkan Visi; "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" dan menjabarkannya pencapaiannya ke dalam Misi berikut:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Untuk lebih mendetailkan arahan misi pembangunan tersebut, maka dikelompokkan penjabarannya melalui 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional, yaitu:

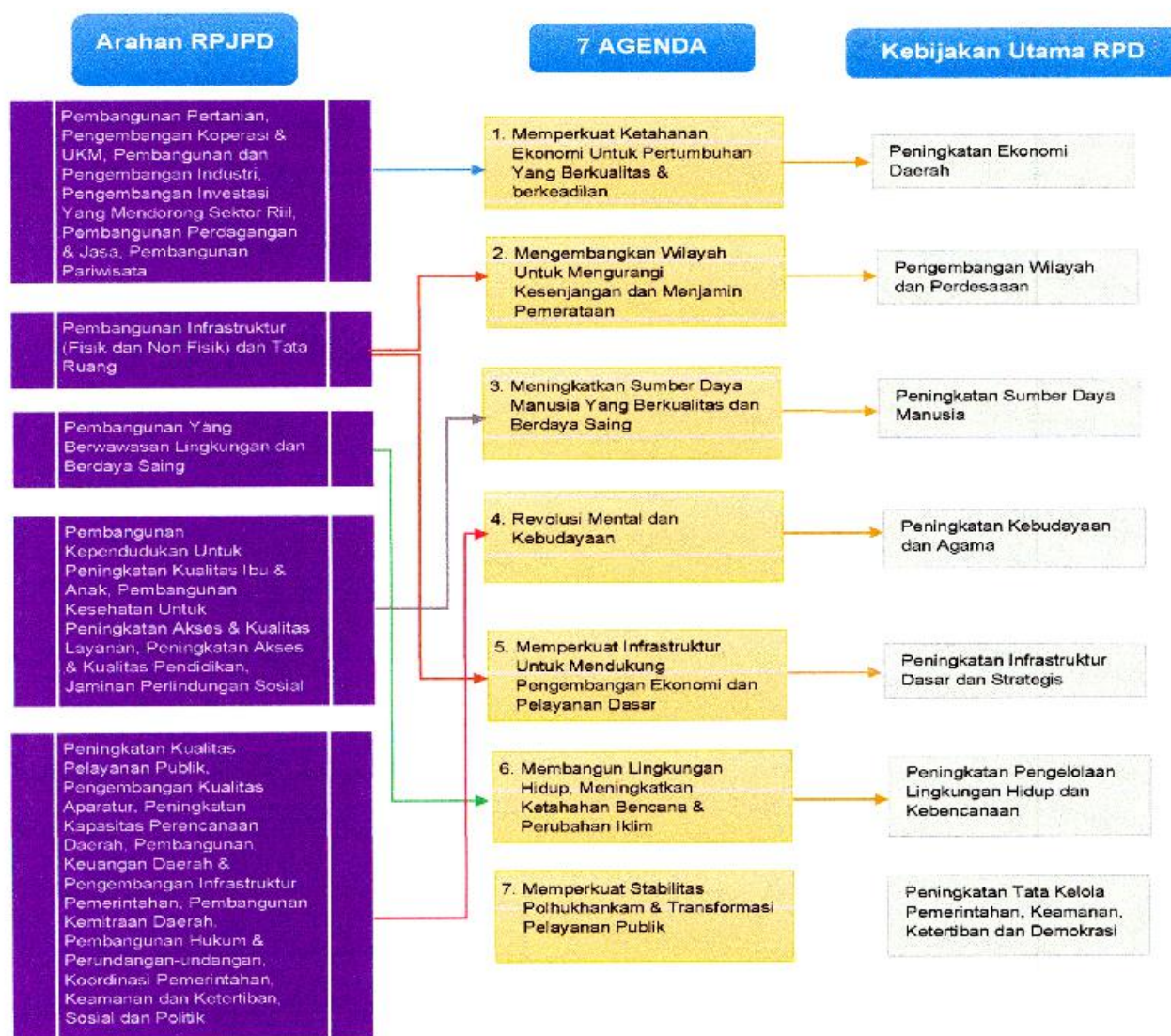
- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Keselarasan RPJPD, RPJMN dan RPD dapat dilihat sebagaimana gambar di bawah ini :

Gambar 4.1

Sinergi Arahan RPJPD, Agenda Pembangunan Nasional dan Kebijakan Utama RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026



4.1. 1 Isu Strategis Pembangunan Daerah

1. Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi

Beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis adalah peningkatan kebutuhan pangan seiring dengan peningkatan populasi penduduk. Di sisi lain, produksi pangan dipengaruhi oleh faktor perubahan iklim, perubahan cuaca yang tak menentu datangnya musim hujan dan kemarau yang susah diprediksi sehingga mengganggu musim tanam dan hasil produksi. Selain itu, serangan hama seperti wareng juga menyerang di berbagai tempat yang sangat merugikan banyak petani. Ketersediaan sarana prasarana produksi termasuk pengairan/irigasi, pengelolaan pasca panen yang

belum maksimal, serta akses terhadap lahan yang terbatas. Dari sisi produsen, produktivitas yang rendah dan fluktuasi harga menyebabkan daya beli petani (Nilai Tukar Petani) relatif rendah khususnya untuk subsektor perikanan baik perikanan tangkap dan budidaya. NTP dan NTUP belum mencerminkan kondisi ideal/ tingkat kesejahteraan petani. Rata-rata Nilai Tukar Petani tahun 2023 sebesar 106,19 tumbuh 2,77. NTP tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 111,32 dan terendah terjadi pada bulan Januari yang berada pada angka 99,98. Sementara itu untuk NTP pada bulan Februari 2024 mengalami kenaikan 2,11% diangka 112,75. Untuk NTUP Desember 2023 sebesar 115,84 naik 1,61 persen dibandingkan NTUP bulan sebelumnya.

Ukuran keberhasilan pembangunan bidang ketahanan pangan dapat diukur dari sisi pola konsumsi pangan ditunjukkan dengan peningkatan Indeks Ketahanan Pangan tahun 2022 diangka 80, 35 atau peringkat ke-6 Nasional dari 34 provinsi. Pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan juga menghadapi beberapa tantangan, di antaranya: (1) tingginya rumah tangga miskin di sector perikanan dan kelautan, (2) produksi perikanan dan daya saing produk kelautan dan perikanan belum maksimal, (3) Nilai Tukar Nelayan (NTN) masih dalam kategori rendah, (4) akses pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan belum maksimal karena keterbatasan SDM.

2. Transformasi struktural berjalan lambat

Transformasi struktural yang berjalan lambat juga ditunjukkan oleh permasalahan (1) nilai tambah produksi rendah karena keterbatasan skill, (2) ketersediaan bahan baku lebih kepada komoditi pertanian yang notabene lebih diutamakan untuk memenuhi kebutuhan nasional, (3) tingginya biaya dalam rantai distribusi perdagangan baik antar pulau maupun ekspor impor. (4) Belum adanya perencanaan dan penetapan Kawasan pengembangan ekonomi/ master plan pengembangan ekonomi daerah, serta (5) daya dukung lingkungan.

Struktur ekonomi Provinsi Gorontalo tahun 2023 dari sisi produksi masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 37,75 persen.

3. Pembangunan Wilayah Untuk Pengurangan Kesenjangan

Pembangunan kewilayahan diarahkan untuk menyelesaikan isu terkait ketimpangan antar wilayah. Tantangan pembangunan kewilayahan yaitu bagaimana meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan antar wilayah kabupaten/kota melalui pengembangan potensi sumber daya masing-masing, meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah, meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, serta meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah.

Isu Strategis dan Permasalahan pembangunan kewilayahan adalah masih adanya ketimpangan antarwilayah yang ditandai dengan:

a. Ketimpangan antar Wilayah

- Masih tingginya angka kemiskinan pedesaan, Sept 2022 sebesar 24,52 %, sementara perkotaan sebesar 4,49%. Maret 2023 tercatat sebesar 23,73 persen, menurun 0,79 persen poin jika dibandingkan kondisi September 2022 di angka 24,52 persen.

- Masih adanya kesenjangan pendapatan yang ditandai dengan Rasio Gini perdesaan sebesar 0,403, meningkat sebesar 0,008 poin dibanding Maret 2022 dan September 2022 yang sebesar 0,395. Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,403; menurun sebesar 0,003 poin dibanding September 2022.
 - Terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan
- b. Pengembangan dan Penguatan Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah/Kawasan
- Pengembangan Kawasan strategis Provinsi belum optimal.
 - Konektivitas dari dan menuju pusat-pusat pertumbuhan yang rendah.
 - Pengembangan kawasan belum terpusat
 - Belum masuk pada kawasan strategis Nasional untuk pengembangan wilayah Ekonomi Pariwisata maupun Industri.
- c. Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Daya Saing Daerah salah satunya terkait belum optimalnya kualitas dan akses pelayanan dasar yang ditandai dengan cakupan akses sanitasi layak sebesar 79,82 persen dan cakupan akses air minum layak sebesar 96,16 persen pada tahun 2022.
- d. Pemanfaatan Ruang
- Belum optimalnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
 - Belum adanya Roadmap pengembangan kawasan
 - Belum maksimalnya penyusunan Rencana Detail Tata Ruang sebagai acuan perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang

4. Sumber Daya Manusia

Tren IPM Provinsi Gorontalo selama 2 dekade ini mengalami peningkatan walaupun kurang signifikan. Tahun 2023 mencapai 71,25 meningkat 0,63 poin dibandingkan tahun 2022 (70,62). Sejak tahun 2020-2023 IPM Provinsi Gorontalo rata-rata meningkat sebesar 0,83persen pertahun.

Meskipun demikian, angka ini masih lebih rendah dari capaian rata-rata secara nasional tahun 2023 yaitu 74,39 persen. Pertumbuhan IPM 2023 mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya namun seluruh dimensi pembentukan IPM mengalami peningkatan. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 70,50 tahun, meningkat 0,28 tahun dari tahun sebelumnya tahun sebelumnya. Harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,04 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,12 menjadi 13,16 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,08 tahun, dari 8,02 tahun menjadi 8,10 tahun pada tahun 2023. Dan pengeluaran riil per kapita per tahun meningkat 382 ribu rupiah (3,57 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. APM rendah disebabkan Angka putus sekolah tinggi, pernikahan dini, angka pekerja pada usia sekolah,

rendahnya kemampuan siswa dalam menyerap pembelajaran. Kualitas lulusan pendidikan vokasi belum optimal. Prevalensi stunting Provinsi Gorontalo sebesar 23,8% sesuai data SSGI dan masuk kategori tinggi.

5. Perlindungan Sosial

Secara umum perlindungan sosial dapat didefinisikan sebagai segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam resiko dan kerentanan baik yang bersifat fisik, ekonomi dan sosial terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan (Bappenas, 2014).

Perlindungan sosial juga menjadi salah satu instrument penting untuk mewujudkan pemenuhan target dalam Sustainable Development Goals/Tujuan pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB). Hal ini menjadi isu strategis dalam SDGs/TPB sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan kesejahteraan secara nasional dalam perlindungan sosial. Rincian terhadap isu ini dapat ditemukan pada tujuan 1.3 yaitu menerapkan secara nasional system dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi

Semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.

Berbagai kendala ditemukan pada pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial diantaranya adalah seringkali ditemukan di lapangan sasaran penerimaan manfaat belum tepat. Hal ini terkadang disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara instansi terkait. Walaupun pemerintah telah menyediakan system terkait data sasaran, namun ketidakakuratan data dan kelengkapan berkas dapat menjadikan data yang ada menjadi kurang valid. Selain itu kendala pelayanan di lapangan juga sering dikeluhkan oleh masyarakat selain jenis bantuan yang belum sesuai harapan.

Perbedaan pemahaman terkait standard operasional prosedur mekanisme penyaluran dan pengadaan jenis bantuan dapat menyebabkan pelayanan menjadi tidak maksimal.

Sesuai data pada Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Daerah (LP2KD) 2021 Provinsi Gorontalo, alokasi anggaran untuk progam bantuan sosial dan jaminan sosial pada tahun 2020 sebanyak RP. 93.417.356.659 atau sebesar 5,06%. Permasalahan keterbatasan finansial daerah menjadikan alokasi ini belum significant. Selain itu juga, peluang kerjasama dengan pihak yang memiliki pendanaan yang dapat mendukung program perlindungan social seperti badan usaha Negara dan swasta belum dirintis

Perlindungan social juga belum memihak sepenuhnya kepada kelompok khusus antara lain lansia dan penyandang disabilitas yang rentan miskin.

6. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda

Presentase jumlah penduduk usia 0-19 di Provinsi Gorontalo sebesar 32,65% (Susenas BPS 2023). Indeks perlindungan anak pada tahun 2022 mengalami penurunan 6,59 poin diangka 57,90 dibandingkan tahun 2021 sebesar 64,49. Angka Kelahiran Remaja (Teenage Birth Rate) ASFR

15-19 tahun untuk tahun 2022 diangka 46,27 lebih tinggi dari angka nasional 26,64. Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum umur 18 tahun menurut provinsi, tahun 2022 diangka 13,66 atau berada di 3 tertinggi nasional. Perkawinan anak akan berdampak besar pada pertumbuhan remaja, secara fisik maupun mental belum siap akibatnya tingkat perceraian meningkat juga memicu stunting dan kematian ibu, bayi. Upaya pemenuhan hak anak, perempuan dan pemuda masih perlu ditingkatkan. Selain itu peningkatan kualitas juga harus menjadi perhatian, karena sesuai data Sensus Penduduk 2020, penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Provinsi Gorontalo sebesar 71,26. Tentunya hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan.

7. Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan adalah persoalan multidimensi. Tidak hanya disebabkan oleh satu factor akan tetapi berbagai unsur kemiskinan menjadi masalah kompleks. Secara nasional, angka kemiskinan provinsi Gorontalo termasuk di 5 provinsi besar persentasenya. Meskipun demikian, angka kemiskinan di Gorontalo terus mengalami penurunan walaupun agak melambat. Sehingga, pengentasan kemiskinan masih tetap menjadi pekerjaan besar yang perlu mendapat perhatian semua pihak. Pertumbuhan ekonomi Gorontalo tumbuh positif pada beberapa tahun ini bahkan diatas rata-rata nasional kecuali pada saat Pandemi Covid 19. Namun belum memberikan pengaruh yang signifikan atas angka kemiskinan.

Pengentasan Kemiskinan menjadi salah satu tujuan utama pembangunan di Provinsi Gorontalo. Bahkan pada agenda 2030 TPB/SDGs, kemiskinan menjadi tujuan pertama. Secara tren, persentase angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo menunjukkan penurunan, meskipun masih belum terlalu signifikan. Dapat dilihat pada data BPS, dalam kurun waktu 4 tahun sejak 2019 persentase kemiskinan mengalami fluktuasi pada kisaran angka 15 persen, pada bulan Maret 2023 berada pada angka 15,15 persen, masih berada di atas rata-rata nasional yang berada pada angka 9,36 persen menurun 0,18 persen poin terhadap Maret 2022. Angka kemiskinan ekstrim di Province Gorontalo tahun 2023 sebesar *4,28%. Kemiskinan menjadi permasalahan yang perlu dituntaskan bersama-sama karena dipengaruhi oleh banyak faktor dan multi dimensi. Sehingga diperlukan sinergi program dan anggaran semua pihak untuk memastikan masyarakat miskin mampu menikmati kehidupan yang berkualitas. Perlu untuk mengoptimalkan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dalam mensinergikan program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di OPD terkait dan pemerintah daerah kabupaten dan kota.

8. Belum optimalnya Pelestarian Warisan Budaya

Gorontalo merupakan salah satu Provinsi yang kental dengan budaya. Kebudayaan Gorontalo dapat ditemui dalam berbagai aktivitas masyarakat Gorontalo, khususnya dalam kegiatan kemasyarakatan seperti pernikahan, khitanan, penerimaan tamu daerah, dan aktivitas lainnya. Kebudayaan juga merupakan bagian penting dari proses pembangunan daerah. Untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan perlu dilakukan upaya pemajuan kebudayaan dengan membangun ekosistem

kebudayaan yang berkelanjutan dan memiliki tata kelola yang efektif dan efisien. Kebudayaan sebagai salah satu urusan pemerintahan daerah yang masuk dalam urusan wajib non pelayanan dasar perlu mendapatkan perhatian besar khususnya dalam rangka melestarikan dan memajukan kebudayaan.

RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025, kebudayaan menjadi salah satu arah kebijakan yang diamanahkan berupa Pembangunan keagamaan utk peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan & pengamalan nilai & ajaran agama, Budaya dan adat isitiadat.

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Provinsi Gorontalo berada pada urutan ke- 24 dari 34 provinsi di level nasional. IPK Provinsi Gorontalo berada pada angka 49,86, sementara untuk nasional berada pada angka 53,74.

Pada dimensi warisan budaya, data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat bahwa terdapat 345 catatan karya budaya tak benda (WBTB) yang tercatat dalam data budaya Kemendikbud RI, dari jumlah tersebut 31 WBTB telah ditetapkan, artinya sebesar 8,9 persen dari total WBTB terdaftar telah ditetapkan.

Sementara itu untuk warisan budaya benda (WBB), data Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo Kemendikbud menunjukkan bahwa terdapat 84 cagar budaya yang telah terdaftar di Provinsi Gorontalo yang tersebar di 4 Kabupaten dan 1 Kota. Dari jumlah tersebut, 6 cagar budaya telah ditetapkan dengan Peraturan dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI atau sebesar tujuh,1 persen yang telah ditetapkan.

Perhatian pada WBTB dan WTB ini relevan dengan prioritas provinsi Gorontalo yang saat ini mendorong penetapan Gorontalo menjadi salah satu Provinsi yang memiliki Geopark Nasional. Hal ini dikarenakan warisan budaya menjadi salah satu bagian dari komponen geopark yaitu cultural diversity.

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) adalah survei nasional yang mengukur tingkat kerukunan umat masyarakat dalam beragama di Indonesia. Tiga dimensi Indeks KUB mencakup toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) pada tahun 2021 Gorontalo termasuk dalam kluster pulau sulawesi dengan capaian 68,74 hasil ini menurun dibandingkan pencapaian pada Tahun 2019 sebesar 73,83. Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Agama beberapa indikator berpengaruh pelaksanaannya di pulau sulawesi.

9. Rendahnya Budaya Literasi

Dalam era teknologi seperti sekarang ini, konteks tradisi intelektual suatu masyarakat bisa dikatakan berbudaya literasi ketika masyarakat tersebut sudah memanfaatkan informasi yang mereka dapat untuk melakukan komunikasi sosial dan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa literasi merupakan suatu tahap perilaku sosial yaitu kemampuan individu untuk membaca, menginterpretasikan, dan menganalisa informasi dan pengetahuan yang mereka dapat untuk melahirkan kesejahteraan hidup (peradaban unggul)

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019, Nilai Budaya Literasi Provinsi Gorontalo berada pada angka 51,68. Angka ini masih berada di bawah rata-rata nasional yang berada pada angka 55,03.

Selanjutnya, data hasil kajian Kegemaran Membaca Masyarakat Indonesia Tahun 2022, provinsi Gorontalo berada pada angka 58,72.

Di sisi lain, kaitannya dengan dunia pendidikan, hasil Indonesian National Assessment Program (INAP) untuk jenjang SD tahun 2016, diperoleh data bahwa distribusi literasi matematika, membaca dan sains masuk dalam kategori kurang, bahkan untuk literasi sains Provinsi Gorontalo merupakan yang terendah jika dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Sulawesi. Pada jenjang SMP berdasarkan data Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI), Provinsi Gorontalo juga masuk dalam kategori kurang dan berada di bawah rata-rata nasional.

Hal yang tidak kalah pentingnya terkait literasi yang relevan juga dengan budaya daerah adalah pelestarian bahasa daerah Gorontalo sebagai bahasa masyarakat Gorontalo yang sering berjalannya waktu semakin terkikis dan berkurang penggunaannya di tengah masyarakat Gorontalo khususnya generasi muda.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) 2021 Provinsi Gorontalo adalah sebesar 22.53. Total perpustakaan di provinsi ini adalah sebanyak 2276, dengan yang terbanyak adalah Perpustakaan Sekolah/Madrasah berjumlah 1314 perpustakaan. Sementara itu, ada 16,7% perpustakaan yang dipersepsi ber-SNP dengan persentase yang tertinggi dari Perpustakaan Perguruan Tinggi. Total jumlah koleksi buku yang terdapat pada perpustakaan-perpustakaan di Provinsi Gorontalo adalah sebanyak 152068. Koleksi buku Ilmu Pengetahuan Sosial adalah yang terbanyak, yaitu sejumlah 23334 buku, sedangkan koleksi yang paling banyak dipinjam di tahun 2020 adalah koleksi buku Geografi dan Sejarah sejumlah 24074 buku.

Seluruh perpustakaan umum daerah di wilayah Provinsi Gorontalo memiliki koleksi berjenis Buku, Bahan Grafika, Rekaman Suara (Kaset, CD, Audio) dan Koran. Jenis lain yang juga banyak dimiliki oleh perpustakaan-perpustakaan umum daerah di provinsi ini adalah Majalah (85,7%), Gambar Hidup & Audio Visual (71,4%) dan E-Book dan Lainnya (71,4%)

Tenaga perpustakaan di Provinsi Gorontalo berjumlah 595 orang, di mana sebagian besar merupakan Pustakawan SK Fungsional. Jumlah pustakawan yang memiliki SK Fungsional adalah sebanyak 439 orang, sedangkan pustakawan dengan kualifikasi ilmu perpustakaan sebanyak 40 orang. Di perpustakaan umum daerah, 59,7% tenaga perpustakaan tersebut memiliki latar belakang jenjang pendidikan S1.

Jumlah anggota perpustakaan yang terdaftar di Provinsi Gorontalo sebanyak 169.657 orang, dengan rata-rata kunjungan 511 orang/hari. Kebanyakan anggota perpustakaan berusia < 18 tahun sebanyak 54,5%, dengan pekerjaan sebagai Pelajar/ Mahasiswa (75,6%). Berdasarkan capaian diatas secara umum Provinsi Gorontalo secara keseluruhan menunjukkan perbaikan jika dibandingkan dengan data IPLM 2019 (9,83) dan IPLM 2020 (10,91) meskipun demikian beberapa aspek yang perlu ditingkatkan kedepan diantaranya : Pengembangan standar Perpustakaan daerah dan umum menuju SNP,

peningkatan koleksi buku, peningkatan kemudahan akses terhadap bahan bacaan, peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga perpustakaan, penguatan digitalisasi perpustakaan, dan kolaborasi antara pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung terlaksananya ekosistem literasi yang lebih merata dan berkelanjutan.

10. Belum Mantapnya Infrastruktur Ekonomi dan Strategis Provinsi

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas – ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Berdasarkan data capaian Kondisi mantap jalan Provinsi pada tahun 2020, dari target 60,39% hanya tercapai 54,38%. Sedangkan untuk Proporsi Panjang Jaringan Jalan Provinsi dalam kondisi baik (Km) pada tahun 2020 dari 257,2 km target, realisasinya hanya 220,6. Hal ini berarti ada gap 6% untuk indikator mantap jalan dan selisih 30 Km lebih Panjang jalan provinsi yang dalam keadaan tidak baik.

Berbagai penyebab dari tidak tercapainya target kedua indikator tersebut antara lain kualitas jalan ruas kewenangan Provinsi yang tidak maksimal dimana untuk beberapa ruas hanya dalam hitungan bulan, jalan yang baru dibangun dan yang sudah direhab terdapat kerusakan disebabkan faktor teknis seperti kondisi geologis tempat ruas jalan tersebut berada dan kurang optimalnya pengawasan dan pembatasan kendaraan yang over supply melintas di ruas jalan tersebut. Dengan adanya ruas jalan yang mengalami kerusakan maka akan menambah cost distribusi (kendaraan yang melintas cepat rusak dan butuh perbaikan) dan penambahan lama waktu barang sampai ke konsumen. Tantangan selanjutnya adalah pada masa pandemi menyebabkan terjadinya refocusing dan realokasi anggaran, kegiatan – kegiatan fisik yang membutuhkan pendanaan besar sering kali dijadikan kegiatan yang dimasukkan untuk ditunda pekerjaan atau tidak dibiayai dulu pada tahun berjalan untuk mendapatkan kuota pagu yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat untuk dipotong pembiayaannya dan dialihkan untuk /penanganan Pandemi Covid-19.

Di sisi pertanian, produksi Padi pada tahun 2020 di Provinsi Gorontalo sebesar 289.656 ton dengan luas panen 56.061 Ha dan produktivitas 51,67 Kw/Ha. Angka tersebut seharusnya bisa lebih tinggi, mengingat pada beberapa wilayah waktu tanam hanya satu kali dalam setahun. Jika bisa dioptimalkan, maka potensi 1,5 kali dari produksi sekarang bisa tercapai dengan pemanfaatan teknologi pertanian, pemakaian bibit yang tepat, pemanfaatan pupuk yang tepat guna dan dukungan irigasi pertanian sebagai core major usaha padi sawah.

Pada periode kedua RPJMD 2017 – 2022 ada beberapa Proyek Strategis Provinsi yang sudah tuntas dan yang masih mengalami kendala. Pada periode RPMD ini diharapkan bisa menjadi perpanjangan tangan dan waktu yang bisa mendukung tuntasnya pembangunan Infrastruktur Strategis Provinsi Gorontalo. Ada 2 fokus pembangunan yang direncanakan untuk dikerjakan pada tahun 2023 yaitu Pengelolaan Danau Limboto, Pengembangan Rumah Sakit Provinsi Hasri Ainun Habibie, Blok Plan Pemerintah Provinsi Gorontalo di Ayula dan Pembangunan Islamic Centre.

11. Deplesi Sumber Daya Alam dan Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo masih cenderung rendah, hal ini dipengaruhi oleh tingkat pencemaran air sungai; penurunan kualitas udara; kerusakan danau limboto berupa penyusutan dan penurunan kualitas air danau; kerusakan mangrove dan terumbu karang; dan jumlah sampah yang cenderung meningkat dari aktivitas masyarakat.

Dari Total 245.000 Ha Lahan di DAS Limboto- Bolango Bone, 140.487 Ha termasuk dalam kategori agak kritis, kritis dan sangat kritis. Hal ini diindikasikan menjadi penyebab meningkatnya sedimentasi baik di sungai maupun di Danau Limboto. Dalam waktu 6 tahun (2013-2018) terjadi alih fungsi lahan hutan sebesar 2.100 Ha di Wilayah DAS Limboto dan Bone, menjadi Kawasan pemukiman, pertanian, semak belukar, dll. Perubahan lahan ini berkontribusi terhadap peningkatan koef pengaliran dan Indeks Erosi Tanah. Sempadan sungai belum efektif sebab pembangunan wilayah pemukiman masih dilaksanakan di wilayah sempadan sungai dan tanpa menerapkan konsep *waterfront city*. Hal ini menyebabkan tingginya kerawanan banjir di Kota Gorontalo , dimana 57% masyarakat tinggal di Kawasan rawan banjir di Pusat Kota Gorontalo (*Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Banjir Provinsi Gorontalo, Bappenas RI Desember 2021*)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Gorontalo Tahun 2019 berada pada poin 74,54. "Kondisi ini masih berada di atas IKLH rata-rata nasional," adapun indikator yang menjadi dasar perhitungan dari IKLH, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Misalnya saja pada Indeks Kualitas Air Tahun 2020 meningkat sebesar 49,33, lebih tinggi 2,33 point dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tersebut berada pada status bahaya, dimana status Sungai Bone, Sungai Bionga, Sungai Paguyaman, Sungai Buladu, Sungai Andagile, Sungai Taluduyunu, dan Sungai Randangan berstatus cemar ringan sampai sedang. Hal ini disebabkan oleh: Limbah Domestik, Limbah Pertanian, Limbah Peternakan, Limbah Industri, Prilaku masyarakat membuang tinja dan ketersediaan sarana sanitasi (jamban) yang masih kurang, pengelolaan sampah dan limbah B3 yang belum maksimal, serta *Illegal Logging* dan ketaatan pelaku usaha yang cenderung rendah.

Adapun beberapa *Respons* yang harus dilakukan terkait Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Gorontalo antara lain: Penyusunan Dokumen perencanaan berbasis KLHS, Membangun koordinasi dengan instansi terkait Pembangunan sarana sanitasi (Jamban, SPAL) secara bertahap, Memperketat proses perijinan berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH), Penguatan kapasitas masyarakat terkait lingkungan hidup, Rehabilitasi hutan dan lahan dengan Target Provinsi 1000 ha/tahun dan BP - DAS tahun 2020 2.500 ha, Pemberdayaan masyarakat melalui Perhutanan Sosial: pengembangan gula semut, jamur tiram, pembuatan handsanitizer, Pengelolaan DAS dan rehabilitasi, dan Pengembangan pertanian berbasis konservasi.

Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup sampah juga masih menjadi permasalahan dalam Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Provinsi Gorontalo, hal ini dibuktikan dengan Timbulan sampah 623,55 ton/hr atau 227.577,28 ton/thn dan

65% Limbah B3 belum terkelola dengan maksimal (Sumber : DLHK Provinsi Gorontalo). Adapun target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Kebijakan Strategi Daerah) sampai dengan tahun 2024 diharapkan mencapai 28 % (70.095,050 Ton/Tahun).

Sementara kerusakan hutan juga menjadi perhatian yang serius dalam penanganannya hingga tahun 2020 luas lahan kritis dalam kawasan sebesar 140.446 Ha sementara di luar kawasan sebesar 191.852 Ha sehingga total lahan kritis 332.298 Ha. Kerusakan terbesar berada di wilayah Kabupaten Gorontalo dengan luas 100.463 Ha.

12. Tingginya Risiko Bencana

Provinsi Gorontalo tercatat memiliki riwayat kejadian bencana yang tinggi, dengan sebagian besar di antaranya merupakan bencana hidrometeorologis yang terkait dengan iklim dan dinamika perubahannya. Bencana-bencana tersebut antara lain puting beliung, banjir, banjir bandang, longsor, kekeringan serta cuaca ekstrim.

Melalui penerapan kerangka kebijakan untuk mengurangi kerentanan (vulnerability) dan meningkatkan ketahanan (resilience) yang menjadi titik simpul konvergensi adaptasi perubahan iklim (API) dan pengurangan risiko bencana (PRB). Luas wilayah provinsi Gorontalo adalah 12.435,00 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 1.202.631 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 170 jiwa/km² (BPS, 2020). Bentuk bentang alam dan permukaan tanah di wilayah ini sebagian besar adalah perbukitan, oleh karenanya Gorontalo memiliki banyak gunung dengan ketinggian yang beragam. Selain itu kondisi tektonik wilayah ini juga dilintasi oleh Sesar Gorontalo yang melewati Kota Gorontalo.

Kondisi geologi demikian menjadikan Provinsi Gorontalo sangat rawan terhadap bencana gempa bumi dan tanah longsor. Berdasarkan data yang dihimpun dari

DIBI BNPB selama periode 5 tahun terakhir provinsi Gorontalo telah mengalami sebanyak 71 kejadian bencana yang didominasi oleh bencana banjir, gempa bumi, tanah longsor, serta kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2021 Provinsi Gorontalo memiliki indeks risiko sedang dengan nilai indeks 120,61(sedang).

13. Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca melalui Pembangunan Rendah Karbon

Emisi RAD-GRK Provinsi Gorontalo berasal dari 3 (tiga) bidang yaitu 1) Berbasis Lahan, 2) Berbasis Energi dan 3) Pengelolaan Limbah. Hasil proyeksi Business as Usual (BAU) Provinsi Gorontalo tahun 2020 tanpa intervensi aksi mitigasi, bidang berbasis lahan masih menempati porsi penyumbang emisi GRK terbesar sebanyak 95,8%. Sedangkan bidang berbasis energi dan limbah secara berturut-turut menyumbang 3,8% dan 0,9% dari total BAU 2020 di Provinsi Gorontalo.

14. Belum optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Belum meratanya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB). Capaian RB Provinsi Gorontalo pada tahun 2019 “BB” sehingga perlu didorong terus pelaksanaannya hingga maksimal. Sementara itu, kesalahan dan kelalaian dalam proses administrasi dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa juga masih terjadi, hal ini ditandai dengan masih adanya beberapa PNSD yang bermasalah hukum dan berproses hingga ke pengadilan.

Beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis. Pertama, terkait dengan profesionalitas PNSD, penerapan sistem merit belum optimal dilaksanakan serta rendahnya kompetensi dan tingkat pendidikan PNSD.

Kedua, dari aspek tata laksana, perlu didorong penerapan arsitektur proses bisnis pemerintahan yang juga akan mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI) yang terintegrasi, baik dari sisi tata kelola, infrastruktur TIK, maupun layanan. Ketiga, dari sisi akuntabilitas, Pemerintah Provinsi Gorontalo memperoleh predikat “B” atau baik untuk penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2020 Hasil ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen kinerja mulai terbangun dengan baik, khususnya dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah, namun kedepan perlu terus dioptimalkan keterpaduan sistem dan melanjutkan money follow program sehingga perencanaan dan penganggaran lebih berorientasi pada hasil yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Mengingat kebijakan belanja daerah disesuaikan dengan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain kenaikan belanja pegawai, belanja bunga pinjaman daerah, belanja untuk Pilkada Tahun 2024 dan Belanja Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota Oleh karena itu, perlu sistem manajemen kinerja kelembagaan, sistem perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan andal serta implementasi sistem integritas.

15. Menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dan penguatan konsolidasi demokrasi

Rendah Rasa Aman di Lingkungan Masyarakat, Kejahatan terhadap nyawa, fisik, kesusilaan, dan masih relatif tinggi. Secara khusus kejahatan terhadap perempuan dan anak juga menjadi perhatian setiap negara, dan juga menjadi komitmen global dalam pencapaian sasaran TPB. Oleh karena itu, perempuan dan anak korban kekerasan memerlukan penanganan khusus. Selama tahun 2020 kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo telah menyelesaikan 2.199 kasus kejahatan konvensional dari 3.485 kasus yang dilaporkan dibanding tahun 2019 mengalami penurunan 61 kasus. Kasus tertinggi adalah kasus penganiayaan 989 kasus, pencurian biasa 398 kasus, penipuan 234 kasus, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 182 kasus dan penggelapan sebanyak 165 kasus.

Sarana Penyebaran Paham Radikal Semakin Beragam, meluasnya penyebaran paham ideologi berbasis kekerasan dan perekrutan teroris dilakukan melalui media sosial, sekolah, dan lembaga masyarakat. Segmen perekrutan semakin beragam, tidak hanya mencakup pria dewasa, tetapi juga perempuan dan anak-anak. Selain itu penegakan peraturan daerah masih lemah, dibuktikan dengan belum adanya laporan penindakan terhadap penegakan peraturan daerah

Dari sisi demokrasi, Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi, masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan. masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat. capaian indeks demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Gorontalo tahun 2021 mencapai 77,01. Angka ini masuk kategori sedang

16. Dukungan Terhadap Isu Strategis Nasional di Provinsi Gorontalo

Dalam Musrenbangns RKP tahun 2025 Presiden RI menyampaikan beberapa hal yang harus diperhatikan yakni terkait kemampuan manajemen fiskal, koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran project prioritas, baik nasional maupun daerah. Tahun 2025 adalah fondasi awal pelaksanaan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN tahun 2025-2029 untuk meneruskan kewajiban bangsa dalam mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Dalam mewujudkan hal tersebut, diperlukan optimalisasi sinergi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, penguatan kolaborasi pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, dan penguatan integrasi berbagai sumber-sumber pembiayaan pembangunan, sebagaimana pidato presedien dalam Musrenbangnas 2025.

Isu Strategis Nasional adalah Isu terkait Transformasi Ekonomi, Transformasi Sosial dan Transforasi Tata Kelola yaitu:

1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, peningkatan kapasitas ketahanan kesehatan dan pemerataan kapasitas responsive system kesehatan di seluruh wilayah;
2. Optimalisasi bonus demografi dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas;
3. Percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif;
4. Peningkatan mutu dan daya saing produk, produktivitas tenaga kerja, kemampuan menciptakan inovasi, serta tuntutan ekonomi hijau;
5. Destinasi pariwisata dan masalah degradasi lingkungan;
6. Mendorong peningkatan ekonomi kreatif dan produktivitas ekonomi di sektor parairan serta memastikan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan sistem ekonomi, sosial dan lingkungan;
7. Percepatan transisi energi, ekonomi sirkular industri, tenaga kerja hijau dan pengelolaan hutan lestari;
8. Dgitalisasi sektor strategis dan integrasi ekonomi dometik dan global;

9. Integritas partai politik, sistem anti korupsi dan akuntabilitas kinerja penganun, transformasi digitalisasi pelayanan publik, manajemen talenta dan integrasi proses bisnis.

Mengacu pada focus-fokus pembangunan yang tertuang dalam RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 dan memperhatikan teknokratik RPJMN serta menelaah rumusan isu-isu strategis daerah, maka kebijakan utama pembangunan provinsi Gorontalo tahun 2025 adalah :

➤ **1. Peningkatan Ekonomi Daerah**

Pembangunan ekonomi akan dititikberatkan pada Pengelolaan sumber daya ekonomi sesuai potensi yaitu pertanian, kelautan dan perikanan serta kehutanan dan mendorong peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

➤ **2. Pengembangan Wilayah dan Pedesaan**

Pembangunan wilayah dan pedesaan akan difokuskan dengan mengkoordinasikan seluruh seluruh stakeholders pembangunan pada Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan bagi wilayah yang belum berkembang dan Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata.

➤ **3. Peningkatan Sumber Daya Manusia**

Pembangunan sumberdaya manusia dititikberatkan pada Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, Peningkatan layanan pendidikan yang lebih berkualitas, pelaksanaan perlindungan social, Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, juga mendorong upaya Pengentasan kemiskinan dan Peningkatan produktivitas tenaga kerja.

➤ **4. Peningkatan Kebudayaan dan Agama**

Pembangunan kebudayaan dan agama akan didorong melalui peningkatan pelestarian kebudayaan dan budaya lirisasi serta meningkatkan pemahaman dan kerukunan beragama.

➤ **5. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis**

Pembangunan infrastruktur dititikberatkan pada Pembangunan infrastruktur layanan dasar, Pembangunan konektivitas transportasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

➤ **6. Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan**

Pembangunan lingkungan hidup dan ketahanan bencana diarahkan melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

➤ **7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi**

Pembangunannya diarahkan pada peningkatan pelayanan publik berkualitas, percepatan reformasi birokrasi serta Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

4.2.1 Tema dan Unsur Tema RKPD Tahun 2025

Berdasarkan kebijakan utama pembangunan Gorontalo dalam RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dan berdasarkan hasil evaluasi capaian pembangunan daerah tahun berjalan dan isu strategis pembangunan daerah, maka ditetapkan tema dan unsur tema pembangunan untuk tahun 2025 adalah:

“Transformasi Sosial Ekonomi Inklusif dan Hilirisasi Sumber Daya Alam Berkelanjutan yang didukung Tata Kelola Pemerintahan”

Adapun unsur tema RKPD tahun 2025 adalah, sebagai berikut :

Tabel 4.1
Unsur-unsur tema RKPD Tahun 2025

Transformasi Sosial (Penanganan Kemiskinan dan Stunting)	1. Meningkatnya mutu dan kualitas layanan pendidikan (SMA, SMK dan Pendidikan Khusus) 2. Meningkatnya derajat kesehatan 3. Peningkatan kualitas anak, perempuan, pemuda dan Kelompok Rentan 4. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama 5. Pemenuhan Hak Sosial Dasar Masyarakat 6. Meningkatnya budaya literasi masyarakat
Transformasi Ekonomi dan Hilirisasi Sumber Daya Alam Berkelanjutan	1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan 2. Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, Lapangan kerja dan daya saing perekonomian 3. Meningkatnya daya saing dan kemandirian desa 4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 5. Meningkatnya ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim
Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis	1. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan ekonomi Inklusif dan Pelayanan Dasar.
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Stabilitas Keamanan Daerah	1. Meningkatnya stabilitas keamanan dan penguatan demokrasi daerah 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

4.3. Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025

Perumusan Strategi dan arah kebijakan merupakan langkah yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan menengah daerah yang dirumuskan dan menjadi pedoman untuk dilaksanakan agar pembangunan lebih terarah, efektif dan efisien dalam perwujudan tujuan dan sasaran pembangunan. Berdasarkan tujuan, sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD Tahun 2023-2026,

sebagaimana tema yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 maka sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2
Tema, Unsur Tema dan Sasaran RKPD 2025

No	Tema	Unsur Tema	Sasaran
	Transformasi Sosial Ekonomi dan Hilirisasi Sumber Daya Alam Berkelanjutan yang didukung Tata Kelola Pemerintahan	Transformasi Ekonomi dan Hilirisasi Sumber Daya Alam Berkelanjutan	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan
			Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, Lapangan kerja dan daya saing perekonomian
			Meningkatnya daya saing dan kemandirian desa
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
			Meningkatnya ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim
		Transformasi Sosial (Penanganan Kemiskinan dan Stunting)	Meningkatnya mutu dan kualitas layanan pendidikan
			Meningkatnya derajat kesehatan
			Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda
			Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama
			Pemenuhan Hak Sosial Dasar Masyarakat
10			Meningkatnya budaya literasi masyarakat
11		Infrastruktur Dasar dan Strategis	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi Inklusif dan Pelayanan Dasar
12		Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Daerah	Meningkatnya stabilitas keamanan dan penguatan demokrasi daerah
13			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Adapun uraian sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagaimana penjelasan di bawah ini :

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan

Strategi : Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu dan keamanan serta keanekaragaman komoditi potensial bersumber dari pertanian, perikanan dan kelautan yang ramah lingkungan dan berdampak pada penguatan kemandirian pangan serta kesejahteraan petani dan nelayan.

Arah Kebijakan yang dilakukan adalah :

1. Peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing sektor pertanian dan perikanan yang berkelanjutan, serta pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya;
2. Penumbuhan dan peningkatan kapasitas *emerging sectors* (bioekonomi dan bioteknologi, pendidikan dan riset, serta manajemen sumber daya);
3. Peningkatan peran pusat-pusat pertumbuhan untuk pengembangan produk unggulan dalam mendukung pengembangan wilayah;
4. Peningkatan nilai tambah dan penerapan pariwisata berkelanjutan termasuk pengembangan wilayah konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi (*eco-tourism*);
5. Optimalisasi peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan inovasi untuk pengembangan potensi unggulan.
6. Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.
7. Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui pertanian regenerative

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 4.3
Indikator, Capaian dan Target Sasaran I

No	Indikator Sasaran	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
1	Indeks Ketahanan Pangan	80,52 Indeks (2022)	86,04 Indeks	88,86 Indeks
2	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	37,75 %	38,98 %	39,55 %
3	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTN-Pi)	95,44 Rasio	97,82 Rasio	98,82 Rasio
4	Nilai Tukar Petani (NTP)	111,32 Rasio	105,09 Rasio	105,89 Rasio
5	Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)	115,84 Rasio	113,18 Rasio	118,85 Rasio
6	*Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi			
7	*Pembentukan Modal Tetap Bruto	%PDRB		0 %PDRB
8	*Prevalensi ketidakcukupan konsumsi			18,63

2. Sasaran: meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian

Strategi : Peningkatan industri hulu hilir, industri olahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, peningkatan nilai tambah , Peningkatan KUKM, peningkatan ekspor, dan peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Arah Kebijakan :

1. Mendorong investasi melalui promosi, peningkatan layanan perizinan dan membangun kemitraan;
2. Menyiapkan desain perencanaan industri, melakukan pengendalian izin usaha industri, mengelola sistem informasi industri, pengendalian dan pengawasan terhadap limbah industri;
3. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pengawasan dan hubungan industrial;
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan usaha koperasi, IKM dan UKM;
5. Digitalisasi promosi dan pemasaran;
6. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha pengolahan hasil produksi pertanian, perikanan dan kehutanan berskala kecil;
7. Perluasan kemitraan dan kerjasama internasional, Pameran dan misi dagang untuk mendorong ekspor;
8. Kerjasama antar daerah dalam memenuhi bahan baku industri;
9. Peningkatan kelancaran arus barang, stabilisasi harga dan pasar;
10. Peningkatan peran pusat-pusat pertumbuhan untuk pengembangan produk unggulan dalam mendukung pengembangan wilayah;
11. Peningkatan nilai tambah dan penerapan pariwisata berkelanjutan termasuk pengembangan wilayah konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi (*eco-tourism*);
12. Peningkatan pengelolaan destinasi wisata di kawasan geopark dan kawasan strategis pariwisata Provinsi Gorontalo (Benteng Otanaha, Lombongo, Botubarani, Iluta, Bubohu/Bongo, Bolihutuo, Minanga, Torosiaje)
13. Pengembangan industri pariwisata halal;
14. Promosi dan Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
15. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pertambangan mineral non logam dan batuan dalam rangka peningkatan penanaman modal daerah;
16. Menyiapkan perencanaan konservasi Cekungan Air Tanah (CAT) dan Nilai Perolehan Air (NPA) tanah serta melakukan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah.

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana tabel di bawah ini **Tabel 4.4**
Indikator, Capaian dan Target Sasaran II

No	Indikator	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
1	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	4,42 %	5,36 %	5,92 %
2	Nilai Ekspor	37,96 USD	19,52 USD	38,5 USD

3	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)			27,56%
4	Realisasi PMA/PMDN	5,515	12.879 TOE/Milyar Rupiah	13, 352 TOE/Milyar Rupiah
5	Kontribusi PDRB sektor Pariwisata	2,41		3,5
6	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum			
7	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif			
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	56,4%		
9	Presentasi Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal			

3. Sasaran Meningkatnya daya saing dan kemandirian desa

Strategi : Mendorong peningkatan ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan kluster kawasan strategis listrik.

Arah Kebijakan :

1. Revitalisasi lembaga ekonomi desa;
2. Kerjasama antar desa dan antar lembaga ekonomi desa;
3. Peningkatan sarana prasarana ekonomi desa;
4. Peningkatan infrastruktur ekonomi desa;
5. Pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga berdasarkan potensi desa;
6. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dalam penguatan tata kelola data Desa;
7. Pengembangan dan Fasilitasi Kawasan Transmigrasi;
8. Pembinaan Dinas PMD Kab/Kota dalam memperkuat kapasitas dalam pengendalian infrastruktur pedesaan;
9. Revitalisasi peran Tim Koordinasi Pengembangan Kawasan Pedesaan Provinsi Gorontalo (TKPKP-Go).

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.5
Indikator, Capaian dan Target Sasaran III

No	Indikator	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
1	Kemiskinan perdesaan	23,73 %	23,38 %	22,82 %
2	Peningkatan Status Desa dari desa maju menjadi desa mandiri (kawasan Strategis Provinsi/Lokasi Prioritas)	49 Desa	6 Desa	7 Desa

4. Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Strategi : Peningkatan pengelolaan, pengendalian dan perlindungan Lingkungan Hidup

Arah Kebijakan :

1. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;

2. Peningkatan Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dalam pelaksanaan izin lingkungan / persetujuan lingkungan, SLO dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup;
3. Peningkatan SDM Lingkungan Hidup dan kehutanan Serta Pemberdayaan Masyarakat kehutanan;
4. Pembangunan Rendah Karbon;
5. Rehabilitasi hutan dan lahan dalam kawasan dan luar kawasan hutan;
6. Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
7. Optimalisasi Pemanfaatan Hutan (Persetujuan Berusaha Pengelolaan Hutan).

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 4.6
Indikator, Capaian dan Target Sasaran IV

Indikator	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	79,52 Indeks*	80,3 Indeks	80,53 Indeks

**capaian IKLH telah melampaui Target Akhir RPD*

5. Sasaran Meningkatnya ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim

Strategi : Peningkatan pengelolaan penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana

Arah Kebijakan :

1. Meningkatnya kualitas tata kelola penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana;
2. Peningkatan penanganan bangunan rumah korban bencana dan dampak program sesuai SPM.

Strategi : Pembangunan Rendah Karbon

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan Energi Terbarukan;
2. Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
3. Peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian menuju pertanian ramah lingkungan;
4. Peningkatan koordinasi dan advokasi penerapan modifikasi proses dan teknologi serta manajemen limbah industri;
5. Peningkatan fasilitasi pemenuhan persyaratan izin angkutan dan pengujian berkala kendaraan bermotor.

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 4.7
Indikator, Capaian dan Target Sasaran V

Indikator	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
Indeks Resiko Bencana	120,61*	120,01	119,51

** capaian IRBI telah melampaui Target Akhir RPD*

6. Sasaran Meningkatnya mutu dan kualitas layanan Pendidikan

Strategi : Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola Layanan Pendidikan Serta Kurikulum yang Adaptif

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Secara Proporsional seperti Guru produktif dan Guru pendidikan luar biasa.
2. Meningkatkan Kualitas Sarana Dan Prasarana Satuan Pendidikan, khususnya satuan pendidikan menengah dan satuan Pendidikan Khusus
3. Meningkatkan Kualitas pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan menengah dan khusus
4. Mendorong peningkatan kualitas dan daya saing lulusan SMK, melalui penguatan mutu, relevansi penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis pengembangan Kerjasama Dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri .
5. Pengembangan Kegiatan Ekstrakurikuler Berbasis Entrepreneurship
6. Peningkatan Ketersediaan Dan Kualitas Data Pendidikan
7. Peningkatan Koordinasi Dan Advokasi Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pemenuhan SPM Pendidikan .

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 4.8
Indikator, Capaian dan Target Sasaran VI

Indikator	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
Rata-rata lama sekolah	8,10	8,28	8,56
Harapan Lama Sekolah	13,16	13,24	13,93
Angka Partisipasi Sekolah (APS)	71,7	71,63	72,39
Persentase satuan Pendidikan berakreditasi minimal B SMA/SMK (%)	SMA : 52 SMK : 33	SMA = 1:20 SMK =1:15	SMA = 56 SMK = 42
Persentase penduduk penyandang disabilitas yang bersekolah	989	-	25

7. Sasaran Meningkatnya derajat Kesehatan

Strategi : Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas Kesehatan RSUD Ainun Habibie dan Labkesda;
2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas SDM Kesehatan pada fasilitas Kesehatan provinsi
3. Peningkatkan kualitas tata kelola layanan Kesehatan di fasilitas kesehatan provinsi

4. Peningkatan pengelolaan rujukan dan rujuk balik di fasilitas kesehatan
5. Pengembangan promosi dan pemasaran Labkesda
6. Peningkatan layanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Usaha Kesehatan Perorangan (UKP)
7. Peningkatan koordinasi advokasi pemerintah kabupaten/kota dalam percepatan penanganan stunting
8. Peningkatan koordinasi advokasi pemerintah kabupaten/kota dalam pemenuhan SPM Kesehatan untuk penurunan AKI AKB
9. Digitalisasi layanan Kesehatan
10. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 4.9
Indikator, Capaian dan Target Sasaran VII

Indikator	Capaian 2023	Target 2024	Target 2024
Angka Harapan Hidup	68,83	68,61	68,90
Prevalensi Stunting	26,9 %	14%	14%

8. Sasaran Pemenuhan Hak Sosial Dasar Masyarakat

Strategi : Perlindungan sosial bagi masyarakat

Kebijakan :

1. Penguatan pendampingan pelaksanaan jaminan sosial;
2. Peningkatan upaya pemenuhan layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
3. Peningkatan upaya pemenuhan hak dasar anak terlantar, disabilitas dan lansia dalam panti;
4. Advokasi pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten/Kota secara dinamis serta pengembangan sistem evaluasi terpadu;
5. Pemanfaatan DTKS dalam penentuan sasaran penerima bantuan sosial
6. Pemberian kebutuhan pangan khusus untuk perbaikan dan penjaminan pertumbuhan gizi anak dan ibu hamil.

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 4.10
Indikator, Capaian dan Target Sasaran VIII

Indikator	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
Cakupan penerima penjaminan pemeliharaan kesehatan (UHC)	96,6 %*	95,7 %	97 %

Cakupan masyarakat miskin yang mendapatkan Bantuan sosial (%)	10,9 %	23 %	25 %
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	49,38%	-	51%

**capaian telah melebihi target tahun 2024, perlu penetapan target kembali*

9. Sasaran Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda

Strategi : Meningkatkan tumbuh kembang anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan peran dan partisipasi perempuan serta meningkatkan produktifitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak;
2. Meningkatkan kapasitas ekonomi perempuan;
3. Menjamin keamanan perempuan dan anak dari kekerasan dan pelecehan seksual;
4. Mengembangkan potensi dan minat pemuda;
5. Menumbuhkan jiwa wirausaha muda.

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 4.11
Indikator, Capaian dan Target Sasaran IX

Indikator	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,391	-	0,38
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	66,79	-	66,78
Indeks Pembangunan Gender	88,12	88,22	88,32
Indeks Perlindungan Anak	57,90 (2022)	67,7	67,9
Indeks Pembangunan Pemuda	54,17 (2022)	52,62	54,57

10.Sasaran Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama

Strategi : Meningkatkan pelestarian warisan budaya daerah sebagai bagian pendukung pembangunan dan meningkatkan nilai keagamaan

Arah Kebijakan :

1. Revitalisasi, pemanfaatan, aktualisasi, cagar, objek, nilai budaya dan kearifan lokal untuk mendukung Rintisan Geopark Gorontalo;
2. Pengembangan, perlindungan hak dan pengelolaan kebudayaan;
3. Peningkatan sarana prasarana pusat pembinaan mental spiritual;
4. Pengembangan nilai-nilai keagamaan khususnya islam sebagai akar budaya daerah;
5. Peningkatan kerukunan dan toleransi antar umat beragama.

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 4.12
Indikator, Capaian dan Target Sasaran

Indikator	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
Persentase warisan budaya benda/tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	-	-	-
Indeks Kerukunan Umat Beragama	-	-	-

*Sasaran ini hanya menargetkan capaian pada akhir tahun RPD yakni tahun 2026.

11.Sasaran Meningkatnya budaya literasi masyarakat

Strategi : Meningkatkan budaya literasi, bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan peran perpustakaan sekolah dan perpustakaan daerah sebagai sarana sosialisasi dan penguatan literasi peserta didik dan masyarakat;
2. Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra daerah;
3. Pengembangan teknologi informasi sebagai corong informasi literasi masyarakat yang mudah diakses dan diperoleh masyarakat;
4. Penguatan institusi sosial penggerak, penggiat dan pemerhati literasi sebagai mitra pemerintah dalam penguatan literasi masyarakat.

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 4.13
Indikator, Capaian dan Target Sasaran XI

Indikator	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	70,39	57,64	71,5

* capaian telah melebihi target RPD

12.Sasaran Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Strategi : Meningkatkan Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Non Fisik Kewenangan Provinsi

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan jangkauan dan kualitas infrastruktur ekonomi dan layanan dasar;
2. Peningkatan pengelolaan dan penanganan sampah;
3. Peningkatan pengelolaan penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana;
4. Peningkatan sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum lainnya;
5. Peningkatan kualitas pemanfaatan ruang;
6. Mengurangi *Backlog*;
7. Peningkatan pengelolaan penanganan kawasan kumuh kewenangan Provinsi;
8. Peningkatan konektivitas pelayanan transportasi;
9. Peningkatan keselamatan lalu lintas;
10. Menurunkan tingkat kemacetan lalu lintas.

Tabel 4.14
Indikator, Capaian dan Target Sasaran XII (a)

Indikator	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi	70,3	64,51	71,5
Rasio Elektrifikasi (%)	99,8	99,7	100
Konsumsi Listrik Perkapita (kWH)*	1.100	1.100	1.100
Persentase Luasan Kawasan Kumuh (%)	4,6	7,38	7,08
Persentase Cakupan Air minum Layak	96,16	96,56 %	100 %
Persentase Cakupan Sanitasi Layak	79,82	80,08 %	81,54 %
Persentase Kinerja Irigasi Kewenangan Provinsi	30,19	65%	31,50
Rasio Konektivitas Antar Wilayah (%)	0,553 Rasio	0,55 Rasio	0,703 Rasio

Strategi : Meningkatkan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pelaksanaan *E-Government*

Arah Kebijakan :

1. Penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE);
2. Transformasi digital dalam peningkatan pelayanan pemerintahan;
3. Pengelolaan media komunikasi publik, membangun kemitraan, meningkatkan tata Kelola informasi dan komunikasi;
4. Peningkatan pemanfaatan digitalisasi untuk tata kelola penyelenggaraan pelayanan

pemerintahan yang terbuka dan terintegrasi.

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 4.15
Indikator Capaian, Target dan Target Sasaran XII (b)

INDIKATOR	CAPAIAN 2023	TARGET 2024	TARGET 2025
Nilai Maturitas SPBE	2,22		

**Sasaran ini hanya menargetkan capaian pada akhir tahun RPD yakni tahun 2026.*

13.Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Strategi : Percepatan reformasi birokrasi

Arah Kebijakan :

1. Penguatan manajemen institusi pemerintah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan, penerapan standar internasional dalam mutu layanan publik, tata kelola pemanfaatan TIK;
2. Proses bisnis organisasi pemerintah berbasis pada prioritas pembangunan;
3. Transformasi digital dalam penerapan SPBE secara terintegrasi melalui pemanfaatan infrastruktur, proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, dan layanan SPBE secara terpadu;
4. Penerapan manajemen talenta ASN, dalam bentuk penguatan perencanaan kebutuhan ASN sesuai prioritas pembangunan, pengembangan pola karir structural dan fungsional, pelaksanaan talent pool JPT, implementasi Human Capital Development Plan (HCDP) dan pengembangan budaya kerja berakhlak;
5. Penguatan kebijakan kesejahteraan ASN dalam bentuk kebijakan insentif untuk ASN tingkat risiko pekerjaan tinggi, dan bertalenta (high performance);
6. Perluasan implementasi sistem integritas, melalui penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM dan pengembangan dan implementasi sistem integritas ASN;
7. Penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, melalui penyempurnaan kebijakan dan implementasi manajemen risiko, penguatan implementasi SPIP sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah;
8. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pernatausahaan daerah melalui pemanfaatan SIPD sesuai UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
9. Pemanfaatan TIK untuk penguatan penerapan *e-services* dan Sistem Informasi Pelayanan Publik;
10. Penerapan replikasi inovasi pelayanan publik;
11. Akselerasi model/desain inovasi pelayanan publik;
12. Penataan produk hukum daerah;

13. Peningkatan kapasitas tata laksana: perencanaan dan anggaran, keuangan, dan aset, pengadaan barang jasa, pengendalian, pengelolaan data sektoral, Kearsipan, riset, inovasi, Fasilitas Kesra Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar serta Pelayanan Pimpinan;
14. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur yang profesional dan kompeten didukung oleh manajemen ASN berbasis sistem merit;
15. Peningkatan kualitas tata kelola perencanaan, pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan terintegrasi;
16. Dukungan terhadap penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 4.16
Indikator, Capaian dan Target Sasaran XIII

Indikator	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
Nilai SAKIP	BB	BB Nilai	BB Nilai
Indeks Kematangan Organisasi	49	49 Indeks	49 Indeks
Indeks Kualitas Perencanaan	87,64 (Baik)	Baik	Baik
Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP *	WTP *
Indeks Sistem Merit	327	-	300
Nilai Maturitas SPBE	3,22	-	3,25
Nilai Pengawasan Kearsipan	97,64	63 Nilai	98 Nilai
Indeks Pelayanan Publik	4,24	-	-
Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB		1,6	-

14. Meningkatnya stabilitas keamanan dan penguatan demokrasi daerah

Strategi : Peningkatan ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta pemantapan demokrasi

Arah Kebijakan :

1. Pencegahan kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan dan disabilitas;
2. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga kepolisian dan TNI;
3. Meningkatkan kerukunan beragama dengan memperhatikan kesetaraan, keterwakilan,

- partisipasi etnis;
4. Penguatan karakter dan wawasan kebangsaan sesuai nilai-nilai Pancasila;
 5. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 6. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil;
 7. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang baik.

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 4.17
Indikator, Capaian dan Target Sasaran XIV

Indikator	Capaian 2022	Target 2024	Target 2025
Indeks Integritas Nasional	-	74,7	-
Indeks Demokrasi	73,74	74	78

*Indeks Demokrasi ditargetkan hanya pada akhir tahun RPD

4.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan program yang berhubungan dengan kepentingan public dan memiliki daya ungkit dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam rangka pencapaian indicator tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dijelaskan sebelumnya, Provinsi Gorontalo menetapkan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2023 sebagaimana table di bawah ini :

Tabel 4.18
Program Prioritas Provinsi Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	OPD Penanggung Jawab
	Tujuan : Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	
	Sasaran : Meningkatkan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian
4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian
5	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian

6	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Pangan
7	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Pangan
8	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Pangan
9	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Pangan
10	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
11	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan
12	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
13	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	Dinas Kelautan dan Perikanan
14	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda)	Dinas Kelautan dan Perikanan
15	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (UPTD Pelabuhan Perikanan Tilamuta)	UPTD-PPI Tilamuta
16	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (UPTD Balai Perikanan Budidaya Laut & Payau)	UPTD-Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Laut & Payau
17	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma)	UPTD-PPI Gentuma

Sasaran : Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, Lapangan kerja dan daya saing perekonomian

1	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (UPTD BP2MDPP)	UPTD-BP2MDPP
3	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
4	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
5	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata
6	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
7	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Diskumperindag
8	Program Pendidikan dan Latihan Koperasi	Diskumperindag
9	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Diskumperindag
10	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Diskumperindag
11	Program Pengembangan UMKM	Diskumperindag
12	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Diskumperindag
13	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Diskumperindag
14	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Diskumperindag
15	Program Perizinan dan Pendaftaran Usaha	Diskumperindag
16	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Diskumperindag
17	Program Pengembangan Ekspor	Diskumperindag
18	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	UPTD Balai Pemantapan Sertifikasi Mutu Barang
19	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas PMPTSP
20	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Dinas PMPTSP

21	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas PMPTSP
22	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP
23	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP
24	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Naker ESDM Trans
25	Program Hubungan Industrial	Dinas Naker ESDM Trans
26	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Dinas Naker ESDM Trans
27	Program Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Naker ESDM Trans (UPTD -BLK)
28	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Dinas Naker ESDM Trans
29	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Dinas Naker ESDM Trans

Sasaran : Meningkatnya daya saing dan kemandirian desa

1	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas PMD, Administrasi Dukcapil
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas PMD, Administrasi Dukcapil
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Dinas PMD, Administrasi Dukcapil
4	Program Penataan Desa	Dinas PMD, Administrasi Dukcapil
5	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas PMD, Administrasi Dukcapil
6	Program Pencatatan Sipil	Dinas PMD, Administrasi Dukcapil
7	Program Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	Dinas PMD, Administrasi Dukcapil
8	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Dinas Naker ESDM Trans
9	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Dinas Naker ESDM Trans

Sasaran : Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PUPRPKP
2	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUPRPKP
3	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas PUPRPKP
4	Program Pengembangan Permukiman	Dinas PUPRPKP
5	Program Penataan Bangunan	Dinas PUPRPKP
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas PUPRPKP
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPRPKP
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	Dinas PUPRPKP
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUPRPKP
10	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Dinas PUPRPKP
11	Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Dinas PUPRPKP
12	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas PUPRPKP
13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo (UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan)	Dinas PUPRPKP (UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan)

14	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas PUPRPKP (UPTD TPA Talumelito)
15	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas PUPRPKP (UPTD TPA Talumelito)
16	Program Kawasan Permukiman	Dinas PUPRPKP
17	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi
18	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Dinas PM, ESDM, Transmigrasi
19	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
20	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
21	Program Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik	Dinas Kominfo dan Statistik
22	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Kominfo dan Statistik
23	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Dinas Kominfo dan Statistik

Sasaran : Pemenuhan Hak Sosial Dasar Masyarakat

1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial, PP dan PA
2	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial, PP dan PA
3	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial, PP dan PA
4	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial, PP dan PA
5	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Sosial, PP dan PA
6	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial, PP dan PA
7	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Sosial, PP dan PA
8	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Sosial, PP dan PA
9	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Sosial, PP dan PA
10	Program Peningkatan Kualitas keluarga	Dinas Sosial, PP dan PA
11	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Dinas Sosial, PP dan PA
12	Program Perlindungan Perempuan	Dinas Sosial, PP dan PA

Tujuan : Peningkatan Sumber daya manusia

Sasaran : Meningkatnya mutu dan kualitas layanan pendidikan

1	Program pendidik dan tenaga kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
2	Program pengelolaan pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
3	Program pengendalian perizinan pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
4	Program Pendidikan Kurikulum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

Sasaran : Meningkatnya derajat Kesehatan

1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia kesehatan	Dinas Kesehatan
2	Program Sediaan Farmasi, Alat, Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan

4	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Kesehatan
5	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	RSUD dr. Ainun Habibie

Sasaran : Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda

1	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Sosial, PP dan PA
2	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Sosial, PP dan PA
3	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Sosial, PP dan PA
4	Program Peningkatan Kualitas keluarga	Dinas Sosial, PP dan PA
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Dinas Sosial, PP dan PA
6	Program Perlindungan Perempuan	Dinas Sosial, PP dan PA

Sasaran : Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama

1	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
2	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
3	Program Pengelolaan Permuseuman	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kesbangpol
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Kesbangpol

Sasaran : Meningkatnya budaya literasi masyarakat

1	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
2	Program Pengelolaan Arsip	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
4	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
5	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Tujuan : Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Sasaran : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas LH & Kehutanan
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas LH & Kehutanan
3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Dinas LH & Kehutanan

4	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas LH & Kehutanan
5	Program Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Dinas LH & Kehutanan
6	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas LH & Kehutanan
7	Program Pengelolaan Hutan	Dinas LH & Kehutanan
8	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Dinas LH & Kehutanan
9	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Dinas LH & Kehutanan
10	Program Pengelolaan DAS	Dinas LH & Kehutanan

Sasaran : Meningkatnya ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim

1	Program Pengembangan Perumahan	Dinas PUPRKP
2	Program Penanggulangan Bencana	BPBD

Tujuan : Terwujudnya *Good and Clean Government*

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

1	Program pengembangan Sumberdaya Manusia	Badan Diklat
2	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
3	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah
4	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan Daerah
5	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Keuangan Daerah
6	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPPEDA
7	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPPEDA
8	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	BAPPPEDA
9	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
10	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
11	Program kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa	Biro Pengadaan
12	Program perekonomian dan pembangunan	Biro Pembangunan & Ekonomi
13	Program kebijakan administrasi pembangunan	Biro Pembangunan & Ekonomi
14	Program Penataan Organisasi	Biro Organisasi
15	Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Biro Hukum
16	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Biro Pemerintahan & Kesra
17	Program Kesejahteraan Rakyat	Biro Pemerintahan & Kesra
18	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
19	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi	Sekretariat DPRD
20	Program Pelayanan Penghubung	Badan Penghubung
21	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Dinas Kominfo dan Statistik

Sasaran : Meningkatnya stabilitas keamanan dan penguatan demokrasi daerah

1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Kesbangpol
---	--	------------

2	Program Peningkatan peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Kesbangpol
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kesbangpol
4	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Dinas Satpol PP, Linmas dan Kebakaran
5	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Dinas Satpol PP, Linmas dan Kebakaran

Selanjutnya, dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga melaksanakan penelaahan program prioritas daerah terhadap prioritas nasional Tahun 2025, Adapun tujuannya agar dapat tergambarkan dukungan program prioritas Provinsi Gorontalo terhadap pembangunan nasional.

Sebagaimana Peraturan Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Bapenas Nomor 2 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 bahwa Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** menjadi fondasi Awal untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dengan berpedoman pada RPJP Nasional dengan RPJMN dengan sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional untuk Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

Tabel 4.19
Prioritas Nasional untuk Provinsi Gorontalo 2025

Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	• Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat • Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik
Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	• Penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen subsektor tanaman pangan • Penyediaan sarana pascapanen tanaman pangan • Penyediaan sarana produksi usaha perikanan yang disalurkan ke masyarakat • Pengembangan kawasan jagung berkelanjutan • Pengembangan kawasan aneka cabai di lima kabupaten • Fasilitasi business matchmaking startup digital • Fasilitasi digital technopreneur • Pemanfaatan teknologi digital di sektor

	pertanian
	• Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian
	• Pembangunan prasarana pengendali daya rusak air di Sungai Bolango
	• Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetative
	• Penguatan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi baik di dalam dan di luar kawasan konservasi
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	• Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	• Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan • Penurunan kematian ibu dan bayi • Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/ sederajat • Fasilitasi literasi digital
	• Penurunan kematian ibu dan bayi
	• Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/ sederajat
	• Fasilitasi literasi digital
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	• Peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai domestik, antar daerah, dan global
	• Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik
Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	• Pengembangan Kawasan Transmigrasi Sumalata di Kabupaten Gorontalo Utara dalam mendukung pemerataan ekonomi
	• Pembangunan rumah susun pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bone Bolango
	• Pembangunan rumah susun pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bone Bolango
Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	• Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik
	• Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, pemanfaatan pembiayaan alternatif, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan transfer ke daerah, serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional
Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	• Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan

Berdasarkan kebijakan dan prioritas pembangunan pada Rancangan Awal RKP Tahun 2025, dilaksanakan penyelarasan program prioritas Rancangan Awal RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dengan Prioritas RKP Tahun 2025 sebagaimana table di bawah ini :

Tabel 4.9
Penyelarasan Prioritas Pembangunan Rancangan Awal RKP dan Rancangan Awal RKPD
Provinsi Gorontalo Tahun 2025 beserta dukungan Program Prioritas Tahun 2025

No	Prioritas RKP	Prioritas RKPD	Program Prioritas Pembangunan Provinsi Gorontalo Tahun 2024
1.	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2. Program Peningkatan peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik 3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 4. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum 5. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran 6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
2.	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 5. Program Penyuluhan Pertanian 6. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 7. Program Penanganan Kerawanan Pangan 8. Program Pengawasan Keamanan Pangan 9. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 10. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 11. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 12. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil 13. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 14. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (UPTD BP2MDPP) 15. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 16. Program Pemasaran Pariwisata 17. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 18. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

			dan Ekonomi Kreatif 20. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 21. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 22. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 23. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 24. Program Pengembangan UMKM
3.	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Infrastruktur Dasar dan Strategis	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 2. Program Penyelenggaraan Jalan 3. Program Penataan Bangunan Gedung 4. Program Pengembangan Permukiman 5. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 8. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah 9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 10. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan 11. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 12. Program Pengembangan Jasa Konstruksi 13. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 14. Program Kawasan Permukiman 15. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan 16. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan PrAngkutan Jalan (LLAJ) 17. Program Pengelolaan Pelayaran 18. Program Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik 19. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 20. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi 21.
4.	Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Peningkatan Sumber Daya Manusia	1. Program pendidik dan tenaga kependidikan 2. Program pengelolaan Pendidikan 3. Program pengendalian perizinan Pendidikan 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia kesehatan 5. Program Sediaan Farmasi, Alat, Kesehatan dan Makanan Minuman 6. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 7. Program Pengendalian Penduduk 8. Program Pembinaan Keluarga Berencana 9. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 11. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 12. Program Pemberdayaan Sosial 13. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 14. Program Rehabilitasi Sosial 15. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

			16. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 17. Program Perlindungan Khusus Anak 18. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 19. Program Peningkatan Kualitas keluarga 20. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 21. Program Perlindungan Perempuan 22. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 23. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan 24. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 25. Program Pembinaan Perpustakaan
5.	Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Peningkatan industri hulu hilir, peningkatan nilai tambah tenaga kerja, Peningkatan KUKM, ekspor, pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri 3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 4. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan 5. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 6. Program Pengembangan Ekspor 7. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 8. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 9. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal 10. Program Promosi Penanaman Modal 11. Program Pelayanan Penanaman Modal 12. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 13. Program Penempatan Tenaga Kerja 14. Program Hubungan Industrial 15. Program Pengawasan Ketenagakerjaan 16. Program Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 17. Program Pengelolaan Aspek Geologi
6.	Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Peningkatan ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal	1. Program Administrasi Pemerintahan Desa 2. Program Peningkatan Kerjasama Desa 3. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
7	Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan	Peningkatan ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta pemantapan demokrasi	1. Program Peningkatan peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik 2. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 3. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum 4. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran 5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan

	narkoba		Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial 6. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 8. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 9. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 10. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 11. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 12. Program Penyelenggaraan Pengawasan 13. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 14. Program kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa 15. Program perekonomian dan pembangunan 16. Program kebijakan administrasi pembangunan 17. Program Penataan Organisasi 18. Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum 19. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah 20. Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 21. Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi 22. Program Pelayanan Penghubung 23. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 24. Program Pengelolaan Arsip 25. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
8.	Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Peningkatan pengelolaan, pengendalian dan perlindungan Lingkungan Hidup	1. Program Penanganan Bencana 2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 3. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 4. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 7. Program Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 9. Program Pengelolaan Hutan 10. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 11. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 12. Program Pengelolaan DAS 13. Program Pengembangan Perumahan 14. Program Penanggulangan Bencana 15. Program Pengelolaan Energi Terbarukan

4. 5 Pokok – Pokok Pikiran DPRD dalam RKPD Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam proses penyusunannya juga mengakomodir proses politik dalam hal ini yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan

Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 78 bahwa dalam penyusunan rancangan awal DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud disampaikan secara tertulis kepada kepala BAPPEDA paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan. Pokok-pokok pikiran DPRD selain disampaikan secara tertulis juga dimasukkan/diinput kedalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) pada tahapan perencanaan. Setelah diterima oleh Kepala Bappeda, Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui proses penelaahan/verifikasi untuk diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Proses penelaahan/verifikasi dimaksud dilaksanakan melalui system SIPD-RI yang merupakan hasil inputan dari seluruh anggota DPRD provinsi. Rekapitulasi pokok-pokok pikiran DPRD dalam SIPD-RI sebagaimana terlampir di bawah ini :

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KOTA

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan daerah Provinsi Gorontalo, maka arah kebijakan pembangunan di wilayah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo di fokuskan pada hal-hal sebagai berikut :

5.1 KOTA GORONTALO

5.1.1 Kebijakan Prioritas Pembangunan Kota Gorontalo

Kebijakan prioritas pembangunan Kota Gorontalo diarahkan pada beberapa hal yaitu :

1. Pengembangan jaringan drainase yang terintegrasi dengan sungai kawasan perkotaan rawan banjir.
2. Pengamanan dan mitigasi bencana : Sesar/patahan Gorontalo yang merupakan bagian zona pertemuan antara zona eurasia dan zona pasifik.
3. Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu dan keamanan serta keanekaragaman komoditi potensial bersumber dari pertanian, perikanan dan kelautan yang ramah lingkungan dan berdampak pada penguatan kemandirian pangan serta kesejahteraan petani, nelayan dan pembudidaya.
4. Peningkatan industri hilir, industri olahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, aspek kegeologian, peningkatan nilai tambah, tenaga kerja, Peningkatan KUKM, peningkatan ekspor, dan peningkatan pariwisata (Benteng Otanaha, Iluta) dan ekonomi kreatif.
5. Peningkatan pengelolaan penanganan kawasan kumuh kewenangan Provinsi; Peningkatan konektivitas pelayanan transportasi dan Peningkatan keselamatan lalu lintas.
6. Meningkatkan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pelaksanaan E-Government.
7. Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola Layanan Pendidikan Serta Kurikulum yang Adaptif.
8. Pemenuhan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat Melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat Provinsi Sebagai Upaya Implementasi Tahapan SPM Provinsi dan Penguatan Koordinasi serta Advokasi SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota dalam rangka mendukung peningkatan Angka Harapan Hidup dan upaya percepatan Penurunan Prevalensi stunting termasuk pengembangan teknologi informasi berbasis digital.
9. Peningkatan upaya pemenuhan layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); Peningkatan upaya pemenuhan hak dasar anak terlantar, disabilitas dan lansia dalam panti.

5.1.2 Sasaran Pembangunan

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kota Gorontalo dan Kebijakan prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo, maka sasaran kinerja pembangunan Kota Gorontalo diproyeksikan sebagai berikut :

Tabel 5.1

Proyeksi Makro Ekonomi Kota Gorontalo Tahun 2025

Indikator	Capaian			Proyeksi	Outlook
	2021	2022	2023	2024	2025
Pertumbuhan Ekonomi	2,8	4,1	4,52	4,97	5,72
Kemiskinan	5,93	5,73	5,64	5,43	5,24
Tingkat Pengangguran	4,55	3,5	4,06	3,18	3,2
IPM	77,41	78,22	78,64	79,2	78,94
Indeks Gini	0,406	0,396	0,396	0,392	0,264

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo 2024, Hasil Proyeksi KEMD Bappeda Provinsi dan Berita Acara Pembahasan Musrenbang RKPD 2025

5.2 KABUPATEN GORONTALO

5.1.1 Kebijakan Pembangunan Prioritas Kabupaten Gorontalo

Prioritas Pembangunan Provinsi di Kabupaten Gorontalo diarahkan pada :

1. Peningkatan produksi, produktivitas, mutu dan keamanan serta keanekaragaman komoditi potensial bersumber dari pertanian, perikanan dan kelautan yang ramah lingkungan dan berdampak pada penguatan kemandirian pangan serta kesejahteraan petani, nelayan dan pembudidaya.
2. Peningkatan industri hulu hilir, industri olahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, aspek kegeologian, peningkatan nilai tambah, tenaga kerja, Peningkatan KUKM, peningkatan ekspor, dan peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif.
3. Mendorong peningkatan ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster kawasan strategi dan meningkatkan Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Non Fisik Kewenangan Provinsi Meningkatkan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pelaksanaan E-Government.
4. Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola Layanan Pendidikan Serta Kurikulum yang Adaptif.
5. Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta dengan Pemenuhan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat Melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat Provinsi Sebagai Upaya Implementasi Tahapan SPM Provinsi dan Penguatan Koordinasi serta Advokasi SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota dalam rangka mendukung peningkatan Angka Harapan Hidup dan upaya percepatan Penurunan Prevalensi stunting termasuk pengembangan teknologi informasi berbasis digital.
6. Penguatan pendampingan pelaksanaan jaminan sosial; Peningkatan upaya pemenuhan layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); Peningkatan upaya pemenuhan hak dasar anak terlantar, disabilitas dan lansia dalam panti; Advokasi pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten/Kota secara dinamis serta pengembangan sistem

evaluasi terpadu; Pemanfaatan DTKS dalam penentuan sasaran penerima bantuan sosial; Pemberian kebutuhan pangan khusus untuk perbaikan dan penjaminan pertumbuhan gizi anak dan ibu hamil.

7. Meningkatkan tumbuh kembang anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan peran dan partisipasi perempuan serta meningkatkan produktifitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan.
8. Peningkatan pengelolaan, pengendalian dan perlindungan Lingkungan Hidup; Meningkatnya kualitas tata kelola penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana; Peningkatan penanganan bangunan rumah korban bencana dan dampak program sesuai SPM.

5.1.2 Sasaran Pembangunan Kabupaten Gorontalo

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Gorontalo dan Kebijakan prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo, maka sasaran kinerja pembangunan Kabupaten Gorontalo diproyeksikan sebagai berikut :

Tabel 5.2

Proyeksi Makro Ekonomi Kabupaten Gorontalo Tahun 2025

Indikator	Capaian			Proyeksi	Outlook
	2021	2022	2023	2024	2025
Pertumbuhan Ekonomi	2,42	3,93	4,51	4,89	5,16
Kemiskinan	17,89	17,71	17,48	16,98	16,52
Tingkat Pengangguran	2,12	1,83	2,48	2,32	2,19
IPM	68,53	69,51	70,37	71,1	71,9
Indeks Gini	0,389	0,413	0,413	0,409	0,402

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo 2024, Hasil Proyeksi KEMD Bappeda Provinsi dan Berita Acara Pembahasan Musrenbang RKPD 2025

5.3 KABUPATEN BOALEMO

5.3.1 Kebijakan Pembangunan Prioritas Kabupaten Boalemo

1. Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu dan keamanan serta keanekaragaman komoditi potensial bersumber dari pertanian, perikanan dan kelautan yang ramah lingkungan dan berdampak pada penguatan kemandirian pangan serta kesejahteraan petani, nelayan dan pembudidaya
2. Peningkatan industri hulu hilir, industri olahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, aspek kegeologian, peningkatan nilai tambah, tenaga kerja, Peningkatan KUKM, peningkatan ekspor, dan peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif

3. Mendorong peningkatan ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster kawasan strategi dan meningkatkan Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Non Fisik Kewenangan Provinsi Meningkatkan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pelaksanaan E-Government
4. Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola Layanan Pendidikan Serta Kurikulum yang Adaptif
5. Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta dengan Pemenuhan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat Melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat Provinsi Sebagai Upaya Implementasi Tahapan SPM Provinsi dan Penguatan Koordinasi serta Advokasi SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota dalam rangka mendukung peningkatan Angka Harapan Hidup dan upaya percepatan Penurunan Prevalensi stunting termasuk pengembangan teknologi informasi berbasis digital
6. Penguatan pendampingan pelaksanaan jaminan sosial; Peningkatan upaya pemenuhan layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); Peningkatan upaya pemenuhan hak dasar anak terlantar, disabilitas dan lansia dalam panti; Advokasi pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten/Kota secara dinamis serta pengembangan sistem evaluasi terpadu; Pemanfaatan DTKS dalam penentuan sasaran penerima bantuan sosial; Pemberian kebutuhan pangan khusus untuk perbaikan dan penjaminan pertumbuhan gizi anak dan ibu hamil
7. Meningkatkan tumbuh kembang anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan peran dan partisipasi perempuan serta meningkatkan produktifitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan
8. Peningkatan pengelolaan, pengendalian dan perlindungan Lingkungan Hidup; Meningkatnya kualitas tata kelola penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana; Peningkatan penanganan bangunan rumah korban bencana dan dampak program sesuai SPM.

5.3.2 Sasaran Pembangunan Kabupaten Boalemo

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Boalemo dan Kebijakan prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo, maka sasaran kinerja pembangunan Kabupaten Boalemo diproyeksikan sebagai berikut :

Tabel 5.3

Proyeksi Makro Ekonomi Kabupaten Boalemo Tahun 2025

Indikator	Capaian			Proyeksi	Outlook
	2021	2022	2023	2024	2025
Pertumbuhan Ekonomi	2,04	3,05	4,42	4,79	4,81 – 5,31
Kemiskinan	19	18,74	18,38	17,89	17,56
Tingkat Pengangguran	3,57	2,07	2,86	2,62	2,13
IPM	66,42	67,27	68,78	68,57	68,93
Indeks Gini	0,41	0,39	0,39	0,39	0,380

5.4 KABUPATEN POHUWATO

5.4.1 Kebijakan Pembangunan Prioritas Kabupaten Pohuwato

1. Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu dan keamanan serta keanekaragaman komoditi potensial bersumber dari pertanian, perikanan dan kelautan yang ramah lingkungan dan berdampak pada penguatan kemandirian pangan serta kesejahteraan petani, nelayan dan pembudidaya
2. Peningkatan industri hulu hilir, industri olahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, aspek kegeologian, peningkatan nilai tambah, tenaga kerja, Peningkatan KUKM, peningkatan ekspor, dan peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif
3. Mendorong peningkatan ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster kawasan strategi dan meningkatkan Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur Fisik (pembangunan bandara Pohuwato) dan Non Fisik Kewenangan Provinsi Meningkatkan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pelaksanaan E-Government.
4. Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola Layanan Pendidikan Serta Kurikulum yang Adaptif
5. Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta dengan Pemenuhan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat Melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat Provinsi Sebagai Upaya Implementasi Tahapan SPM Provinsi dan Penguatan Koordinasi serta Advokasi SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota dalam rangka mendukung peningkatan Angka Harapan Hidup dan upaya percepatan Penurunan Prevalensi stunting termasuk pengembangan teknologi informasi berbasis digital
6. Penguatan pendampingan pelaksanaan jaminan sosial; Peningkatan upaya pemenuhan layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); Peningkatan upaya pemenuhan hak dasar anak terlantar, disabilitas dan lansia dalam panti; Advokasi pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten/Kota secara dinamis serta pengembangan sistem evaluasi terpadu; Pemanfaatan DTKS dalam penentuan sasaran penerima bantuan sosial; Pemberian kebutuhan pangan khusus untuk perbaikan dan penjaminan pertumbuhan gizi anak dan ibu hamil
7. Meningkatkan tumbuh kembang anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan peran dan partisipasi perempuan serta meningkatkan produktifitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan
8. Peningkatan pengelolaan, pengendalian dan perlindungan Lingkungan Hidup; Meningkatnya kualitas tata kelola penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana; Peningkatan penanganan bangunan rumah korban bencana dan dampak program sesuai SPM.

5.4.2 Sasaran Pembangunan Kabupaten Pohuwato

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pohuwato dan Kebijakan prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo, maka sasaran kinerja pembangunan Kabupaten Pohuwato diproyeksikan sebagai berikut :

Tabel 5.4

Proyeksi Makro Ekonomi Kabupaten Pohuwato Tahun 2025

Indikator	Capaian			Proyeksi	Outlook
	2021	2022	2023	2024	2025
Pertumbuhan Ekonomi	2,2	3,1	4,4	4,73	5,8
Kemiskinan	18,08	17,87	17,64	17,41	15,61
Tingkat Pengangguran	2,45	3,41	3,46	3,02	2,50
IPM	67,93	68,67	69,3	69,9	67,85
Indeks Gini	0,413	0,39	0,4	0,397	0,312

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo 2024, Hasil Proyeksi KEMD Bappeda Provinsi dan Berita Acara Pembahasan Musrenbang RKPD 2025

5.5 KABUPATEN BONE BOLANGO

5.5.1 Kebijakan Pembangunan Prioritas Kabupaten Bone Bolango

1. Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu dan keamanan serta keanekaragaman komoditi potensial bersumber dari pertanian, perikanan dan kelautan yang ramah lingkungan dan berdampak pada penguatan kemandirian pangan serta kesejahteraan petani, nelayan dan pembudidaya
2. Peningkatan industri hulu hilir, industri olahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, aspek kegeologian, peningkatan nilai tambah, tenaga kerja, Peningkatan KUKM, peningkatan ekspor, dan peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif
3. Mendorong peningkatan ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster kawasan strategi dan meningkatkan Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Non Fisik Kewenangan Provinsi Meningkatkan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pelaksanaan E-Government
4. Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola Layanan Pendidikan Serta Kurikulum yang Adaptif
5. Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta dengan Pemenuhan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat Melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat Provinsi Sebagai Upaya Implementasi Tahapan SPM Provinsi dan Penguatan Koordinasi serta Advokasi SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota dalam rangka mendukung peningkatan Angka Harapan Hidup dan upaya percepatan Penurunan Prevalensi stunting termasuk pengembangan teknologi informasi berbasis digital
6. Penguatan pendampingan pelaksanaan jaminan sosial; Peningkatan upaya pemenuhan layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); Peningkatan upaya pemenuhan hak dasar

anak terlantar, disabilitas dan lansia dalam panti; Advokasi pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten/Kota secara dinamis serta pengembangan sistem evaluasi terpadu; Pemanfaatan DTKS dalam penentuan sasaran penerima bantuan sosial; Pemberian kebutuhan pangan khusus untuk perbaikan dan penjaminan pertumbuhan gizi anak dan ibu hamil

7. Meningkatkan tumbuh kembang anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan peran dan partisipasi perempuan serta meningkatkan produktifitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan
8. Peningkatan pengelolaan, pengendalian dan perlindungan Lingkungan Hidup; Meningkatnya kualitas tata kelola penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana; Peningkatan penanganan bangunan rumah korban bencana dan dampak program sesuai SPM.

5.5.2 Sasaran Pembangunan Kabupaten Bone Bolango

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bone Bolango dan Kebijakan prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo, maka sasaran kinerja pembangunan Kabupaten Bone Bolango diproyeksikan sebagai berikut :

Tabel 5.5

Proyeksi Makro Ekonomi Kabupaten Bone Bolango Tahun 2025

Indikator	Capaian			Proyeksi	Outlook
	2021	2022	2023	2024	2025
Pertumbuhan Ekonomi	2,18	4,01	4,47	4,82	5,3
Kemiskinan	16,3	16,05	15,51	15,16	14,60
Tingkat Pengangguran	3,45	3,29	3,39	3,11	3,0
IPM	70,76	71,39	71,97	72,4	72,66
Indeks Gini	0,364	0,4	0,4	0,397	0,382

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo 2024, Hasil Proyeksi KEMD Bappeda Provinsi dan Berita Acara Pembahasan Musrenbang RKPD 2025

5.6 KABUPATEN GORONTALO UTARA

5.6.1 Kebijakan Pembangunan Prioritas Kabupaten Gorontalo Utara

1. Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu dan keamanan serta keanekaragaman komoditi potensial bersumber dari pertanian, perikanan dan kelautan yang ramah lingkungan dan berdampak pada penguatan kemandirian pangan serta kesejahteraan petani, nelayan dan pembudidaya
2. Peningkatan industri hulu hilir, industri olahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, aspek kegeologian, peningkatan nilai tambah, tenaga kerja, Peningkatan KUKM, peningkatan ekspor, dan peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif
3. Mendorong peningkatan ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster kawasan strategi dan meningkatkan Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Non Fisik

Kewenangan Provinsi Meningkatkan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pelaksanaan E-Government

4. Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola Layanan Pendidikan Serta Kurikulum yang Adaptif
5. Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta dengan Pemenuhan Layanan Kesehatan Perorangan dan Layanan Kesehatan Masyarakat Melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat Provinsi Sebagai Upaya Implementasi Tahapan SPM Provinsi dan Penguatan Koordinasi serta Advokasi SPM Bidang Kesehatan di Kab/Kota dalam rangka mendukung peningkatan Angka Harapan Hidup dan upaya percepatan Penurunan Prevalensi stunting termasuk pengembangan teknologi informasi berbasis digital
6. Penguatan pendampingan pelaksanaan jaminan sosial; Peningkatan upaya pemenuhan layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); Peningkatan upaya pemenuhan hak dasar anak terlantar, disabilitas dan lansia dalam panti; Advokasi pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten/Kota secara dinamis serta pengembangan sistem evaluasi terpadu; Pemanfaatan DTKS dalam penentuan sasaran penerima bantuan sosial; Pemberian kebutuhan pangan khusus untuk perbaikan dan penjaminan pertumbuhan gizi anak dan ibu hamil
7. Meningkatkan tumbuh kembang anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan peran dan partisipasi perempuan serta meningkatkan produktifitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan
8. Peningkatan pengelolaan, pengendalian dan perlindungan Lingkungan Hidup; Meningkatnya kualitas tata kelola penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana; Peningkatan penanganan bangunan rumah korban bencana dan dampak program sesuai SPM.

5.6.2 Sasaran Pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara dan Kebijakan prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo, maka sasaran kinerja pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara diproyeksikan sebagai berikut :

Tabel 5.6

Proyeksi Makro Ekonomi Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025

Indikator	Capaian			Proyeksi	Outlook
	2021	2022	2023	2024	2025
Pertumbuhan Ekonomi	2,21	3,3	4,31	4,79	4,8
Kemiskinan	17,23	17,24	17,03	16,83	16,25
Tingkat Pengangguran	2,3	2,02	2,77	2,69	2,1
IPM	66,64	67,41	68	68,6	67,23
Indeks Gini	0,404	0,434		0,424	0,410

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo 2024, Hasil Proyeksi KEMD Bappeda Provinsi dan Berita Acara Pembahasan Musrenbang RKPD 2025

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2025 menjabarkan rencana Program Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang akan didanai pada tahun 2025. Komposisi pendanaan dari Program dan Kegiatan merupakan elaborasi lebih lanjut dari fokus pembangunan yang tergambar pada Tema beserta Unsur Tema RKPD Tahun 2025.

Program Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah disajikan bersama dengan semua parameter yang menyertai, yaitu Indikator, Target Tahun Rencana, Lokasi serta Pagu yang merupakan hasil perumusan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan untuk kemudian menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan daerah di masing-masing Perangkat Daerah.

Selanjutnya, pendanaan perencanaan pembangunan Tahun 2025 untuk masing-masing Perangkat Daerah dapat dicermati pada Tabel TB.56 sebagai berikut:

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah menjadi alat ukur dalam memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Berikut disajikan target indikator kinerja utama daerah tahun 2025 beserta target indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tahun 2025 sebagaimana tabel 7.1 dan tabel 7.2 di bawah ini:

Tabel 7.1
Target Indikator Kinerja Utama Provinsi Gorontalo

Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target 2025	Target Nasional 2025
Pertumbuhan Ekonomi	4,50	5,23-5,46	5.30-5.60
Indeks Gini	0,417	0,394-0,400	0.379-0.382
Inflasi	4,40	3,91-2,52	2,7 *
Pendapatan Perkapita	42,35	44,14	81.96 - 82.08
TPT	3,06	2,87-3,08	4.50-5.00
Persentase Kemiskinan	15,51	14,21-14,50	6.0 - 7.0
Indeks Pembangunan Manusia (point)	71,25	71,65	-
Indeks Modal Manusia*	-	0,50	0,50
Nilai MCP	87,50	95,6	-
Indeks Reformasi Birokrasi	77,75	78	-
Prevalensi Stunting	23,8	14	18,8

*Indikator hasil pembahasan Rakortekrenbang Nasional 2024

Tabel 7.2

Target Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Gorontalo

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian 2023	Target		
			2024	2025	
				RPD	Outlook
1	2	3	4	5	6
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
1.1	Pertumbuhan Ekonomi	4,50	5,23-5,46	6,66	4,60-5,86
1.2	Indeks Gini	0,417	0,396	0,394	0,394-0,400
1.3	Inflasi	5,15	4 – 5	1,86	3,91-2,52
1.4	Pendapatan Perkapita	42,35		37,20	44,14
1.5	Persentase Kemiskinan	15,51	14,54	14,21	15,00
1.6	Indeks Pembangunan Manusia (point)	69,81	70,02	70,36	71,65
Fokus Kesejahteraan Sosial					
2	Pendidikan				
2.1	Rata-rata lama sekolah	8,10	8,28	8,56	8,56
2.2	Harapan lama sekolah	13,16	13,24	13,93	13,93
2.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kelompok Umur 16-18	71,7	71,63	72,39	72,39
2.4	Persentase Satuan pendidikan berakreditasi minimal B SMA/SMK (%)	SMA : 52 SMK : 33	SMA = 1:20 SMK = 1:15 SLB = 1:3	-	SMA : 56 SMK : 42
2.5	Persentase penduduk penyandang disabilitas yang bersekolah	100	-	-	100
3	Kesehatan				
3.1	Angka harapan hidup	68,83	68,61	69,22	69,22
3.2	Prevalensi stunting	23,8 %	14 %**	-	14 %
Fokus Budaya dan Agama					

4	Kebudayaan dan Agama				
4.1	Persentase warisan budaya benda/tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	-	-	-	-
4.3	Indeks Kerukunan Umat Beragama	-	-	-	-
ASPEK PELAYANAN UMUM					
Pelayanan Urusan Wajib					
6	Pekerjaan Umum				
6.1	Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi	70,3	64,51	61,63	71,5
6.2	Persentase Kinerja Irigasi Kewenangan Provinsi	30,19	65 %	68 %	31,50 %
7	Perumahan				
7.1	Persentase Luasan Kawasan Kumuh (%)	4,6	7,38	7,08	7,08
7.2	Persentase Cakupan Air minum Layak	96,16	96,56 %	96,14	100 %
7.3	Persentase Cakupan Sanitasi Layak	79,82	80,08 %	81,54	81,54 %
8	Lingkungan Hidup				
8.1	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	79,52	80,3 Indeks	75,32 Indeks	80,53 Indeks
9	Sosial				
9.1	Cakupan penerima penjaminan pemeliharaan kesehatan (UHC)	96,6%	95,7%	-	97
9.2	Cakupan masyarakat miskin yang mendapatkan Bantuan sosial (%)	10,9	23 %	-	25
10	Ketenagakerjaan				
10.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,06	2,40 - 3,49	3,20	2,95
11	Pemerintahan				
11.1	Nilai MCP	82,51	-	95,6	-
11.2	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	66,3	-
11.3	Nilai SAKIP	BB	BB Nilai	-	BB Nilai
11.4	Indeks Kematangan Organisasi	-	49 Indeks	49	49 Indeks
11.5	Indeks Kualitas Perencanaan	N/A	-		-
11.6	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP
11.7	Indeks Sistem Merit	327	-	-	-

11.8	Nilai Maturitas SPBE	3,22	-	-	-
11.9	Indeks Demokrasi (%)	73,74	-	-	74
11.10	Nilai Pengawasan Kearsipan	97,64	64 Nilai	64 Nilai	98 Nilai
12	Ketahanan Pangan				
12.1	Indeks Ketahanan Pangan	80,35 Indeks	86,04 Indeks	88,86 Indeks	86,86 Indeks
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
13.1	Kemiskinan perdesaan	23,73 %	23,58%	22,82%	22,82%
13.2	Peningkatan Status Desa dari desa maju menjadi desa mandiri (kawasan Strategis Provinsi/Lokasi Prioritas)	49 Desa	6 Desa	7 Desa	7 Desa
14	Penanggulangan Bencana				
14.1	Indeks Resiko Bencana	120,61	120,01	122	119,51
15	Penanaman Modal				
15.1	Realisasi PMA/PMDN (milyar)	5,515 TOE/Milyar Rupiah	14,987 TOE/Milyar Rupiah	13,352 TOE/Milyar Rupiah	13,352 TOE/Milyar Rupiah
16	Perhubungan				
16.1	Rasio Konektivitas Antar Wilayah (%)	0,553	0,55 Rasio	0,703 Rasio	0,703 Rasio
17	Kepemudaan dan Olahraga				
17.1	Indeks Pembangunan Gender	88,12	87,13	87,23	88,32
17.2	Indeks Perlindungan Anak	57,90	67,7	67,9	67,9
17.3	Indeks Pembangunan Pemuda	54,17	52,62	53,67	54,57
18	Perpustakaan				
18.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	70,39	58,5	50,79	71
Pelayanan Urusan Pilihan					
19	Pertanian				
19.1	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	37,75%	38,98 %	39,55	39,55 %
19.2	Nilai Tukar Petani (NTP)	111,32 Rasio	105,09 Rasio	105,89	105,89 Rasio
19.3	Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)	115,84 Rasio	113,18 Rasio	118,85	118,85 Rasio
20	Kehutanan				
20.1	Penurunan emisi GRK (%)	-	-	-	-
21	Pariwisata				

21.1	Kontribusi PDRB sektor Pariwisata	2,41	-	3,5	3,5
22	Kelautan dan Perikanan				
22.1	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTN-Pi)	95,44 Rasio	97,82 Rasio	98,82 Rasio	98,82 Rasio
23	Energi dan Sumber Daya Mineral				
23.1	Rasio Elektrifikasi (%)	99,8	99,7	99,9	99,7
24	Industri				
24.1	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	4,42 %	7,89 %	5,92 %	5,92 %
25	Perdagangan				
25.1	Nilai Ekspor (juta USD)	37,96 USD	19,52 USD	23,7 USD	38,5 USD

BAB VIII

PENUTUP

RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang mengemban amanat pembangunan tahun ketiga dari empat tahun perencanaan pembangunan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo 2023 – 2026. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan yang berlaku sedari Tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dimanfaatkan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan Tahun 2025, ditetapkan prinsip dan kaidah yang harus menjadi komitmen seluruh elemen masyarakat yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pembangunan daerah. Prinsip dan Kaidah dimaksud adalah:

1. Seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo dan semua Pemerintah Daerah se-Provinsi Gorontalo serta elemen masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di Gorontalo, berkewajiban untuk melaksanakan Strategi dan Arah Kebijakan yang telah ditetapkan dalam RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 secara sinergis, sinkron dan terintegrasi.
2. Untuk memaksimalkan pendanaan pembangunan, kontribusi dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta dunia industri harus senantiasa dioptimalkan, sekaligus juga agar berperan sebagai pengawas dalam pelaksanaan pembangunan.
3. RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan dokumen KUA-PPAS Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dan APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2025.
4. Untuk mengoptimalkan integrasi, sinergitas, sinkronisasi, harmonisasi dan pelaksanaan Program dan Kegiatan pembangunan daerah, maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun Renja PD masing-masing dengan mempedomani RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025.
5. Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian terhadap perumusan kebijakan dan pelaksanaan Renja PD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 sebagaimana tugas pokok dan fungsi masing – masing, kemudian melaporkan hasilnya secara berkala kepada Pj. Gubernur, melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah, dan Badan Keuangan Provinsi Gorontalo sebagaimana ditentukan dalam Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017.
6. Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, kemudian melaporkan hasilnya secara berkala kepada Gubernur, melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah, dan Badan Keuangan Provinsi Gorontalo sebagaimana ditentukan dalam Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017.
7. Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan Program dan Kegiatan pembangunan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kab/Kota, maka RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 harus dijadikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2025.

Pj. GUBERNUR GORONTALO,

td

RUDY SALAHUDDIN